

AKAR DAN DALANG

SUAR SUROSO

AKAR DAN DALANG
PEMBANTAIAAN MANUSIA TAK BERDOSA
DAN
PENGGULINGAN BUNG KARNO

★ *penerbit buku*
Ultimus
Bandung 2013

Akar dan Dalang

Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno

© Suar Suroso

Editor: Koesalah Soebagyo Toer, Bilven

Desain sampul: Ucok (TYP:O Graphics)

Diterbitkan oleh Ultimus

Cetakan 1, Mei 2013

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

SUROSO, Suar

Akar dan Dalang

Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno

Cetakan 1, Bandung: Ultimus, 2013

xxxvi + 258 hlm.; 14,5 x 20,5 cm

978-602-8331-45-6

CV Ultimus

Jl. Cikutra Baru 4 No.30, Bandung, 40124

Telp./Faks. (022) 70908899, 7217724

ultimus_bandung@yahoo.com

www.ultimus-online.com

SEKAPUR SIRIH

PENULIS buku ini, Suar Suroso, boleh dikatakan satu-satunya orang Indonesia yang sampai sekarang menekuni masalah filsafat materialisme dialektika dan historis, gerakan komunis internasional, maupun gerakan buruh internasional. Dalam hubungan masalah-masalah itulah ia menjelaskan terbelahnya dunia menjadi dua kubu, yaitu kubu sosialis atau komunis dan kubu kapitalis atau imperialis yang saling bermusuhan. Sampai akhir Perang Dunia II, kedua kubu ini masih bisa bekerja sama dalam usaha mengalahkan musuh bersama, yaitu fasisme Jerman—Italia—Jepang, dengan membentuk persekutuan Amerika—Inggris—Perancis—Rusia—Tiongkok. Tapi sejak tahun 1945, ketika Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt (1882—1945) meninggal dan digantikan oleh Harry S. Truman (1884—1972), dunia praktis kembali terbagi menjadi dua kutub yang saling bermusuhan dengan kesengitan yang semakin tinggi, saling mematikan: kutub sosialis/komunis di bawah Uni Sovyet dan kubu kapitalis/imperialis di bawah Amerika Serikat.

Suar berusaha menjelaskan bahwa permusuhan itulah yang menimbulkan apa yang dinamakan Perang Dingin, yaitu perang yang berlangsung di front politik, ekonomi, dan propaganda, dan hanya sedikit di front persenjataan. Kedua pihak tidak pernah sampai terjun langsung bermuka-muka, satu dan lain hal karena ditemukannya senjata pemusnah massal: senjata nuklir. Walau demikian, Perang Dingin tidak kurang panas daripada Perang Panas. Perang Dinginlah yang menyebabkan terjadi banyak kudeta, seperti yang telah terjadi di Korea, Vietnam, dan Indonesia, juga menyebabkan terjadi banyak revolusi, seperti telah terjadi di Tiongkok, Vietnam, dan Kuba.

Untuk menghadapi Perang Dingin, di kubu kapitalis/imperialis dikembangkan apa yang dinamakan *“the policy of containment”*, yaitu politik pembasmian komunisme sejagat, bersama sarana-sarana dan cara-cara

pelaksanaannya, yang tanpa bosan-bosannya dijelaskan dan diuraikan oleh Suar dalam bukunya yang cukup banyak, seperti: *Asal-Usul Teori Sosialisme, Marxisme Sampai Komune Paris; Marxisme, Sebuah Kajian: Dinyatakan Punah Ternyata Kiprah; Peristiwa Madiun: Realisasi Doktrin Truman di Asia; Bung Karno, Marxisme & Pancasila; ‘Peristiwa Madiun’, PKI Korban Perdana Perang Dingin; Bung Karno Korban Perang Dingin*; dan akhirnya buku ini: *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*.

Nyaris di hampir semua buku ini Suar merasa perlu membahas *“the policy of containment”* karena ia tahu bahwa media massa dunia, baik cetak maupun elektronik, dan dunia penerbitan, sudah lama, sampai dewasa ini, dikuasai dan ditongkrongi oleh kubu kapitalis/imperialis, hingga pemberitaan mengenai kejadian dan uraian mengenai peristiwa dunia pun jomplang ke arah kepentingan kutub tersebut. Kalau kita boleh bicara tentang rekayasa terbesar di dunia sekarang ini, itulah rekayasa di bidang media massa dan penerbitan.

Untuk mengimbangi kejomplangan itu, Suar menulis buku-bukunya ini. Untuk itu dia gali tanpa lelah bahan-bahan yang sampai sedemikian jauh belum diketahui umum, bahkan bersifat rahasia dan hanya dikuasai oleh dinas-dinas rahasia. Tentu usaha ini tidak seimbang dengan rekayasa terbesar zaman kita itu tadi. Tapi Suar berkeyakinan bahwa kutub sosialis/komunis harus mengadakan perlawanan. Sepatah kata dalam perlawanan itu sama dahsyatnya dengan peluru yang mengena ditembakkan ke arah musuh. Maka itu tidak segan ia membalik-balik bahan yang tersembunyi tidak hanya dalam bahasa yang *“lazim”*, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, tapi juga dalam bahasa Belanda, Jerman, Perancis, Tionghoa, dan Rusia, seperti terlihat dalam Daftar Kepustakaan.

Dan apa yang istimewa dalam buku ini? Dari Daftar Kepustakaan kelihatan, tak kurang 30 buku yang ditulis oleh D.N. Aidit, bekas Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk *Pilihan Tulisan Aidit* Jilid I, II, dan III. Lebih istimewa lagi ialah kritik terhadap segi-segi ideologi, teori, dan organisasi PKI, seperti: *Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan* (MKTBP), semboyan *persatuan nasional berporoskan nasakom*, mendukung *demokrasi terpimpin* di bawah Presiden Soekarno, *revolusi dari atas dan dari bawah*, *teori dua aspek kekuasaan negara*, *semboyan dwitunggal rakyat dan ABRI*, *pembangunan partai kader dan partai massa sekaligus*, *menjadikan Marxisme milik nasion*.

Saya tak perlu menunjukkan halamannya. Pembaca perlu mencarinya sendiri. Untuk itu saya haturkan: Selamat membaca.

Koesalah Soebagyo Toer

SAMBUTAN (1)

DALAM rangka usaha pelurusan sejarah bangsa, ratusan bahkan ribuan tulisan, analisis, dan buku-buku studi telah terbit di Indonesia oleh penulis-penulis Indonesia sendiri, bersangkutan dengan masalah krusial bangsa dewasa ini, yaitu *masalah pelurusan sejarah*. Masalah pelurusan sejarah Indonesia juga sudah berpuluh kali menjadi tema utama seminar-seminar di Indonesia maupun di luar negeri.

Situasi pemberlakuan dan pemanfaatan hak-hak demokrasi, khususnya hak dengan bebas menyatakan pendapat, yaitu *freedom of speech* dan *freedom of expression* dewasa ini, sedang tumbuh subur dan berkembang terus. Baik dalam kuantitas maupun kualitas. Tidak sedikit tulisan tersebut ditimba dari pengalaman langsung penulisnya sendiri, korban akibat pemelintiran sejarah bangsa yang dilakukan penguasa orba.

Berbagai lapisan masyarakat, dalam jumlah tak terhitung, khususnya yang disebut “orang-orang biasa”, dengan sadar menggunakan kebebasan media komunikasi demi perjuangan untuk reformasi, demokrasi, dan HAM. Termasuk media internet seperti *website* (meliputi diskusi interaktif) atau *blog* pribadi, *mailing-list*, *youtube*, *facebook*, *twitter*, dll.

Situasi yang dimulai dan berlangsung terus sejak gerakan massa reformasi dan demokrasi Mei 1998 telah secara formal mengakhiri rezim orde baru. Sejak Presiden B.J. Habibie menggantikan Presiden Soeharto sebagai presiden ke-3 Republik Indonesia, secara luas dan leluasa kesempatan demokrasi ini digunakan oleh para aktivis dan pejuang-pejuang reformasi dan demokrasi demi perubahan yang konsisten, untuk tegaknya negara Republik Indonesia sebagai negara hukum.

Secara lebih spesifik, kegiatan dan perjuangan tersebut berlangsung dengan mengajukan tuntutan diakhirinya pelanggaran hak-hak asasi manusia serta dipulihkannya hak-hak kewarganegaraan dan politik para

korban Peristiwa 1965, yang sampai detik ini masih mengalami diskriminasi dan stigmatisasi dari jurusan penguasa dan para pendukung rezim orde baru. Perjuangan tersebut semakin sengit terfokus sekitar tuntutan adil agar Kejaksaan Agung mengambil langkah konkret melaksanakan Rekomendasi Komnas HAM 23 Juli 2012 sekitar penanganan pelanggaran HAM berat oleh aparat negara di sekitar Peristiwa 1965.

Secara formal, rezim orde baru sudah runtuh, tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebijakan politik dan tindakan penguasa tetap menolak rehabilitasi hak-hak kewarganegaraan dan hak politik jutaan korban Peristiwa 1965.

Suar Suroso (82 tahun), mantan wakil pemuda Indonesia di organisasi mancanegara, yaitu Gerakan Pemuda Demokratis Sedunia, GPDS, dengan tekun mengikuti perkembangan politik di tanah air. Dalam periode setelah ambruknya rezim orde baru, Suar Suroso termasuk salah seorang penulis sejarah bangsa, yang dengan tekun dan teliti secara efektif memanfaatkan situasi keberadaan kebebasan menyatakan pendapat di Indonesia.

Dalam waktu panjang, Suar Suroso mengadakan riset, menekuni, menggeluti, serta menulis karya-karya penting dalam rangka pelurusan sejarah bangsa yang direkayasa dan dibengkokkan rezim orde baru. Sehubungan dengan ini, Suar Suroso pernah menulis sebuah artikel khusus yang mengungkap pemelintiran sejarah Indonesia yang dilakukan oleh ahli sejarah orde baru, Dr. Nugroho Notosusanto.

Kiranya sudah jelas, dalam rangka mengakhiri kehidupan politik dan ideologi orde baru, ada satu masalah yang mutlak harus ditangani bersama. Yaitu, menyangkut masalah pelurusan sejarah bangsa, khususnya sejarah gerakan politik sejak masa kolonialisme sampai dewasa ini.

Menelusuri sejumlah besar literatur yang diterbitkan dalam periode pasca-Soeharto, Suar Suroso adalah salah seorang penulis langka yang dengan berencana melakukan studi dan penulisan sejarah gerakan politik di Indonesia secara gamblang. Ia mengedepankan sejumlah dokumen dan fakta-fakta yang diakui kebenarannya, sesuai dengan bahan-bahan dokumentasi dan literatur kiri di Indonesia dan mancanegara. Atas dasar itu, Suar Suroso melakukan analisis dan mengemukakan kesimpulannya. Ia dengan rinci menguraikan dalam artikel-artikel dan buku-bukunya, tentang perkembangan gerakan politik bertujuan kemerdekaan di Indonesia, yang berporoskan gerakan revolusioner Marxis, nasionalis, dan agama. Meliputi periode sejak didirikannya Budi Utomo, Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, dan ISDP, Partai Sosial Demokrat Indonesia yang kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI.

Dengan jelas Suar Suroso menguraikan dan menganalisis perkembangan gerakan politik kiri Marxis yang berkembang menjadi PKI. Suatu parpol yang tak henti-hentinya berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Menurut Suar Suroso, inilah yang menyebabkan PKI merupakan ancaman terbesar bagi dominasi AS di Asia Tenggara, teristimewa setelah makin kuatnya kerja sama dan persatuan kekuatan politik yang diwakili Bung Karno dan kekuatan kiri yang diwakili oleh PKI.

Buku Suar Suroso yang baru berjudul: *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno* adalah buku politik penting yang menjadi khazanah berharga dalam literatur sejarah gerakan politik kiri di Indonesia. Sekaligus merupakan karya serius dan penting oleh penulis, dalam perjuangan besar demi pencerahan di Indonesia, teristimewa menyangkut pelurusan sejarah yang direkayasa oleh rezim orde baru.

Buku terbaru Suar Suroso, bersama dengan tulisan-tulisan yang banyak dan buku-buku yang telah diterbitkannya: sekitar Marxisme dan Bung Karno; mengenai campur tangan dan subversi CIA (AS) dalam urusan dalam negeri Indonesia khususnya yang menyangkut “Red Drive Proposals AS” (1948); mengenai Peristiwa Madiun; tentang bantuan senjata dan keuangan CIA pada pemberontakan separatis PRRI/Permesta (1957); Peristiwa Pembantaian Massal 1965/67/68; dan teristimewa perebutan kekuasaan negara dan pemerintahan Presiden Soekarno oleh Jenderal Soeharto, merupakan sumber pengetahuan yang ditulis atas dasar studi dan penelitian cukup lama dan menyeluruh.

Buah pena Suar Suroso tersebut merupakan literatur-historis yang berharga dan bahan referensi dan studi yang tidak-boleh-tidak harus dibaca dan dipelajari oleh setiap pemeduli sejarah kontemporer Indonesia dan bagi siapa saja yang ingin mendalami sejarah perkembangan politik kemerdekaan Indonesia.

Amsterdam, 19 Januari 2013

Ibrahim Isa

SAMBUTAN (2)

BUKU karya Suar Suroso yang terbit kali ini adalah salah satu dari buku karya kesembilan yang membahas tentang peristiwa besar dan penting yang membuka periode baru dalam sejarah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu dari periode perjuangan mencapai Indonesia yang demokratis untuk mencapai Indonesia yang makmur dan sejahtera berbalik menjadi negeri neo-kolonial neo-liberal dengan pandangan pragmatisme model AS.

Kesembilan buku Suar ialah:

1. *Bung Karno Korban Perang Dingin*;
2. *Peristiwa Madiun - PKI Korban Perang Dingin*;
3. *Bung Karno, Marxisme, dan Pancasila*;
4. *Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah Ternyata Kiprah*;
5. *Peristiwa Madiun - Realisasi Doktrin Truman di Asia*;
6. *Asal Usul Teori Sosialisme, Marxisme sampai Komune Paris*;
7. *Jelita Senandung Hidup*;
8. *Pelita Keajaiban Dunia*; dan
9. *Akar dan Dalang - Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*.

Dalam buku-buku tersebut, terutama dalam buku *Akar dan Dalang*, Suar Suroso telah menyanggah secara kategoris berbagai pikiran dan uraian yang dikemukakan oleh orde baru dan pembela-pembelanya, sarjana pembela imperialis, kolonialis, baik di dalam maupun di luar negeri. Pertama, *Buku Putih Komkaptib* yang ditulis oleh Laksamana Sudomono. Buku Prof. Nugroho Notosusanto, *The Coup Attempt of the September 30 Movement Indonesia* yang ditulis bersama dengan Ismail Saleh, juga disanggahnya.

Suar Suroso dalam buku *Akar dan Dalang*, membongkar semua persekongkolan AS—Inggris untuk menumbangkan Presiden Soekarno dan

menghancurkan PKI 1965 yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an dan sudah tentu hal itu juga kelanjutan dari Peristiwa Madiun 1948 yang diarsiteki Marle Cochran dengan usulannya "*Red Drive Proposal*" pada Wapres/Perdana Menteri Drs. Moh Hatta, ini sebagai realisasi Doktrin Truman, Presiden AS, "*policy of containment*" 1946 di Asia, selanjutnya diperkuat dengan doktrin *rollback* Presiden Eisenhower 1949. Komunis tidak hanya dibendung, tapi harus dibasmi.

Doktrin-doktrin yang menjadi dasar dan pelaksanaan politik Perang Dingin inilah yang dinamakan *akar* dari peristiwa yang terjadi di Indonesia, sedangkan persekongkolan AS—Inggris yang berkomplot dengan Mayjen. Soeharto, Panglima Kostrad waktu itu, bersama dengan Yoga Sugama dan Ali Murtopo adalah *dalang* sesungguhnya Peristiwa September 1965. Pembunuhan terhadap Jenderal A. Yani, cs. (SUAD), pimpinan teras PKI, D.N. Aidit, Lukman, Nyoto, Sakirman, dan kader-kader serta anggota simpatisan PKI di seluruh Indonesia, penahanan Presiden Soekarno hingga wafatnya, pembunuhan 500 ribu—3 juta orang, pemenjaraan 2 juta orang tanpa salah apa pun selama 14 tahun lebih, dan lain-lain, adalah korban pembasmian komunis, mereka yang anti kolonial dan imperialis.

Suar Suroso juga menjelaskan secara rinci kegiatan bagaimana AS mempersiapkan perwira TNI untuk menggulingkan Presiden Soekarno dengan mendidik dan melatih mereka. Tidak kurang 2000 perwira AD yang pernah belajar di Akademi Militer Western Institute for Security Cooperation di Fort Benning, Georgia, dan The Commander in Burgency Training Center di Fort Bragg, Fayetteville, NC. AS juga pernah mengirim beberapa orang secara rahasia mengajar kontra pemberontakan ke Indonesia.

Dalam buku ini juga dibebankan secara rinci peranan: *National Security Council* (NSC); Pemerintah Bayangan (*The Shadow Government*); *Central Intelligence Agency* (CIA); *RAND Corporation*; *Ford Foundation*; pakta-pakta militer; dari *tentara rakyat* ke TNI; kubu Soeharto—CIA; dan lainnya. Dasar pemikiran politik membasmi komunis dan gerakan anti kolonialisme-imperialisme tidak hanya untuk masa lalu, tetapi sampai sekarang ini, di era kapitalisme global, menjadi politik luar negeri AS dan negeri kapitalis lainnya. Perang agresi di Timur Tengah adalah wujud konkret masih terus dilaksanakan politik dasar tersebut. Demikian juga masih akan terus dilaksanakan termasuk di negeri lain dan Indonesia dewasa ini, yang beda hanya bentuk dan caranya. Inilah watak kapitalisme global selama masih di dunia ini.

Demikian juga kritik terhadap kekeliruan dan kesalahan politik pemikiran pimpinan CC PKI, D.N. Aidit, tak luput dari perhatian Suar

Suroso, demikian luas, dalam, rinci, dan lengkap persoalan yang dibahas dengan menggunakan pandangan serta metode memandangnya sangat kritis. Buku ini sangat menarik, berharga untuk dibaca, dibahas oleh siapa pun, terutama bagi mereka yang ingin mempelajari sejarah perjuangan rakyat Indonesia sebagai bekal perjuangan perubahan pada hari ini dan hari esok, melepaskan diri dari kekangan neo-kolonial, neo-liberal, dan pandangan hidup pragmatis model AS yang membuat Indonesia amburadul, penuh korupsi, pembiusan narkoba, perkelahian, kejahatan terorisme, politik pembiaran, untuk Indonesia merdeka demokratis (*demos kratos* bukan *demong kratos* dan *oligo kratos*), berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera—sosialisme Indonesia. Inilah arah dan tujuan perjuangan rakyat Indonesia dewasa ini, tetapi perlu waktu yang relatif lama. Keteguhan tekad dan pendirian seperti diteladani oleh pejuang-pejuang pendahulu kita semua mutlak perlu dimiliki oleh pejuang rakyat Indonesia.

Sumaun Utomo

SAMBUTAN (3)

BUKU Suar Suroso, *Akar dan Dalang*, merupakan suatu tulisan yang sifatnya analisa politik tentang apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an. Pada waktu terjadinya Peristiwa G30S.

Penulis Suar Suroso sebagai seorang Marxis tentunya menggunakan cara Marxisme dalam penulisannya itu sesuai dengan anjuran Bung Karno yang terkenal dalam sejarah politiknya selama ia menjadi Presiden RI. Apakah Bung Karno sendiri menggunakan secara konsisten metode analisa itu, saya sebaiknya serahkan jawabannya pada para pembaca.

Saya sendiri pernah mencoba untuk menanyakan tentang hal itu kepada beliau, di dalam pesawat terbang pada waktu saya diperintahkan mengikuti beliau, dalam perjalanan dari Tokyo ke Wina pada tahun 1962¹

Saya tidak dapat melupakan menjalankan perintah itu sebagai Panglima Kodam Kaltim karena KSAD Nasution mengejek saya bahwa saya cocok berfungsi sekaligus sebagai seorang *bodyguard* Bung Karno.

Suar Suroso dalam bukunya telah menguraikan tentang proses politik yang terjadi pada periode itu dilihat dari sudut global maupun internal Indonesia.

Penulis juga berusaha menguraikan mengenai sejarah pribadi dari sejumlah “*political actors*” yang tersangkut dalam sejarah politik itu, termasuk dari Ketua PKI, D.N. Aidit.

Untuk generasi zaman sekarang bangsa kita, saya kira perlu dan berguna untuk baca buku ini. Paling tidak untuk mengetahui bagaimana seorang Marxis Indonesia memandang Peristiwa G30S dan perkembangan politik global dari negara-negara Barat pada periode itu.

Saya sebagai penulis pada zaman sekarang ini, dapat mengatakan bahwa semua hal di universum ini tidak statis. Semua hal ihwal mengalami evolusi yang bersifat biologis dan non-biologis.

Tentu juga ideologi atau filosofi mengalami suatu evolusi yang dapat diikuti oleh para pemikir dan ilmuwan dari dunia Barat maupun pemikir dan ilmuwan dari dunia Timur sepanjang masa.

Karena itu sejarah umat manusia mengenal munculnya serentetan orang-orang yang tersohor dan dinyatakan sebagai *filosof-filosof baru*, di eranya masing-masing mulai dari Plato, Aristotle, yang telah mempengaruhi jalan pemikiran para pemikir Barat hampir seribu tahun.

Di samping fenomena perkembangan filosofi tadi itu, ternyata ilmu pengetahuan atau *science* secara umum dan *technological science* khususnya, ternyata mengalami perkembangan evolusioner yang pesat, malahan lebih cepat bilion-bilion kali daripada evolusi biologis menurut hukumnya yang dikatakan oleh Raymond Kurzweil dalam bukunya: *The Singularity is Near* sebagai “*The Law of Accelerating Returns*”¹

Tentu saja Suar Suroso akan melanjutkan menulis buku karya-karyanya yang baru yang patut dibaca oleh generasi bangsa kita sekarang.

Saya sebagai penulis dalam memberikan tanggapan atas permintaan penulis Suar Suroso terhadap tulisannya itu, merasa perlu untuk menyatakan bahwa efek dari permintaannya itu, sangat menyentuh diri saya. Karena saya serentak sadar bahwa saya sebetulnya tidak pernah langsung tertarik untuk menjadi penulis seperti saya sekarang ini.

Dalam memenuhi permintaan Suar Suroso ini, anehnya pada diri saya timbul kebutuhan untuk sekaligus menulis tentang proses terjadinya diri saya sebagai seorang penulis dalam bentuk dan macam seperti yang saya peragakan sekarang ini. Yaitu mungkin sebagai suatu produk terakhir dari proses sejarah pribadi diri saya yang berumur 92 tahun ini.

Mungkin karena latar belakang pendidikan saya itu medis, saya condong pada permulaan menganalisa keadaan di sekitar saya dari sudut pandangan psikologis atau psikiatris, di sampingnya juga “*biologis modern*”, sesuai dengan latar belakang pendidikan saya itu.

Pencerminan dari hal itu dapat dibaca dalam tulisan saya dalam buku pertama tentang analisa saya terhadap dirinya tokoh-tokoh politik seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir, dalam periode permulaan *sejarah modern* bangsa kita pada periode penjajahan Jepang, menjelang proklamasi

¹ Tentang hal itu lihat dalam buku saya *Pemikiran Militer*.

¹ Lihat dalam buku seri *Pemikiran Militer*, Jilid 4 hal.235.

kemerdekaan, dan “pemindahan terpaksa” pemerintah baru RI itu ke Yogyakarta dahulu itu.

Saya menyatakan bahwa bapak-bapak kita itu pada waktu itu masih berada dalam suatu situasi mental, yaitu sedang dalam menjalani suasana “honeymoon” masing-masing, karena mereka ketiga-tiganya baru menikah.

Bahkan Sjahrir baru menikah untuk kedua kalinya, setelah berpisah dengan istrinya yang perempuan Belanda, dan mendapatkan adik ipar seorang mahasiswa senior kedokteran teman kita, yaitu Soedjatmoko.

Sedangkan Bung Karno baru dapat menikah dengan Fatmawati setelah berpisah dengan Ibu Inggit, dan Bung Hatta baru menikah juga.

Kita sebagai mahasiswa kedokteran pada waktu itu mengerti bahwa mereka bertiga itu berada dalam kondisi psikologis tertentu yang bisa dikatakan khusus.

Dalam kondisi berat seperti itu, ternyata mereka itu tidak dapat bantuan yang semestinya dari tokoh-tokoh intelektual yang telah diangkat sebagai anggota kabinet baru pada waktu itu. Mereka ini adalah hasil dari pendidikan tinggi di Nederland, negara penjajah bangsa kita. Kelompok intelektual ini setelah dapat kedudukan dalam kabinet dari pemerintah baru RI berada dalam keadaan semacam “*euphory*” atau kegembiraan luar biasa. Seakan-akan melupakan tugas mereka yang sebetulnya harus dilaksanakan dengan semangat revolusioner sesuai dengan tuntutan zamannya.

Dalam keadaan mental seperti itu ternyata bisa terjadi kebijakan dan tindakan yang bisa dinamakan absurd atau kurang tepat.

Termakan oleh *psywar* musuh, yaitu kolonialis Belanda dan Inggris yang mewakili Sekutu, mereka mengeluarkan dalam kepanikan, *Dekrit 5 Oktober 1945 tentang Berdirinya TKR*.

Kemungkinan besar hal itu bisa terjadi karena mereka terpengaruh *psywar* dari intelijen pihak Sekutu dan kolonialis Belanda yang dipanikkan oleh laporan bahwa telah terjadi suatu revolusi besar di kota Surabaya pada waktu itu.

Suatu hal yang mengagetkan dan menakutkan kolonialis Inggris pada saat itu adalah dapat terbentuknya kekuatan rakyat bersenjata raksasa di kota Surabaya itu.

Tapi secara lihai, intelijen Inggris justru memakai kejadian yang menakutkan mereka itu untuk menyerang dengan tindakan *psywar*, pemerintah baru RI itu. Dan taktik mereka itu berhasil.

Pemerintah RI tanpa terlebih dahulu mengirimkan *observer* untuk menilai keadaan yang sebenarnya, dalam kepanikannya menggelar langsung rapat kabinet untuk membicarakan hal itu.

Pembicaraan itu boleh dikatakan merupakan suatu diskusi yang dijalankan oleh kelompok “intelektual tinggi” hasil pendidikan universitas Negeri Belanda.

Mereka itu terdiri atas orang-orang yang terpilih dengan teliti oleh suatu tim psikolog yang khusus bertugas untuk menjalankan tugas yang sangat penting untuk pemerintah kolonialis Belanda. Hasil dari seleksi itu adalah dapat terbentuknya suatu kelompok calon mahasiswa untuk dimasukkan dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi atau universitas di beberapa kota di Nederland. Macam dari lembaga-lembaga itu telah ditentukan oleh suatu *board* yang khusus dibentuk untuk keperluan itu jauh sebelumnya.

Yang paling penting dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Nederland itu adalah misalnya Fakultas Indologi yang relatif baru dibentuk dalam rangka ambisi besar Nederland untuk mencapai terjadinya negara “*Groot Nederland*”/Nederland Agung, yang meliputi: negara-induk Nederland, koloni Hindia-Belanda, Suriname, dan Curacao di benua Amerika Selatan.

Tidak perlu saya katakan bahwa para intelektual yang terpilih tersebut di atas, semua harus dijiwai dengan konsep ambisius itu.

Ternyata Van Mook termasuk salah seorang inti dalam pelaksanaan konsep ini.

Jadi jelas bahwa semua orang yang telah diangkat Bung Karno dalam kabinet presidensial dan kemudian kelompok yang masuk kabinet Sjahrir yang pertama itu tadi merupakan kelompok orang intelektual bangsa Indonesia yang mau tidak mau telah diresapi dengan ambisi besar pemerintah kolonialis Belanda.

Hal inilah yang disadari oleh kelompok mahasiswa yang independen di Jakarta dahulu itu. Independen artinya tidak ikut dalam kelompok-kelompok yang sudah menggabungkan dirinya kepada tokoh-tokoh politik tradisional masing-masing pada zaman itu.

Kelompok independen ini misalnya secara tegas berpendirian bahwa: begitu diproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia, itu berarti bahwa itu merupakan suatu ultimatum perang terhadap negara kolonialis Kerajaan Nederland. Arti itu tidak dapat ditawar-tawar oleh negara apa pun juga di planet ini.

Semangat mendasar itu, tidak dapat diganti dengan surogat berupa perundingan dalam bentuk apa pun juga.

Jadi dengan sendirinya para pejuang kemerdekaan sebagai konsekuensi dari telah dinyatakan Proklamasi Kemerdekaan RI, hanya ada dua golongan pejuang kemerdekaan yaitu:

- 1) Mereka yang tanpa ragu-ragu merasa berhak untuk merdeka.
- 2) Golongan mereka yang masih bisa merundingkan dan meminta pendapat bangsa lain tentang hak kemerdekaannya itu.

Penggolongan ini perlu disadari supaya bangsa kita dapat menyederhanakan pengertian tentang “Proklamasi Kemerdekaan RI” itu.

Ternyata prinsip itu belum merata di antara tokoh-tokoh yang telah diangkat dalam kabinet “pemerintahan-*initial*” RI pada waktu itu.

Hal inilah yang menyebabkan dapat dikeluarkan *Dekrit 5 Oktober 1945* itu, yang ternyata mengakibatkan terjadinya reaksi-berantai yang bersifat sangat negatif dan terang merugikan dalam jangka panjang. Antara lain memberi jalan pada tindakan musuh-musuh kemerdekaan rakyat kita untuk mengadakan subversif secara luas yang bersifat sangat destruktif.

Dekrit 5 Oktober 1945 oleh sementara anggota kabinet dianggap sebagai suatu usaha untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah baru RI dapat menguasai keadaan yang kacau di Surabaya itu (*kacau dilihat dari sudut pandang imperialis Inggris*).

Bapak-bapak pemimpin dalam pemerintah baru RI itu tidak dapat atau belum sadar bahwa negara-negara Barat yang merasa menang dalam Perang Dunia ke-2 yang besar itu, sudah mempunyai “master-konsep” sendiri yang tidak bisa dipengaruhi oleh konsep pemikiran mereka yang boleh dikatakan naif itu.

Lebih-lebih jika dihubungkan dengan fakta bahwa dekrit itu sama sekali tidak diikuti oleh suatu konsep militer yang relevan walaupun misalnya dalam bentuk sederhana yang dapat diterima, dalam tahap perkembangan politik pada waktu itu.

Sekutu terus melanjutkan melaksanakan konsep mereka yang meliputi juga nusantara kita. Dalam masalah ini mereka tentunya mendengarkan suara Belanda dan Inggris yang merasa ikut serta dalam menang dalam perang besar itu.

Kita bangsa Indonesia, tidak pernah terpaksa untuk secara aktif ikut dalam perang besar itu, seperti misalnya rakyat India yang dijajah Inggris, kira-kira hampir sama lamanya seperti bangsa Indonesia dijajah kolonialis Belanda.

Hal itu terjadi karena Belanda menyerah kepada Jepang tanpa mengadakan perlawanan dengan *tentara-semu* KNIL-nya.

Rakyat India yang dijajah Inggris terpaksa harus ikut mengorbankan dirinya dalam diikutkan perang oleh penjajahnya, yaitu kolonialis Inggris.

Bahkan kesatuan-kesatuan militer Inggris yang terdiri atas suku-suku bangsa India telah dipaksa Inggris untuk ikut dalam perang besar itu, di

dalam beberapa medan perang di benua Asia dan bahkan juga dapat dikerahkan oleh Inggris untuk menghadapi *arek-arek Soeroboyo* yang bersenjata seusainya PD-2 pada bulan Oktober–November sampai awal Desember 1945.

Kurang tepatnya penginterpretasian tentang esensi dan dampak jangka panjang dari *Dekrit 5 Oktober 1945* oleh para elite-politik dari semua kepartaian (termasuk PKI), ternyata dapat menimbulkan penentuan garis politik partai-partai itu yang kurang atau bahkan tidak tepat. Mereka itu tidak sadar bahwa *Dekrit 5 Oktober* itu, telah memberikan kesempatan kepada eks-opsir KNIL yang selama itu “*dormant*” dan berada dalam keadaan frustrasi dan demoralisasi yang mendalam, setelah menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang, untuk malah bisa masuk jajaran tentara RI secara resmi dan legal berdasarkan *Dekrit 5 Oktober 1945* itu.

Malahan mereka dapat dorongan dan bantuan dari Mr. Ali Sastroamidjojo dan Mr. Amir Sjarifuddin berdasarkan *konsep politik pribadi* mereka, sebagai menteri-menteri dalam kabinet pemerintah RI yang baru itu.

Ternyata eks-opsir KNIL hampir semua malahan dapat masuk dalam eselon yang tertinggi tentara Indonesia seperti di Kementerian Pertahanan dan di Markas Besar Tentara RI yang sedang berada dalam taraf pembentukan pada waktu itu.

Para bekas perwira PETA yang baru dilucuti Jepang juga dapat kesempatan untuk masuk dalam instansi tertinggi tentara Indonesia, yaitu Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara RI.

Berarti bahwa Kementerian Pertahanan dan Markas Besar Tentara RI sudah mulai dari permulaan terbentuknya dapat dimasuki oleh elemen-elemen kontra-revolusioner. Bekas opsir KNIL dan bekas perwira PETA yang tidak revolusioner dan secara *pasif menghadapi Jepang bekas atasan mereka* yang sudah kalah perang.

Hal ini tentunya diketahui oleh intelijen Belanda dan intelijen Inggris dan diteruskan kepada CIA.

Kebanyakan eks-opsir KNIL di Jawa Barat dapat langsung masuk dalam Divisi Siliwangi yang pimpinannya sudah dapat diinfiltrasi oleh bekas KNIL Divisi Siliwangi yang bermarkas di kota Bandung.

Jelas sekarang untuk para pembaca bahwa *Dekrit 5 Oktober 1945* mempunyai segi yang sangat menguntungkan untuk bekas opsir-opsir KNIL dan bekas perwira PETA yang sudah berada dalam keadaan frustrasi berat karena dilucuti Jepang dan kemudian ternyata tidak mempunyai inisiatif untuk merebut senjata atau tidak mempunyai keberanian moral untuk melucuti tentara Jepang.

Jadi, bekas KNIL dan bekas perwira PETA berada dalam kondisi moral yang sama. Keduanya mengalami frustrasi berat, tapi mereka tetap tidak sadar bahwa mereka berdua mempunyai identitas yang sebenarnya memang sama yaitu sebagai “tentara semu” yang dibentuk oleh bangsa-bangsa asing yang menjajah bangsa Indonesia, yaitu kolonialis Belanda dan fasis Jepang.

Di samping kesalahan yang fatal itu tadi, elite-politik kepartaian juga tetap tidak dapat melihat hakikat yang sesungguhnya dari organisasi KNIL dan PETA.

Kedua kelompok orang yang berseragam dan bersenjata itu adalah sebetulnya bukan kesatuan tentara yang mempunyai sifat sebagai suatu bagian dari angkatan bersenjata yang sungguh-sungguh dapat digunakan untuk perang menghadapi musuh dari luar negeri.

Kedua organisasi militer-semu itu hanya merupakan “tentara-polisi” untuk menghadapi rakyat di kalangan bawah, yaitu buruh dan petani yang berontak melawan pemerintah kolonial Belanda dan pejah fasis Jepang nanti seandainya dapat bertahan lebih lama lagi di Indonesia.

KNIL sebagai alat penjajah kolonialis Belanda dan PETA sebagai alat penjajah fasis Jepang kedua-duanya tentu saja harus dididik melawan komunisme oleh majikannya.

Personel, teristimewa golongan perwiranya, dari kedua organisasi alat penjajah itu terpilih dan berasal dari kalangan bangsawan atasan dan menengah.

Kesalahan dalam menginterpretasi hakikat dan dampak *Dekrit 5 Oktober 1945* ini oleh bapak-bapak pejabat pemerintah RI dan elite-politik kepartaian sangat mempengaruhi proses jalannya politik di RI mulai dari tahun 1945, Peristiwa Madiun 1948, dan sampai dengan tahun 1950-an, dan terus berjalan sampai dan sesudah terjadinya G30S yang disusul oleh terbentuknya orde baru Soeharto yang tidak secara kebetulan memakai dengan sengaja, opsir dan perwira KNIL dan PETA untuk mempertahankan kekuasaannya yang karena itu berkualitas sebagai rezim penindas rakyat dan sangat anti-komunis. Soeharto sendiri pernah bisa dipilih oleh penjajah Belanda dan Jepang untuk masuk KNIL dan PETA.

Bagian dari sejarah RI ini tentunya diketahui sepenuhnya oleh CIA yang dapat input dari intelijen Kerajaan Belanda dan intelijen Kerajaan Inggris.

Tentang dampak jangka panjang yang sangat negatif itu, saya telah menulis secara terperinci dalam salah satu jilid buku seri saya, yaitu *Pemikiran Militer*.

Keadaan seperti yang saya terangkan di atas itu tentu saja dipantau dengan cermat oleh intelijen kolonialis Belanda dan Inggris dan dengan

sendirinya diteruskan kepada organisasi intelijen Amerika pada waktu itu, yang kemudian berkembang menjadi CIA yang lebih sempurna.

Tentang dampak jangka panjang dari *Dekrit 5 Oktober 1945* pemerintah baru RI itu saya kira perlu saya uraikan. Hal ini saya jalankan karena saya ingat petuah dari seorang pakar strategi perang pada zaman kuno, seorang bangsa Tionghoa, yang mengatakan: “Untuk bisa menang dalam perang perlu diingat tiga masalah yang bisa dikatakan dengan sederhana, yaitu: terutama kenali dirimu sendiri. Kedua, kenali musuhmu; ketiga, kenali betul-betul medan yang kamu hendak gunakan untuk menggelar seluruh kekuatan perangmu. Dengan mengenal ketiga masalah itu dengan baik, kamu mempunyai kemungkinan besar untuk unggul dalam perangmu itu.”

Ternyata yang terberat untuk dilaksanakan dari tiga petuah itu adalah petuah yang pertama, yaitu mengenal sungguh-sungguh objektif dan jujur pada dirimu sendiri.

Menurut pengalaman saya, memang sangat sukar untuk mengenal diri sendiri itu. Saya sendiri pernah mengalami proses yang sangat rumit itu mulai dari kanak-kanak umur delapan tahun. Saya, oleh bapak saya, disuruh pada libur panjang musim panas pergi ke rumah eyang kakung saya yang hidup sebagai petani di pedesaan di daerah Kediri, Jawa Timur.

Kata bapak saya, tujuan untuk menghabiskan libur panjang saya di rumah eyang kakung itu untuk *belajar menemukan jati diri saya*.

Apa arti sebetulnya yang disebut bapak saya itu saya tentunya tidak tahu dan tidak mengerti.

Tidak ada gunanya untuk meminta keterangan lebih lanjut pada waktu itu. Karena justru karena saya tidak tahu itu saya harus pergi dan menghabiskan liburan saya di “*dalemnya*” kakung di pedesaan yang bersejarah kuno itu.

Saya pada waktu itu sudah ikut organisasi Kepanduan Bangsa Indonesia/KBI dan saya pergi sendiri dengan berseragam pandu KBI dengan kereta api dari Surabaya ke Keras. Dari stasiun kecil itu saya masih harus naik dokar ke Desa Karangtalun, tempat rumah eyang saya itu. Episode dalam kehidupan saya itu tidak dapat saya lupakan dan membekas begitu mendalam dalam benak saya sehingga saya dapat menulis novel dua jilid tentang pengalaman saya sebagai kanak-kanak yang belajar menemukan jati dirinya.

Novel dua jilid itu berjudul *Si Pemburu*.

Maaf, saya sedikit menyimpang dan melantur.

Masalah mengenal diri dalam arti sempit adalah riwayat kehidupan pribadi seseorang dan dalam arti luas di dalam rangka strategi perang bukan merupakan masalah kecil yang dapat begitu saja diremehkan.

Kelompok saya sebagai mahasiswa kedokteran senior independen sering mendiskusikannya pada waktu menjelang terjadinya Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 dan sesudah itu.

Seperti yang telah saya uraikan di atas, kelompok kita mengadakan analisa itu kebanyakan berdasarkan metode yang berhubungan erat dengan kuliah-kuliah kita di dalam ilmu psikologi dan psikiatri. Kita belum mengenal cara-cara menganalisa yang lain seperti misalnya secara Marxisme yang pada waktu itu mulai dipamerkan secara demonstratif oleh orang-orang penganut Sjahrir yang terkenal berideologi sosialis, mereka kebanyakan hidup di gedung kos di Jalan Menteng 31 Jakarta.

Tempat hidup kelompok independen kita adalah kompleks gedung yang besar dengan halaman depan luas dan mencolok di Jalan Prapatan nomor 10 dekat daerah Pasar Senen Jakarta.

Kelompok kita dalam suatu diskusi pernah mensinyalir bahwa pada waktu itu suatu penyakit jiwa yaitu *Multiple Personality Disease*, nampaknya telah mulai menjangkiti para pemimpin pemerintah baru kita dan juga beberapa orang mahasiswa teman kita. Bentuk dari kejangkitan itu menurut diagnosa kelompok kita bisa macam-macam. Untungnya kelompok kita pada waktu itu masih memandang terjadinya fenomena itu dari sudut pandang *black humor*.

Tetapi apakah fenomena adanya kejangkitan penyakit jiwa seperti yang saya uraikan di atas hanya terjadi di Jakarta di kalangan pimpinan negara dan di kalangan intelektual yang berasal dari Negeri Belanda dan kalangan mahasiswa asli Jakarta?

Ternyata jawabannya adalah berdasarkan teori ilmiah: yaitu kemungkinan besar penyakit penyimpangan jiwa itu mempunyai peluang untuk terjadi dalam suatu suasana yang sangat tegang atau genting seperti yang terjadi pada waktu itu di Jakarta menjelang usainya PD II, dan mungkin juga sebagai akibat dari suatu proses dari "*agitasi diri sendiri*" yang terlalu hebat.

Mengapa saya berani mengatakan demikian. Karena saya pernah menyaksikan fenomena seperti itu pada tahun 1970. Pada waktu itu saya berada di RRC dalam rangka melaksanakan perintah Panglima Tertinggi Bung Karno, yaitu: setelah menyelesaikan tugas belajar di lembaga pendidikan militer tertinggi di Uni Sovyet yaitu di War College Suworov, saya harus mengadakan peninjauan di RRC dan Vietnam.

Pada waktu itu di RRC masih berlangsung dengan hebat RBKP/ Revolusi Besar Kaum Proletar Tiongkok dan masih berkobarnya Perang Vietnam.

Saya akan persingkat cerita saya ini. Pokoknya pada kunjungan saya di kota Peking, sekarang Beijing, bertemu dan dapat bicara dengan Jusuf Adjitorop atau Josef Simanjuntak, seorang mantan anggota CC PKI yang sedang berobat di kota itu.

Dalam pembicaraan itu saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ia itu menunjukkan gejala penyakit *Multiple Personality Disease* dalam suatu taraf yang serius. Hal itu tidak mengherankan saya, karena saya tahu juga bahwa saya berhadapan dengan seorang pasien sakit lever/hepatitis yang parah.

Di samping itu, J.A. menunjukkan gejala penyakit MPD yang serius juga. Ia merasa bahwa ia itu seorang pemimpin Partai Komunis Cina. Ia bicara tentang RRC, sebagai "*benteng revolusi*" dan tentang RBKP yang perlu harus dijalankan dalam ucapan yang memperkuat diagnosa saya itu.

Saya pada waktu itu menarik kesimpulan bahwa J.A. itu sama sekali lupa bahwa PKI belum pernah memegang kekuasaan negara, jadi masih mempunyai status yang sama seperti partai-partai lain di Indonesia. Jadi berarti bahwa menjalankan Marxisme oleh PKI tidak bisa mengikuti teorinya V.I. Lenin atau Mao Zedong yang sudah memegang kekuasaan negara pada zaman mereka.¹

Pada saat itu timbul pikiran pada diri saya bahwa di situ harus antara lain dicari jawabannya mengapa Peristiwa G30S bisa terjadi.

Jika diringkas, mungkin pemikiran dogmatis seperti itulah yang menjadi salah satu sebab terjadinya G30S.

Marx dan Engels jika saya tidak salah pernah mengatakan bahwa ideologi mereka itu bukan merupakan suatu dogma.

Apakah Bung Karno yang menganjurkan orang memakai Marxisme sebagai cara untuk menganalisa suatu problem, ia sendiri secara konsekuen memakainya? Bagaimana tentang ide *nasakom* yang ia sudah pernah ucapkan pada tahun 1920-an? Apakah suatu ide seperti "*bekerja sama nasakom*" dapat secara terlepas dari hubungan spasial dan temporal digunakan?

Menurut teori politik baru abad 21 dalam buku Andrew Heywood, *Politics*, misalnya, dianjurkan untuk dapat dibedakan di antara "*facts* dan *values*".

¹ Lihat tentang pembicaraan saya dan J.A. dalam *Memoar Harjo Kecik Ke-3, Dari Moskow ke Peking*, hal.274—294, dan di buku *PM*, Jilid 2, hal.399—438.

Apakah ide kerja sama nasakom bisa merupakan suatu fakta yang bisa dikatakan ilmiah?

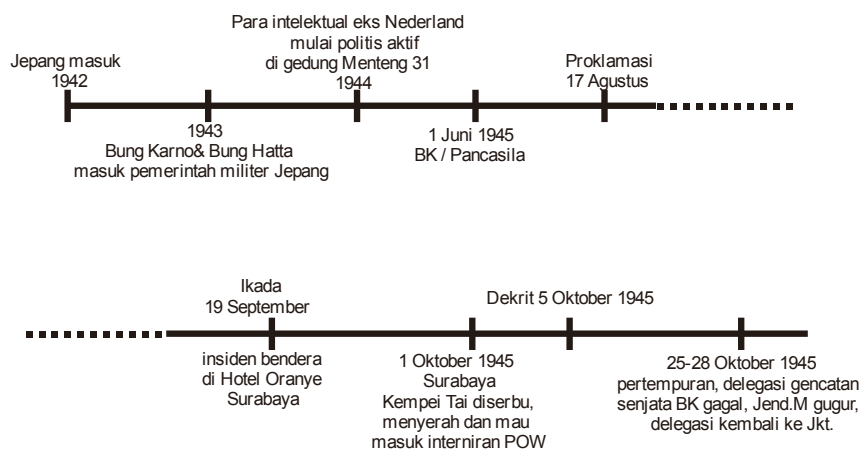
Saya kira masalah-masalah seperti ini kita sebagai generasi sekarang harus tetap tinjau secara *scientific* berdasarkan teori-teori baru abad-21 yang ada sekarang di bidang politik, filosofi, dan lain-lain.

Semua hal ihwal dalam universum ini tidak statis tapi berevolusi secara abadi.

Tapi setelah terjadi *Dekrit 5 Oktober 1945*, kelompok kita mahasiswa independen pada waktu itu, mulai memandang fenomena yang terjadi itu dari sudut pandang yang lebih serius. Karena kita mulai curiga bahwa pihak musuh mulai menunggangi keadaan dengan kemampuan organisasi intelijennya. Hal inilah yang dilupakan oleh para tokoh dan elite-kepartaian pada zaman itu.

Di samping itu saya kira terjadinya bahaya penyimpangan jiwa seperti gejala penyakit *Multiple Personality Disease* itu tetap kita masukkan dalam perhitungan kita.

Untuk menjelaskan keadaan proses perkembangan sejarah pada waktu itu, saya pikir perlu menggunakan gambaran *timeline* dari kejadian-kejadian yang penting dilihat dari sudut ilmiah atau historiografi mulai dari saat masuknya fasis Jepang di Indonesia.



Melihat *timeline* dari kejadian sejarah yang penting di atas, jelas bahwa pada waktu terjadinya proklamasi tidak terjadi sesuatu yang perlu dicatat,

juga pada terjadinya rapat raksasa di Lapangan Ikada di Jakarta tidak terjadi apa-apa yang patut dicatat dalam sejarah.

Jadi di Jakarta sebagai tempatnya pemerintah RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, tidak terjadi suatu gejala dari tanda adanya suatu revolusi dengan model tertentu.

Pada waktu itu semua berjalan normal tanpa adanya gejolak yang dapat menarik perhatian penduduk kota Jakarta pada umumnya, malahan Bung Karno dan Bung Hatta masih sempat mengadakan korespondensi dengan pihak militer Inggris di Jakarta.¹

Lain halnya yang terjadi di kota Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya terjadi sesuatu yang menggemparkan seluruh penduduk kota Surabaya. Yaitu kegagalan usaha kolonialis Belanda untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa dan masih dapat menunjukkan kekuatannya, dengan secara simbolik dan angkuh mengibarkan bendera kerajaan Belanda di atas gedung hotel di tengah kota Surabaya. Demonstrasi tetap masih adanya kekuasaan kolonialis Belanda itu gagal karena langsung dihancurkan-leburkan oleh tindakan tegas dan tepat dari warga kota Surabaya.

Secara objektif sebetulnya bisa dikatakan bahwa peristiwa penurunan dan perobekan bendera Kerajaan Belanda yang terjadi pada 19 September 1945 itu adalah suatu insiden berdarah yang dapat dipandang sebagai permulaan dari revolusi dan perang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sedangkan 1 Oktober 1945, dengan diserbunya secara massal oleh rakyat Surabaya dan menyerahnya Markas Besar Kempei Tai di Surabaya sebagai simbol kekuasaan fasis Jepang itu, dapat dipandang sebagai pelaksanaan suatu garis proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno atas nama rakyat Indonesia, yang menyatakan supaya ambil alih kekuasaan dijalankan secara seksama dan dalam waktu yang sesingkatnya.

Penduduk Surabaya secara menyeluruh dengan demikian merupakan warga RI yang pertama dapat melaksanakan apa yang tercantum dalam proklamasi kemerdekaan RI yang dibacakan oleh Bung Karno itu.

Mengapa masalah yang bersifat sederhana itu tidak dapat diakui pada waktu itu oleh bapak-bapak tokoh-tokoh pejabat yang baru diangkat menjadi anggota kabinet dari pemerintahan yang baru RI?

Malahan rakyat Surabaya dituduh tidak berdisiplin dan mungkin ingin mendirikan negara sendiri.

¹ Tentang hal itu dapat dibaca dalam buku *Pemikiran Militer*, Hario Kecik, Jilid 1, hal.212—217.

Saya mengerti bahwa penilaian seperti itu asalnya dari orang-orang yang tetap tidak dapat atau belum mampu melepaskan belenggu penjajahan kolonialis Belanda.

Jadi di mana untuk pertama kali terbentuknya tentara dari negara RI itu?

Pada 17 Agustus 1945, PETA yang masih memegang senjata tidak menyatakan sebagai tentara RI secara spontan.

Pada 22 Agustus, seluruh PETA dapat dikatakan sudah dilucuti oleh Jepang, dan dapat terlihat pada 19 September, perwira-perwira PETA nampak berpakaian sipil mirip tokoh-tokoh politik sipil berjalan di samping kelompok Bung Karno dan Bung Hatta. Nampak jelas dalam foto dokumentasi itu, eks-Shodanco Mufreni, anggota dari Daidan I di Jakarta di bawah pimpinan Daidanco Mr. Kasman Singodimedjo (kemudian menjadi anggota Kabinet Pemerintah RI).

Sedangkan massa raksasa penduduk Jakarta meninggalkan dengan tenang lapangan Gambir yang besar itu.

Hanya terdengar suara ribuan kaki manusia yang sedang berjalan pada waktu itu.

Apakah pandangan seperti itu dapat dikatakan sebagai suatu gambaran adanya terjadi suatu revolusi?

Jika demikian adanya, “kapan sebetulnya dapat dikatakan revolusi kemerdekaan itu mulai?”

Apa yang saya tulis ini bukan sama sekali suatu usaha untuk mengejek *a la arek Soeroboyo*, tapi saya dengan serius mengajak para pembaca merenungkan hal ini secara ilmiah untuk menemukan kebenarannya dan bila perlu mengadakan peninjauan ke belakang secara jujur ilmiah.

Mudah-mudahan apa yang saya tulis ini dapat memberikan input yang berguna kepada saudara Suar Suroso

Saya minta maaf atas kesalahan-kesalahan besar dan kecil yang mungkin terselip dalam tulisan saya ini.

Terima kasih saya ucapkan.

Jam 22.30, 24 Desember 2012, Jakarta

Hario Kecik

SAMBUTAN (4)

ATAS permintaan penulisnya, saya berusaha untuk memberikan tanggapan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya terhadap buku *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*.

Buku tersebut sangat baik dan perlu dibaca oleh generasi muda khususnya generasi penerus yang masih mencintai bangsa dan tanah airnya. Buku tersebut menyajikan berbagai fakta tentang peranan kaum kolonialis/imperialis yang penuh kelicikan, baik dalam memecah-belah bangsa dan menjadikan kaum reaksioner di dalam negeri dalam menjadikan dan mempertahankan Indonesia negeri jajahan dari zaman kolonialisme klasik (penjajahan model lama) hingga kolonialisme/imperialisme modern (penjajahan model atau dalam bentuk baru).

Tulisan *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno* menggambarkan bahwa sejarah perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia tak pernah terputus dari waktu ke waktu, dari bentuk satu tahap ke tahap berikutnya.

Gerakan revolusioner rakyat Indonesia yang tumbuh sejak dalam cengkeraman kolonialis Belanda tak pernah berhenti meskipun berulang kali menghadapi pukulan-pukulan dan penindasan yang sangat berat. Perkembangan tersebut terus meningkat, hingga terjadinya syarat-syarat perubahan dari negeri jajahan menjadi negeri merdeka, yaitu terciptanya krisis revolusioner yang membuat rakyat secara nasional bangkit melakukan revolusi hingga berdirinya negara Republik Indonesia. Peristiwa sejarah tersebut menjadi sangat penting dipelajari oleh kaum revolusioner, bahwa faktor-faktor objektif itu lahir dan berkembang sebagai suatu keharusan yang tak dapat direka-reka, sebagaimana krisis yang terjadi di Indonesia dan di mana pun di dunia. Kita, suka atau tidak suka, inginkan atau tidak, ia merupakan keharusan yang akan terjadi. Tetapi, revolusi itu akan berjalan

mencapai perspektifnya apabila tampil peranan subjektif yang memimpin revolusi. Pimpinan revolusi berupa organisasi kelas yang mempunyai program-program perubahan yang membebaskan negeri dan masyarakat dari penjajahan. Dari sini, peranan subjektif yang diperlukan tidak bersifat individual, melainkan secara organisasi yang harus tampil dengan program-program perubahan mendatang, sehingga rakyat mengetahui ke mana arah revolusi itu dan rakyat yang terorganisasi memberikan dukungan sepenuhnya.

Sebagaimana diketahui, kolonialis Belanda sejak bertekuk lutut pada fasisme Jepang yang menguasai Indonesia, bersekutu dengan imperialisme Amerika Serikat dan Inggris, hingga kemudian Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima. Namun demikian, Belanda tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam hal ini, kolonialis Belanda bersama Amerika Serikat justru menyusun siasat untuk menghancurkan kekuatan bersenjata rakyat yang dipimpin oleh kaum komunis dan kaum revolusioner, dengan berkomplot bersama kaum reaksioner didikan dan menjadi kaki-tangan kolonialis Belanda sebagai kekuatan utama di dalam negeri. Siasat licik Belanda berhasil menempatkan perwira-perwira KNIL memimpin kekuatan bersenjata yang resmi menjadi TNI. Kemudian melakukan berbagai provokasi hingga terjadinya Peristiwa Madiun. Siasat imperialis Belanda berhasil menghancurkan kekuatan bersenjata di bawah pimpinan kaum revolusioner yang dilanjutkan dengan pendudukan kembali oleh Belanda melalui agresi militer kedua dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS)

Meskipun secara formal kemudian RIS dibubarkan, tetapi secara riil kolonialis Belanda berhasil menguasai sebagian teritorial wilayah Indonesia, yaitu Irian Barat. Secara militer, TNI dikuasai oleh para perwira KNIL yang kemudian menjadi kaki-tangan setia kaum imperialisme. Selanjutnya, TNI yang sebagian besar pucuk pimpinannya terdiri dari perwira KNIL itu berhasil pula melakukan konsolidasi (reorganisasi), terutama setelah diberlakukannya Dwifungsi ABRI dan menjadi *backing* para tuan tanah, sehingga bagaikan membangun negara di dalam negara Republik Indonesia. Keadaan demikian menjadikan Indonesia masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal.

Dalam keadaan demikian, meskipun dalam politik luar negeri anti imperialisme tampak demikian hebat dan mendapat dukungan dari Asia—Afrika dan Amerika Latin yang dipelopori Indonesia di bawah Presiden Soekarno sehingga membangun kekuatan Nefo, akan tetapi kaum imperialis melalui kekuatan reaksioner di dalam negeri justru berhasil mengonsolidasi

diri, menguasai, dan memimpin situasi hingga berpuncak pada terjadinya Peristiwa G30S.

Buku *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno* telah mengupas berbagai rencana kaum imperialis dengan strategi menguasai (menjajah kembali) Indonesia. Rencana kaum imperialis dalam menjalankan Perang Dingin dengan strategi global menguasai dunia, telah berhasil melalui taktik menaklukkan dan menguasai berbagai negeri, termasuk Indonesia.

Sementara itu, kaum revolusioner Indonesia di bawah pimpinan partai telah melakukan kesalahan-kesalahan dan memiliki kelemahan-kelemahan serius di bidang teori, politik, organisasi, dan ideologi.

Kesalahan dan kelemahan ini bukanlah bersifat individu pimpinan partai, sehingga sangatlah tidak tepat jika ada sementara orang yang menumpahkannya kepada seseorang pimpinan. Sudah barang tentu, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam pimpinan partai, semakin besar pula harus memikul tanggung jawab terhadap kesalahan tersebut. Semua itu telah mereka tebus dengan nyawa dalam memikul tanggung jawab. Sedangkan mereka yang menyalahkan sana-sini, tidak berbuat sesuatu bagi rakyat dan bangsanya.

Setelah terjadinya pembantaian besar-besaran terhadap rakyat yang tak berdosa dan digulingkannya pemerintahan Bung Karno oleh kaum imperialis melalui kekuatan setianya di dalam negeri, maka dilakukannya penancapan kakinya di bumi pertiwi, yang menjadikan Indonesia negeri dan masyarakat jajahan model baru dengan sisa-sisa feodal.

Bagi kaum revolusioner dalam hal ini, kiranya perlu menyatukan pandangan terhadap materi masyarakat dan negeri Indonesia sebagai hal pokok. Dengan demikian, akan menemukan jalan akan “apa yang harus dikerjakan” dan “dari mana dimulai”. Tentu dengan berpegang teguh pada prinsip “Tidak ada satu kelas yang akan melepaskan kekuasaan secara sukarela”. Pembelejeatan pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan oleh rezim kaki tangan imperialis adalah penting, tapi tidak berilusi mendapat belas kasihan dan tidak menjadikannya sebagai pekerjaan pokok yang harus digeluti sepanjang usia.

Demikian tanggapan saya terhadap buku *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno*.

Nurman

KATA PENGANTAR

PEMBANTAIAN manusia tak berdosa dan penggulingan Bung Karno adalah maha-malapetaka menimpa Indonesia di pertengahan abad ke-20. Ini merupakan halaman hitam sejarah. Bukan saja sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia. Betapa tidak! Indonesia waktu itu adalah negeri besar kelima di dunia dalam jumlah penduduk. Rakyat Indonesia yang besar dan beradab telah jadi korban kebiadaban strategi negara adikuasa. Indonesia yang cemerlang, mercusuar perjuangan rakyat-rakyat sedunia melawan kekuasaan lalim imperialisme, berubah wajah jadi pengekor negara adidaya. Ini dipicu oleh *Peristiwa Gerakan 30 September 1965*.

Tak sedikit buku ditulis di dalam dan luar negeri mengenai *Peristiwa Gerakan 30 September*. Tapi peristiwa itu tetap misterius. Lantang berkumandang suara mencari dalang. Tapi dalang hanya dicari dengan berkutit sekitar tindak-tanduk pribadi-pribadi atau kesaksian dan pengakuan pribadi-pribadi termasuk hasil-hasil pengadilan *mahmilub* yang dikendalikan militer. Sedangkan *lembaga yang mendunia*, yang mengendalikan pribadi-pribadi itu, bahkan yang merekayasa dan mengendalikan banyak peristiwa dunia, tidak disinggung. Lebih sayang lagi, tak terjadi usaha serius *membongkar akar* malapetaka itu. Maka tak bisa lain, *Peristiwa Gerakan 30 September* itu tetap misterius.

Peristiwa ini bukanlah hanya menyangkut Indonesia. Lebih-lebih lagi bukan hanya menyangkut Bung Karno, PKI, dan Angkatan Darat. Ini terjadi dalam dunia yang sedang dilanda *Perang Dingin*. Indonesia sedang jadi sasaran *Perang Dingin*. Para pelaku, jagal-jagal pembantai manusia sampai para pelaku penggulingan Bung Karno hanyalah eksekutor, pelaksana sadar atau tidak sadar dari strategi *Perang Dingin*, yaitu pembasmian kaum komunis di mana saja muncul, termasuk pembasmian atas kaum komunis Indonesia; strategi yang bertujuan membikin punah PKI di Indonesia untuk

selama-lamanya. Maka *akar* peristiwa ini tidaklah terdapat di Indonesia. Hanyalah dengan mengupas secara menyeluruh, mengupas saling hubungannya dengan dunia yang sedang dilanda *Perang Dingin*, barulah bisa membongkar akar dan menemukan dalangnya, barulah jelas-jelas hakikat sesungguhnya *peristiwa* itu. Maka akan jelas, bahwa *peristiwa* itu bukanlah misteri. Demi tujuan inilah, penulis mempersembahkan kepada pembaca buku *Akar dan Dalang Pembantaian Manusia Tak Berdosa dan Penggulingan Bung Karno* ini.

Penulis sangat berterima kasih pada editor, Bung Koesalah Soebagyo Toer, yang sudah mengedit naskah dan mengusahakan penerbitannya, serta menyumbangkan tulisan *Sekapur Sirih* menyambut terbitnya buku ini. Juga terima kasih pada Bung Ibrahim Isa yang bermurah hati memberi kata *Sambutan* yang sangat inspiratif. Demikian pula kepada Bung Nurman yang menyumbang dengan tanggapan dan kata *Sambutan* yang ikut memberi bobot pada buku ini. Dan terima kasih khusus saya sampaikan pada Pak Hario Kecik, Purnawirawan Brigjen. TNI, mantan Panglima Daerah Militer Kalimantan Timur, dengan tanggapan beliau sebanyak 20 halaman kwarto, yang selengkapnyanya dimuat sebagai *Sambutan*, sedangkan bagian yang bersifat masukan, yaitu yang menyangkut paparan sejarah periode awal Revolusi Agustus, terutama mengenai *Dekrit 5 Oktober 1945* dalam hubungan dengan pembangunan kekuatan bersenjata RI, dipakai penulis untuk menyempurnakan Bab VIII naskah bagian subjudul: 7. *Dari Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Jadi Pasukan Anti Ajaran Bung Karno dan Jadi Pembasmis Komunis*.

Di samping menggunakan masukan dari Pak Hario Kecik ini, subjudul tersebut dilengkapi dengan bahan dari Doktrin TNI-Angkatan Darat *Tri Ubaya Shakti*, hasil Seminar ke-2 Angkatan Darat, 25 s/d 31 Agustus 1966 di Grha Wiyata Yudha / *Seskoad* Bandung, yang *Mukadimah*-nya antara lain menyatakan *Komunisme, Marxisme-Leninisme, Maoisme adalah bertentangan dengan Pancasila*.

Menyangkut sejarah PKI, penulis menggunakan sejumlah kutipan dari *Manuskrip 45 Tahun PKI*, hasil riset *Lembaga Sejarah PKI* yang belum diterbitkan. Karena itu, terima kasih khusus saya sampaikan pada Pak Utomo Sumaun, Ketua Umum *LPRKROB*, salah seorang sekretaris dari *Lembaga Sejarah PKI*, yang juga telah menulis kata *Sambutan* yang memberi bobot tambahan bagi buku ini.

Dan tak lupa, terima kasih khusus disampaikan pada Bung Bilven yang berkat perhatian dan bantuannya, Penerbit Ultimus telah berjasa dengan berhasil menerbitkan buku ini.

Mudah-mudahan buku ini bisa jadi sekedar sumbangsih bagi merintis usaha membuka kunci *misteri Peristiwa G30S*, membongkar akar dan membikin telanjang dalang maha-malapetaka yang telah melanda bangsa Indonesia, dalam usaha besar memaparkan sejarah berdasarkan pandangan yang menyeluruh, *cari kebenaran dari kenyataan*. Semoga buku ini bisa jadi secercah urun demi membebaskan bangsa kita dari pembodohan yang berlangsung di bawah kekuasaan rezim militeris orba Soeharto lewat tulisan-tulisan sejarah yang menyesatkan.

Kepada para pembaca yang berkenan memberi kesan dan kritik-kritik, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Januari 2013

Suar Suroso

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih — Koesalah Soebagyo Toer

Sambutan (1) — Ibrahim Isa
Sambutan (2) — Sumaun Utomo
Sambutan (3) — Hario Kecik
Sambutan (4) — Nurman

Kata Pengantar — Suar Suroso

I — Berkas G30S, Penguasa Barat Berpesta-Pora

II — Membantah Fitnah Pemalsu Sejarah

1. Buku Putih Kopkamtib
2. Karya Victor Miroslav Fic: Kudeta 1 Oktober 1965
3. Karya Jung Chang dan Jon Halliday: Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui
4. Prof. Nugroho Notosusanto: PKI Dalang G30S; Pancasila Bukan Hasil Galian Bung Karno

III — Perang Dingin Demi Pembasmian Komunisme Sejangat

IV — Doktrin Truman *The Policy of Containment*

V — Politik Rollback, Peningkatan The Policy of Containment
Eisenhower dan Dulles
Doktrin Reagan

VI — Akar Perang Dingin

VII — Cara-Cara CIA Membasmi Kekuatan Anti Imperialisme

VIII — Dalang dan Aparat Pembasmi Kekuatan Kiri dan Penggulingan
Bung Karno

1. National Security Council (NSC)—Politbiro Perang Dingin
2. “Pemerintah Bayangan”
3. Central Intelligence Agency (CIA)
4. RAND Corporation
5. Ford Foundation
6. Pakta-Pakta Militer: North Atlantic Treaty Organization (NATO), South-East Asian Treaty Organization (SEATO), Central Treaty Organization (CENTO).
7. Dari Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Jadi Pasukan Anti Ajaran Bung Karno dan Jadi Pembasmi Komunis

IX — Gerakan Buruh Indonesia, Tulang Punggung Kekuatan Anti Imperialisme

X — PKI dan Bung Karno Bagaikan Hantu Bagi Amerika

1. Lahirnya Gerakan Nasional, Peranan Penting Sarekat Islam
2. Dari Sarekat Islam ke Sarekat Rakyat
3. Lahirnya PKI
4. Pemberontakan Nasional 1926, Sangkakala Revolusi Indonesia
5. Krisis Kapitalisme, Indonesia di Bawah Fasisme
6. Revolusi Agustus 1945
7. Provokasi Madiun
8. Kebangkitan Kembali PKI
9. Kongres Nasional Ke-5 PKI
10. Usaha Reaksi Melawan PKI
11. Pemilihan Umum Pertama dalam Sejarah Indonesia, Gagasan Bung Karno Membentuk Kabinet Gotong Royong.
12. Tiga Kekuatan dan Tiga Konsep Penyelesaian Revolusi
13. Sidang-Sidang Konstituante, PKI Membela Pancasila Dasar Negara
14. Amerika dan Pemberontakan PRRI – Permesta
15. Demokrasi Terpimpin
16. Manifesto Politik RI (Manipol)
17. Yo Sanak, Yo Kadang, Yen Mati Aku Sing Kelangan, Amerika Musuh Rakyat Paling Berbahaya
18. Dwi-Tunggal Rakyat dan Tentara
19. Pentingnya Pendidikan Marxisme-Leninisme
20. Bung Karno: “Go Ahead!”
21. Imperialisme Amerika Musuh Nomor Satu Rakyat Indonesia

22. Teori “Dua Aspek Kekuasaan Negara” dan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)
23. PKI dan Gerakan Komunis Internasional
24. Partai Massa dan Partai Kader
25. Mengobarkan Semangat Berani
26. PKI dan Masalah Tani
27. Gunakan Pancasila Menyerang PKI
28. Deklarasi Bogor – Tata Krama Nasakom
29. Melawan Trotskisme
30. ‘Situasi Revolusioner’
31. Tesis “45 Tahun PKI”
32. Lagi-Lagi Dwitunggal Rakyat dan ABRI
33. Serentetan Kesimpulan Teoretis yang Problematis
34. Memuncaknya Reaksi Anti-PKI dan Usaha Menggulingkan Bung Karno

XI— Ciptakan Dasar untuk Bertindak Represif Demi Pembasmian PKI dan Penggulingan Bung Karno

Biodata Penulis
Daftar Kepustakaan

I

BERKAT G30S, PENGUASA BARAT BERPESTA-PORA

OKTOBER 1965. Dunia buncah. Disentak berita dahsyat mengagetkan. Malapetaka melanda Indonesia. Lebih mengerikan dari Nero membakar Roma, melebihi korban bom atom menimpa Hiroshima, lebih dahsyat dari pertempuran Stalingrad yang jadi titik-balik Perang Dunia kedua, lebih menegakkan bulu roma dari Perang Korea dan Perang Vietnam. Indonesia berlumuran darah. Manusia tak berdosa, yang tak melawan dibunuh secara semena-mena. Mayat-mayat bergelimpangan, berhanyutan di Bengawan Solo, di Sungai Musi, di Sungai Asahan, dan sungai-sungai lainnya. Bertebaran kuburan tanpa nisan. Terjadi *pembantaian manusia* yang tak ada taranya dalam sejarah Indonesia, bahkan dalam sejarah dunia. Inilah muara dari rencana *Sang Angkatan Murka*, demi menggulingkan Bung Karno. “Keputusan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno ini telah diambil oleh Presiden Eisenhower pada tanggal 25 September 1957, lima bulan sebelum proklamasi PRRI.” [Tim Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.186].

Dengan *Peristiwa 30 September 1965*, di Indonesia terjadi pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira menengah pucuk pimpinan Angkatan Darat. Belum pernah terjadi dalam sejarah peperangan mana pun, baik dalam Perang Dunia pertama, maupun Perang Dunia kedua, Perang Korea, maupun dalam Perang Vietnam, sekian banyak perwira tinggi, pucuk pimpinan Angkatan Darat terbunuh dalam satu peristiwa, dalam satu malam. Dan peristiwa ini disusul oleh penangkapan dan pemenjaraan besar-

besaran tanpa melalui pengadilan. Berlangsung *pembantaian manusia*, pembasmian kaum kiri, pelarangan Partai Komunis Indonesia, pelarangan penyebaran Marxisme-Leninisme di seluruh Indonesia. Peristiwa bermuara pada penggulingan Bung Karno; hingga berubahnya Indonesia dari *mercusuar perjuangan melawan imperialisme* menjadi negeri yang mengekor pada kekuasaan asing, terutama Amerika Serikat.

Ada yang menilai kejadian ini sebagai “*satu peristiwa yang paling membuat zaman dalam sejarah Asia sesudah Mao Zedong tampil berkuasa di Tiongkok*” [Kulit buku karya Arnold C. Brackman, *The Communists Collapse in Indonesia*, W.W. Norton Inc. New York, *First edition*, 1969].

“Pemerintah Johnson sangat gembira dengan berita dari Indonesia.” [Max Frankel, *New York Times*, 12 Maret 1966].

Bertrand Russel menulis, bahwa *The Times*, London, memperkirakan “*Telah terbunuh sekitar satu juta orang selama empat bulan. Jadi dalam empat bulan di Indonesia terbunuh sebanyak dalam dua belas tahun perang Vietnam*” [The *Silent Slaughter, The Role of the United States in the Indonesian Massacre*, Youth Against War and Fascism, 58 West 25 Street, New York, N.Y.10010, 1966].

Dalam waktu kurang dari satu tahun sesudah terjadinya G30S dan pembantaian berdarah, James Reston, kolumnis *The New York Times* menulis menunjukkan kekaguman atas kejadian ini sebagai “*pancaran cahaya di Asia*”.

Tahun 1967, Richard Nixon melukiskan Indonesia sebagai “*hadiah terbesar di daerah Asia Tenggara*.” [Richard M. Nixon, “*Asia After Vietnam*”, *Foreign Affairs*, October 1967, p.111.].

U. Alexis Johnson, Wakil Menteri Luar Negeri AS, 1966, menyatakan bahwa “pembasmian komunis di negeri Indonesia yang besar adalah peristiwa yang setara dengan Perang Vietnam, yang barangkali *adalah titik balik historis di Asia abad ini*.” [Joe Nunes, *Indonesia: The Final Solution*] [<http://chss.montclair.edu/english/furr/nunesindonesia.html>].

Rex Mortimer menulis, “Banyak orang Barat kala itu justru melihat pembunuhan massal tersebut dengan penuh rasa puas dan kelegaan sebagai penghilangan sepenuhnya ancaman dan hambatan bagi kepentingan mereka, sementara kalangan lain melihatnya sebagai pemecahan bagi jalan buntu politik tak terelakkan yang disesali dan memalukan, namun masih bisa dimaklumi. Pembunuhan ratusan ribu manusia yang kebanyakan tidak mengerti, mengapa mereka harus dibunuh itu tidak banyak menarik perhatian apa lagi menggugat perikemanusiaan kita dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain di belahan dunia lain, yang sebenarnya dalam dimensi maupun skalanya jauh lebih kecil.” [Rex Mortimer: *Indonesian*

Communism Under Sukarno, Cornell University Press, 1974, edisi Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal.viii].

Dr. Brad Simpson, Princeton University, menulis, “Pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah satu bentuk teror yang manjur, syarat yang tak boleh tidak untuk mengintegrasikan Indonesia masuk sistem ekonomi politik regional dan internasional, untuk peningkatan rezim militer yang modern dan untuk menggulingkan Soekarno.” [*Memo of Conversation*, 14 Februari 1966, RG 59, State Department Central Files 1964–66, POL 2 INDON, NA].

Rakyat awam bingung, terpana. Buruh, tani, massa rakyat tercengang. Bahkan anggota-anggota PKI umumnya terheran-heran. Tak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Tak pernah membayangkan akan terjadinya peristiwa yang demikian. Yang terpaku dalam pikiran adalah: jika berlangsung pemilihan umum, PKI akan mencapai kemenangan besar. Tak ada yang membayangkan, apalagi siap menghadapi bencana berupa pembasmian, pembantaian manusia. Karena itu, peristiwa ini adalah maha-musibah bagi rakyat, bagi kaum kiri.

Dari hasil penelitian CIA sendiri mengenai operasinya di Indonesia ini, pemerintah Amerika memainkan peranan penting dalam satu pembunuhan massal yang paling buruk dalam abad ini dengan memberikan nama ribuan pimpinan Partai Komunis kepada tentara Indonesia, yang membunuh mereka dalam pembantaian berdarah yang diperkirakan sampai setengah juta manusia.

Tapi para penguasa Barat, terutama Amerika Serikat “*bergendang paha*”, bahkan *berpesta-pora*. Gembira ria melebihi kegembiraan seusai Perang Dunia pertama dan Perang Dunia kedua mengalahkan fasisme. Bagi penguasa Barat, terutama Amerika Serikat, peristiwa ini bukanlah suatu kebetulan, yang terjadi di luar dugaan. Sudah lama diharapkan, dan dinantikan bahwa peristiwa ini akan terjadi. Bukan hanya harapan, tapi direncanakan dengan perhitungan yang masak dan telah diambil berbagai tindakan dengan persiapan kekuatan yang cukup untuk mewujudkan kejadian ini.

“Pada 1950-an, pemerintahan Eisenhower bahkan memutuskan bahwa, jika diperlukan, mereka akan mendukung terbelahnya Indonesia dan terpisahnya Jawa (yang merupakan basis golongan kiri) dari wilayah lain di negara ini.” [Audrey R. Kahin dan George Mc T. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*, 1995].

Ada bukti pembicaraan di lingkaran-lingkaran diplomatik Amerika Serikat, Inggris, dan Sekutu sebagai poros yang membenci perkembangan

politik di Indonesia beserta solusinya. “Menurut sudut pandang kami, tentu saja, *upaya kup PKI yang gagal* kiranya merupakan perkembangan paling efektif untuk membalikkan kecenderungan politik di Indonesia,” demikian kata Howard P. Jones, Duta Besar AS untuk Indonesia, Maret 1995. [John Roosa (2006) dalam *Pretext for Mass Murder*].

Usahakan terjadinya suatu “*perebutan kekuasaan*”, “*suatu coup d’etat*” di mana terlibat Partai Komunis Indonesia. Ini dapat dijadikan dalih untuk membasminya. Inilah gagasan, yang sesungguhnya terwujud dalam kenyataan. Partai Komunis tertua di Asia, terbesar di luar negeri-negeri sosialis, terbesar sesudah Partai Komunis Uni Sovyet dan Partai Komunis Tiongkok, Partai Komunis Indonesia jadi berantakan. Semua pimpinan tertingginya terbunuh atau dipenjarakan. Lebih satu juta anggotanya dibunuh, dipenjarakan. Kekuatan kiri Indonesia, kaum Soekarnoïs pendukung Bung Karno dibasmi habis-habisan.

CIA membikin pemaparan palsu mengenai apa yang terjadi, kemudian diterbitkan berupa sebuah buku *Indonesia 1965, Kup Yang Prematur*, yang ketahuan sebelumnya. Para pejabat Amerika, wartawan, dan para sarjana yang berhubungan dengan CIA menciptakan dongeng, bahwa pembunuhan berdarah itu adalah “*reaksi mendadak dari rakyat yang spontan terhadap terorisme PKI*.” Maka, dalam Oktober 1965, para jenderal Angkatan Darat mengambil langkah, menyerang balik terhadap kup para kolonel yang gagal, menjadi pogrom anti-komunis, dan mengubah Indonesia yang kaya sumber alam itu bisa dieksploitasi oleh korporasi-korporasi raksasa Amerika. Jika Vietnam adalah kekalahan besar sesudah Perang Dunia kedua, maka Indonesia adalah satu kemenangan terbesar.

Gabriel Kolko menyimpulkan: “*penyelesaian terakhir*” tentang masalah komunis di Indonesia adalah jelas satu tindakan yang paling biadab yang tak berperikemanusiaan dalam abad ini, bagian terbesar dari ini jelas setara dengan kejahatan perang yang sama dengan jenis yang dilakukan oleh Nazi. Tak seorang pun orang Amerika dalam masa sesudah 1945 yang haus darah, sebagaimana yang dilakukan di Indonesia memprakarsai pembunuhan besar-besaran, dan yang berbuat segala-galanya yang dalam kekuasaannya untuk mendorong Soeharto, termasuk mempersenjatai para pembunuh, untuk menyaksikan bahwa pelikuidasian PKI dilakukan sampai pada puncaknya. [Gabriel Kolko, *Confrontation the Third World: United States Foreign Policy 1945–1980*, Pantheon Books, 1988].

Di tahun 1965, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soeharto, membantai 500.000 anggota PKI. Amerika Serikat mendorong orang Indonesia menjalankan pembunuhan besar-besaran dengan memberikan

bantuan diplomatik dan materiil demi mendukung pembunuhan-pembunuhan tersebut.

Jumlah tepat mereka yang terbunuh tak akan pernah bisa diketahui. Kementerian Luar Negeri Amerika menaksir di tahun 1966, jumlah terbunuh sekitar 300.000. Data resmi yang diumumkan Indonesia pada pertengahan tahun 1970 adalah 450.000 sampai 500.000 meninggal. [Gabriel Kolko, *Confrontation the Third World: United States Foreign Policy 1945–1980*, Pantheon Books, 1988].

Dalam bulan Oktober 1976, Laksamana Sudomo, Kepala Kopkamtib menyatakan dalam wawancaranya kepada wartawan Belanda, bahwa lebih dari 500.000 terbunuh. Amnesty Internasional mengutip sebuah sumber lain yang menyatakan lebih dari 700.000, dan yang lainnya menaksir bahwa lebih dari satu juta orang meninggal [Chomsky, Herman, 79].

Sarwo Edhie Wibowo yang mengomandoi pengerahan pasukan baret merah Kostrad mengakui bahwa dalam peristiwa ini telah terbunuh sebanyak tiga juta manusia.

II

MEMBANTAH FITNAH PEMALSU SEJARAH

BERLALU waktu hampir setengah abad. Peristiwa 1965 di Indonesia masih diliputi kegelapan. Penyiksaan, pemenjaraan, pembuangan, perkosaan, pembunuhan telah menelan korban jutaan umat. Inilah halaman tergelap dalam sejarah Indonesia. Trauma yang mendalam tetap terpendam di hati para korban atau keluarga korban yang masih hidup.

Berbagai visi bermunculan mengungkap kejadian yang menelan korban jutaan manusia itu. Pemalsuan sejarah berlangsung dahsyat dalam mengungkap peristiwa ini. Mulai dari *Buku Putih Kopkamtib*, disusul tulisan-tulisan para pakar sejarah seperti Prof. Noegroho Notosoesto, Victor Miroslav Fic, Jung Chang, C.J.A. Dake, semuanya “menghitamkan” PKI dan *Bung Karno*, menyatakan PKI atau *Bung Karno* adalah dalang G30S, yang menjadi awal malapetaka bangsa Indonesia.

1. *Buku Putih Kopkamtib*

Dalam *Kata Pengantar Buku Putih Kopkamtib*, yang diterbitkan 20 Mei 1978, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Laksamana Sudomo, menyatakan bahwa “bangsa Indonesia sudah bertekad bulat untuk tidak memberi kesempatan hadirnya kembali paham komunis untuk selamanya di negara kita.”

Sesudah lewat pembantaian manusia yang kejam tak ada taranya, rezim fasis Soeharto secara jasmaniah membasmi kaum komunis dan golongan kiri, *Kopkamtib* yang jadi aparat represif rezim ini dengan *Buku Putih*-nya

menelanjangi dirinya sendiri sebagai pemalsu sejarah, penjunjung tinggi panji komunis-fobi yang anti-demokrasi, anti Undang-Undang Dasar 1945.

Kalimat pertama *Buku Putih* menyatakan bahwa “Peristiwa Gerakan 30 September yang dilaksanakan dan didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan singkatan G.30.S/PKI pada tahun 1965, merupakan noda hitam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sebagai puncak daripada segala bentuk penyimpangan hukum dan konstitusi yang hampir-hampir menghancurkan dan menenggelamkan kita sebagai negara dan bangsa.”

Dengan tegas dinyatakan PKI mendalangi G30S.

Dengan memaparkan sejarah PKI, *Buku Putih Kopkamtib* menghitamkan PKI dengan tuduhan-tuduhan: “PKI membenalu tubuh Sarekat Islam.”

Kenyataannya, bukan membenalu, tapi PKI (ISDV) membawa maju Sarekat Islam dari kegiatan usaha dagang menjadi satu gerakan menuju kemerdekaan.

Selanjutnya, yang dinyatakan *Buku Putih* adalah fitnah, bahwa: “Dengan Pemberontakan Nasional 1926, PKI melancarkan suatu petualangan yang akan membawa malapetaka bagi ribuan patriot Indonesia.”

Pemberontakan Nasional 1926 *bukanlah petualangan*, tapi perlawanan bersenjata untuk kemerdekaan, yang menggoyahkan kekuasaan kolonial Belanda. Dalam pemberontakan ini, kaum komunis jadi pelopor, berguguran korban sampai ke tiang gantungan, ribuan ditangkap dan dipenjarakan Belanda, dibuang ke Boven Digul. Sejarah mencatat kepahlawanan Egom, Hassan, dan Dirdja, kader-kader PKI yang gugur di tiang gantungan. [Lembaga Sedjarah PKI: *Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia (1926)*, Jajasan Pembaruan, Jakarta, 1961].

Tidak ada masalah “*menohok kawan seiring*” seperti yang dituduhkan dalam *Buku Putih*: “Di daerah-daerah tempat terjadinya kekalutan ini untuk kesekian kalinya PKI memperlak golongannya lain dalam mencapai tujuannya, sesuai dengan bunyi pepatah ‘*Menohok kawan seiring, menggantung dalam lipatan*’ ... para pemimpin PKI telah mengorbankan ribuan pengikutnya.”

Pemberontakan bersenjata tahun 1926 merupakan canang bagi rakyat Indonesia, bahwa kolonialisme Belanda bisa dilawan, kemerdekaan harus diperjuangkan. Inilah Sangkakala Revolusi Indonesia.

Menurut *Buku Putih*, “di zaman Jepang pun kaum komunis Indonesia tidak dapat berkulit.”

Kebalikan dari yang ditulis dalam *Buku Putih*, yang sesungguhnya terjadi adalah: semenjak tahun 1936, dengan kedatangan Musso, terbentuklah CC PKI ilegal. Musso membawa *garis front anti-fasis* dari *Komintern*. Secara

rahasia, di bawah pimpinan PKI ilegal, kaum komunis tetap aktif, berorganisasi menggerakkan rakyat. Terbentuk dan bergeraklah organisasi Gerindo di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin. Tahun 1939, di Jakarta terbentuk organisasi Gerakan Rakyat Anti Fasis (Geraf) dipimpin kader-kader PKI ilegal. Pembentukannya dihadiri antara lain Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Widarta, Armunanto, Dr. Liem Koen Hien.

Di Jakarta, kader-kader PKI seperti Wikana, D.N. Aidit, Hoetabarat, Soemarto, Ronosoedarmo, Pojas, dan lain-lainnya, aktif ambil bagian dalam memimpin berbagai organisasi legal, semi-ilegal, dan ilegal. Mereka menghimpun massa dan menggunakan organisasi-organisasi itu untuk mendidik dan melatih massa melawan fasisme Jepang. Wikana menggunakan kesempatan politik Kaigun (Angkatan Laut Jepang) untuk menarik pemuda-pemuda dengan mendirikan “Asrama Indonesia Merdeka”, dalam kegiatan pendidikan dimasukkan pikiran-pikiran anti-fasis. D.N. Aidit juga menggunakan “Asrama Menteng 31” untuk mempropagandakan ide-ide anti-fasis. Pada akhir tahun 1944, D.N. Aidit bersama dengan M.H. Lukman, Sidik Kertapati, dll., mendirikan satu organisasi yang lebih tegas coraknya anti-fasis dan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yaitu Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom). Di samping itu, Wikana, D.N. Aidit, dll., juga mempunyai hubungan dengan berbagai grup dan kelompok anti-fasis di Jakarta. Kekuasaan fasis Jepang mencium kegiatan orang-orang komunis, dan melakukan penangkapan-penangkapan. Jepang menangkap Koesnandar, Soebijanto Koesoemo, Hardjo Soepingi. Juga Sudisman, Tjoegito, Sjaifoellah, Fatah Jasin. Di Semarang ditangkap Kasim dan Broto, di Nganjuk ditangkap Tarmoedji, di Tulung Agung ditangkap Soeparto, di Blitar ditangkap Noto. Tak lama kemudian ditangkap Azis di Sidoarjo. Pamoedji, Ketua CC PKI, juga ditangkap di Purworedjo. Menyusul ditangkap di Jakarta, Mr. Amir Sjarifuddin. Selanjutnya bukan hanya kader-kader PKI, tokoh-tokoh lainnya Dr. Kajadoe, Mr. Soemanang, Ki Mangoensarkoro, Dr A. Kapau Gani, juga ditangkap. Akibat siksaan, banyak di antara mereka yang meninggal dunia seperti Pamoedji, Sjaifoellah. Soekajat dan Azis serta Abdoerrahim dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya di Kantor Kenpeitai di Jalan Alun-Alun Tjontong Surabaya. Mr. Amir Sjarifuddin dijatuhi hukuman mati, tapi berkat perjuangan kekuatan progresif, terutama berkat jaminan yang diberikan Bung Karno, hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur hidup. Prof.Dr. Moechtar, dan Dr. Kajadoe dibunuh dengan dipenggal lehernya di Jakarta.

Di bawah pimpinan orang-orang progresif atau yang berhubungan dengan kader-kader PKI ilegal, terjadi “berbagai pemberontakan anti Jepang seperti di Pantjur Batu Deli Serdang (26 Juli 1942) terkenal dengan pemberontakan Aron (Uaron); 23 Oktober 1943, Pemberontakan Karangampel, Indramayu; November 1942, Pemberontakan Tani di Tjut Pilieng, Aceh; November—Desember 1943, Pemberontakan Tani Lohbener, Indramayu; Februari 1944, Pemberontakan Tani Singaparna; November 1944, Pemberontakan Meureudu dan Beureum Aceh; Mei 1945, Pemberontakan suku Daya Tajan dan Ketapang Kalimantan.

“Menjelang menyerah kalahnya Jepang, CC PKI mengadakan sidangnya di Pemalang, yang antara lain mengambil keputusan untuk menyerukan kepada semua kader PKI agar ambil bagian aktif merebut kekuasaan dari Jepang, termasuk merebut perusahaan dan pabrik-pabrik serta melucuti senjata Jepang”. [Lembaga Sejarah PKI: *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Jakarta, Mei 1965].

Buku Putih Kopkamtib yang menyatakan PKI tidak berkutik di bawah kekuasaan fasis Jepang adalah bertentangan dengan kenyataan. Ini adalah pemalsuan sejarah, yang menyesatkan, adalah fitnah terhadap PKI yang berjuang melawan fasisme Jepang.

Buku Putih menulis: “Karena mengikuti garis Dimitrov, maka kaum komunis sama sekali tidak memegang peranan yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945”

Ini adalah pemalsuan sejarah yang sangat menyesatkan. Terpilihnya Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri pertama Republik Indonesia menunjukkan pengakuan akan peranan tokoh komunis dalam Revolusi Agustus 1945. Di Menteng 31, pusat kegiatan pemuda menjelang Proklamasi Kemerdekaan, terdapat dan aktif kader-kader PKI ilegal, seperti Wikana, D.N. Aidit, dan M.H. Lukman. Sejarah mencatat peristiwa dilarikannya Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok sebelum berlangsungnya Proklamasi Kemerdekaan. Wikana, kader PKI ilegal memainkan peranan penting dalam peristiwa ini. Rengasdengklok, daerah pertama yang mengibarkan bendera Merah Putih sebelum proklamasi diumumkan, adalah daerah historis, yang berada di bawah kekuasaan pasukan yang dipimpin perwira PETA Oemar Bachsan, seorang kader PKI ilegal.

Dalam pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, tokoh-tokoh PKI aktif semenjak permulaannya. Dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya terdapat pasukan di bawah pimpinan Soemarsono, kader PKI.

Maka tidaklah betul: “Komunis sama sekali tidak memegang peranan yang mendukung Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,” seperti yang ditulis *Buku Putih*.

Menurut *Buku Putih*, tahun 1947, “dengan pembentukan Kominform, Gerakan Komunis Internasional berubah haluan dari menempuh garis Dimitrov, yaitu politik front persatuan anti fasisme, menjadi garis Zhdanov (bukan *Zhdanov* menurut *Buku Putih*!) yang mengangkat panji anti imperialisme Amerika dan meninggalkan kerja sama dengan kaum sosial demokrat”.

Sebenarnya, yang berubah haluan adalah pemerintah AS di bawah Presiden Truman, dari bersekutu dengan Uni Sovyet melawan fasisme jadi memusuhi Uni Sovyet. Seusai Perang Dunia kedua, yang terjadi adalah: dengan “*telegram panjang*”-nya dari Moskow, George McKennan, Dubes AS untuk Uni Sovyet memprakarsai politik pembendungan komunisme sejagat, *the policy of containment* yang selanjutnya menjadi *Doktrin Truman*. Dengan realisasi Doktrin Truman, Amerika Serikat mengobarkan *Perang Dingin* demi membasmi Uni Sovyet dan partai-partai komunis di dunia.

Tentang *meninggalkan kerja sama dengan kaum sosial demokrat*, bukannya terjadi sesudah pembentukan Kominform, tapi semenjak terbentuknya Komintern tahun 1919, dengan salah satu dari 21 pasal syarat keanggotaan Komintern bagi partai-partai komunis sedunia. Pasal itu menyatakan, harus menggunakan nama Partai Komunis, meninggalkan nama sosial-demokrat dan memutuskan hubungan dengan partai sosial demokrat. Alasannya adalah: partai-partai sosial demokrat telah mengkhianati ajaran diktator proletariat Marx, dalam praktik telah menjadi musuh komunisme. Demikianlah kaum sosial-demokrat, baik di Eropa, maupun di Indonesia.

Buku Putih Kopkamtib menghubungkan Kominform dan garis Zhdanov dengan *Konferensi Pemuda Asia Tenggara* yang diselenggarakan bulan Februari 1948 di Kalkuta, India. Konferensi ini berlangsung atas prakarsa *Gabungan Pemuda Demokratis Sedunia (World Federation of Democratic Youth—WFDY)* dan *Persatuan Internasional Mahasiswa (International Union of Students—IUS)* yang menurut *Buku Putih* mengikuti Kominform, menetapkan “*garis Kalkuta*”.

Tidak ada hubungan antara Kominform dengan WFDY dan Konferensi Pemuda Asia Tenggara di Kalkuta. Kominform adalah badan kerja sama terutama di bidang informasi antar Partai-Partai Komunis Uni Sovyet dan negeri-negeri sosialis dan Partai Komunis Perancis dan Itali. Kominform terkenal dengan publikasi berkala berjudul *For A Lasting Peace And For People's Democracy* dalam berbagai bahasa.

Konferensi Kalkuta adalah konferensi pemuda Asia Tenggara yang dihadiri wakil-wakil 39 organisasi beranggotakan tujuh juta pemuda dari India, Pakistan, Birma, Malaya, Indonesia, Vietnam, Ceylon, dan Tiongkok.

Di samping itu terdapat peninjau dan delegasi persahabatan dari Nepal, Filipina, Mongolia, Korea Utara, Uni Sovyet terutama dari semua Republik Sovyet dari daerah Asia, dan dari Australia, Inggris, Perancis, serta Yugoslavia. Sebelum pembukaan konferensi, berlangsung demonstrasi yang diikuti kira-kira 100.000 pemuda di jalan-jalan Kalkuta. Ini mendemonstrasikan solidaritas pemuda demokratis sedunia berjuang melawan penghisapan imperialis. Resolusi yang diputuskan konferensi menyatakan: “Perjuangan kita untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi dan perjuangan pemuda sedunia untuk demokrasi dan perdamaian, menentang pecahnya perang dunia ketiga adalah sama dan satu, dan kedua-duanya ditujukan terhadap musuh yang sama...” Semboyan Konferensi yang dikumandangkan mengutuk musuh adalah: *Jangan Jamah Asia! Mampuslah Imperialisme!* Dan selanjutnya, resolusi konferensi menyatakan bahwa “Sekarang ini Amerika Serikat adalah kekuasaan imperialis yang paling agresif di dunia.” [Guy de Boyson, President de la F.M.J.D., *Rapport Du Comite Executif De La F.M.J.D., 2me Congres De La Federation Mondiale De La Jeunesse Democratique*, Budapest, Septembre 1949, page 20—21].

Dalam konferensi ini, Indonesia diwakili oleh utusan Badan Kongres Pemuda RI, terdiri dari O. Rondonuwu, Soepeno (yang kemudian jadi anggota DPR GR dan tokoh pimpinan Kantor Berita Antara), dan Francisca Fanggidey (kemudian jadi anggota DPP Pemuda Rakyat dan anggota DPR GR).

Konferensi pemuda Kalkuta yang mengangkat tinggi semboyan anti imperialisme ini sering difitnah oleh pers Barat terutama Amerika Serikat sebagai konferensi komunis yang mengobarkan revolusi di Asia.

Buku Putih juga secara mengada-ada, menghubungkan-hubungkan Persetujuan Renville dan jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin dengan garis Dimitrov, dan dinyatakan bahwa “Kabinet Republik Indonesia beralih dari tangan PKI Amir Sjarifuddin ke tangan Wakil Presiden Mohammad Hatta, yaitu setelah Persetujuan Renville yang bersifat kompromistis mengikuti garis Dimitrov itu ditolak oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).”

Jatuhnya kabinet Amir tak ada hubungan dengan garis Dimitrov, tidak ada penolakan KNIP atas Persetujuan Renville, tapi adalah karena Masyumi yang menduduki lima portofolio dan mendukung Persetujuan Renville, dengan mendadak menentang Persetujuan Renville dan mengundurkan diri dari kabinet. Ini disusul oleh PNI. Amir Sjarifuddin meletakkan jabatan. Sesudah itu, Masyumi jadi pendukung utama kabinet Hatta yang menggantikan kabinet Amir. Dan kabinet ini justru menjadikan pelaksanaan Persetujuan Renville sebagai programnya. Latar belakangnya, bukanlah

karena garis Dimitrov, tapi karena mulai dijalankannya “Red Drive Proposals” untuk penyingkiran kaum komunis dari pemerintah Indonesia.

Buku Putih memaparkan bahwa, “Sementara itu meletuslah kerusuhan-kerusuhan di kota Surakarta. Terjadilah culik-menculik dan insiden-insiden bersenjata antar golongan yang saling bertentangan, yang kemudian hari terbukti memang sengaja diciptakan oleh PKI dalam rangka mengalihkan perhatian untuk menutupi persiapan pemberontakan Madiun.”

Jelas-jelas ini adalah fitnah. Tidak ada kenyataan yang membenarkannya. Mana bisa, PKI sengaja menciptakan insiden-insiden bersenjata? Memang terjadi penculikan-penculikan. Yang diculik adalah anggota-anggota PKI. Dimasukkan rumah tahanan negara. Penculiknya adalah para aparat negara. [Baca: Suar Suroso: *Peristiwa Madiun: Realisasi Doktrin Truman di Asia*, Hasta Mitra, 2010, hal.76].

Tentang Peristiwa Madiun, *Buku Putih* menulis: “18 September 1948, jam 03.00, di kota Madiun meletuslah tiga tembakan pistol sebagai tanda dimulainya pemberontakan Madiun yang dilakukan oleh PKI. Menurut sebuah dokumen yang ditemukan di rumah Amir Sjarifuddin di Jogjakarta ternyata pemberontakan itu telah dirancang sebelumnya. Kekuatan PKI di bawah pimpinan Soemarsono (Komandan Pesindo), Kolonel Djoko Sujono, Letnan Kolonel Dahlan, dan lain-lain, merebut kekuasaan di Madiun.”

Di samping itu, dengan semena-mena, *Buku Putih* memfitnah PKI telah dua kali berkhianat terhadap negara RI. Dinyatakannya: “Telah merupakan kenyataan bahwa dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, PKI setidak-tidaknya telah dua kali berkhianat terhadap negara Republik Indonesia dengan cara mengadakan pemberontakan. Pemberontakan yang pertama dilakukannya pada tahun 1948, dikenal sebagai Peristiwa Madiun.”

Lagi-lagi ini adalah fitnah. Tidak ada bukti tentang dokumen yang dimaksudkan di atas. Soemarsono dalam bukunya, *Revolusi Agustus: Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah*, secara terperinci menyatakan, bahwa Peristiwa Madiun bukanlah pemberontakan, tapi adalah bela diri atas provokasi yang dilancarkan Pemerintah Hatta.

Dan Suar Suroso dengan bukunya *Peristiwa Madiun: Realisasi Doktrin Truman di Asia*, terbitan Hasta Mitra, 2010, memaparkan latar belakang dan proses Peristiwa Madiun. Ditunjukkannya bahwa Peristiwa Madiun bukanlah pemberontakan PKI, tapi adalah pelaksanaan *Doktrin Truman, the policy of containment* – politik pembendungan komunisme yang dilancarkan Amerika di Asia. [Soemarsono: *Revolusi Agustus – Kesaksian Seorang Pelaku*

Sejarah, Hasta Mitra, Jakarta 2010]; [Suar Suroso: *Peristiwa Madiun: Realisasi Doktrin Truman di Asia*, Hasta Mitra, Jakarta, 2010].

Di samping itu, Departemen Agitprop CC PKI telah mengeluarkan *Buku Putih Tentang Peristiwa Madiun*, dan D.N. Aidit menyampaikan pidato pembelaannya di depan Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955 berjudul *Menggugat Peristiwa Madiun*. [D.N. Aidit: *Menggugat Peristiwa Madiun*, pidato pembelaan di depan Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955]; [Departemen Agitprop CC PKI: *Buku Putih Tentang Peristiwa Madiun*, disusun dan diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI, cetakan kedua, 1954.]

Dengan menghubungkan-hubungkan pada Doktrin Zhdanov dan Doktrin Dimitrov, *Buku Putih* secara sembrono menyatakan: “Resolusi Jalan Baru Bagi Republik Indonesia yang diprakarsai Musso yang disahkan Politbiro CC PKI 1 September 1948 sebagai anggota Kominform adalah bersumber pada Doktrin Zhdanov yang menggantikan Doktrin Dimitrov, yang dalam realisasinya melahirkan pemberontakan Madiun oleh PKI pada tanggal 18 September 1948.”

PKI bukanlah anggota Kominform. Anggota-anggota Kominform hanyalah PKUS, Partai-Partai Komunis semua negeri sosialis, dan Partai Komunis Perancis, serta Partai Komunis Itali. *Resolusi Jalan Baru Bagi Republik Indonesia* adalah self-kritik pimpinan PKI berkenaan dengan gagalnya Revolusi Agustus 1945. Resolusi ini mengkritik kesalahan-kesalahan PKI di bidang organisasi, politik, dan ideologi, menunjukkan jalan keluar yaitu pertama-tama menyatukan semua partai yang berideologi Marxisme-Leninisme menjadi satu partai, yaitu partai yang sudah mempunyai tradisi dalam perjuangan nasional, Partai Komunis Indonesia (PKI); mengoreksi kesalahan di bidang politik dan ideologi.

Resolusi Jalan Baru, tidak ada hubungan dengan perencanaan Peristiwa Madiun. Justru demi mencegah pelaksanaan resolusi inilah, pemerintah Hatta dengan Amerika Serikat di belakang layar, memprovokasi pecahnya Peristiwa Madiun. Dengan demikian rencana kongres penyatuan partai-partai itu tidak terlaksana dan pimpinan-pimpinan utama PKI termasuk Musso dan Amir Sjarifuddin terbunuh.

Menurut *Buku Putih*: “dalam melaksanakan program perjuangannya, PKI menggunakan cara dan sikap yang arogan (angkuh), sehingga pemerintah (kabinet Sukiman) pada tahun 1951 terpaksa memerintahkan penangkapan kader-kader PKI. Tindakan ini secara populer terkenal sebagai Peristiwa Agustus 1951.”

Peristiwa ini adalah *Razia Agustus Sukiman*, yaitu penangkapan besar-besaran atas kader-kader PKI di banyak tempat. Sungguh tidak masuk akal, *partai politik dinilai bersikap angkuh dalam melaksanakan programnya*. Yang terjadi adalah waktu itu meningkatnya aksi-aksi menentang politik pemerintah Sukiman yang membikin persetujuan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, yaitu persetujuan tentang keamanan *Mutual Security Act* (MSA) yang secara rahasia ditandatangani Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo. Persetujuan ini adalah dalam rangka usaha Amerika menarik Indonesia masuk pakta militer SEATO. Aksi-aksi rakyat di bawah pimpinan PKI menentang politik Masyumi inilah yang oleh *Buku Putih* dianggap PKI bersikap arogan (angkuh).

Puncak pemalsuan dan fitnah *Buku Putih* terhadap PKI dirumuskan sebagai berikut: *“Perebutan kekuasaan oleh PKI dengan Gerakan 30 September pada tahun 1965 itu bukanlah semata-mata suatu kebetulan belaka dan bukan pula sebagai suatu reaksi terhadap situasi tertentu melainkan justru pelaksanaan prinsip kaum komunis yang bersumber pada Materialisme Dialektika Historis Karl Marx.”*

Materialisme Dialektis dan Historis tidaklah mengajarkan cara perebutan kekuasaan seperti yang ditempuh Gerakan 30 September 1965. Perebutan kekuasaan politik menurut ajaran Marx haruslah ditempuh secara jalan revolusioner, yaitu dengan menggerakkan kekuatan massa rakyat yang sudah tidak mau dikuasai penguasa, dan menggulingkan kekuasaan yang sudah tidak mampu lagi menguasai massa. Sedangkan Gerakan 30 September 1965 adalah suatu *putch*, suatu cara penggulingan dan perebutan kekuasaan yang terlepas dari massa. Cara demikian ditentang oleh ajaran Marx. Dan jelas-jelas, Gerakan 30 September bukanlah aksi yang dilakukan di bawah pimpinan PKI.

Buku Putih Kopkamtib tidak hanya *“menghitamkan”* dan memfitnah PKI, tapi juga *“menghitamkan”* Bung Karno. *Buku Putih* menulis: *“Dr.Ir. Soekarno sendiri sebagai bapak dari Marhaenisme akhirnya berubah menjadi seorang Marxis.”*

Sesungguhnya, Bung Karno bukannya berubah jadi Marxis, tapi justru karena beliau adalah Marxis, makanya bisa merumuskan Marhaenisme. Sebagai pengagum Marx, semenjak remaja Bung Karno sudah keranjingan Marxisme. Dalam tahun 1926 telah tampil dengan gagasan persatuan antara tiga aliran Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Gagasan ini akhirnya menjadi gagasan Nasakom. Karena sangat gandrung akan persatuan bangsa, Bung Karno berusaha mewujudkan *nasakomisasi* di semua lapangan.

Menurut *Buku Putih*, setelah usaha ke arah *nasakomisasi* ABRI itu gagal, maka *“PKI menuntut supaya kaum buruh dan kaum tani, yakni dua*

golongan yang telah menjadi unsur-unsur PKI, dipersenjatai; Latihan kemiliteran bagi unsur-unsur PKI yang diselenggarakan oleh AURI di Lubang Buaya/Pondok Gede di lingkungan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah itu merupakan bagian dari persiapan G.30.S/PKI. Di sekitar daerah Lubang Buaya/Pondok Gede ini telah digali pula lubang-lubang sebagai persiapan penguburan para korban kelak. Ini terdapat juga di berbagai tempat lain di seluruh Indonesia. Seperti diketahui, kenyataan ini memang sesuai dengan rencana PKI untuk melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap lawan politiknya manakala G.30.S/PKI itu dapat berhasil sepenuhnya.”

Gagasan mempersenjatai buruh dan tani adalah realisasi pembentukan *“Angkatan Kelima”* di samping adanya Empat Angkatan: Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. *Gagasan Angkatan Kelima* ini bukanlah datang dari PKI, tetapi adalah gagasan Bung Karno yang didukung oleh PKI.

Latihan-latihan yang diselenggarakan AURI di Lubang Buaya / Pondok Gede adalah dimaksudkan untuk mobilisasi dalam rangka politik Bung Karno: Ganyang Malaysia. Yang mengikuti latihan itu terdiri dari para pemuda-pemudi dari kalangan berbagai organisasi yang berporos *nasakom*. Jelas-jelas, tidak ada hubungannya dengan persiapan G30S. Dan tidak ada penggalian lubang-lubang di sekitar Lubang Buaya seperti yang ditulis *Buku Putih*. Apalagi penggalian lubang-lubang di berbagai tempat lain di seluruh Indonesia. Ini adalah sungguh-sungguh kebohongan di siang bolong, pemalsuan sejarah yang memalukan.

Buku Putih menilai ajaran Bung Karno tentang persatuan nasional berporoskan *nasakom* hanyalah menguntungkan PKI dan merugikan golongan lainnya.

Justru dengan *nasakom*, tidak ada golongan yang ditinggalkan. *“Nasakom* adalah wadah yang diciptakan Bung Karno untuk mempersatukan kekuatan nasional melawan kolonialisme/imperialisme dan membangun tanah air. Nasakom disetujui oleh 10 partai politik yang ada di Indonesia dalam pertemuan di Istana Bogor pada tanggal 12 Desember 1964, antara lain: PNI, NU, PKI, Perti, Partindo, PSII, Murba, IPKI, Partai Kristen, dan Partai Katolik yang melahirkan Ikrar 4 Pasal sebagai berikut:

1. Mendukung politik konfrontasi dengan Malaysia,
2. Memelihara persatuan nasional yang progresif revolusioner berporoskan *nasakom*,
3. Menempuh musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah,
4. Membantah isu bahwa Bung Karno akan meletakkan jabatan.

[Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi yang Berhak*, cetakan kedua, Transmedia Pustaka, Jakarta 2008, hal. 164–165].

Buku Putih menyalahkan gagasan *nasakom* dari Bung Karno dan menuduh PKI tak bermaksud membangun negara berdasarkan Pancasila. Dikemukakan dalam *Buku Putih*: “Dr.Ir. Soekarno sejak mudanya terkenal sebagai pejuang besar untuk kemerdekaan bangsanya serta sebagai seorang nasionalis, akan tetapi dengan pendekatan yang dilakukan PKI, sedikit demi sedikit sejak tahun 1959 ia telah mulai mengubah dasar dan arah pandangan politiknya sehingga akhirnya menjadi seorang Marxis yang kemudian menetapkan konsepsi politik *nasakom* (nasionalis-agama-komunis).”

“Konsepsinya itu bertolak dari pemikiran bahwa kekuatan sosial politik Indonesia terletak dalam tangan golongan nasionalis, golongan agama, dan golongan komunis, dan bahwa ketiga golongan itu dapat bersatu padu, di bawah pimpinannya. Ia tidak mau mengakui dan seolah-olah melupakan bahwa Konstitusi PKI menyatakan bahwa tujuan mereka bukanlah membina negara RI yang berdasarkan Pancasila, melainkan membentuk negara komunis.”

Adalah salah menyatakan PKI tidak bermaksud membina negara RI berdasarkan Pancasila. Sejarah sidang-sidang Konstituante membuktikan, bahwa PKI bersama PNI adalah yang paling tangguh memperjuangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Dan dalam *Preambul Konstitusi* PKI tercantum: “PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 yang dalam *Pembukaan*-nya memuat *Pantjasila* sebagai dasar-dasar negara dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia.”

Buku Putih menuduh Bung Karno mengutamakan PKI, karena itu merugikan golongan lainnya. Mengenai ini dinyatakan: “Menurut penilaian Soekarno, PKI perlu dibawa serta aktif dalam perjuangan bangsa. Soekarno pura-pura tidak melihat adanya akibat buruk bagi golongan lain dalam kerja sama yang dipaksakan itu. Dengan konsepsinya itu, pada hakikatnya Soekarno melambungkan PKI ke tempat yang tinggi, yang tak mungkin tercapai oleh PKI dengan kekuatannya sendiri. Sebenarnya, hal ini sudah merugikan golongan lain itu. Dalam berbagai macam sikap dan tindakan serta ucapan pengakuannya sendiri pada beberapa kesempatan, di antaranya dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang MPRS yang berjudul ‘*Nawaksara*’ pada tahun 1966, Soekarno hanya mengutamakan kaum komunis sambil merugikan golongan lainnya.” (Huruf miring dari Pen.)

Ini adalah tuduhan yang tak beralasan dari *Buku Putih* terhadap Bung Karno. Ini adalah fitnah terang-terangan di siang bolong. Dengan fitnah

inilah, Bung Karno digulingkan oleh MPRS yang sudah dikebiri oleh rezim orba. Tidak betul pidato “*Nawaksara*” Bung Karno hanya mengutamakan kaum komunis sambil merugikan golongan lainnya. Pidato “*Nawaksara*” ini adalah pidato pertanggungjawaban Bung Karno sebagai Presiden, Pemimpin Besar Revolusi, yang memaparkan masalah-masalah *Ambeg Parama Arta* dalam memimpin perkembangan situasi ketika itu.

2. Karya Victor Miroslav Fic: *Kudeta 1 Oktober 1965*

PEMALSUAN sejarah yang sangat serius dilakukan oleh Victor Miroslav Fic. Menurut Fic, “asal-usul Gestapu 1965 justru terjadi di Zhongnanhai, Peking, Cina antara Aidit—Mao tanggal 5 Agustus, menyusul kabar kesehatan Presiden yang memburuk: jatuh pingsan sebanyak 4 kali tanggal 4 Agustus dan muntah-muntah sebanyak 11 kali akibat gangguan ginjal. Dan para dokter Cina yang merawatnya yakin bahwa satu serangan lagi, dapat saja membuat presiden meninggal atau lumpuh. Alhasil, suksesi menjadi persoalan mendesak yang tak terelakkan, karena pasti terjadi perebutan kekuasaan yang berdarah-darah antara PKI dan Angkatan Darat yang selama ini berseteru.

Nasihat Mao adalah: ‘Habisi para jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat lalu akan menjadi seekor naga yang tak berkepala dan akan mengikutimu....’

Dari Cina, Aidit begitu tiba di bandara, langsung menghadap presiden tanggal 7 dan 8 Agustus 1965.

Apa isi perjanjian rahasia antara Soekarno—Aidit—Mao, yang salah satunya presiden akan beristirahat panjang dengan alasan kesehatan di sebuah tempat yang nyaman di Danau Angsa, Cina.

Perjanjian rahasia Presiden—Mao dibocorkan secara tertulis oleh Aidit dalam suratnya tanggal 10 November 1965 pada kader partai: *Sosro dan Tjeweng*, jelas tidak membuktikan kesetiakawanan apalagi memenuhi janji yang telah diucapkan;sebab dari sana semua persetujuan Sosro dengan tetangga akan digugat terus ... dalam memperjuangkan konsep partai kita tidak peduli akan korban, bila perlu Sosro jadi korban, bila dia tidak memenuhi semua perjanjian; ... tapi harus diingat kekuatan kita sekarang hanya satu; perjanjian politik Sosro dengan tetangga; bila Sosro meninggalkan kita, berarti hukum karma berlaku;...‘mudah-mudahan Sosro dan Tjeweng tidak akan mengkhianati kita, ... bila nanti mereka berkhianat, maka dari negara tetangga perjanjian-perjanjian pasal yang telah kami sampaikan secara IR pada bulan Agustus yang lalu terpaksa diumumkan dan ini adalah berarti

lonceng kematian dan kehancuran bagi Sosro/Tjeweng” [Dari kulit buku Victor M. Fic, *Kudeta 1 Oktober 1965, Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005].

Fic mendasarkan pendapatnya di atas pada surat D.N. Aidit 10 November 1965. Pada surat tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan surat itu adalah palsu.

1. Kepala surat berjudul *Central Komite Partai Komunis Indonesia*. PKI tidak memakai istilah *Central Komite*, tapi *Komite Central*.
2. Kalimat pertama surat berbunyi: *Kawan seperjuangan kaum Marxis/Leninis*. Dalam berkorespondensi, CC PKI tidak biasa menggunakan kalimat ini. Dan PKI tidak biasa menuliskan istilah *Marxis/Leninis*, tetapi *Marxis-Leninis*.
3. Kalimat yang berbunyi “telah kami perhitungkan, namun jelas semua tindakan kaum reaksioner khususnya Dewan Jenderal dapat mengecilkan anggota Partai yang masih belum berpengalaman.” Kalimat ini tidak bisa dipahami isinya. Sesuatu yang tak mungkin ditulis oleh D.N. Aidit yang rapi bahasa Indonesianya.
4. Surat ini adalah surat pribadi D.N. Aidit, tetapi menggunakan kalimat: “3. Karena itu sekali lagi CC Partai menandakan, semua....” Ini adalah janggal.
5. Kalimat “bahwa 30 September adalah ‘En Rimpel in’t grote Ocean’” adalah bahasa Belanda yang salah ejaannya, memberi pengertian lain, satu kecerobohan tak mungkin atau sulit dilakukan oleh D.N. Aidit.
6. Kalimat: “Bila ketua berhijrah ke tetangga maka....” Untuk kata pengganti dirinya, adalah janggal jika D.N. Aidit menggunakan istilah *ketua*.
7. Dalam suratnya ini, D.N. Aidit menggunakan ejaan *DJ* sebagai singkatan *Dewan Jenderal*. Ini berarti D.N. Aidit sudah menggunakan Ejaan Baru Yang Disempurnakan oleh rezim orba. Pada tahun 1965, singkatan *Dewan Djenderal*, mestinya adalah *DD*. Karena itu, dengan sekian banyak kejanggalan dan kesalahan, surat D.N. Aidit tanggal 10 November 1965 ini adalah palsu. Maka isinya tak mungkin bisa dipercaya kebenarannya. Padahal isi surat itu adalah sangat penting: menyangkut keterlibatan Bung Karno, Subandrio, dan Negara Tetangga.

Dokumen No.3, dengan kepala surat “KOMITE-CENTRAL PARTAI KOMUNIS INDONESIA, KRAMAT RAYA 81 JAKARTA IV/4, Tel.: 448227”, juga ada kejanggalan-kejanggalan. Nomor telepon adalah salah. Istilah

KOMITE-CENTRAL, bukanlah ejaan yang biasa dipakai oleh PKI. Yang dipergunakan bagi Kepala Surat dan Envelop resmi CC PKI adalah:

KOMITE CENTRAL
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
Kramat Raja 81 – Djakarta IV/4
Telp: 4827 Gambir.

Surat yang bertanggal 28 September ’65, jadi sebelum terjadinya peristiwa 30 September, tapi sudah memberi petunjuk untuk pembubaran partai, persembunyian senjata, cara-cara upacara pembubaran partai di hadapan instansi. Ini semua sungguh tidak masuk akal. Dan surat ini sudah menggunakan Ejaan Baru Yang Disempurnakan. Karena itu, surat ini adalah palsu.

Victor M. Fic secara licik menggunakan *metodologi eklektika* dalam melakukan pemalsuan sejarah. Dipergunakannya sederetan fakta yang memang terjadi dalam kenyataan. Seperti: 5 Agustus 1965, Aidit bertemu dengan Mao Zedong di Zhong Nan Hai. Tapi isi pembicaraannya dikarang sendiri oleh Fic, karena ini tak bisa dibuktikan kebenarannya. Lebih-lebih lagi adalah tak masuk akal dalam pembicaraan itu, Mao Zedong menyuruh Aidit segera membunuh para jenderal pucuk pimpinan Angkatan Darat Indonesia. Adalah benar bahwa Aidit pulang ke Jakarta dan segera menemui Bung Karno melapor. Tapi isi laporannya dikarang sendiri oleh Fic, karena ini tak dapat dibuktikan kebenarannya.

3. Karya Jung Chang dan Jon Halliday: *Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui*

JUNG CHANG dalam bukunya berjudul *Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui* menulis “kegagalan paling parah—dan paling tragis—terjadi di Indonesia. Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai komunis paling besar di kubu non-komunis, dengan anggota sekitar 3,5 juta, dan mempunyai hubungan rahasia yang akrab dengan Peking seperti hubungan rahasia Komunis China dengan Stalin sebelum PKC menguasai China.”

“Di bulan September 1963, Chou Enlai membawa Ketua PKI Aidit ke pertemuan puncak rahasia di Chonghua di China Selatan, bersama pemimpin Vietnam, Ho Chi Minh, dan Ketua Partai Komunis Laos, untuk mengkoordinasikan strategi militer di Indonesia dengan perang di Indocina.

Pertemuan puncak ini meletakkan Indonesia dalam kesejajaran strategis dengan Indocina, dan menghubungkan perkembangan di Indonesia dengan konflik militer di Indochina yang telah berlangsung lebih dahulu.

Tahun berikutnya (1964), orang Mao No.2, Liu Shao-chi, pergi ke Vietnam untuk mencoba memperoleh dukungan Hanoi dalam rencana kudeta terhadap Presiden Soekarno. Ia menyatakan bahwa Soekarno lemah dan bahwa pihak kiri harus bertindak sebelum para perwira tinggi yang anti-Komunis dan pro-AS menggulingkannya. Ho Chi Minh menentang gagasan itu, dan berkata kepada Liu bahwa ia memutuskan untuk terus mendukung Soekarno [(Le Duan, Ketua Partai Komunis Vietnam, kepada delegasi Partai Komunis Italia pada bulan Januari 1979. Percakapan kami dengan Renao Foa, anggota Delegasi, 20 Desember 2006, lanjut ke hlm.651)]”

Tidak ada buktinya dan sungguh tidak masuk akal, Liu Shao-chi menemui Ho Chi Minh untuk mengajak bersatu buat menggulingkan Soekarno.

“Ketua Partai Komunis Jepang di masa itu, Kenji Miyamoto, berceritera kepada kami bahwa Peking terus-menerus berkata kepada PKI dan Partai Komunis Jepang: ‘Kapan saja ada kesempatan untuk merebut kekuasaan kalian harus bangkit dan mengangkat senjata.’ Di tahun 1964, Miyamoto mendiskusikan hal itu dengan Aidit. Sementara Komunis Jepang bersikap hati-hati, Aidit yang amat percaya kepada Mao sangat bersemangat untuk segera beraksi. Setelah konferensi di Aljazair dibatalkan, dengan hati panas Mao menggerakkan PKI untuk merebut kekuasaan.

Rencananya adalah membunuh para jenderal angkatan darat yang anti-komunis, yang boleh dikatakan tidak dapat dipengaruhi oleh Presiden Soekarno yang pro-Peking. Peking telah menekan Soekarno untuk melakukan perombakan radikal di kalangan Angkatan Darat. PKI yakin, bahkan terlalu optimis, bahwa secara rahasia ia dapat mengontrol lebih dari setengah Angkatan Darat, dua pertiga Angkatan Udara, dan sepertiga Angkatan Laut. Menurut rencana itu, begitu para jenderal dibantai, komunis akan mampu menguasai Angkatan Darat, mungkin dengan Soekarno yang untuk sementara memainkan peran sebagai pemimpin boneka.

Di awal bulan Agustus, Aidit datang ke China dan bertemu dengan Mao. Kemudian Aidit kembali ke Indonesia bersama tim dokter China yang beberapa hari kemudian melaporkan bahwa Presiden Soekarno (yang pro-Peking), menderita sakit ginjal parah, dan diperkirakan hidupnya takkan lama lagi, karena itu, jika PKI ingin bertindak sekaranglah saatnya.

Pada tanggal 30 September, sekelompok perwira menangkap dan membunuh Panglima Angkatan Darat Indonesia dan lima jenderal lain.

Berbicara kepada Ketua Partai Komunis Jepang Miyamoto, tak lama setelah peristiwa itu, Mao menyebut kudeta itu sebagai ‘kebangkitan ... Partai Komunis Indonesia.’ Tetapi PKI gagal menangani kejadian tak terduga yang menghancurkan seluruh rencana mereka. Seorang informan telah mengisiki seorang jenderal anti-komunis bernama Soeharto yang di masa itu belum dikenal dan tidak termasuk dalam daftar jenderal yang akan dibunuh. Karena itu, Soeharto, yang sudah siap menunggu terjadinya penangkapan dan pembunuhan jenderal lain sampai selesai, segera menguasai angkatan darat dan melancarkan pembunuhan terhadap ratusan ribu orang komunis dan simpatisan mereka – termasuk orang-orang yang tidak bersalah. Hampir semua pemimpin PKI ditangkap dan dibunuh. Hanya satu anggota Politbiro yang selamat, yaitu Jusuf Adijotorop yang waktu itu sedang berada di China dan yang kami temui di sana – sebagai lelaki yang amat kecewa – tiga dekade kemudian.”

Adalah tidak mungkin bahwa di tahun 1964 Miyamoto berdiskusi dengan D.N. Aidit mengenai sikap PKT yang mendesak-desak PKD dan PKI untuk melakukan pemberontakan. Demikian pula tidak benar bahwa Miyamoto ketemu Mao Zedong tak lama sesudah Peristiwa 1965. Pada waktu itu, hubungan yang buruk antara PKD dan PKT menyebabkan tidak ada hubungan antara PKD dan PKT.

Benar, bahwa Jusuf Adijotorop adalah anggota Politbiro CC PKI yang tinggal berobat di Beijing. Tapi tidak benar jika dikatakan dia menjadi sangat kecewa, karena sampai akhir hayatnya dia mendukung Otokritik Politbiro CC PKI dan dengan aktif memimpin Delegasi CC PKI di luar negeri.

Menurut buku Jung Chang, Presiden Soekarno segera dipaksa meletakkan jabatan. Jenderal Soeharto membangun pemerintahan diktator militer yang sangat anti-Peking dan memusuhi komunitas etnis China yang amat besar di negeri itu.

Mao menyalahkan PKI untuk kegagalan itu. “Partai Komunis Indonesia melakukan dua kesalahan,” katanya kepada Partai Komunis Jepang. *Pertama*, “mereka percaya sepenuhnya kepada Soekarno dan melebih-lebihkan kekuatan PKI di dalam tubuh angkatan darat.” Kesalahan *kedua*, kata Mao, “PKI ‘menyerah tanpa berjuang’.” [Bagian kata-kata Mao yang ini tidak dimuat di dalam versi yang dipublikasikan. Kami diizinkan untuk melihatnya oleh Komite Sentral Partai Komunis Jepang.]

Sesungguhnya pembantaian yang dilancarkan Soeharto sangat kejam dan sangat mendadak hingga tak mungkin bagi PKI untuk membalas menyerang. Ditinjau dari sudut mana pun, sesungguhnya Mao-lah yang harus disalahkan karena Mao-lah yang memulai gerakan itu demi alasan-

alasan yang berpusat pada dirinya sendiri. Ia tidak sabar, ingin segera memperoleh kemenangan setelah impiannya untuk menjadi pemimpin Asia—Afrika berantakan.” [Jung Chang dan Jon Halliday, *Mao: Kisah-Kisah yang Tak Diketahui*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm.650—652].

Jung Chang memfitnah Mao Zedong memulai gerakan Peristiwa 1965 di Indonesia, menyatakan bahwa Mao lah yang harus disalahkan. Jung Chang mendasarkan tulisannya pada keterangan dari Kenji Miyamoto, Ketua Partai Komunis Jepang, yang menyatakan Mao Zedong sering mendesak Partai Komunis Jepang dan Indonesia untuk melakukan pemberontakan.

Bukan kebetulan, Jung Chang menggunakan Kenji Miyamoto untuk mendukung pandangan-pandangannya menyalahkan Mao Zedong dan D.N. Aidit. Kenji Miyamoto adalah Ketua Partai Komunis Jepang semenjak kongres nasionalnya tahun 1958. Di bawah pimpinannya, PKD meninggalkan garis Sanzo Nosaka, yang berpegang pada jalan revolusioner memenangkan sosialisme di Jepang. Sanzo Nosaka telah berjasa membangun persahabatan antara PKD dan PKT. Di bawah pimpinan Kenji Miyamoto, garis Sanzo Nosaka dicampakkan, hubungan PKD dan PKT jadi rusak. Demikian buruknya hubungan kedua partai, hingga di mata pimpinan PKT, Kenji Miyamoto adalah seorang revisionis, dan klik revisionis Kenji Miyamoto adalah pengkhianat Marxisme-Leninisme yang memalukan. [Hung Jen-ta, *Kenji Miyamoto Revisionist Clique: Shameful Renegade to Marxism-Leninism*, Beijing Review, 1967-12-15].

Oleh karena itu, adalah sulit mempercayai kebenaran ucapan Kenji Miyamoto mengenai tindak-tanduk Mao Zedong, terutama mengenai pandangan Mao Zedong tentang Partai Komunis Jepang dan Indonesia. Tak bisa dibuktikan kebenarannya, bahwa Mao Zedong sering mendesak PKD dan PKI untuk melakukan pemberontakan. Dengan sikap-sikap PKD di bawah pimpinan Kenji Miyamoto yang dengan tegas menegasi dan menentang ajaran diktator proletariat dari Marx, mencampakkan Marxisme-Leninisme, maka jelas-jelas Kenji Miyamoto mengambil sikap berlawanan dengan pandangan-pandangan Mao Zedong. Oleh karena itu, mudah dimengerti bahwa Kenji Miyamoto menggunakan kesempatan wawancara dengan Jung Chang untuk mendiskreditkan Mao Zedong dan D.N. Aidit yang tangguh membela pandangan-pandangan PKT dan Mao Zedong.

Dalam bukunya setebal 959 halaman edisi luks itu, Jung Chang tidak hanya mendiskreditkan Mao Zedong dalam hubungannya dengan D.N. Aidit dan PKI, tapi juga menyatakan bahwa Mao Zedong dan Stalin (hal.464—475), memicu pecahnya Perang Korea; bahwa Mao Zedong tak

mau melancarkan perjuangan melawan agresi Jepang; dan Mao Zedong dituduh sebagai seorang pembunuh yang menyebarkan teror kejam (hal.306—326) hingga membunuh Liu Zhitan. Semuanya ini adalah pemalsuan sejarah yang terang benderang.

Bagi mereka yang sedikit mendalam mempelajari sejarah, gampang mengetahui, bahwa Perang Korea adalah pelaksanaan Doktrin Truman, *the policy of containment*, untuk membendung komunisme di Asia Timur; bagaikan bersuluh matahari, sejak semula Mao Zedong menyerukan dan memimpin rakyat Tiongkok melawan agresi Jepang, perang anti Jepang menjadi politik besar PKT bersekutu dengan Kuomintang melancarkan perang anti Jepang sampai menang dan Jepang bertekuk lutut.

Tidak benar dikatakan Mao Zedong membunuh Liu Zhitan dalam revolusi Tiongkok. Adalah Mao Zedong dan Zhou Enlai yang membebaskan Liu Zhitan dari penjara tahanan kaum oportunist “kiri” yang dipimpin Wang Ming. Dan Liu Zhitan diangkat menjadi Panglima Gabungan Tentara XXVI dengan Song Renqiong sebagai komisar politik. Dalam usia 33 tahun, Liu Zhitan gugur kena tembakan senapan mesin musuh dalam pertempuran di Desa San Jiao Zhen, Provinsi Shan Xi. Peristiwa ini disaksikan oleh pengawal pribadinya, Xie Wenxiang, dan Pei Zhouyu, anggota barisan pengawal khusus. Mao Zedong dan pemimpin-pemimpin Tiongkok lainnya, Zhu De, Zhou Enlai, Ye Jianying, menulis sajak dan kaligrafi memuji kepahlawanan Liu Zhitan sebagai pahlawan nasional Tiongkok. [Novel Biografi: *Liu Zhi Tan*, Gong Ren Chuban She, 1979].

4. Prof. Nugroho Notosusanto: PKI Dalang G30S; Pancasila Bukan Hasil Galian Bung Karno

PROF. Nugroho Notosusanto adalah pendukung tangguh rezim orde baru Soeharto. Dengan lantang dia membela pendirian, bahwa PKI adalah dalang G30S. Pandangannya dipaparkan bersama dengan Ismail Saleh dalam buku *The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia* [Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh, *The Coup Attempt of the “September 30 Movement” in Indonesia*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, August 1968]

Dalam buku ini dinyatakan, bahwa “karena alasan-alasan ideologi, jelaslah kalangan agama dengan sendirinya dianggap musuh oleh PKI. Tetapi PKI menganggap tentara sebagai musuhnya yang utama, bukan saja karena tentara merupakan ancaman fisik terhadap partai, tetapi juga atas dasar ideologi. Komunisme adalah asing bagi ideologi negara, Pancasila.

Komunisme berdiri atas dasar perjuangan kelas dan bertujuan menggulingkan setiap pemerintah non-komunis. Pancasila berpendirian untuk kerja sama yang saling menguntungkan dan toleransi. Dan satu dari lima prinsip Pancasila adalah percaya pada satu tuhan sedangkan komunisme berpendirian ateisme” [*Ibid*, hal.4].

Tidaklah benar PKI menganggap tentara sebagai musuhnya yang utama. Bukannya musuh, tetapi PKI menilai tinggi ABRI. D.N. Aidit dalam kuliahnya di Seskoad menyatakan bahwa: “Angkatan bersenjata RI adalah anti-fasis, demokratis, anti-imperialis, dan bercita-cita Sosialisme Indonesia. Ia adalah alat untuk mengabdikan Revolusi Indonesia, untuk mengubah masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis sebagai landasan untuk menuju ke sosialisme.” [D.N.Aidit: *Angkatan Bersenjata dan Penyesuaian Kekuasaan Negara dengan Tugas2 Revolusi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta 1964, hal.7]

Nugroho mempertentangkan komunisme dengan ideologi negara Pancasila, padahal dalam Preambul Konstitusi PKI dinyatakan bahwa “PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 yang dalam Pembukaan-nya memuat Pantjasila sebagai dasar-dasar negara dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia” [Comite Central Partai Komunis Indonesia, *AD-ART (Konstitusi) PKI*, Djakarta, 1962, hal.17].

Adalah benar bahwa PKI berjuang atas dasar perjuangan kelas, tapi tujuannya bukan menggulingkan setiap pemerintah non-komunis. Tujuan PKI dalam tingkat sekarang ialah mencapai sistem demokrasi rakyat di Indonesia, sedangkan tujuannya yang lebih lanjut ialah mewujudkan sosialisme dan kemudian komunisme di Indonesia.” [*Idem*, hal.6].

Pendirian Nugroho yang mempertentangkan Pancasila dengan komunisme adalah salah, karena UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara justru menjamin semua golongan dan aliran serta kepercayaan di bawah naungan negara Republik Indonesia.

Nugroho Notosusanto menyatakan bahwa Pancasila bukanlah hasil galian Bung Karno, tapi galian Mr. Muh. Yamin, karena Yamin lah yang pertama berpidato dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan mengemukakan lima asas dan dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Ini adalah pemalsuan sejarah di siang bolong. Adalah Bung Karno yang pertama kali memaparkan dasar-dasar negara nasional Indonesia, yang beliau beri nama Pancasila. Walaupun beberapa pembicara sebelumnya mengajukan pandangan mengenai dasar negara, tapi tak satu

pun mengajukan lima dasar negara dengan nama Pancasila, termasuk Muhammad Yamin, dan Prof.Dr.Soepomo.

III

PERANG DINGIN DEMI PEMBASMIAN KOMUNISME SEJAGAT

SEMENJAK diumumkannya karya Karl Marx dan Frederick Engels: *Manifes Partai Komunis* pada tahun 1848, borjuasi dunia mulai hidup berburu, membasmi hantu yang memusuhinya, *hantu komunis* yang muncul di dunia. Borjuasi disentak oleh ajaran baru, ajaran Marx yang membongkar rahasia sebab-musabab terjadinya kemiskinan yang melanda kaum pekerja. Marx dan Engels menunjukkan, bahwa borjuasi menjalankan sistem penghisapan manusia atas manusia, yang menjadi sumber kemiskinan bagi rakyat pekerja, dan menyerukan, agar kaum pekerja sedunia bersatu, bangkit berlawanan, mengalahkan borjuasi yang mempraktikkan sistem penghisapan manusia atas manusia, dengan menggulingkan kekuasaan politik borjuasi dan mendirikan kekuasaan politik kelas pekerja. Inilah *hantu* yang mengerikan bagi borjuasi, gagasan yang bermaksud menggulingkan kekuasaan politik borjuasi.

Gagasan yang dipaparkan dalam *Manifes Partai Komunis* dipraktikkan oleh kelas pekerja Perancis dengan menggulingkan kekuasaan borjuis dan menegakkan kekuasaan kelas pekerja: *Komune Paris*, pada tahun 1871. Dengan mengerahkan kekuatan bersenjata, borjuasi Perancis berhasil menumpas *Komune Paris*.

Tahun 1917, di bawah pimpinan Lenin, kelas pekerja Russia berhasil memenangkan Revolusi Oktober, menggulingkan borjuasi Rusia, mendirikan kekuasaan politik kelas pekerja, negara diktator proletariat pertama dalam sejarah. Berdirilah *Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis*

(URSS). Gagasan *Manifes Partai Komunis* diwujudkan dalam kenyataan, dengan berdirinya negara diktator proletariat URSS. Usaha borjuasi dunia untuk membasmi URSS berlangsung tak henti-hentinya semenjak lahirnya URSS.

Perang Dunia kedua usai dengan kekalahan fasisme Jerman, Itali, dan Jepang. Harapan borjuasi Barat agar URSS (Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis) ambruk dengan perang ini tidak terwujud. Malah URSS, bersama negara-negara Sekutu: Amerika, Inggris, dan Perancis tampil sebagai pemenang perang. Bahkan bermunculan negara-negara bercita-citakan sosialisme di negeri-negeri yang bebas dari kekuasaan fasisme atau dibebaskan Tentara Merah Sovyet: Albania, Bulgaria, Hongaria, Rumania, Cekoslowakia, dan Jerman Timur. Juga di daerah Balkan—Yugoslavia. Di Timur muncul Republik Rakyat Tiongkok, Republik Rakyat Demokrasi Korea, dan Republik Demokrasi Vietnam. Di Eropa, dalam pemerintahan Perancis duduk beberapa orang menteri komunis. Di Itali, Partai Komunis Itali maju dan menduduki tempat terkemuka dalam berbagai pemilihan. Pasukan gerilya rakyat di bawah pimpinan kaum komunis maju pesat di Yunani.

Perjuangan rakyat melawan penjajahan, melawan kapitalisme, membangun negara nasional yang bebas merdeka jadi mencuat di semua benua. Cita-cita sosialisme berkembang-biak di dunia. Penguasa Amerika Serikat di bawah pimpinan Presiden Harry Truman menilai perkembangan situasi ini sebagai bahaya perkembangan komunisme yang mengancam kemerdekaan Amerika. Amerika dilanda hantu *histeria anti-komunisme*. Demikian mengerikan bahaya ancaman komunisme itu dalam pikiran penguasa Amerika Serikat, hingga telah dibayangkan akan segera terjadi pendaratan pasukan Uni Sovyet di teritori Amerika.

Dalam Perang Dunia kedua, di bawah pimpinan Presiden Roosevelt dan Josef Stalin, terdapat kerja sama antara Amerika Serikat dan URSS sampai berlangsung Konferensi Yalta. Konferensi Yalta, kadangkala disebut Konferensi Krim dan memiliki nama sandi Konferensi *Argonaut Conference*, adalah sebuah konferensi menjelang usainya Perang Dunia II yang diadakan antara tanggal 4 sampai 11 Februari 1945. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin-pemimpin pemerintah Amerika Serikat, Uni Sovyet, dan Inggris. Mereka adalah Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill, dan Josef Stalin. Saat-saat menjelang wafatnya, Roosevelt tetap mempertahankan prinsip-prinsip putusan Konferensi Yalta.

"Selama perang, Roosevelt berusaha menempatkan Amerika Serikat dalam kedudukan netral, dalam posisi penengah dan wasit antara dua besar

sekutu, Inggris dan Rusia. Dia berpendapat bahwa tak akan ada perdamaian dunia se usai perang, jika tidak berlanjut persekutuan yang kuat, tak ada saling pengertian yang mendalam dan saling percaya antara ketiga mitra besar yang sudah menempa kemenangan perang—dan terutama antara dua yang paling perkasa dari ketiga sekutu, yaitu Amerika Serikat dan Russia.” [Fred J.Cook: *The War-Fare State*, hal.72—73, *with a foreword by* Bertrand Russel, The Macmillan Company, New York, London, Third printing, 1962].

Stalin menilai baik sikap dan usaha-usaha Roosevelt, dan berterima kasih kepadanya atas bantuan yang diberikan kepada Tentara Merah Sovyet. Kekaguman dan penghargaannya pada Roosevelt dan Amerika dia tunjukkan dalam sikapnya yang bersedia menerima baik pasukan Amerika bertempur di front Rusia “di bawah komando jenderal-jenderal Amerika”. [Robert E. Sherwood, *Roosevelt and Hopkins*, Harper, New York, 1948].

Dalam melawan fasisme Hitler, sejak awal Perang Dunia kedua, berlangsung kerja sama antara Uni Sovyet dan Amerika Serikat. Dalam pesannya 18 Februari 1942 kepada Roosevelt, Stalin menyatakan: “Saya sudah menerima pesan mengenai penyerahan senjata-senjata bulan Januari dan Februari. Saya menggarisbawahi, bahwa sekarang ini, ketika rakyat Uni Sovyet dan tentaranya sedang menumpahkan tenaga untuk memukul mundur pasukan-pasukan Hitler dengan ofensif yang gigih, maka penyerahan tank-tank dan pesawat terbang dari Amerika Serikat adalah masalah sangat penting demi usaha bersama kita dan untuk sukses-sukses kita selanjutnya.” [Correspondence Between the Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R. and the Presidents of the U.S.A. and the Prime Ministers of Great Britain During the Great Patriotic War of 1941—1945, volume two, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1957, hal.20].

Roosevelt menilai tinggi semangat rakyat Sovyet melawan fasisme Hitler. Hubungan baik dan kerja sama antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet semenjak awal perang ditunjukkan oleh telegram-telegram pribadi sangat rahasia dari Roosevelt kepada Stalin, 16 Maret 1942: “Tuan Harriman sudah menyerahkan pada saya catatan bertanggal 3 Oktober 1941. Saya sangat menghargai berita dari Tuan. Sudah dikirim sebuah telegram kepada Tuan menasihatkan Tuan bahwa kami bisa memasukkan Uni Sovyet ke dalam pengaturan ketentuan-ketentuan *pengaturan pinjam sewa*. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjamin Tuan sekali lagi, bahwa kami akan berbuat semua yang mungkin untuk mengirimkan suplai ini ke garis pertempuran Tuan. Keteguhan pasukan dan rakyat Tuan untuk mengalahkan Hitlerisme adalah suatu inspirasi bagi rakyat seluruh dunia.” (*Idem*, hal.22).

Dan selanjutnya, dalam telegram paling akhir: Roosevelt menyatakan: “Terima kasih atas keterangan Tuan yang terus terang mengenai pandangan Sovyet tentang insiden Berne, yang sekarang rasanya sudah melenyap jadi masa lampau tanpa berbuat tujuan yang berguna. *Dalam setiap peristiwa, tidaklah seharusnya terjadi saling tak percaya; dan kesalah-pahaman kecil-kecilan semacam itu tidaklah seharusnya terjadi di masa depan. Saya merasa yakin, bahwa di kala pasukan-pasukan kita bersama-sama bertempur di Jerman dan dengan ofensif yang terkoordinasi sepenuhnya, pasukan-pasukan Nazi akan berantakan*” (*Idem*, hal.214).

12 April 1945, Roosevelt wafat. Besoknya, dengan menilai tinggi jasa Roosevelt, Stalin berkirim telegram kepada Presiden Truman menyatakan: “Saya menyatakan kepada pemerintah Amerika Serikat perasaan sedih yang sangat dalam atas wafatnya dengan tiba-tiba Presiden Roosevelt. Rakyat Amerika telah kehilangan seorang tokoh, Franklin Delano Roosevelt, seorang negarawan besar terkenal di dunia dan juara perdamaian dan keamanan sehabis perang. Pemerintah Uni Sovyet menyatakan simpati yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Amerika yang berada dalam kesedihan karena kehilangan ini, dan pada kepercayaan mereka bahwa politik kerja sama antara negara-negara besar yang sudah lahir dan memikul pukulan peperangan melawan musuh bersama akan tetap dikembangkan di masa depan” (*Idem*, hal.214).

Perang Dunia kedua sudah di ambang kehancuran fasisme. Roosevelt digantikan oleh Harry Truman. Lain Roosevelt, lain lagi Truman.

Admiral William Daniel Leahy, Kepala Staf Kepresidenan Roosevelt membimbing Truman semenjak hari-hari pertamanya bertugas sebagai Presiden. Leahy adalah pembantu Roosevelt dalam waktu panjang mengenai masalah-masalah Uni Sovyet. Leahy terkenal sebagai penggagas berbagai *kebijaksanaan yang keras* terhadap Uni Sovyet. Leahy adalah pendukung kuat kebijaksanaan “*senjata dan uang*”-nya Truman terhadap Yunani.

Sebelas hari sesudah wafatnya Roosevelt, mulai berlangsung ketegangan mengenai kedatangan Molotov dalam rangka persiapan Konferensi San Fransisco untuk pembentukan PBB. Truman mengira, bahwa Uni Sovyet tidak akan mengirim delegasi tingkat tinggi. Ternyata, Stalin memutuskan untuk mengirim Menteri Luar Negeri, Molotov. Menghadapi kedatangan Molotov, Truman mengadakan rapat untuk meminta pendapat mengenai cara menghadapinya. Yang hadir adalah: Menlu Edward Stettinus Jr., Menteri Peperangan Henry L. Stimson, Menteri Angkatan Laut Forrestal, Admiral Ernest, Charles Bohlen, Harriman, dan Jenderal Mayor John

R. Deane, Kepala Misi Militer AS di Moskow. Dari antara mereka hanyalah Stimson yang mempunyai sikap kenegarawanan, dan hanya dia yang menunjukkan pandangan yang mempunyai pengertian yang dapat mencegah Perang Dingin.

Admiral Leahy yang hadir dalam Konferensi Yalta mendampingi Roosevelt berpendapat bahwa “dia meninggalkan Yalta dengan kesan bahwa pemerintah Sovyet tidak mempunyai niat untuk adanya pemerintah Polandia yang bebas, dan bahwa dia akan merasa heran jika pemerintah Sovyet bersikap lain dari itu. Tapi dia mengharapkan agar masalahnya diajukan kepada Rusia dengan sedemikian rupa bahwa pintu pemberian bantuan tidak akan tertutup.”

Forrestal mengemukakan pendapat dengan garis keras yang tanpa kompromi terhadap Russia. Dia berpendapat: *“Kita harus membikin perhitungan dengan mereka sekarang juga.”*

Forrestal, bersama dengan Menteri Peperangan Henry Stimson dan Wakil Menlu Joseph Grew pada awal tahun 1945, dengan kuat membela politik lebih lembut terhadap Jepang yang bisa mengizinkan perundingan perletakan senjata, suatu penyerahan yang “menyelamatkan muka”. Yang menjadi perhatian utama bagi Forrestal bukanlah kebangkitan kembali militerisme Jepang, tapi adalah *“bahaya ancaman komunisme Rusia serta usahanya untuk memecah-belah, mendestabilisasi masyarakat Asia dan Eropa, dan oleh karena itu, harus mengusahakan agar Uni Sovyet jangan terlibat perang melawan Jepang.”*

Pandangan-pandangan Forrestal merangsang Truman. Truman menyatakan bahwa dia merasa “persetujuan-persetujuan dengan Uni Sovyet selama ini hanyalah bersifat satu arah,” dan ini tak dapat diteruskan. Dia menyatakan bermaksud *“jalan terus dengan rencana Konferensi San Fransisco, dan jika Rusia tidak mau ikut, mereka bisa pergi ke neraka.”* [Fred J.Cook, *The War-Fare State*, hal.83].

Leahy dan Bohlen adalah saksi-saksi dalam penyambutan terhadap Molotov. Pada kesempatan itu Truman tak kenal ampun mendamprat Molotov. Mengenai ini, kemudian Leahy menulis, bahwa bahasa Truman yang “blak-blakan tanpa pupur dengan sopan-santun kata-kata diplomasi” adalah “tidak menyenangkanku.” [Admiral William Daniel Leahy, *I Was There*, New York and London, Whittlesey House, 1950, *Autobiography*].

Sikap Uni Sovyet yang menampilkan *goodwill* dibalas dengan tampikan kasar. Ini sulit menjadi dasar persahabatan selanjutnya. *“Jika suatu tanggal ditetapkan menjadi awal Perang Dingin, maka tanggal inilah yang dipakai—23 April 1945, sebelas hari sesudah wafatnya Roosevelt.”* [Fred Cook, *Idem*, hal.84].

IV

DOKTRIN TRUMAN *THE POLICY OF CONTAINMENT*

TAHUN 1948, Presiden Harry Truman menyetujui anggaran belanja militer miliaran dolar lebih rendah di bawah permintaan angkatan bersangkutan. Ini menempatkan Forrestal dalam kedudukan bagaikan “tarik-tambang” antara presiden dan gabungan kepala staf. Forrestal juga menjadi bertambah khawatir mengenai ancaman Sovyet. Masa 18 tahun menduduki jabatan Menteri Pertahanan adalah saat-saat sulit bagi lembaga militer Amerika Serikat: Pemerintah Komunis naik panggung di Cekoslowakia dan Tiongkok, Uni Sovyet melakukan blokade terhadap Berlin Barat yang menyebabkan Amerika mengerahkan Berlin Airlift (jembatan udara) untuk memberi suplai bagi kota tersebut, perang antara negara-negara Arab dan Israel sesudah berdirinya negara Israel, dan perundingan-perundingan tengah berlangsung mengenai pembentukan NATO.

Perebutan kekuasaan begitu banyak di Eropa Timur yang diilhami oleh komunis Sovyet, kampanye militer dan politik yang didukung oleh Sovyet melawan pemerintah Yunani, Itali, dan Perancis, kemenangan komunis yang akan datang di Tiongkok, invasi atas Korea Selatan oleh komunis Korea Utara menunjukkan tepatnya pandangan-pandangan Forrestal. Dwight D. Eisenhower mencatat bahwa dia sependapat dengan teori-teori Forrestal mengenai bahaya ekspansi Sovyet dan komunis internasional. Eisenhower mengingatkan, bahwa Forrestal adalah “seorang yang di tengah-tengah berlangsungnya perang, selalu mengedepankan kewaspadaan terhadap Uni Sovyet. Eisenhower ingat akan berbagai kesempatan, ketika dia menjabat

Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu, dia dikunjungi oleh Forrestal, yang dengan hati-hati menjelaskan tesis-tesisnya, bahwa *kaum komunis tidak akan pernah berhenti mencoba menghancurkan semua negara yang representatif*. Eisenhower mencatat dalam buku hariannya tanggal 11 Juni 1949, “Saya tidak pernah merasa sangsi akan ketepatan kesimpulannya mengenai hal ini.” [Immerman, James, *The CIA in Guatemala*, Univ. of Texas Press, 1982].

Dalam pembentukan *the policy of containment* Amerika Serikat, dalam bulan Februari 1946 dari Kedutaan Besar AS di Moskow, Duta Besar George Kennan, mengirim *telegram panjang* yang kemudian dipublikasi sebagai Artikel X bulan Juli 1947. Telegram ini memaparkan hal berikut: “*Dalam membangun pemulihan ekonomi dan menegakkan kepercayaan politik rakyat Eropa Barat dan Jepang demi mereka bisa mempunyai daya tahan terhadap tekanan-tekanan komunis setempat—dan untuk menunjukkan kepada mereka yang di Kremlin dengan cara begini supaya mereka tidak berhasil memperluas kekuasaan dengan intrik-intrik politik dan intimidasi, hingga mereka tak dapat berbuat demi kepentingannya tanpa berhadapan dengan kita, dan seterusnya, di kala keseimbangan politik sudah diciptakan, lanjutan bisa berunding dengan Moskow mengenai penyelesaian politik secara umum.*”

isi telegram ini menunjukkan perlawanan terhadap penguasa Kremlin, menunjukkan supaya dilakukan *containment*, *pembendungan* terhadap perluasan kekuasaan komunis. Teori *containment* yang semula ditujukan untuk Eropa dan Jepang, segera berkembang meluas ke daerah-daerah lainnya termasuk Indonesia.

Tanggal 17 Desember 1948, Kennan, yang ketika itu adalah direktur dari *Policy Planning Staff* dari Kementerian Luar Negeri menyatakan kepada Menteri Luar negeri AS, George C. Marshall, bahwa “*masalah yang paling gawat pada waktu itu dalam perjuangan kita menghadapi Kremlin adalah mungkin problem Indonesia.*” Bagi Kennan, masalahnya diringkaskan menjadi soal *kedaulatan republik, atau kekacau-balauan.*” Dan dia mengingatkan Menteri Luar Negeri Marshall, kekacau-balauan berfungsi sebagai “*pintu terbuka buat komunisme.*” [Ibid, 25].

Jadi dengan motivasi *ketakutan akan perluasan daerah komunis* dan adanya hingar-bingar pendapat umum orang Amerika, yang bersimpati pada kekuatan nasionalisme dan anti-kolonialisme, maka Amerika Serikat mengambil peranan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia.

Pada 7 Februari 1949, Amerika mengancam untuk menarik bantuan Plan Marshall bagi Belanda jika tidak menghentikan kegiatan militer melawan Indonesia. Republik Indonesia berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Ada yang berpendapat, bahwa malangnya, pada waktu itu, sekali lagi Amerika dibingungkan oleh Kremlin dan medan pertempuran Perang Dingin di bagian bumi lainnya, hingga gagal mengembangkan politik luar negeri yang menyeluruh untuk menggunakan keunggulan dan merebut kesempatan yang ditunjukkan oleh negeri demokrasi yang baru muncul itu, yang kaya sumber alam, berkedudukan strategis, berkebudayaan aneka ragam, beragama yang moderat. Dalam kenyataannya, politik luar negeri Amerika selama lebih enam puluh tahun terhadap Indonesia tidaklah tegas, dan sering saling bertentangan. Maka akibatnya, Indonesia bukanlah sekutu yang kuat, Indonesia dewasa ini memandang Amerika dengan mata yang berpurbasangka. Sesudah Soeharto turun panggung dari 32 tahun kekuasaan militer, Amerika kini menghadapi pemusnahan kaum Islam fundamentalis, menggantikan penghancuran “gerombolan komunis”. [Eddie R.Howard, Lt.Col. USAF, *US Relations With Indonesia : A Second Chance To Get It Right*, 29 Januari 2008].

Mantan pejabat CIA, Ralph McGhee, penulis buku *Deadly Deceits-My 25 Years in the CIA* menulis sejumlah artikel dalam tahun 1980 sampai awal 1990, di mana dipaparkannya bahwa CIA dan pejabat Kementerian Luar Negeri AS terlibat dalam menyusun nama-nama orang PKI yang diserahkan kepada tentara untuk kemudian dipergunakan dalam pembasmian mereka. Walaupun ada dari kalangan CIA yang membantah, tapi sangat sedikit kesangsian, bahwa *CIA benar-benar ambil bagian aktif dalam penggulingan Soekarno*.

Truman telah memaparkan sederetan prinsip politik Amerika Serikat yang dikenal kemudian sebagai *Doktrin Truman*. Truman menyatakan bahwa Amerika Serikat, sebagai pemimpin dari *dunia bebas, haruslah mendukung kapitalisme di seluruh dunia dan berjuang melawan komunisme*. Sikap ini didukung oleh George Marshall dan Dean Acheson, yang menggeneralisasi harapan buat Yunani dan Turki menjadi satu *doktrin yang dapat dilaksanakan di seluruh dunia*. Jelas-jemelas, Uni Sovyet adalah inti dari pikiran Truman, tapi tak dinyatakan terang-terangan dalam pidatonya ini. Truman berusaha memecahkan masalah ketidakstabilan Eropa Timur sambil memastikan bahwa komunisme tak akan menyebar masuk negeri-negeri Yunani dan Turki. Pandangan Truman ini didasarkan pada isi telegram George Kennan, Duta Besar Amerika di Moskow waktu itu. Dari isi telegram itu sebagai inti, lahirlah *Doktrin Truman*, yang isinya dipaparkan dalam pidato Truman berikut ini.

12 Maret 1947, Presiden Truman berpidato di depan sidang gabungan Senat dan Congress Amerika. Antara lain Truman mengemukakan: “Ini

menyangkut politik luar negeri dan keamanan nasional. Pemerintah Amerika sudah menerima seruan mendesak dari pemerintah Yunani untuk mendapatkan bantuan keuangan dan ekonomi. Keadaan sesungguhnya yang dihadapi pemerintah Yunani sekarang adalah masalah ancaman dari kegiatan teroris beberapa ribu orang bersenjata di bawah pimpinan komunis, yang merongrong kekuasaan pemerintah di berbagai daerah terutama sepanjang perbatasan utaranya. Saya sepenuhnya memaklumi bahwa jika Amerika Serikat memberikan bantuan kepada Yunani dan Turki akan ada pengaruhnya yang luas. Salah satu tujuan utama dari politik luar negeri Amerika adalah menciptakan syarat-syarat agar kita dan bangsa-bangsa lainnya dapat menempuh cara hidup bebas dari tekanan-tekanan. Ini adalah masalah pokok dalam perang dengan Jerman dan Jepang. Kemenangan kita adalah kemenangan atas negeri-negeri yang memaksakan kemauannya, memaksakan cara hidup mereka atas negeri dan bangsa-bangsa lain. Untuk menjamin perkembangan damai bangsa-bangsa di dunia, bebas dari tekanan-tekanan, Amerika Serikat telah ambil bagian penting dan memimpin pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rakyat di sejumlah negeri akhir-akhir ini mengalami tekanan dari rezim-rezim totaliter yang memaksakan kemauan atas mereka. Pemerintah Amerika Serikat sudah melakukan berbagai protes menentang kekerasan-kekerasan dan intimidasi yang melanggar Persetujuan Yalta mengenai Polandia, Rumania, dan Bulgaria. Saya harus menyatakan bahwa perkembangan hal yang sama juga terjadi di negeri-negeri lainnya.

...

Dewasa ini dalam sejarah dunia hampir setiap bangsa harus memilih cara hidup mereka sendiri. Pilihan ini sering tidaklah bebas. Suatu cara hidup adalah didasarkan pada kemauan mayoritas, dan diwujudkan dalam lembaga-lembaga yang bebas, pemerintahan yang representatif, pemilihan umum yang bebas, jaminan bagi kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat dan beragama, bebas dari penindasan politik. Cara hidup yang lain adalah didasarkan pada kemauan minoritas yang memaksakan kehendaknya atas mayoritas. Ia bersandar pada teror dan penindasan, pers dan radio yang diawasi, pemilihan yang ditetapkan, dan penindasan atas kebebasan pribadi. Saya percaya bahwa politik Amerika Serikat adalah mendukung rakyat-rakyat yang bebas, yang berjuang melawan usaha-usaha penundukan oleh minoritas bersenjata atau tekanan-tekanan dari luar. Saya percaya bahwa kita harus membantu rakyat-rakyat yang bebas, mencapai tujuan mereka dengan cara mereka sendiri. Dunia tidak statis, dan *status quo* tidaklah abadi. Tetapi kita tidak bisa membiarkan perubahan *status quo* dengan melanggar

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan menggunakan cara kekerasan atau dengan cara main dalih atau infiltrasi politik.

Dalam membantu bangsa-bangsa bebas dan merdeka mempertahankan kebebasan mereka, Amerika Serikat akan berpegang pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika Yunani jatuh ke bawah kontrol minoritas bersenjata, maka akan memberi pengaruh pada tetangganya, Turki, dan bisa segera dan serius. Kebingungan dan kekacauan akan menyebar ke seluruh Timur Tengah. Lebih-lebih lagi, lenyapnya Yunani sebagai satu negara merdeka akan memberi pengaruh mendalam bagi negeri-negeri Eropa yang rakyatnya tengah berjuang melawan kesulitan besar mempertahankan kemerdekaan mereka dan usaha pemulihan negeri mereka dari korban peperangan. Jika kita gagal membantu Yunani dan Turki, akibatnya akan mencapai jauh ke Barat bahkan ke Timur.

Hakikat sesungguhnya dari masalah Yunani dewasa ini adalah ancaman dari kegiatan teroris beberapa ribu orang bersenjata yang dipimpin oleh orang-orang komunis, yang merongrong kekuasaan pemerintah, terutama di perbatasan utaranya.”

Yang dimaksud Truman dengan ancaman terhadap Yunani dan Turki adalah datangnya *kekuatan komunis*.

V

POLITIK *ROLLBACK*, PENINGKATAN *THE POLICY OF* *CONTAINMENT*

POLITIK *rollback* muncul sebagai perlawanan Partai Republik atas *containment* gagasan Partai Demokrat. Di balik strategi yang baru ini terdapat ide melakukan ofensif untuk mendorong mundur komunisme, ketimbang hanya defensif menahan (membendungnya). Pengambil inisiatif dari *politik rollback* ini adalah John Foster Dulles. Kemudian *politik rollback* Dulles ini dilaksanakan oleh pemerintahan Ronald Reagan selama tahun 1980-an dan bermuara pada menghasilkan rontoknya daerah kekuasaan Sovyet, berantakannya kubu komunis di Eropa Timur, dan hancurnya Uni Sovyet itu sendiri.

Dalam bahasa strategi Amerika, *rollback* adalah politik untuk membasmi seluruh pasukan musuh dan menduduki negerinya, seperti yang pernah berlangsung dalam Perang Dalam Negeri Amerika hingga membentuk Konfederasi, dan dalam Perang Dunia kedua seperti menghadapi Jerman dan Jepang yang sampai ditaklukkan.

Ungkapan *rollback militer* terhadap Uni Sovyet diusulkan oleh James Burnham dan para ahli strategi lainnya pada akhir tahun 40-an, dan oleh pemerintahan Truman dilaksanakan dalam melawan Korea Utara dengan melangsungkan Perang Korea. Banyak perdebatan waktu itu mengenai masalah apakah Amerika akan menjalankan strategi *rollback* melawan

komunisme di Eropa Timur dalam tahun 1953—1956, putusannya adalah *tidak*.

Sebagai penggantinya, AS memulai pelaksanaan *program jangka panjang dengan perang psikologi* untuk merontokkan pemerintah komunis dan pro-komunis serta dengan membantu pemberontakan-pemberontakan. Usaha-usaha ini sudah dimulai semenjak tahun 1945 di Eropa Timur, termasuk memberi bantuan senjata bagi pejuang-pejuang untuk kemerdekaan di negara-negara Baltik dan Ukraina. Usaha lainnya juga berlangsung di Albania semenjak tahun 1949, menyusul kehancuran kekuatan bersenjata komunis dalam perang dalam negeri Yunani tahun itu. Dalam hal ini, agen-agen yang didaratkan, diselundupkan oleh Inggris dan Amerika Serikat untuk memicu perang gerilya, tetapi gagal. Operasi ini sudah dikhianati oleh agen ganda Inggris, Kim Philby, yang menyebabkan tertangkap dan dibunuhnya agen-agen tersebut. Proses yang ternyata berhasil meruntuhkan pendudukan Sovyet di Afghanistan tahun 1980-an.

Dalam Perang Korea, Amerika Serikat dan PBB secara resmi menjalankan *politik rollback* – menghancurkan pemerintah Republik Rakyat Demokrasi Korea, mengirim pasukan PBB melewati garis lintang 38 derajat untuk menduduki Korea Utara.

Strategi *rollback* Amerika menyebabkan Tiongkok mengirim pasukan sukarela memasuki Korea, memukul kembali pasukan PBB sampai ke garis lintang 38 derajat. Kegagalan strategi *rollback*, menyebabkan Amerika, Jenderal Douglas MacArthur kembali menempuh pelaksanaan *the policy of containment tanpa rollback*.

Dalam bulan November 1950 berlangsung *Operation Paper*, termasuk mempersenjatai dan menyuplai senjata bagi sisa-sisa pasukan Kuomintang Divisi 93 di bawah komando Jenderal Li Mi di Timur Birma, untuk menduduki provinsi Yunnan, mengalahkan pemerintah komunis setempat. Semua pasukan Li Mi terbasmi, dan sesudah kegagalan ini, Amerika menarik bantuannya lebih lanjut.

Eisenhower dan Dulles

JURUBICARA Partai Republik, John Foster Dulles, memelopori dalam memajukan *politik rollback*. Dalam tahun 1949 dia menulis: “Kita harus menjelaskan kepada jutaan rakyat di Eropa Timur dan Asia bahwa kita tidak menerima *status quo* yang ditetapkan Uni Sovyet dengan melakukan agresi dengan *komunisme yang agresif yang dipaksakan* pada mereka, oleh karena itu

masalah pembebasan adalah satunya yang esensial dan bagian jangka panjang dari politik luar negeri kita.”

Dalam tahun 1952, pimpinan nasional Partai Republik menegaskan posisi ini ketika Dwight D. Eisenhower terpilih menjadi presiden, Dulles diangkat menjadi Menteri Luar Negeri. Penasihat Eisenhower, Charles Douglas Jackson, untuk mengoordinasi perang psikologi melawan komunisme.

Radio Free Europe, sebuah lembaga swasta yang dibiayai Congress beroperasi dengan diarahkan ke Eropa Timur untuk menyerang komunisme. Suatu strategi alternatif dari *rollback* adalah *containment*, pemerintah Eisenhower menerima politik *containment* melalui putusan NSC dengan dokumen NSC 162/2 dalam bulan Oktober 1953, ini berarti meninggalkan pelaksanaan *rollback* di Eropa.

Tanggal 30 Oktober 1953, Presiden Eisenhower menyetujui dokumen NSC 162/2, dokumen sangat rahasia yang menegaskan bahwa gudang persenjataan nuklir Amerika tetap dipertahankan dan diperluas untuk menghadapi ancaman komunis. Dokumen itu memperingatkan bahwa Uni Sovyet sudah mempunyai cukup senjata nuklir yang mampu “melumpuhkan dasar industri Amerika”. Walaupun tampaknya dalam waktu dekat Sovyet tidak akan menggunakannya, tidaklah berarti bahwa Amerika bisa mengurangi usahanya untuk menimbun “senjata nuklir secukupnya”.

Amerika Serikat harus membikin jelas kepada Uni Sovyet dan Tiongkok komunis, bahwa Amerika mempunyai maksud untuk memberi reaksi dengan kekuatan militer terhadap setiap agresi yang dilakukan kekuatan bersenjata kubu Sovyet. “Senjata nuklir tersedia untuk dipergunakan sebagaimana senjata lainnya”. NSC 162/2 menunjukkan ketergantungan Amerika Serikat untuk menangkal agresi komunis selama tahun-tahun kekuasaan Eisenhower. Eisenhower juga meluncurkan politik luar negerinya yang disebut “*New Look*”, yang berarti lebih tergantung pada senjata nuklir berjuang dalam Perang Dingin.

Eisenhower bersandar pada aksi-aksi rahasia CIA untuk meruntuhkan pemerintah-pemerintah kecil yang tak bersahabat dengan Amerika, dan menggunakan bantuan ekonomi serta militer untuk memperkuat pemerintah-pemerintah yang mendukung posisi Amerika dalam Perang Dingin. Dalam pelaksanaan *politik rollback* dalam bulan Agustus 1953 berlangsung *operasi Ajax* dengan kerja sama dengan Inggris, dibantu militer Iran dalam merestorasi kekuasaan Syah Iran.

Pelaksanaan politik *rollback* mendapat ujian ketika pemerintah Hongaria di bawah Imre Nagy dalam tahun 1956 menentang kekuasaan Uni Sovyet di Hongaria dengan menyatakan menarik diri dari Pakta Warsawa, dan menyerukan pada pemerintah Barat untuk membantu melawan invasi Uni Sovyet. Ini adalah satu pemberontakan terhadap kekuasaan Uni Sovyet. Waktu itu Eisenhower membayangkan bahwa pelaksanaan *politik rollback* dengan memberi bantuan, akan mendatangkan bahaya terpicunya perang nuklir dengan Sovyet. Dan Menteri Luar Negeri Dulles mengira Imre Nagy adalah memihak Uni Sovyet. Ternyata Nagy digulingkan oleh Janos Kadar, Hongaria kembali ke dalam Pakta Warsawa dan tak terjadi penggulingan kekuasaan negara sosialis di Hongaria. Tanpa menjalankan *politik rollback*, Amerika tetap menjalankan *the policy of containment* terhadap Hongaria.

Doktrin Reagan

DALAM pemerintahan Ronald Reagan, di tahun 1980-an, gerakan *rollback* mendapat kebangkitan berkat desakan dari *Heritage Foundation* dan lembaga-lembaga berpengaruh yang konservatif, mulai menyalurkan pengiriman senjata membantu kekuatan dan gerakan anti-komunis di Afganistan, Angola, Kamboja, Nikaragua, dan negeri-negeri lainnya, dan meluncurkan invasi yang sukses dalam tahun 1983 di Nicaragua yang berhasil menggulingkan pemerintah yang menamakan dirinya Marxis. Ini adalah contoh gemilang melaksanakan *politik rollback*, menggulingkan pemerintah beraliran Marxis.

Intervensi pemerintah Reagan terhadap negeri-negeri Dunia Ketiga dikenal sebagai *Doktrin Reagan*. Dalam berbagai medan pertempuran *rollback*, Uni Sovyet memberikan banyak konsesi, bahkan mundur dari Afganistan yang dikuasainya.

Arus kegoncangan nasionalistis melanda negeri-negeri Uni Sovyet pada tahun 1989. Lima belas negara anggota URSS menyatakan undang-undang mereka tidak tunduk pada Uni Sovyet, menyatakan diri sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Tanggal 25 Desember 1991, Uni Sovyet resmi membubarkan diri. Inilah penggulingan komunisme di Eropa, *pelaksanaan politik rollback* yang dilaksanakan Ronald Reagan di Eropa.

Doktrin-Doktrin anti komunis Truman – *the policy of containment*, Doktrin Dulles-Eisenhower *politik rollback*, yang dianut dan dilaksanakan oleh semua Presiden Amerika menyusul Eisenhower: Richard Nixon, Lindon Bayne

Johnson, J.F. Kennedy, Ronald Reagan, George W. Bush, dan seterusnya; diikuti oleh indoktrinasi histeria anti-komunis yang intensif. Histeria anti-komunis yang dikobarkan sejak tahun 20-an, disusul dengan kampanye anti komunis McCarthyisme, pandangan-pandangan Barry Goldwater.

Demikian intensifnya indoktrinasi anti-komunis itu hingga, William Blum dalam, bukunya *Killing Hope – US Military and CIA Interventions Since World War II*, Zed Book menulis: “Selama empat tahun se usai Perang Dunia kedua, banyak orang Amerika, termasuk pejabat-pejabat tingginya menyimpan pandangan bahwa Perang Dunia kedua adalah ‘perang yang salah, melawan musuh yang salah’. Sesungguhnya, *musuh sejati Amerika adalah komunisme*. Membasmi komunisme adalah tugas sejarah Amerika. Mestinya, Nazi Hitler dibantu untuk mengarahkan serangan ke Timur, membasmi habis komunisme di muka bumi.” [Baca, William Blum, *Killing Hope – US Military and CIA Interventions Since World War II*, Zed Books, London, 1986]

Terhadap Indonesia, sejak masa revolusi Agustus 1945, Republik Indonesia yang dipimpin Presiden Soekarno tetap berada dalam perhatian Amerika Serikat. Ketakutan akan Indonesia dilanda kekuasaan komunisme sudah menggelisahkan Amerika. Tampilnya Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri, menyebabkan Amerika menggalakkan usaha untuk menggusurnya. Dengan “*Red Drive Proposal*”-nya, Indonesia jadi dilanda *Peristiwa Madiun* yang berdarah. Inilah realisasi *the policy of containment*, Doktrin Truman, di Indonesia menyusul sukses pelaksanaannya di Yunani dan Itali. Dalam Peristiwa Madiun ini, generasi pertama pimpinan tertinggi PKI, Musso, Amir Sjarifuddin, dapat dibasmi.

Tapi PKI tidaklah punah. Seiring dengan perkembangan gerakan kiri sedunia, di bawah generasi kedua pimpinan tertinggi PKI dengan D.N.Aidit, MH Lukman, dan Njoto, serta Sudisman sebagai tokoh-tokoh terkemukanya, PKI berkembang pesat dan tampil jadi partai besar keempat memenangkan Pemilihan Umum 1955 untuk parlemen; dan jadi partai pertama dalam pemilihan umum 1957 untuk Dewan-Dewan Perwakilan Daerah.

Gagasan Bung Karno persatuan nasional berporos *nasakom*, adalah sesuai dengan haluan strategi PKI, memenangkan sosialisme lewat jalan damai. Perkembangan PKI yang diiringi oleh politik luar negeri Bung Karno dengan gagasan *nasakom* dalam arena internasional sungguh mengkhawatirkan Amerika Serikat. Dan kalau jadi berlangsung pemilihan umum menurut rencana semula, kawan dan lawan meramalkan, bahwa PKI akan mendapat kemenangan besar. Ini sungguh mengkhawatirkan Amerika Serikat. Atas usaha Nasution, Angkatan Darat pun bertindak menolak berlangsungnya

pemilihan umum tersebut, hingga jadi ditunda.

PKI maju terus dengan aksi-aksi politik yang merugikan Amerika. Mulai dari mengumandangkan semboyan *imperialisme Amerika adalah musuh utama rakyat Indonesia*, sampai diikuti oleh aksi-aksi mengambil alih perusahaan kapital Belanda dan akhirnya kapital raksasa Amerika: Stanvac, Good Year, Caltex, Shell, dan lain-lain. Sebelum itu, Bung Karno menunjukkan perlawanan terhadap Amerika dengan mengumandangkan seruan “*Go to hell with your aids!*” Tak ayal lagi, *vonis pembasmian komunis Indonesia dan penggulingan Bung Karno* pun dilaksanakan.

Amerika tak berhasil membasmi komunisme di Korea dengan tiga tahun Perang Korea. Amerika babak belur dalam Perang Vietnam tahun enam puluhan, walaupun mengerahkan seperempat juta pasukan, juga tak berhasil membasmi komunis Vietnam. Inilah puncak-puncak Perang Dingin di Asia. *Indonesia tak boleh dibiarkan jatuh ke tangan kekuatan komunis. Inilah akar pembasmian komunis dan penggulingan Bung Karno di Indonesia.*

Dengan dikorekturkannya bendera merah berpalu-arit dari puncak istana Kremlin, Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis (URSS) buyar, lenyap dari peta politik dunia. Awal tahun 1992 dalam pedato kenegaraannya, Presiden George Bush memproklamkan: “*Perang Dingin sudah usai, Komunisme sudah mampus, dan kita menang!*” [Suar Suroso, *Bung Karno Korban Perang Dingin*, Hasta Mitra, Jakarta 2007, hal.1].

Kenyataannya, gerakan komunisme tidaklah punah. Maka arwah penganut *Perang Dingin* masih gentayangan di dunia. *The policy of containment* – politik membendung komunisme masih tetap melanda dan menghantui dunia. Termasuk menghantui Indonesia. *Inilah akar dari pembasmian kaum kiri, pembasmian kaum komunis, pelarangan Partai Komunis Indonesia dan Marxisme-Leninisme di Indonesia. Dan inilah akar penggulingan Bung Karno yang berideologi kiri.*

VI

AKAR PERANG DINGIN

SIKAP Truman yang sangat tangguh *anti komunisme* dipaparkan lagi lebih jelas dalam pidato inauguralnya, 20 Januari 1949, saat mau menjabat Presiden Amerika Serikat, untuk masa jabatan kedua.

Truman menyatakan, “Rakyat-rakyat di dunia menghadapi masa depan dengan ketidak-pastian yang gawat, yang terdiri dari menghadapi harapan besar yang sama juga dengan ketakutan besar. Dalam kebimbangan itu, melebihi dari masa lalu, mereka memandang Amerika Serikat dengan kemauan baik, harapan, kekuatan dan pimpinan yang bijaksana. ... Kita percaya, bahwa semua orang mempunyai hak untuk keadilan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama untuk kebaikan. Kita percaya bahwa semua orang mempunyai hak kebebasan untuk berpikir dan menyatakan pendapat. Kita percaya bahwa manusia diciptakan sama, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Kita tidak akan bergeser dari keyakinan ini.”

“Rakyat Amerika menginginkan, dan bertekad bulat bekerja untuk satu dunia yang di dalamnya semua bangsa dan semua rakyat adalah bebas untuk memerintah dirinya sendiri sesuai dengan keinginan sendiri, dan ingin mencapai penghidupan yang layak dan memuaskan. Di atas segala-galanya, rakyat kita menginginkan dan bertekad untuk berbuat demi perdamaian di dunia – satu perdamaian yang adil – berdasarkan persetujuan sejati yang dicapai dengan kesamaan.”

“Untuk mencapai tujuan ini, Amerika Serikat sebagaimana bangsa-bangsa lainnya menempatkan dirinya secara langsung bertentangan dengan rezim yang mempunyai tujuan sebaliknya dan secara keseluruhan berbeda

dalam gagasan hidup. Negara tersebut menganut filsafat palsu yang mengaku memberikan kebebasan, keamanan, dan kesempatan yang lebih besar bagi kemanusiaan. Disesatkan oleh filsafat ini, banyak rakyat sudah mengorbankan kebebasan mereka yang hanya diimbali dengan kesedihan, kebohongan, kemiskinan, dan tirani.”

“Filsafat palsu tersebut adalah komunisme.

Komunisme didasarkan pada kepercayaan bahwa manusia adalah lemah, tidak sempurna dan tidak mampu mengatur diri sendiri, oleh karena itu diperlukan pengaturan penguasa-penguasa yang kuat.

Komunisme membolehkan seseorang ditangkap ditahan tanpa hukuman yang memenuhi hukum, tanpa pengadilan, dan kerja paksa dipakai sebagai alat kekuasaan negara. Negaralah yang menetapkan informasi apa yang bisa diterima, karya seni apa yang boleh dihasilkan, pemimpin mana yang harus diikuti, dan pandangan apa yang harus dipikirkan.

Komunisme berpendapat bahwa dunia sudah terbagi demikian dalam menjadi kelas-kelas yang bertentangan hingga peperangan adalah tak dapat dihindarkan.”

Saya memaparkan ini bukanlah hanya untuk sekedar mempercayainya, tetapi karena tindakan-tindakan akibat dari filsafat komunis adalah satu ancaman terhadap usaha bangsa-bangsa merdeka untuk mewujudkan pemulihan dunia dan perdamaian yang abadi.” [Harry S. Truman, *Inaugural Address, Thursday, January 20, 1949*].

Truman tidak ragu-ragu memalsu bahkan memfitnah tentang pengertian akan komunisme. Tanpa menggubris filsafat Marxis *Materialisme Dialektis* dan *Materialisme Historis* yang ilmiah dan *Ekonomi Politik Marxis* yang bertujuan *melenyapkan penindasan manusia oleh manusia, melenyapkan l'exploitation de l'homme par l'homme*, Truman menuduh filsafat Marxis itu menyesatkan.

Yang *menyesatkan* bukanlah filsafat komunisme, tapi pemahaman Truman tentang komunisme. *The policy of containment–Doktrin Truman*–dimaksudkan bukan hanya untuk membendung tapi malah untuk membasmi komunisme secepat. *Di mana saja muncul komunisme haruslah dibasmi.* Inilah *Akar Perang Dingin*. Itulah yang terjadi, yang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Pandangan anti-komunisme bukan hanya dikumandangkan Truman. John Foster Dulles juga tampil sebagai tokoh anti komunis yang tangguh. Semua Presiden Amerika menyusul Truman: Dwight Eisenhower, Richard Nixon, J.F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, dan seterusnya, adalah anti-komunis. Di samping itu terdapat Joseph McCarthy, Allen W. Dulles, Barry Goldwater, James Burnham, ... tokoh-tokoh tangguh anti komunisme.

Dalam tahun 1956 di Hongaria terjadi perubahan politik yang dianut pimpinan Partai Komunis Hongaria, Imre Nagy. Imre Nagy ingin membebaskan diri dari ikatan Pakta Warsawa. Berbeda dengan Eisenhower, Barry Goldwater berpendapat menghadapi peristiwa Hongaria itu, Amerika seharusnya terjun mengintervensi, kalau perlu siap dengan menggunakan senjata nuklir. Dia mengkritik Eisenhower, karena ingin dan bersedia bertemu dan berunding dengan Khrushchyov. Dia menentang pemilikan umum atas alat-alat produksi, karena itu dianggapnya adalah *sistem sosialis*.

Pembantu Goldwater, melukiskan Goldwater dalam buku-bukunya sebagai *konservatif yang sadar*, Goldwater dinilai sebagai *pembawa panji politik anti-komunis yang tak kenal kompromi*. Dia menganggap, kaum komunis mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menguasai setiap jengkal bumi raya. Menurut dia “ancaman komunis tumbuh setiap hari”, dia menuduh sementara pimpinan Amerika “secara sia-sia mencari cara untuk berbaik-baik dengan Uni Sovyet dengan mengorbankan nilai kebanggaan nasional.”

Goldwater mengumumkan, bahwa Amerika sedang berperang melawan “musuh yang tak pernah menyembunyikan tujuannya untuk menghancurkan kita dan semua rakyat yang cinta damai.”

Dinyatakannya, bahwa “kemenangan adalah kunci untuk semua problem,” dan, “pilihan lainnya adalah kekalahan.”

Ditambahkannya lagi: “Strategi kita haruslah pertama-tama berwatak ofensif. Kita harus menyatakan, bahwa gerakan komunis dunia adalah di luar hukum dalam masyarakat bangsa-bangsa berbudaya. Oleh karena itu, kita harus mencabut pengakuan diplomatik terhadap semua negara komunis, termasuk Uni Sovyet.

Dan ditulisnya: “Kita harus,—kita sendiri—siap melancarkan operasi militer melawan rezim komunis yang mudah diserang.” [*Macrohistory and World Report*].

Menurut buku Francis P. Sempa, *The First Cold-Warrior*, John Foster Dulles dan George Kennan mempercayai strategi James Burnham (1905—1987) pada awal Perang Dingin. James Burnham adalah salah seorang tokoh anti-komunis yang tangguh, yang semula pengikut aliran Trotskis Amerika. James Burnham banyak menulis buku dan artikel anti komunis yang analitis dan bersifat teori. Tulisan-tulisannya diikuti oleh Dulles dan Kennan.

Sesudah diperkenalkan *the policy of containment*—Doktrin Truman, sebelum dan sesudah masa kekuasaan Eisenhower, Dulles menampilkan politik *rollback* terhadap kekuasaan Sovyet. Kennan secara rahasia mengusulkan kepada pemerintah Truman suatu program ambisius untuk melangsungkan perang politik terorganisasi melawan Uni Sovyet, termasuk

melakukan operasi-operasi sabotase, subversif, propaganda, dan membantu kekuatan perlawanan di seluruh negeri yang dikuasai Uni Sovyet.

Dulles meninggalkan *operasi rollback* sesudah kebangkitan pemberontakan di Jerman Timur, Polandia, dan Hongaria tidak mendapat sambutan dari Amerika. Tapi Kennan dan Dulles mengenal baik tulisan-tulisan James Burnham. Para anti-komunis yang liberal seperti Arthur Schlesinger menerima analisa Burnham mengenai adanya ancaman Sovyet, tapi tidak menerima seruannya untuk menjalankan politik ofensif. Bagi para anti-komunis yang konservatif, karya-karya James Burnham, trilogi *Perang Dingin* dinilai sangat tinggi. Seperti George Nash menunjukkan bahwa “Burnham adalah satu-satunya yang menyuplai gerakan intelektual konservatif dengan rumusan-rumusan teoretis untuk mencapai kemenangan dalam Perang Dingin.”

Tulisan-tulisan Burnham yang sangat anti-komunis mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Misalnya Charles Clayton Morrison menilai *The Struggle for the World* adalah suatu “blueprint untuk penghancuran”. Harry Elmer Barnes menyebutnya, satu “buku anti-Amerika yang paling berbahaya”. George Orwell menuding Burnham seorang yang memuja kekuasaan.

Karyanya *The Coming Defeat of Communism* mendapat tentangan dari James Reston, David Spitz, R.H.S. Crossman, dan Louis Fisher. Burnham mengutamakan perhatiannya pada perkembangan komunisme di Amerika. Dia adalah penganut “McCarthyism”. Dia menyerukan untuk *pelarangan Partai Komunis di Amerika*.

Di samping menulis buku-buku dan artikel mengenai Perang Dingin, Burnham memberi kuliah pada National War College, the Naval War College, the School for Advanced International Studies, dan the Air War College. Dia adalah konsultan pada lembaga CIA dan mempunyai peranan dalam merencanakan penggulingan Mohammad Mossadegh yang sukses serta memulihkan kekuasaan Shah di Iran pada awal tahun 1950-an.

Burnham mempunyai kemampuan menunjukkan perkembangan situasi dunia dari segi pandangan komunis Sovyet. Di sini, dia bisa memanfaatkan masa lampaunya sebagai seorang penganut aliran Trotskis. Burnham adalah salah satu contoh bagaimana seorang eks-komunis mengajukan pandangan anti-komunis yang paling intelijen dan realistik.

Yang paling penting adalah pandangan strategis Burnham untuk memenangkan *Perang Dingin*. Inti dari strategi itu adalah melancarkan perang politik, psikologi, dan ekonomi terhadap Uni Sovyet dengan tujuan memperlemah bahkan memecah pengawasannya atas Eropa Timur dan Tengah.

Unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Ofensif ideologi dan propaganda melawan kekuasaan Sovyet.
2. Membantu para pembangkang dan grup-grup perlawanan di dalam daerah kekuasaan Sovyet.
3. Menggunakan kekuatan ekonomi dan teknologi untuk menimbulkan ketegangan dalam ekonomi Sovyet yang lemah.
4. Menggunakan perang psiko-politik untuk mendorong ketakutan dan perpecahan di antara para tokoh-tokoh pimpinan Sovyet.
5. Menggunakan perdagangan dan senjata-senjata ekonomi lainnya untuk memperlemah perekonomian Sovyet dan
6. Memaksa Sovyet untuk terjerumus ke dalam defensif geopolitik.

Ofensif Pemerintah Reagan di tahun 80-an adalah sehaluan persis dengan strategi Burnham, yaitu melancarkan ofensif ideologi dan propaganda yang seru melawan Sovyet, menyatakan pemimpin-pemimpin Sovyet pembohong dan penipu, meramalkan kehancuran Sovyet dalam waktu dekat, dan menantang pemimpin Sovyet untuk merobohkan *Tembok Berlin*. Reagan memberikan bantuan dan mendorong gerakan Solidaritas Polandia dan pemberontak Afganistan. Reagan membangun kekuatan militer Amerika Serikat, sedia menggunakan peluru kendali berkepala nuklir di Eropa, dan mengumumkan plan Strategic Defense Initiative (SDI), jadi memberikan tekanan tambahan pada ekonomi Sovyet yang sudah keropos. Dengan demikian berusaha meyakinkan Sovyet, bahwa mereka tak akan menang dalam perlombaan senjata dengan Amerika Serikat.

John Foster Dulles yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan Eisenhower menganggap *the policy of containment* itu adalah defensif. Dia berpendapat, menghadapi perkembangan komunisme haruslah aktif dan ofensif. *Tidak hanya dibendung, tapi harus dibasmi*. Dia tampil dengan gagasan *rollback*.

VII

CARA-CARA CIA MEMBASMI KEKUATAN ANTI IMPERIALISME

PERISTIWA pembunuhan tahun 1965, pembasmian komunis dan kaum kiri di Indonesia, bukanlah kejadian pembantaian manusia satu-satunya dalam sejarah.

Tahun 1950, gerilya anti Jepang yang seusai Perang Dunia kedua berkembang jadi gerilya bersenjata di bawah pimpinan Huk Balahap di Filipina dibasmi lewat pembantaian, kekerasan bersenjata di bawah pimpinan CIA. Dari penyimpulan pengalamannya membasmi gerilya di Filipina, CIA merumuskan gagasan *Operasi Phoenix*. Operasi ini dijalankan di Vietnam untuk membasmi gerilya di bawah pimpinan Partai Komunis Vietnam lewat pembunuhan besar-besaran.

Cara-cara pembasmian komunis dan kaum kiri ini menjadi bahan pendidikan di akademi militer Fort Leavenworth yang mendidik perwira-perwira Vietnam Selatan dan Indonesia. Dari Indonesia terdapat antara lain: Jenderal Ahmad Yani, Brigjen. Soewarto, Sarwo Edhie, dll. Pada tahun 1965 di Indonesia sudah terdapat dua ribu perwira hasil didikan akademi-akademi militer Amerika.

William Colby, mantan Direktur CIA menyatakan, bahwa *program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah sama dengan Program Phoenix*. Para pembunuh, teroris-teroris ini dididik dan dilatih di sekolah-sekolah *Western Hemisphere Institute For Security Cooperation*, yang dulunya *The School*

of The Americas, Ft. Benning, Georgia dan *The Counter-Insurgency Training Center*, Ft. Bragg, Fayetteville, N.C. [Baca *The Real Phoenix Program*, Posted By: *tenavision* Date: Friday, 6-Jan-2006 12:38:49]

Program Phoenix diramu oleh Kepala Divisi Timur Jauh CIA, William Colby, dilaksanakan oleh Kepala Kantor CIA, William Casey. Tom Ridge, Oliver North, dan Bob Kerry adalah di antara mata-mata pelaksana *Program Phoenix*. Di sekitar tahun enam puluhan, beberapa orang pengajar masalah kontra-pemberontakan datang di Indonesia memberi latihan. Latihan militer Amerika Serikat ini dilakukan dengan rahasia karena Washington menganggap pemimpin negeri ini yang netralis, Soekarno, adalah dicurigai secara politik. Latihan hanya diperbolehkan agar Amerika Serikat mendapat pengaruh dalam militer Indonesia yang dianggap dapat disandari.

Bantuan dan latihan yang diberikan Amerika secara rahasia, yang bagian terbesarnya diberi nama yang tidak menakutkan "*civic action*", yang umumnya diperkirakan berarti untuk membangun jalan, memberi tenaga untuk klinik-klinik kesehatan dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya dengan pekerja sipil berupa kegiatan-kegiatan saling-bantu. Tetapi "*civic action*" juga memberi syarat untuk kerja rahasia di Indonesia, demikian pula di Filipina dan Vietnam, yaitu untuk perang syaraf.

Untuk menangkal Partai Komunis Indonesia yang kuat, Beret Merah Angkatan Darat melancarkan pembunuhan ratusan ribu manusia, pria dan wanita, serta kanak-kanak. Begitu banyak mayat dilemparkan masuk sungai-sungai di Jawa Timur hingga airnya menjadi merah oleh darah. Dalam taktik perang syaraf klasik, mayat-mayat yang telanjang juga mengabdikan untuk peringatan bagi para penduduk di desa-desa di hilir sungai.

"Supaya tidak tenggelam, mayat-mayat itu secara sembarangan diikatkan pada pancang-pancang bambu," tulis saksi mata Pipit Rochijat.

"Dan hanyutnya mayat-mayat itu dari daerah Kediri ke daerah hilir Kali Brantas mencapai tujuan pentingnya dengan mayat-mayat itu ditumpuk di atas rakit berhiaskan panji-panji PKI berkibar dengan bangga." [Baca: Rochijat, *Am I PKI or Non-PKI?*, Indonesia, Oktober 1985].

Sementara penulis sejarah, menghubungkan kekerasan yang luar biasa ini dengan sikap tentara yang keterlaluan kegila-gilaan yang bertindak dengan "kekejaman yang tak direncanakan" atau "histeria massa" yang menyebabkan berlangsungnya pembunuhan sampai hampir setengah juta orang Indonesia, banyak di antaranya adalah turunan Tionghoa.

Tetapi taktik yang berulang-kali menempatkan mayat secara menakutkan itu adalah cocok dengan doktrin perang syaraf militer, yang

menurut seorang perwira pimpinan para pembunuh, itu adalah satu bentuk isyarat tuntutan untuk pembasmian PKI.

Sarwo Edhie, komandan para komando yang terkenal dengan pasukan Beret Merah, memberi peringatan, bahwa perlawanan komunis “jangan diberi kesempatan untuk berkonsentrasi atau mengonsolidasi diri. Secara sistematis harus dipukul mundur dengan segala cara, termasuk perang syaraf.” [Baca: *The Revolt of the G30S/PKI and Its Suppression*, diterjemahkan oleh Robert Cribb dalam *The Indonesian Killings*].

Sarwo Edhie sudah dikenal sebagai seorang penghubung CIA, ketika dia bertugas di Kedutaan Indonesia di Australia. [Baca: *Pacific*, May-June 1968].

Dalam *The Very Dark Side of U.S. History, Consortium News / By Peter Dale Scott and Robert Parry*, Oct. 8, 2010, dipaparkan bahwa dalam memoarnya, Lansdale membual mengenai salah satu trik perang syaraf yang legendaris, yang dipergunakan melawan gerilya Huk, melawan mereka yang dianggap percaya akan takhayul dan takut pada makhluk seperti vampir penghisap darah, yang disebut dalam bahasa penduduk setempat *asuang*.

“Pasukan *psy-war* melakukan penghadangan di jalan yang biasanya ditempuh oleh rombongan gerilya Huk,” tulis Lansdale. “Ketika rombongan patroli Huk itu lewat di tempat penghadangan, pasukan *psy-war* dengan diam-diam menangkap orang yang paling belakang dari rombongan patroli Huk itu. Karena malam gelap, peristiwa ini tak diketahui oleh rombongan patroli itu. Orang yang ditangkap itu dibunuh, dengan diberi dua lubang di lehernya, sepertinya bekas gigitan vampir penghisap darah, ditegakkan mayat itu diatas tumitnya, dikeringkan darahnya, dan dibawa kembali mayat itu ke jalan semula.

Ketika rombongan gerilya Huk itu kembali mencari temannya yang hilang, menemukan mayat kawan mereka tanpa darah, maka setiap anggota patroli Huk itu akan percaya, bahwa *asuang* sudah menghisap darahnya.” [Baca: Lansdale, *In the Midst of Wars*].

Inilah operasi perang syaraf untuk menakut-nakuti gerilya Huk.

“Taktik khusus dari pasukan adalah mengepung suatu daerah, semua yang ada dalam daerah kepungan itu dianggap sebagai musuh,” kata seorang kolonel Filipina yang pro Amerika. “Hampir setiap hari didapati mayat mengapung di sungai, banyak di antara mereka adalah korban dari kesatuan Nenita dari pasukan mayor Napoleon Valeriano. [Baca: Benedict J. Kerkvliet, *The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines*].

Kurt Nimmo menulis dalam *CIA Assassination Program Revealed: Nothing New Under the Sun*, bahwa program pembunuhan besar-besaran di Indonesia adalah didasarkan pada pengalaman-pengalaman CIA di Filipina. Para

penasihat militer Amerika dari *Joint US Military Advisory Group* (JUSMAG) dan Kantor CIA di Manila merencanakan dan memimpin penindasan berdarah terhadap kekuatan nasionalis Hukbong Mapagpalaya ng Bayan [Catatan Roland G Simbulan, *Operasi Rahasia dan CIA, Hidden History in the Philippines*].

Sebuah petunjuk perintah CIA mengenai pembunuhan menyatakan bahwa adalah perlu membunuh seorang pemimpin politik yang kariernya jelas menunjukkan bahaya bagi usaha kemerdekaan. CIA tidak memilih-milih ketika melakukan pembunuhan sejumlah besar orang di Indonesia. Sesudah membasmi komunis di tahun 1965, perwira-perwira militer Indonesia memimpin pasukan mereka melikuidasi Partai Komunis Indonesia dan akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno.

Peter Dale Scott menulis, bahwa tugas terbesar membasmi PKI dan pendukungnya yang berlumuran darah yang sekarang diakui oleh para sahabat Soeharto sudah mengorbankan lebih dari setengah juta jiwa. Untuk pertama kalinya pejabat-pejabat Amerika mengakui bahwa tahun 1965 secara sistematis mereka telah menghimpun daftar nama pimpinan komunis dari pimpinan atasan sampai kader-kader desa. Sebanyak 5.000 nama diserahkan kepada tentara Indonesia, dan kemudian diperiksa oleh pejabat Amerika nama-nama mereka yang ditangkap dan dibunuh, menurut pejabat-pejabat Amerika. [Kathy Kadane menulis untuk *South Carolina's Herald Journal* on May, 1990].

Semua program CIA semenjak Perang Vietnam, sesungguhnya adalah kelanjutan dari *Program Phoenix*. Ke dalamnya termasuk operasi penyeludupan senjata dan narkotik di Iran; operasi di Nicaragua yang dikendalikan oleh William Casey dan Oliver North; serangan atas Panama yang mengakibatkan 20.000 orang mati. Masih dapat disebutkan tentang kejadian-kejadian di Amerika Selatan dan Tengah, Irlandia, Kroatia, Serbia, Kosovo, Makedonia, Montenegro, Afganistan, *Indonesia* yang selama empat bulan dengan 500.000 terbunuh, nama-nama orang yang akan dibasmi dikumpulkan pejabat Kedutaan Besar AS dan diserahkan pada Soeharto yang naik berkuasa lewat kup CIA, pasukan Soeharto mendapat bimbingan dan diberi bantuan jeep, senjata, radio-radio lapangan. Sinyal siaran pesan-pesan radio *single side band* KWM-2s dapat dimonitor *National Security Agency*.

Para penasihat militer dari *Joint US Military Advisory Group* (JUSMAG) dan kantor CIA di Manila merencanakan dan memimpin penindasan berdarah terhadap gerakan nasionalis Hukbong Mapagpalaya ng Bayan (HMB) yang seusai Perang Dunia kedua menentang dengan keras

amendemen *Parity Rights* dan persetujuan militer yang berat sebelah dengan Amerika Serikat. Berhasilnya CIA mematahkan pemberontakan Huk yang berlandaskan kaum tani di tahun 1950, menjadikan operasi ini satu model untuk operasi-operasi kontra pemberontakan di masa depan di Vietnam dan Amerika Latin. Kolonel Lansdale dan koleganya, Kolonel Napoleon Valeriano, kemudian menggunakan pengalaman kontra-gerilyanya di Filipina ini untuk mendidik mata-mata para pekerja rahasia di Vietnam dan di sekolah yang diselenggarakan Amerika, yang melatih pembunuh-pembunuh kontra-gerilya di Amerika Latin. Jadi, Filipina sudah menjadi prototipe contoh operasi-operasi rahasia yang sukses dan perang syaraf. [Baca: *Covert Operations and the CIA's Hidden History in the Philippines*, by Roland G. Simbulan, *Convenor/Coordinator, Manila Studies Program University of the Philippines, Lecture at the University of the Philippines-Manila*, Rizal Hall, Padre Faura, Manila, August 18, 2000.]

Pada akhir tahun lima puluhan, CIA juga aktif menggunakan daerah Filipina, terutama pangkalan udara Clark Air Base, untuk latihan dan melancarkan operasi mata-mata dan logistik, di mana *Amerika Serikat secara rahasia mendukung para kolonel yang memberontak di Indonesia (PRRI-Permesta), tapi gagal menggulingkan Presiden Soekarno*. Waktu itu CIA memberi bantuan suplai, latihan, dan pangkalan logistik di beberapa pulau Filipina, termasuk landasan udara di pulau Tiwi-Tiwi, Sanga-Sanga. Sebuah maskapai milik CIA, the Civil Air Transport, secara aktif dipergunakan oleh CIA dari daerah Filipina untuk memberikan bantuan langsung bagi grup pemberontakan militer yang berusaha menggulingkan Presiden Soekarno di ujung tahun lima puluhan. [Ibid]

Sekali lagi, dalam hubungan dengan ini, keunggulan-keunggulan dari *model Indonesia* menunjukkan dengan jelas, bahwa di masa selanjutnya, Amerika akan mencari kesempatan-kesempatan untuk sasaran-sasaran pembunuhan besar-besaran dan bila terjadi bisa direkayasa secara rahasia dengan lebih baik. Ini bisa berarti menggunakan mereka sebanyak mungkin untuk berjuang membasmi musuh atas dasar apa pun.

“Mantan Direktur CIA, William Colby, dalam satu wawancara, menyatakan bahwa kegiatan Kedutaan Besar AS di Indonesia menyiapkan daftar nama pemimpin-pemimpin PKI adalah sama dengan pelaksanaan *Program Phoenix* CIA di Vietnam. Tahun 1965, Colby adalah Direktur Divisi Timur Jauh dari CIA yang bertanggung jawab untuk memimpin strategi rahasia Amerika di Asia.” [San Francisco Examiner, 20/5/90].

Ketika dia mengambil jabatan ini di tahun 1962, Colby mengatakan *dia mendapati bahwa Amerika tidak mempunyai daftar lengkap para aktivis PKI di*

Indonesia, dan dia berpendapat bahwa *ini adalah satu celah dalam sistem intelijen*” [Ibid].

Maka tak pelak lagi dia pun mengambil langkah untuk mengatasi keadaan ini.

Operasi Phoenix pada dasarnya adalah *proyek pembunuhan* yang dikelola Amerika dengan menggunakan Pasukan Khusus, dan ditujukan pada kader-kader Front Pembebasan Nasional Vietnam. Perang Vietnam yang berkembang sampai sedemikian jauh, walaupun lewat saringan politik dan media pers, terhitung juga bahwa *Operasi Phoenix* telah menyebabkan 41.000 rakyat Vietnam mati. [William Blum, *The CIA: A Forgotten History*, London: Zed Books Ltd., 1986, p.145].

Dengan *Operasi Phoenix* yang tak berperikemanusiaan, diiringi dengan pemboman besar-besaran hingga bom-bom yang dijatuhkan di Vietnam melebihi jumlah bom dalam Perang Dunia kedua, walaupun menggunakan semua senjata termmodern pada waktu itu, Amerika *tidak berhasil membasmi komunis Vietnam dan menundukkan Republik Demokrasi Vietnam*.

CIA tidak hanya melakukan pembasmian komunis dengan pembunuhan-pembunuhan yang tak berperikemanusiaan. Di samping operasi pembasmian secara fisik, CIA menggalakkan operasi-operasi psikis. Operasi di bidang propaganda anti-komunis juga merupakan kegiatan sangat penting dari CIA. Untuk itu, dibangun dan digalakkan siaran *Radio Svoboda*, *Radio Free Europe* dengan berbagai bahasa yang ditujukan ke daerah Uni Sovyet dan negara-negara sosialis Eropa Timur. Di Asia digalakkan *Radio Free Asia*, yang terutama ditujukan ke daerah Republik Rakyat Tiongkok. Isi siarannya adalah berpropaganda anti-komunis, mendiskreditkan sistem sosialis. Seiring dengan propaganda anti-komunis CIA dengan siaran radio ini, terdapat kegiatan internet yang menggunakan berbagai website, terutama website *World Socialist WebSite* (WSWS), jaringan Internasional IV Trotskis. Tidak kalah dengan kampanye CIA, website ini sangat tangguh dalam berpropaganda anti Partai Komunis Tiongkok, anti sistem sosialis yang dibangun di Tiongkok.

Dengan dananya yang melimpah ruah, *Ford Foundation* sangat intensif bergerak di bidang penerbitan mengabdikan propaganda anti-komunis. Para penulis yang kehausan dana akan mendapat fasilitas dari *Ford Foundation* untuk menerbitkan karya-karya yang anti komunis.

Praeger Publishers, yang dibangun Frederick A. Praeger tahun 1949, adalah salah satu Badan Penerbit penting yang memenuhi pesanan CIA telah menerbitkan banyak karya tentang komunisme, yang sebenarnya mengabdikan pada propaganda anti komunisme. Church Committee Senat

Amerika tahun 1976 menyatakan, bahwa selama tiga puluh tahun atas permintaan dan subsidi CIA telah diterbitkan lebih dari seribu judul buku propaganda anti komunisme.

Dengan dukungan CIA, Penerbit Praeger sudah menerbitkan buku-buku anti-komunisme, antara lain: *The Dynamic of Soviet Society* oleh Walt Rostow; *The New Class* oleh Milovan Djilas; *Concise History of the Communist Party* oleh Robert A. Burton; *The Foreign Aid Programs of the Soviet Bloc and Communist China* oleh Kust Muller; *In Pursuit of World Order* oleh Richard N. Gardner; *Peking and People's Wars* oleh Jenderal Mayor Sam Griffith; *The Yenan Way* oleh Eudocio Ravines; *Life and Death in Soviet Russia* oleh Valentin Gonzales; *The Anthill* oleh Suzanne Labin; *The Politics of Struggle: The Communist Front and Political Warfare* oleh James D. Atkinson; *From Colonialism to Communism* oleh Hoang Van Chi; *Why Vietnam* oleh Frank Trager; dan *Terror in Vietnam* oleh Jay Malin.

Bekerja sama dengan berbagai penerbit, memberi dana bagi penerbitan karya-karya tulis yang anti komunis, yang menyesatkan pembaca mengenai komunisme adalah salah satu kegiatan CIA lewat *Ford Foundation*. Kegiatan ini sudah memainkan peranan penting dalam melaksanakan *the policy of containment* di semua benua, termasuk Indonesia. Buku *Negara Madiun?* yang terbit dengan dana *Ford Foundation*, bermanfaat menyalahkan PKI dalam *Peristiwa Madiun* adalah sejenis buku yang dideretkan di atas.

Kenapa di Vietnam *Operasi Phoenix* membunuh, memenjarakan, menyiksa jutaan rakyat, gagal membasmi Partai Komunis Vietnam dan gagal mengalahkan Republik Demokrasi Vietnam, tapi di Indonesia berhasil menghancurkan PKI dan menggulingkan pemerintah Bung Karno?

Sebabnya adalah: di Indonesia, semenjak tahun 1949 di bawah rekayasa CIA, *Ford Foundation* dengan program dua puluh tahunnya berkolaborasi dengan *RAND Corporation*, *Rockefeller Foundation*, menggunakan berbagai akademi militer AS Fort Leavenworth, Fort Benning, Fort Bragg, mendidik sejumlah besar perwira Angkatan Darat, mendidik sejumlah besar intelektual hingga terbentuknya kelompok "*Berkeley Mafia*", dengan dukungan partai-partai kanan anti komunis Masyumi, kaum sosial demokrat PSI, dan penganut aliran Trotskis, semuanya menjadi kekuatan anti-komunis, anti Bung Karno. Di samping menggunakan Angkatan Bersenjata, kekuatan inilah yang dikerahkan *Kubu Soeharto-CIA* membasmi kaum komunis dan kaum kiri serta berhasil menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno.

Walaupun terdapat Partai Komunis yang besar, yang gigih mengangkat semboyan anti imperialisme Amerika, tapi PKI tidak memimpin kekuatan

bersenjata seperti Partai Komunis Vietnam, PKI menempuh jalan damai dalam berrevolusi, tidak dipersiapkan untuk menghadapi musuh biadab yang demikian perkasa, yang semenjak bertahun-tahun secara berencana dengan teliti mempersiapkan pembasmian kaum komunis dan kaum kiri Indonesia dengan tujuan menggulingkan Bung Karno.

Operasi Program Phoenix yang dilancarkan CIA adalah sumber malapetaka yang mengorbankan banyak jiwa. Rezim fasis orba Soeharto yang anti komunis ditegakkan dengan memanipulasi G30S, adalah hasil dari operasi ini. Rezim ini memusatkan tuduhannya, bahwa PKI lah dalang G30S, adalah bertanggung jawab atas terjadinya korban pembunuhan besar-besaran itu.

Sesudah rezim Soeharto digulingkan, para pakar sejarah Indonesia memusatkan perhatian pada *mencari sumber dan sebab musabab bencana ini*. Di antara sekian banyak pakar sejarah, Pak Asvi Warman Adam adalah salah seorang yang berusaha keras secara objektif meninjau dan menulis kembali sejarah. Membantah versi tunggal pemerintah orba Soeharto yang menyatakan *PKI adalah dalang G30S*.

Tapi tak sedikit yang menulis dengan haluan melemparkan tanggung jawab kesalahan pada pimpinan PKI terutama Bung Aidit, atau Bung Karno. Ini adalah pemalsuan sejarah. Hal ini dilakukan oleh Victor Miroslav Fic, Jung Chang, C.J.A. Dake, Noegroho Notosoesanto, John Roosa, dll. Mereka dengan segala jalan, termasuk dengan pemalsuan-pemalsuan sejarah, berusaha membuktikan bahwa PKI adalah dalang, atau pemimpin PKI terutama Aidit, terlibat dalam peristiwa G30S, yang bermuara pada peristiwa pembantaian manusia yang berlumuran darah ini.

Di kalangan generasi muda yang menjadi korban peristiwa berdarah ini, terdapat usaha untuk mempelajari dan memahami masa lampau, belajar sejarah, mencari sumber malapetaka yang telah menimpa bangsa. Ada yang disesatkan oleh pandangan, bahwa malapetaka itu disebabkan oleh kesalahan pimpinan PKI. Pandangan demikian bisa ditunggangi oleh usaha *membangkitkan komunisto-fobi* yang selalu dikobarkan CIA. Kalau ini berkembang, maka akan menghasilkan lahirnya generasi muda yang *anti-komunis di Indonesia*. Inilah yang jadi idaman penguasa Amerika Serikat

VIII

DALANG DAN APARAT PEMBASMI KEKUATAN KIRI DAN PENGGULINGAN BUNG KARNO

1. *National Security Council* (NSC)—Politbiro Perang Dingin

KOMUNISME sudah berkembang dari teori menjadi praktik, hingga telah terbentuk negara yang didasarkan pada ajaran komunisme. Seusai Perang Dunia kedua, bukan hanya ada Uni Republik-Republik Sovyet Sosialis (URSS), tetapi telah berkembang hingga di Eropa Tengah dan Timur terbentuk negara-negara sosialis dipimpin partai-partai komunis. Para penguasa negara Amerika Serikat membayangkan bahaya, bahwa komunis akan merebut dan menguasai setiap jengkal bumi ini. Karena itu, *di mana saja ada atau muncul, kaum komunis harus dibasmi*.

Maka pelaksanaan *strategi pembasmian komunisme secepat* adalah sangat rumit, sudah menyangkut pembasmian kekuasaan banyak negara, harus berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, militer dan, budaya. Setelah dipaparkan Doktrin Truman – *the policy of containment*, dan yang diikuti oleh gagasan anti-komunis *rollback* Dulles, Doktrin Eisenhower, maka diperlukan aparat yang kuat untuk pelaksanaannya. Banyak segi yang tak bisa dilakukan secara terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena itu diciptakan berbagai aparat yang canggih dan rapi, di antaranya terdapat “*Pemerintah Bayangan*”. Aparat-aparat yang canggih dan rapi ini bekerja di

bawah komando *National Security Council* (NSC), Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, *Politbiro Perang Dingin*.

National Security Council (NSC) didirikan berdasarkan Undang-Undang Umum 82—253, yang disahkan 26 Juli 1947, sebagai bagian dari reorganisasi umum aparat Keamanan Nasional Amerika, berdasarkan ketetapan *National Security Act* tahun 1947 (PL 235-61 Stat 496, U.S.C. 402) yang kemudian diamendir oleh *National Security Act* tahun 1949 (63 Stat. 579, 50 U.S.C. *National Security Act Amendments of 1949* 63 Stat. 579, 50 U.S.C. 401 *et seq*). Dalam tahun 1949, sebagai bagian dari Plan Reorganisasi, NSC ditempatkan di dalam Kantor Eksekutif Presiden. NSC memainkan *peranan menentukan mengenai politik luar negeri Amerika*. Dewan ini berfungsi semenjak kepresidenan Truman, Eisenhower, Nixon, Kennedy, Johnson, dan seterusnya.

Fungsi dari NSC, sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang tahun 1947 adalah memberi nasihat pada presiden mengenai integritas politik-politik dalam negeri, luar negeri, dan militer yang berhubungan dengan keamanan nasional, untuk memudahkan kerja sama antar kementerian-kementerian. Di bawah pimpinan presiden, NSC bisa memberi petunjuk mengenai hal-hal yang menyangkut Keamanan Nasional Amerika, mempertimbangkan politik-politik dan kemudian melaporkannya atau mengajukan usul-usul kepada presiden.

NSC diketuai oleh presiden. Yang hadir dalam rapat-rapatnya secara teratur adalah wakil presiden, menteri luar negeri, menteri keuangan, menteri pertahanan, pembantu presiden untuk keamanan nasional. Ketua Gabungan Kepala-Kepala Staf adalah penasihat militer tetap dari Dewan, dan Direktur Badan Intelijen Nasional adalah penasihat intelijen. Kepala Staf Kepresidenan, penasihat presiden, dan pembantu presiden di bidang politik ekonomi diundang untuk menghadiri sidang-sidang NSC. Jaksa Agung dan Direktur Kantor Manajemen Anggaran Belanja juga diundang menghadiri sidang yang bersangkutan dengan masalah tanggung jawab mereka.

Pada masa kepresidenan Kennedy, yang mengendalikan NSC adalah aristokrat McGeorge Bundy, yang memainkan peranan penting dalam masalah politik luar negeri selama tahun 60-an sampai dia meninggalkan kedudukan dalam pemerintahan untuk menjadi ketua Ford Foundation. Stafnya termasuk Walt Rostow, dari *MIT Center for International Studies*; ekonom Harvard, Carl Kaysen; Michael Forrestal (putra mantan *President of Dillon Read*); dan Robert Komer (seorang pejabat pemerintah).

Yang berikut ini adalah anggota Komite Eksekutif NSC pada masa pemerintahan Kennedy yang bersidang secara teratur dengan periodik dua

minggu: Lyndon Johnson, wakil presiden, perwakilan dari kapital minyak Texas; Dean Rusk, mantan Presiden Rockefeller Foundation; Robert McNamara, mantan presiden Ford Motors; Robert F. Kennedy, multimilioner dari Boston; Douglas Dillon, mantan presiden Dillon Read; Roswell Gilpakric, ahli hukum sebuah korporasi dari New York; McGeorge Bundy, seorang aristokrat dari Boston yang mantan dekan di Harvard; Adlai Stevenson, ahli hukum sebuah korporasi dari Chicago; John McCone, seorang multimilioner industrialis dari Los Angeles; Dean Acheson, seorang ahli hukum dan mantan menteri luar negeri; Robert Lovett, seorang bankir investor pada Brown Brothers, Harriman; Jenderal Maxwell Taylor, seorang penasihat Presiden, dan mantan kepala Mexican Light and Power Company, Ltd.; Jenderal Mayor Marshall Sylvester Carter, Wakil Direktur CIA; George Ball, seorang ahli hukum sebuah korporasi kemudian menjadi mitra dari Lehman Brothers; Edwin M. Martin, pejabat kementerian luar negeri, pakar khusus mengenai Amerika Latin; Lwedlyn Thompson, pejabat kementerian luar negeri; Theodore Sorensen, penulis pidato dan penasihat presiden.¹

Yang duduk dalam NSC adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidang politik, ekonomi, dan militer, yaitu “mereka-mereka yang menguasai Amerika”. Dan ruang lingkup yang ditangani oleh NSC menunjukkan besarnya kekuasaan dewan ini. Karena itu, John Fischer dari *Harper’s Magazine* menulis bahwa “NSC adalah Politbiro Mr. Truman”.²

Ini berarti, NSC adalah *Politbiro Perang Dingin*. Putusan-putusannya memberi haluan dan menetapkan langkah-langkah yang diambil Amerika Serikat dalam Perang Dingin, yaitu dalam melaksanakan *the policy of containment* – Doktrin Truman, *membendung dan membasmi komunisme secepat*. Dalam usaha membasmi komunisme secepat, NSC telah mengambil serentetan putusan yang mengintervensi banyak negeri, termasuk Indonesia. Antara lain putusan-putusan NSC 171/1, 5518, 5901, 6023.

Pelaksanaan *strategi pembasmian komunisme secepat* adalah sangat rumit. Ini sudah menyangkut *pembasmian kekuasaan negara*, harus berhadapan dengan kekuatan politik, ekonomi, militer, dan budaya suatu negara. Sesudah dipaparkannya Doktrin Truman – *the policy of containment*, dan yang diikuti oleh gagasan anti-komunis *rollback* Dulles serta Doktrin Eisenhower, maka diperlukan aparat yang kuat untuk pelaksanaannya. Banyak segi yang tak bisa dilakukan secara terbuka oleh pemerintah Amerika Serikat. Karena

¹ Baca: David Horowitz, *Corporations and the Cold War*, published with the Bertrand Russel Peace Foundation, Monthly Review Press, First Printing, New York and London, 1969, hal.43—46]

² *Ibid.*, hal.44.

itu diciptakan berbagai aparat yang canggih dan rapih, di antaranya terdapat “*Pemerintah Bayangan*”.

2. “Pemerintah Bayangan”

RICHARD J. Boylan, Ph.D. yang menulis *The Shadow Government—A Structural Analysis* memaparkan wujud dan fungsi *aparat Perang Dingin* yang canggih ini. Dikemukakannya bahwa di Amerika terdapat satu “*Pemerintah Bayangan*,” yaitu jaringan organisasi yang sangat luas, yang melakukan operasi seiring dengan pemerintah legal Amerika Serikat.

Sebagaimana pemerintah, “*Pemerintah Bayangan*” ini adalah pemerintah rahasia yang juga mempunyai cabang-cabang yang fungsional. Karena “*Pemerintah Bayangan*” didirikan oleh para tokoh terkemuka yang punya kuasa, tindak-tanduknya tidak dikontrol oleh badan-badan legislatif.

Cabang-cabangnya meliputi: cabang eksekutif, cabang intelijen, cabang kementerian peperangan, cabang industri senjata, dan cabang kementerian keuangan. Kegiatan operasi-operasi khusus dalam bidang cabang intelijen dan cabang kementerian peperangan melaksanakan petunjuk-petunjuk politik yang memerlukan *operasi-operasi rahasia* yang kalau ketahuan, tak diakui sebagai kegiatan legal. Cabang industri persenjataan tunduk kepada cabang eksekutif, melalui departemen peperangan dan atau cabang intelijen untuk mendapatkan *Anggaran Biaya Gelap* bagi sistem persenjataan.

Secara teoretis, kementerian keuangan tunduk kepada cabang eksekutif mengenai pelaksanaan kebijaksanaan keuangan, tetapi *de facto* juga tunduk langsung kepada kekuasaan mereka yang sudah menciptakan “*Pemerintah Bayangan*”. Kementerian Keuangan pada waktunya melapor langsung sebagaimana alat pelaksanaan politik keuangan. Tujuan dari lima cabang ini adalah tujuan menyeluruh dari pemerintah bayangan melaksanakan kontrol yang rahasia.¹

Yang masuk cabang eksekutif:

1. *Council on Foreign Relations* (CFR). Termasuk di dalamnya: George Bush, Bill Clinton, semua direktur-direktur CIA, semua kepala-kepala gabungan kepala staf, hampir semua anggota kabinet, dan para pejabat yang diangkat oleh cabang eksekutif.

¹ Richard J. Boylan, Ph.D., *The Shadow Government – A Structural Analysis*

2. Komisi Trilateral: yang anggota-anggotanya adalah: David Rockefeller, Henry Kissinger, John D. Rockefeller, Alan Greenspan, Zbigniew Brezinski, Anthony Lake, John Glenn, David Packard, David Gergen, Diane Feinstein, Jimmy Carter, Adm. William Crowe, dll.
3. *The Bilderberg Group*: Prince Hans-Adam of Liechtenstein, Prince Bernhard of Netherland, Bill Clinton, Lloyd Bentsen, dll.
4. *National Security Council* (NSC), menyusun politik militer dan intelijen dan grup kontrol untuk keamanan nasional dan internasional yang melapor langsung kepada presiden, dengan *Committee 5412* yang rahasia (yang memimpin operasi-operasi rahasia, dan *Subcommittee PI-40* nya)
5. Gabungan Kepala-Kepala Staf Compartment Operasi Khusus (JCS) dari direktorat operasi-operasi yang melaksanakan perintah-perintah *Committee NSC 5412*, dengan menggunakan Komando Pasukan Khusus USA.
6. Kantor Program Nasional (NPO), yang melakukan operasi Kelanjutan Proyek Pemerintah (COG—*Continuity of Government Project*), satu proyek rahasia yang sedang berlangsung untuk mempertahankan pusat-pusat komando, kontrol, komunikasi, dan intelijen selama keadaan sangat darurat nasional dengan melakukan operasi rahasia, sekuriti, di bawah tanah kota-kota dengan dilakukan oleh para pengganti pemimpin-pemimpin nasional yang ada di permukaan.

Yang masuk Cabang Intelijen:

1. *National Security Agency* (NSA), memonitor dan menyadap semua telepon, telegram, komputer modern, radio, televisi, telepon genggam, microwave, dan komunikasi satelit, dan bidang-bidang elektromagnetik “yang menarik” di seluruh dunia, dan mengatur kontrol informasi dan kegiatan-kegiatan rahasia yang berhubungan dengan *kerahasiaan UFO (piring terbang)* dan mengawasi operasi-operasi luar bumi, Fort Meade.
2. *National Reconnaissance Office* (NRO), menghimpun informasi dari sateli-satelit mata-mata dari bumi, memonitor jalur UFO (piring terbang) memasuki dan meninggalkan atmosfer bumi, mengoordinasi penembakan senjata-senjata sinar energi dari satelit Perang Bintang yang mengorbit menurut pilihan manusia dan sasaran-sasaran di udara dari pesawat luar-bumi, pangkalan Pentagon dan daerah lapangan terbang Dulles, VA.

3. *National Reconnaissance Organization* (NRO), alat operasi-operasi intelijen militer dari *PI-40 Subcommittee*, menjalankan pengawasan, pencegahan, penangkapan, dan pensitaan, atas UFO-UFO dan para penumpangnya yang dari luar-bumi untuk kepentingan intelijen dan tujuan-tujuan “kemanan internasional”.
4. *Central Intelligence Agency* (CIA), mengomandoi, sering mengontrol, dan kadang-kadang mengoordinasi rapat-rapat orang asing, menghimpun informasi oleh mata-mata, pengawasan elektronis, dan cara-cara lain, *operasi-operasi rahasia kontra-pemberontakan oleh paramiliter yang di luar kebiasaan*, menyelenggarakan proyek-proyek pasifikasi politik yang mendahului yang melanggar hukum internasional, demikian pula melakukan operasi-operasi mendadak kontra-intelijen melawan agen-agen asing; bertindak dalam pengawasan dalam negeri, dan manipulasi proses-proses politik Amerika Serikat, “dalam rangka kepentingan nasional” secara langsung bisa melanggar putusan-putusan *Congress*, melakukan operasi perusahaan-perusahaan dengan “front palsu” untuk mencari laba, ambil bagian besar-besaran dalam pengapalan internasional obat-obat narkotik yang ilegal, menggunakan selubung keamanan nasional dan imunitas, bekerja sama dengan operasi-operasi rahasia NSA’s UFO, Langley, VA, dan cabang-cabang di seluruh dunia.
5. *Federal Bureau of Investigation, Counter Intelligence Division* (FBI). Melakukan investigasi, pengawasan, menetralkan agen-agen intelijen asing yang beroperasi di dalam negeri Amerika, dan bekerja sama dengan NRO dalam mengawasi mereka-mereka yang terlibat.

Di samping itu terdapat banyak badan atau lembaga lainnya, antara lain: *NSA’s Central Security Service* dan *CIA’s Special Security Service*, yang berfungsi memata-matai mata-mata, meluncurkan operasi-operasi khusus yang tak dapat dipercayakan pelaksanaannya pada perwira-perwira intelijen, Ft. Meade, MD, dan Langley, VA.

Di bawah naungan “*Pemerintah Bayangan*” terdapat berbagai proyek penting yang rahasia: *Project Deep Water*, menghimpun kekuatan, sumber-sumber dan metode yang dihasilkan dari mendatangkan secara rahasia Kepala Intelijen Nazi Hitler, Jenderal Reinhard Gehlen, untuk menyusun aparat intelijen Amerika. *Proyek Paperclip*, yang melanjutkan hasil mendatangkan secara rahasia senjata-senjata Nazi dan para sarjana *aerospace/UFO* bagi riset militer rahasia Amerika dan dasar-dasar perkembangan.

Di bawah cabang keuangan, terdapat *Federal Reserve System (FED)*, yaitu kartel bank-bank swasta besar yang dikuasai elite para bankir pemilik uang super-kaya, seperti Rockefellers, Mellons, DuPonts, Rotschilds, dsb., yang mendikte pemerintah mengenai arus uang, nilai uang, dan kadar bunga. Juga terdapat *Lembaga-lembaga yang dibiayai sendiri oleh CIA*, yang operasi-operasinya berada di bawah kontrol perdagangan internasional obat-obat narkotik heroin, kokain, dan marijuana, demikian juga bagi usaha-usaha “front” perusahaan-perusahaan sebagai sumber uang tunai bagi operasi-operasi rahasia tanpa tercatat dan penjualan senjata-senjata dan bahan narkotik eksotik serta dana penyuapan yang strategis.¹

“Bagaikan gurita, ia beroperasi secara rahasia di bawah selubung layar yang diciptakannya sendiri. Pada kepala gurita ini terdapat kepentingan-kepentingan *Rockefeller Standard Oil* dan segelintir pemilik bank yang perkasa, yang umumnya berhubungan dengan bankir-bankir internasional. Kumpulan segelintir bankir internasional yang perkasa inilah sesungguhnya mengendalikan pemerintah Amerika Serikat untuk tujuan-tujuan kepentingan dirinya sendiri. Secara praktis, mereka mengontrol kedua partai politik.”²

3. Central Intelligence Agency (CIA)

CIA adalah lembaga paling penting sebagai aparat pelaksana strategi Perang Dingin. CIA beroperasi dengan jaringan yang memasuki semua bidang kehidupan sosial. Mulai dari politik, militer, ekonomi, budaya, media pers. Pada pokoknya, kegiatannya berupa operasi-operasi rahasia.

Operasi Paperclip. Dalam tulisannya *A Timeline of CIA Atrocities*, Steve Kangas memaparkan: Sementara lembaga-lembaga Amerika menguber kriminal perang Nazi untuk ditangkap, badan-badan intelijen Amerika menyeludupkan mereka ke Amerika, tidak dihukum, tapi untuk dipergunakan buat melawan Uni Sovyet selanjutnya. Yang paling penting di antaranya adalah Reinhard Gehlen, tokoh mata-mata Hitler yang sudah membangun jaring mata-mata di Uni Sovyet.

Dengan direstui Amerika, dia membangun “organisasi Gehlen”, satu jaringan pelarian mata-mata Nazi yang menghidupkan kembali kegiatan mereka di Russia. Ini termasuk perwira-perwira intelijen SS Nazi, Allfred Six dan Emil Augsburg (yang melakukan pembunuhan massal orang Yahudi), Klaus Barbie (“penjagal di Lyon”), Otto von Bolschwing (dalam holokaus bersama Eichmann), dan Kolonel SS, Otto Skorzeny (sahabat pribadi Hitler) dengan info intelijen mengenai Uni Sovyet, mengabdikan jembatan antara pembubaran OSS dan dibangunnya CIA. Uni Sovyet juga melakukan penetrasi ke dalam organisasi Gehlen. [Baca: Steve Kangas: *A Timeline of CIA Atrocities*] [Steve Kangas, *A Timeline of CIA Atrocities*, accessed in <http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtimeline.html>, William Blum, *op.cit.*, p.259].

CIA didirikan atas putusan *Congress* dengan rumusan dari *National Security Act 1947*, yang ditandatangani Presiden Harry Truman. Ia adalah kelanjutan dari *Office of Strategic Service* (OSS) yang berfungsi dalam Perang Dunia kedua dan dibubarkan Oktober 1945 dengan fungsinya dialihkan pada Kementerian Peperangan. Sebelas bulan sebelumnya, dalam tahun 1944, pendiri OSS, William J. Donovan, mengusulkan kepada Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk mendirikan organisasi baru yang langsung di bawah pengawasan presiden, “yang akan melakukan tugas intelijen dengan metode terbuka dan rahasia, dan bersamaan waktu akan memberikan bimbingan intelijen, menetapkan objek-objek intelijen nasional, serta menghubungkan bahan-bahan intelijen yang dihimpun oleh semua lembaga negara.

Menurut rencana ini, sebuah lembaga sipil yang kuat, terpusat harus mengoordinasi semua lembaga intelijen. Dia juga mengusulkan supaya lembaga ini mempunyai kekuasaan untuk menjalankan “operasi subversif di luar negeri” tetapi “tak punya fungsi polisi untuk pelaksanaan undang-undang, di dalam dan luar negeri.”

Dalam bulan September 1947, menurut *National Security Act 1947*, didirikan *National Security Council* (NSC) dan *Central Intelligence Agency* (CIA). Rear Admiral Roscoe H. Hillenkoetter diangkat menjadi direktur pertama CIA.

Petunjuk NSC mengenai *Office of Special Projects*, 18 Juni 1948 (NSC 10/2), memberi CIA kekuasaan untuk menjalankan operasi-operasi rahasia “melawan negara asing atau grup-grup luar negeri yang jahat, atau membantu negara-negara asing atau grup-grup, tetapi harus direncanakan dan dilaksanakan dengan demikian rupa hingga tak ada bukti yang menunjukkan tanggung jawab pemerintah Amerika mengenai hal tersebut.”

¹ [Source:http://www.luisprada.com/Protected/the_secret_shadow_government.htm] [<http://www.drboylan.com/>].

² [New York City Mayor John F. Hylan, 1922, *Brother Veritus' Website*, Published in this website on January 13, 2005.]

Steve Kangas menulis, CIA mendirikan *Office of Policy Coordination*, dipimpin oleh Frank Wisner. Dalam piagam rahasianya ditulis bahwa tanggung jawab lembaga ini adalah termasuk “propaganda, perang ekonomi, aksi langsung preventif, termasuk sabotase, anti-sabotase, pembasmian, pemindahan-pemindahan penduduk, melakukan subversi terhadap negara-negara yang tak bersahabat dengan AS, membantu grup-grup perlawanan bawah tanah dan mendukung unsur-unsur anti-komunis setempat di dunia bebas.”

Tahun 1948 di Itali, CIA campur tangan dalam pemilihan umum. Itali menghadapi kemungkinan kemenangan kaum komunis. CIA membeli suara, berpropaganda anti-komunis, mengancam pemimpin-pemimpin oposisi, menginfiltrasi dan merusak organisasi mereka. Komunis dapat dikalahkan.

Demikian pula di Perancis. CIA bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan anti-komunis pengikut Trotskis dan kaum sosial demokrat, mengeluarkan unsur komunis dari Pemerintah Perancis.

Hal yang sama terjadi di Indonesia. Amerika tidak tenang dengan adanya kabinet dipimpin komunis Amir Sjarifuddin. Maka berlangsung usaha penggulingan pemerintahan Amir Sjarifuddin dan realisasi *Red Drive Proposals*, hingga pecahnya *Peristiwa Madiun*, September 1948. Dengan menggerakkan oposisi dari partai Islam Masyumi, kabinet Amir berhasil dijatuhkan. Disusul oleh pecahnya *Peristiwa Madiun*. Dalam *Peristiwa Madiun*, sejumlah besar kader pimpinan utama PKI, termasuk Musso, Amir Sjarifoeddin, dan lain-lain, terbunuh menjadi korban.

Akhir tahun 40-an, CIA melancarkan operasi *Mockingbird*, yaitu mulai merekrut organisasi-organisasi perkabaran dan para jurnalis untuk menjadi mata-mata dan penyebar propaganda. Usaha ini dipelopori oleh Frank Wisner, Allen Dulles, Richard Helms, dan Philip Graham. Graham adalah penerbit *The Washington Post*, yang menjadi pelaku utama CIA. Sementara itu, aset media CIA termasuk ABC, NBC, CBS, majalah-majalah *Time*, *Newsweek*, kantor perkabaran *Associated Press*, *United Press International*, *Reuters*, *Hearst Newspapers*, *Scripps-Howard*, *Copley News Service*, dan lain-lain. Terdaftar dalam CIA paling kurang 25 organisasi dan 400 jurnalis menjadi alat CIA.

Tahun 1949, CIA membangun alat propaganda penting *Radio Free Europe*. Selama puluhan tahun selanjutnya, *Radio Free Europe* terus-menerus berpropaganda anti-komunis, anti Uni Sovyet. Siarannya adalah penuh kepalsuan, bahkan di Amerika sendiri “penerbitan transkrip siarannya adalah terlarang.” [Baca: Steve Kangas, *A Timeline of CIA Atrocities*].

Tahun 1953, CIA mendalangi kup militer menggulingkan pemerintah Mossadegh yang dipilih dengan demokratis. Ini terjadi sesudah Mossadegh mengancam untuk menasionalisasi perusahaan minyak milik Inggris. CIA menggantikan Mossadegh dengan seorang diktator, Syah Iran, dengan polisi rahasianya Savak yang adalah kejam seperti Gestapo.

Dengan satu kup militer, CIA menggulingkan pemerintah Jacobo Arbenz yang dipilih secara demokratis di Guatemala tahun 1954. Arbenz mengancam menasionalisasi *United Fruit Company* milik Rockefeller, di mana terdapat saham Direktur CIA, Allen Dulles. Arbenz digantikan oleh Castillo Armaz, perwira didikan Amerika dan sejumlah diktator kaum kanan yang menjalankan politik kekerasan sampai membunuh 100.000 rakyat Guatemala selama 40 tahun.

Dalam tahun 1949, undang-undang *Central Intelligence Act (Public law 81–110)* memberi kuasa bagi CIA untuk menggunakan prosedur keuangan dan administratif rahasia, dan membebaskannya dari pembatasan-pembatasan biasa dalam penggunaan dana Federal. CIA juga dibebaskan dari keharusan mengumumkan “organisasi, fungsi, pejabat-pejabat, titel-titel, gaji, atau anggota pejabat yang dipekerjakan.”

CIA juga menyusun program “PL-110” untuk mengurus para pembelot dan “unsur-unsur asing penting” lainnya yang termasuk di luar prosedur imigrasi normal, demikian pula memberikan pada mereka bantuan ekonomi.

Allen Dulles yang bertugas sebagai perwira kunci operasi OSS di Swiss dalam Perang Dunia kedua, menggantikan kedudukan Bedell Smith, Kepala CIA. Pada waktu itu politik Amerika didominasi oleh *anti-komunisme* yang keras.

Terdapat berbagai kegiatan anti-komunis. Yang paling terkemuka adalah investigasi yang digalakkan oleh Senator Joseph McCarthy dan sedang dikembangkan secara sistematis *doktrin of containment*, yang berasal dari gagasan George Kennan. Juga berlangsung blokade Berlin dan Perang Korea.

Sebagaimana saudaranya, John Foster Dulles, yang menjabat menteri luar negeri waktu itu, perhatian Allen Dulles sangat terpusat pada Uni Sovyet, yaitu kesulitan-kesulitan mendapatkan informasi dari masyarakatnya yang tertutup, hanya sangat sedikit agen-agen yang bisa menyusup untuk mendapatkan informasi, maka pemecahannya dilakukan lewat teknologi tinggi.

Sukses pertama adalah dengan menggunakan pesawat terbang Lockheed U-2, yang dapat mengambil potret dan menghimpun sinyal-sinyal elektronis dari ketinggian yang jauh. Ini telah mengungguli pencapaian teknologi pertahanan udara Sovyet. Sesudah Gary Powers tertembak jatuh oleh roket

bumi-udara SA-2 buatan Sovyet, maka Amerika mengembangkan pesawat SR-71 menggantikan pesawat Lockheed U-2.

Tujuan utama dari CIA selama Perang Dingin adalah untuk mencuri rahasia-rahasia Sovyet, mengerahkan mata-mata. Tetapi CIA tak pernah punya orang yang dapat menyusup dalam ke Kremlin. Hanyalah segelintir mata-mata Sovyet yang secara sukarela membocorkan informasi penting, tapi mereka segera ketahuan, tertangkap dan terbunuh. [Baca: Tim Weiner, *Legacy of Ashes: The History of the CIA*, Publisher: Anchor, May 20, 2008].

Menggulingkan Berbagai Pemerintah. Tahun 1954–1958, perwira CIA Edward Lansdale selama empat tahun berusaha menggulingkan pemerintah Vietnam Utara, dengan menggunakan semua cara yang kotor. CIA juga berusaha melegalsir pemerintah boneka Vietnam Selatan yang kejam dikepalai Ngo Dinh Diem. Usaha ini gagal, tak mendapat dukungan rakyat Vietnam Selatan karena pemerintah Diem anti demokrasi yang sesungguhnya, anti *landreform* dan anti langkah-langkah mengurangi kemiskinan. Kegagalan-kegagalan CIA yang terus-menerus menyebabkan Amerika memperluas intervensi, sampai Perang Vietnam mencapai puncaknya.

Tahun 1956, *Radio Free Europe* menghasut rakyat Hongaria untuk memberontak sesudah disiarkannya pidato rahasia Khrushyov mengutuk Stalin dalam Kongres ke-XX PKUS. Siaran radio itu juga menunjukkan, bahwa Amerika akan memberikan bantuan bagi rakyat Hongaria yang berjuang. Pemerintah Imre Nagy yang kanan menyatakan keluar dari Pakta Warsawa dan menyerukan agar Barat memberi bantuan. Pemerintah ini digulingkan berkat bantuan pasukan Sovyet, dan digantikan oleh pemerintah Janos Kadar yang memulihkan sistem demokrasi rakyat di Hongaria.

Tahun 1958, CIA mendukung pemberontakan bersenjata PRRI–Permesta di Indonesia. CIA membantu pemberontakan dengan pengiriman senjata dan penggunaan pesawat membom daerah Republik Indonesia, sampai pesawatnya tertembak jatuh dan pilotnya tertangkap hidup-hidup.

Militer Amerika dan CIA membantu “Papa Doc” Duvalier menjadi diktator Haiti tahun 1959. Duvalier membangun polisi pribadi “Tonton Macoutes” yang melakukan teror atas rakyat. Terbunuh 100.000 rakyat selama keluarga Duvalier berkuasa. Amerika tak ambil pusing, mengenai pelanggaran hak asasi manusia ini.

Bulan April 1961, CIA mendaratkan 1.500 orang Kuba pengasingan menginvasi di Plaja Giron untuk menggulingkan pemerintah Fidel Castro.

Operasi dengan kode “*Operation Mongoose*” ini gagal. Perencana invasi ini membayangkan bahwa pendaratan ini akan memicu kebangkitan perlawanan rakyat terhadap Fidel Castro. Kegagalan CIA ini menyebabkan Presiden Kennedy memecat Direktur CIA, Allen Dulles.

Tahun 1957–1973, CIA beroperasi di Laos. CIA hampir tiap tahun mensponsori kup, berusaha menegasi pemilihan-pemilihan umum yang demokratis. Masalahnya adalah: di Laos terdapat Pathet Lao, grup kaum kiri yang dapat dukungan rakyat. Akhir tahun 50-an, CIA bahkan membangun pasukan “*Armee Clandestine*” dari orang-orang Asia bayaran untuk menyerang Pathet Lao. Sesudah pasukan yang didanai CIA mengalami kegagalan demi kegagalan, Amerika mulai melakukan pemboman atas daerah Laos. Tapi Pathet Lao tak terkalahkan.

Tahun 1961, CIA melakukan pembunuhan atas Rafael Trujillo, diktator kejam Republik Dominika yang semenjak tahun 1930 mendapat dukungan Washington. Laba perusahaan Trujillo berkembang demikian besar, mencapai sekitar 60 persen perekonomian negeri yang menyaingi kapitalis Amerika. Karena itu dia digulingkan.

CIA mensponsori pembunuhan atas Patrice Lumumba, Perdana Menteri Republik Demokratis Kongo yang terpilih secara demokratis. Lumumba digantikan oleh Antoine Gizenga, *Secretary-General Unified Lumumbist Party (Parti Lumumbiste Unifié)*, CIA tidak berhasil segera menggantikan Lumumba dengan orangnya. Empat tahun berlangsung kekacauan politik, akhirnya tahun 1965, di Kongo berlangsung kup militer yang didukung CIA untuk mendudukkan Mobutu Sese Seko jadi perdana menteri. Mobutu sejak semula adalah agen CIA di Kongo. Dengan kup ini Mobutu berhasil jadi penguasa Kongo yang kejam dan kaya-raja.

Tahun 1963, CIA menggulingkan Presiden Republik Dominika, Juan Bosch yang terpilih secara demokratis. Dan digantikan dengan sebuah junta militer kanan yang kejam.

Di Ekuador, CIA mendukung kekuatan militer Ekuador menggulingkan Presiden Jose Velasco yang terpilih secara demokratis. Wakil Presiden Carlos Arosemana menggantikannya. CIA menentukan orangnya untuk mengisi kedudukan kursi wakil presiden.

Kemudian CIA mendukung kup militer yang menggulingkan Presiden Arosemana, yang politiknya independen, bukan sosialis, tapi tak bisa diterima oleh Washington. Junta militer mengambil oper kekuasaan, membatalkan hasil pemilihan umum, dan mulai berlangsung pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Oktober 1965, CIA mendalangi penggulingan Soekarno. CIA sudah berusaha melenyapkan Soekarno semenjak tahun 1957, dengan menggunakan berbagai usaha untuk membunuhnya, memfitnah dengan intrik seksual, serta mendukung pemberontakan PRRI/Permesta yang mendirikan republik tandingan.

Di Republik Dominika terjadi pemberontakan, rakyat memulihkan Juan Bosch sebagai presiden yang pernah dipilih. Amerika mendaratkan pasukan Angkatan Laut untuk menindas pemberontakan ini dan mendirikan pemerintahan militer. CIA memainkan peranannya di belakang layar.

Tahun 1964, CIA mendukung kup militer Brazilia menggulingkan Presiden Joao Goulart yang terpilih secara demokratis. Junta militer yang menggantikannya selama dua dasawarsa merupakan kediktatoran yang paling berlumuran darah. Jenderal Castelo Branco membangun “pasukan mati” yang pertama di Amerika Latin, yaitu gerombolan polisi rahasia yang mengejar kaum “komunis” untuk disiksa, interogasi, dan dibunuh. Sering terjadi bahwa “komunis” ini sesungguhnya hanyalah lawan politik dari Jenderal Branco. Kemudian ternyata, bahwa pasukan mati itu adalah didik oleh CIA.

Dengan dukungan CIA, tahun 1965 Raja Yunani menggulingkan Perdana Menteri George Papandreou. Papandreou tidak berhasil dengan tangguh melindungi dan membela kepentingan Amerika di Yunani.

Tahun 1966 terjadi Peristiwa *Ramparts* di Amerika. Majalah radikal *Ramparts* mulai menyiarkan sejumlah artikel yang anti-CIA. Di antaranya ditulis bahwa CIA sudah membayar 25 juta dolar pada Universitas Michigan untuk menyewa para “profesor” buat mendidik siswa-siswa Vietnam Selatan dengan metode polisi rahasia. MIT dan universitas-universitas lainnya juga sudah mendapat pembayaran yang sama. *Ramparts* juga mengungkapkan bahwa *National Students Association* adalah organisasi *front* CIA. Para siswa kadang-kadang direkrut secara main sogok dan “jalan belakang”.

Tahun 1967, kup militer yang didukung CIA menggulingkan pemerintah Yunani, dua hari sebelum pemilihan umum. Yang diperkirakan akan menang adalah George Papandreou, seorang calon yang liberal. Selama enam tahun berikutnya berlangsung kekuasaan para kolonel yang didukung CIA dengan bersimharajalelanya penyiksaan dan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik.

Operasi Phoenix tahun 1967, mengikuti pengalaman CIA di Filipina membasmi gerilya komunis Huk Balahap. Operasi mahakejam, penuh penyiksaan dan pembunuhan. CIA membantu pejabat-pejabat Vietnam

Selatan untuk mengenal dan kemudian membunuh pemimpin-pemimpin Vietcong yang beroperasi di desa-desa Vietnam Selatan. Menurut laporan *Congress* tahun 1971, operasi ini telah membunuh 20.000 komunis Vietnam (Vietcong)

Tahun 1968, operasi militer di Bolivia yang dilakukan CIA berhasil menangkap pemimpin gerilya yang terkenal Che Guevara. CIA ingin menangkap hidup untuk diinterogasi, tapi pemerintah Bolivia membunuhnya untuk mencegah tuntutan umum dunia untuk pengampunannya.

Tahun 1970, CIA menggulingkan Norodom Sihanouk, digantikan dengan politisi anti komunis, antek CIA, Lon Nol.

Tahun 1971, sesudah Bolivia selama lima tahun mengalami kekacauan politik, kup militer yang didukung CIA menggulingkan Presiden Juan Torres yang kiri. Selama dua tahun selanjutnya, diktator Hugo Banzer berkuasa dengan mengorbankan lebih dari 2.000 orang lawan politiknya dipenjarakan tanpa lewat pengadilan, disiksa, diperkosa, dan dibunuh.

Tahun 1973, CIA menggulingkan dan membunuh Salvador Allende, presiden beraliran sosialis yang pertama terpilih secara demokratis di Amerika Latin. Muncul masalah karena Allende menasionalisasi perusahaan-perusahaan Amerika di Chili. Maskapai ITT menyerahkan pada CIA satu juta dolar untuk keperluan kup. CIA mengganti Allende dengan Jenderal Augusto Pinochet, yang menjalankan penyiksaan dan pembunuhan ribuan penduduknya dan membasmi pemimpin-pemimpin serikat buruh dan partai politik kiri. [Baca: Tim Weiner, *Legacy of Ashes: The History of the CIA*, Publisher: Anchor (May 20, 2008)]

Yang di atas ini adalah sebagian dari aksi dan operasi-operasi rahasia yang digalakkan CIA semenjak berdirinya. *Pembasmian kaum kiri* dan *penggulingan pemerintah kiri* bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah terjadi di banyak negeri. Ini berakar pada *doktrin pembasmian komunisme – the policy of containment*—Doktrin Truman—dan *gagasan rollback* John Foster Dulles. Eksekutornya, badan pelaksanaanya yang utama adalah CIA.

4. RAND Corporation

BANYAK lembaga bernaung di bawah “*Pemerintah Bayangan*”. Salah satunya adalah RAND (*Research AND Development*) Corporation. Ini adalah sebuah lembaga prestisius yang berfungsi sebagai gudang tenaga ahli, sarjana-sarjana terkemuka yang menjadi tangan penting proyek-proyek

intelijen yang melibatkan front-CIA, tentang perkembangan persenjataan, dan perkembangan basis-basis bawah tanah.

Di dalamnya terdapat para sarjana teoretikus pembela tangguh kapitalisme dan anti-komunis. Di antaranya ialah Walt Whitman Rostow yang tahun 1960 menampilkan karya anti Marxisme: *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*, Yoshihiro Francis Fukuyama, profesor Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) Johns Hopkins University, yang bergendang paha dengan ambruknya Uni Sovyet dengan karyanya tahun 1992: *The End of History and The Last Man*.

Chalmers Johnson, seorang profesor Asian Studies University of California, menulis dalam *A Litany of Horrors, America's University of Imperialism*, bahwa RAND Corporation of Santa Monica, California, didirikan segera se usai Perang Dunia kedua oleh Korps Angkatan Udara Amerika yang kemudian menjadi Angkatan Udara Amerika Serikat. Para jenderal Angkatan Udara yang mempunyai pikiran untuk mengabadikan hubungan selama masa perang yang berkembang antara kalangan pekerja ilmiah dan kalangan intelektual serta militer, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Proyek Manhattan yang mengembangkan dan menghasilkan bom atom.

Tak lama kemudian, RAND menjadi sebuah lembaga kunci dari *empire* Perang Dingin Amerika. Sebagai jurupikir (*thinktank*) utama bagi peranan hegemoni dunia Barat, RAND adalah alat dalam memberikan kedudukan militer dewasa ini dan tuntutan-tuntutannya yang kian luas terhadap bom atom, kapal-selam nuklir, peluru kendali antar benua, dan pesawat-pesawat pembom jarak jauh. Tanpa RAND, kompleks industri militer, demikian juga demokrasi Amerika tidak akan seperti sekarang ini.

Kegiatan RAND banyak menyangkut ideologi, mendukung nilai-nilai Amerika yaitu individualisme dan kepentingan pribadi, serta menentang Marxisme, tapi penampilan ideologisnya diselimuti oleh statistik-statistik dan persamaan-persamaan, yang membuatnya seperti analisa yang “rasional” dan “ilmiah”. Kesimpulan-kesimpulan dari riset RAND mengenai Dunia Ketiga, mengenai perang terbatas, dan mengenai perang kontra-pemberontakan selama Perang Vietnam menyatakan bahwa Amerika Serikat haruslah mendukung “modernisasi militer” di negeri-negeri yang terbelakang, yang berarti adalah hal yang baik jika militer mengambil alih kekuasaan, harus bekerja sama dengan perwira-perwira negeri lain. Maka selama tahun-tahun 1960–1970, Amerika memberi dukungan pada sejumlah negara kediktatoran militer seperti di Vietnam Selatan, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Indonesia, dan Taiwan.

Sekitar tahun 1958, PKI tampil sebagai gerakan massa yang luas di Indonesia. Pada masa itulah, sekelompok kecil intelektual peneliti akademis Angkatan Udara Amerika dan “*thinktank*” yang dapat subsidi CIA mulai membangun kontak dengan militer Indonesia secara terbuka, dengan menggunakan majalah-majalah ilmiah dan penerbitan Amerika lainnya, mendorong militer Indonesia untuk merebut kekuasaan dan menghancurkan PKI.

Contoh yang paling menonjol adalah Guy Pauker, yang dalam tahun 1958 mengajar di Universitas-California dan Berkeley serta bekerja sebagai konsultan dari RAND Corporation. Dalam kedudukan terakhirnya ini, dia sering melakukan kontak dengan apa yang dia sebut “kelompok sangat kecil” intelektual PSI dan sahabat-sahabat mereka dalam tentara.

Dalam sebuah buku RAND yang diterbitkan oleh *Princeton University Press*, Pauker mendesak sahabatnya di dalam tentara Indonesia untuk mengambil “penuh tanggung jawab” bagi kepemimpinan bangsa mereka, satu “tugas penuh” dan kemudian “memukul, menyapu bersih rumah”.

Ungkapan-ungkapan Pauker “penuh tanggung jawab”, “tugas penuh”, “membersihkan rumah”, adalah kata-kata kiasan bagi pemberontakan dan pembunuhan besar-besaran, kata-kata kiasan yang sering dipakai untuk suatu kup. Perintah pembunuhan yang pertama oleh perwira-perwira militer bagi mahasiswa-mahasiswa Islam pada awal bulan Oktober 1965 adalah kata-kata *sikat* yang berarti sapu, bersihkan, “basmi”, atau “bunuh besar-besaran”.

RAND Corporation berkolaborasi dengan Ford Foundation di bawah koordinasi CIA berhasil membangun kelompok sarjana ekonomi dan politik berupa *Berkeley Mafia* yang menjadi unsur penting dari *Grup Soeharto—CIA*. Bahkan melalui Brigjen. Soewarto, wakil komandan Seskoad menampilkan doktrin Angkatan Darat *Tri Ubaya Shakti* yang melandasi gagasan *Dwi Fungsi ABRI*.

5. Ford Foundation

FORD Foundation adalah sebuah lembaga swasta yang didirikan di Michigan dengan pusatnya di New York, yang diciptakan untuk menghimpun dana bagi program-program Edsel Ford dan Henry Ford tahun 1936. Lembaga ini memberi bantuan melalui markas besarnya di New York dan dua belas kantor di bidang internasional.

Dilaporkan bahwa pada tahun 2007 memiliki aset sebesar 13,7 miliar dolar dan telah mengeluarkan bantuan sebesar 530 juta dolar untuk proyek-proyek yang dipusatkan buat memperkuat nilai-nilai demokrasi, perkembangan masyarakat dan ekonomi, pendidikan, media, kesenian dan budaya, serta hak-hak manusia.

Mengenai Ford Foundation, James Petras menulis 15 Desember 2001, bahwa dari awal tahun 50-an sampai sekarang, CIA telah menyusup ke dalam Ford Foundation secara sangat dalam. Hasil penelitian *Congress Amerika* tahun 1976 menunjukkan bahwa hampir 50% dari 700 pemberian dana di bidang kegiatan internasional oleh lembaga-lembaga utama adalah didanai oleh CIA. [Frances Stonor Saunders, *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War*, Granta Books, 1999, pp.134–135].

CIA berpendapat, bahwa lembaga-lembaga seperti Ford Foundation adalah “jenis yang terbaik dan sangat masuk akal untuk selubung dana.” [Ibid, p.135].

Kerja sama lembaga-lembaga yang prestisius, menurut seorang mantan pekerja CIA, memungkinkan CIA untuk mendanai “program-program aksi rahasia yang luas tak terbatas, menyangkut golongan-golongan pemuda, serikat buruh, universitas-universitas, badan-badan penerbitan, dan badan-badan swasta lainnya.” [Ibid, p.135].

Akhir tahun 1950-an, Ford Foundation memiliki kekayaan seharga tiga miliar dolar. Pada mulanya Ford Foundation hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah di bidang propaganda kebudayaan internasional. Ford Foundation tercatat dalam keterlibatannya dalam aksi-aksi rahasia di Eropa, bekerja sama dengan erat dalam penyusunan *Plan Marshall* dan proyek-proyek khusus dari para pejabat CIA.

Richard Bissel adalah Ketua Ford Foundation tahun 1952. Selama dua tahun menjabat ketua, dia sering bertemu dengan Kepala CIA, Allen Dulles, dan pejabat-pejabat CIA lainnya dalam “sama-sama mencari” ide-ide baru.

Tahun 1954, Bissel meninggalkan Ford Foundation untuk menjadi pembantu khusus Allen Dulles. Di bawah pimpinan Bissel, Ford Foundation adalah “pelopor pemikir Perang Dingin”. Satu di antara proyek Ford Foundation adalah mendirikan badan penerbitan, *Inter-cultural Publications*, dan penerbitan majalah *Perspectives* di Eropa dalam empat bahasa. Menurut Bissel, tujuan Ford Foundation bukanlah untuk “mengalahkan intelektual kiri dalam perjuangan dialektis, tapi untuk menarik mereka supaya meninggalkan posisinya.” [Ibid, p.140].

Para dewan direksi dari balai penerbitan sepenuhnya didominasi oleh budaya pembela Perang Dingin. Karena kuatnya aliran kiri dalam

kebudayaan di Eropa sesuai Perang Dunia kedua, majalah *Perspectives* gagal menarik pembaca dan jadi bangkrut. Disusul dengan majalah lainnya, *Der Monat*, yang didanai dengan dana rahasia dari militer Amerika Serikat di bawah pimpinan Melvin Lasky, diambil over oleh Ford Foundation, dengan memberinya *wajah merdeka*. [Ibid, p.140].

Yang jadi Ketua Ford Foundation tahun 1954 adalah John McCloy, yang sebelumnya adalah pembantu menteri peperangan, presiden Bank Dunia, High Commissioner Jerman yang diduduki ketua Rockefeller’s Chase Manhattan Bank. Sebagai High Commissioner Jerman yang diduduki, McCloy telah memberi wajah bagi sejumlah besar agen CIA. [Ibid, p.141].

McCloy mengintegrasikan Ford Foundation dengan operasi-operasi CIA. Dia menciptakan ikatan khusus antara CIA dengan Ford Foundation. McCloy mengepalai komite konsultasi tiga orang dengan CIA untuk memudahkan penggunaan Ford Foundation untuk mendapatkan dana. Dengan ikatan struktur demikian, Ford Foundation menjadi salah satu organisasi yang dapat dimobilisasi untuk perjuangan politik melawan kaum kiri pro-komunis yang anti imperialis.

Berbagai “front” CIA menerima dana bantuan yang besar dari Ford Foundation. Mereka dinyatakan sebagai organisasi kebudayaan “independen” yang disponsori CIA, grup-grup *human rights*, seniman-seniman dan intelektual yang menerima dana CIA/Ford Foundation. Salah satu penerima donasi terbesar dari Ford Foundation adalah *Kongres untuk Kebebasan Kebudayaan* yang diorganisasi CIA awal tahun 1960 yang menerima 7 juta dolar. Berbagai operasi CIA mendapat jaminan tenaga dari Ford Foundation dengan kerja sama yang berlanjut dengan CIA. [Ibid, p.143].

Semenjak awal, sudah terdapat hubungan struktural yang erat dan saling bertukar personil dalam tingkat tinggi antar CIA dan Ford Foundation. Hubungan struktural sudah didasarkan pada kepentingan bersama yang mereka anut. Hasil dari kolaborasi ini adalah *penerbitan dan penyebaran sejumlah majalah* yang isinya dipakai oleh media massa yang dipergunakan oleh intelektual pro-Amerika untuk melancarkan polemik melawan kaum Marxis dan kaum anti imperialis. Ford Foundation memberi dana bagi organisasi-organisasi anti-Marxis dan kaum intelektual untuk mendapat perlindungan legal bagi kedudukannya sebagai “independen” dari dana pemerintah (CIA).

Adalah penting artinya dana Ford Foundation bagi front kebudayaan CIA untuk merekrut intelektual non-komunis yang didorong untuk menyerang kaum Marxis dan komunis kiri. Banyak kaum kiri yang non-komunis ini kemudian mengaku bahwa mereka “ditipu”, dan bahwa jika

mereka tahu bahwa Ford Foundation adalah berfront dengan CIA, mereka tidak akan membiarkan nama dan *prestise* mereka dikorbankan.

Kekecewaan mereka yang anti-komunis ini jadi terbuka setelah media pers menerbitkan pengakuan kolaborasi Ford Foundation dengan CIA. Tujuan dari kongres-kongres mewah yang diselenggarakan di villa-villa luks dan hotel berbintang lima di Lake Como, Paris, dan Roma, semua pameran megah dan mahal serta majalah-majalah gemerlapan hanyalah untuk mengkritik “imperialisme Sovyet”, dan “tirani komunis” serta “kediktatoran yang dibela kaum kiri”—walaupun dalam kenyataannya Amerika melakukan intervensi penggulingan pemerintah demokratis Jacobo Arbenz di Guatemala, dan pemerintah Mossadegh di Iran, dan Amerika dengan tangguh mendukung para diktator Batista di Kuba, diktator di Republik Dominika, Nikaragua, dan lain-lainnya.

Sejarah kolaborasi Ford Foundation dengan CIA demi Amerika mencapai hegemoni dunia merupakan kenyataan yang terdokumentasi. Sesudah tahun 60-an terdapat perubahan yang tidak mendasar. Ford Foundation lebih fleksibel dalam memberikan dana bantuan dalam jumlah kecil bagi grup-grup hak asasi manusia dan bagi peneliti akademis yang kadang-kadang berbeda dengan politik Amerika. Yang lebih penting, Ford Foundation bekerja lebih terbuka dalam hal kerja sama dengan pemerintah Amerika dalam proyek-proyek kebudayaan dan pendidikan, terutama dengan *Agency of International Development*.

Sebagaimana di tahun-tahun 50-an dan 60-an, Ford Foundation sekarang ini secara terpilih memberi bantuan bagi grup-grup hak-hak asasi manusia yang anti-kiri yang memusatkan serangan pada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia oleh lawan-lawan Amerika, dan mengambil jarak dengan organisasi-organisasi serta para pemimpin hak-hak manusia yang anti-imperialis. Ford Foundation sudah mengembangkan satu strategi yang canggih dalam memberi dana bagi grup-grup hak asasi manusia yang menyerukan pada Washington agar *mengubah politiknya* sambil memblejeti lawan-lawan Amerika tentang pelanggaran-pelanggarannya yang “*sistematis*”. Ford Foundation mendukung grup hak-hak asasi manusia yang tidak ikut dalam aksi-aksi massa anti-globalisasi dan anti neo-liberal.

Dalam periode ofensif besar militer-politik Amerika Serikat dewasa ini, Washington menampilkan masalah “*terorisme atau demokrasi*”, sebagaimana halnya menampilkan masalah “*Komunisme atau Demokrasi*” dalam masa Perang Dingin. Kini, Ford Foundation dengan baik memainkan peranannya sebagai kolaborator untuk jadi pelindung *Perang Dingin Kebudayaan Baru*. Ini

adalah tetap dalam rangka *realisasi the policy of containment*. Khusus mengenai Indonesia, Ford Foundation mempunyai *strategi 20 tahun*.

6. Pakta-Pakta Militer:

***North Atlantic Treaty Organization (NATO),
South-East Asian Treaty Organization (SEATO),
Central Treaty Organization (CENTO).***

UNTUK membendung dan membasmi Uni Sovyet dan negeri-negeri sosialis lainnya, Amerika Serikat memprakarsai pembentukan pakta-pakta militer yang mengepung negeri-negeri sosialis.

Tanggal 4 April 1949, di Eropa dibentuk *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), di Timur Tengah dibentuk CENTO (Pakta Baghdad), 1954 di Asia Tenggara dibentuk SEATO, dan di Selatan dibentuk pakta Australia—New Zealand—US (ANZUS).

Pernah direncanakan pembentukan *Latin American Treaty Organization* (LATO) tapi tidak terwujud.

Ketika pembentukannya, yang jadi anggota NATO adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda, Belgia, Denmark, Swedia, Kanada, Portugal, Italy, Norway, Denmark, dan Iceland dengan kedudukan markasnya di Brussel.

Karena tak sudi pimpinan militer NATO hanya dikuasai Amerika dan Inggris, 1966, Perancis di bawah pimpinan Jenderal De Gaulle mengundurkan diri dari struktur militernya. NATO lumpuh secara militer.

Tapi sesudah Partai Sosialis Perancis di bawah pimpinan Francois Mitterand memerintah, Perancis kembali aktif dalam struktur militer NATO. NATO berjaya lagi sebagai Pakta Militer.

Di samping mendukung NATO, Partai-partai sosial demokrat Eropa aktif mendukung Perang Dingin yang digalakkan Amerika Serikat untuk membendung dan membasmi URSS dan negara-negara sosialis lainnya di Eropa. Sesudah URSS ambruk, NATO memperluas keanggotaannya sampai masuknya sejumlah bekas negara sosialis, bekas anggota Pakta Warsawa.

Sekjen pertama NATO, Lord Ismay, menyatakan, bahwa tujuan NATO adalah: “*menjaga Rusia supaya berada di luar, Amerika masuk, dan Jerman di bawah.*” [Reynolds, *The origins of the Cold War in Europe. International perspectives*, p.13].

Pasal V dari perjanjian Pakta NATO berbunyi: “serangan terhadap satu anggota, berarti serangan terhadap semua anggota NATO.” [“NATO and the fight against terrorism”. North Atlantic Treaty Organization. <http://www.nato.int/issues/terrorism/evolve02.html>. Retrieved 27 May 2011].

Sesudah robohnya Tembok Berlin tahun 1989, NATO terlibat dalam berantakannya Yugoslavia tahun 1990 sampai 1995, dengan ikut operasi-operasi militer, dan kemudian di Serbia dalam tahun 1999. Secara politik, NATO berusaha membuka hubungan baik dengan bekas musuh-musuhnya, yang bermuara pada penerimaan bekas negara-negara Pakta Warsawa menjadi anggotanya pada tahun 1999 dan 2004.

Sesudah terjadinya serangan 11 September terhadap gedung Pusat Perdagangan Dunia New York, yang dianggap sebagai serangan terhadap salah satu anggota NATO, maka dengan mendasarkan pada *Pasal V Pakta NATO*, pasukan NATO dikerahkan melawan terorisme Al Qaida yang dipimpin Osama Bin Laden di Afganistan. Di samping itu, NATO berperan mengirim para pendidik militer ke Irak, membantu operasi kontra pembajakan. Dan kegiatan NATO berlanjut, dengan atas nama melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973, Angkatan Udara NATO dikerahkan demi pelaksanaan putusan tentang *no-fly zone* di udara Libya.

Tanggal 16 Desember 2002 tercapai persetujuan antara NATO dan Persatuan Eropa yang disebut *Persetujuan Berlin Plus*. Dengan persetujuan ini, Persatuan Eropa diberi kemungkinan untuk menggunakan alat-alat NATO di kala diperlukan untuk bertindak secara bebas dalam situasi krisis internasional, dengan syarat-syarat bahwa NATO sendiri tidak mau bertindak—yang disebut “*right of first refusal*”—hak penolakan pertama.

Sekarang terdapat 28 negara anggota NATO. Yang paling baru adalah Albania dan Kroasia yang masuk NATO dalam April 2009. Gabungan pengeluaran kepentingan militer semua anggota NATO adalah lebih dari 70% pengeluaran dunia untuk pertahanan. Amerika Serikat sendiri mengeluarkan sebesar 43% dari jumlah anggaran militer dunia. [“*The 15 countries with the highest military expenditure in 2009*”. <http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/15majorspenders>. Retrieved 22 August 2010.]

Sampai Juli 2011, NATO berjaya melakukan operasi menggunakan pesawat pembom dan tempur membantu kekuatan penentang Moammar Gadhafi di Libya.

South-East Asian Treaty Organization (SEATO) dibentuk tahun 1954 di kala John Foster Dulles sedang galak melawan komunisme, membendung

perkembangan pengaruh RRT ke Asia Tenggara. Yang menjadi anggotanya adalah: Amerika Serikat, Inggris, Filipina, Pakistan, Thailand, dan Ceylon.

Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno menentang masuk SEATO. Bahkan aktif menyelenggarakan Konferensi Asia—Afrika di Bandung. Usaha CIA menyabot Konferensi Bandung dengan meledakkan pesawat *Kashmir Princess*, milik Pakistan Air Lines yang membawa delegasi Tiongkok ke Konferensi, mengorbankan sejumlah wartawan, tapi tak berhasil membunuh PM Zhou Enlai.

Dengan hadirnya PM Zhou Enlai dan Presiden Ho Chi Minh dalam Konferensi Bandung, maka RRT dan Republik Demokrasi Vietnam tak terbendung masuk dunia internasional.

SEATO tak berdaya membendung RRT dari Selatan. Kekalahan Amerika dalam Perang Vietnam untuk membasmi komunis Indocina dan menyalahkan Republik Demokrasi Vietnam mengalami kegagalan total. Thailand, Ceylon, dan Pakistan, anggota SEATO berkembang menjadi sahabat-sahabat Republik Rakyat Tiongkok. Demikian pula Filipina. Maka SEATO pun jadi tak berdaya, dan secara diam-diam menjadi lenyap.

Central Treaty Organization (CENTO), asalnya bernama *Middle East Treaty Organization* (METO), juga terkenal dengan Pakta Baghdad, didirikan tahun 1955. Anggota-anggotanya adalah Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. Tahun 1958, Amerika Serikat masuk Komite Militer Pakta ini. Markasnya berkedudukan di Baghdad (1955—1958) dan di Ankara (1958—1979). Tahun 1979, Pakta ini dibubarkan. Pakta Militer ini dinilai sebagai yang paling tidak sukses dalam persekutuan Perang Dingin. [Martin, Kevin W. (2008). “*Baghdad Pact*”. In Ruud van Dijk, et.al., *Encyclopedia of the Cold War*, New York: Routledge, pp.57.]

7. Dari Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Jadi Pasukan Anti Ajaran Bung Karno dan Jadi Pembasmi Komunis

5 OKTOBER 1945, Presiden Soekarno mendekritkan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia. Waktu itu disebut *Tentara Keamanan Rakyat* (TKR). Selanjutnya, 5 Oktober diperingati setiap tahun sebagai *Hari Angkatan Perang Indonesia*.

Pasukan bersenjata yang dibentuk Jepang, *Pembela Tanah Air* (PETA), secara resmi dibubarkan Jepang 22 Agustus 1945. Lahirnya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia didahului oleh munculnya berbagai barisan bersenjata Rakyat yang terbentuk dalam rangka melucuti pasukan-pasukan

Jepang yang kalah dalam Perang Dunia kedua, dan untuk membela kemerdekaan setelah diumumkannya Proklamasi 17 Agustus 1945.

Organisasi *Badan Keamanan Rakyat (BKR)* telah lahir pada awal September dan organisasi *BPKKP (Badan Penolong Keluarga Korban Perang)* dan *BPP (Badan Pembantu Prajurit)* yang dibentuk oleh Pemerintah Surabaya Jawa Timur pada tanggal 3 September 1945, dilebur dalam organisasi *BKR*, karena dua organisasi tersebut dianggap sudah tidak relevan dengan situasi dan kondisi pada waktu itu. *BKR* dibentuk pada 9 September 1945 dalam Gedung *GNI* yang bersejarah, satu bulan sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu. [Hario Kecik, *Pemikiran Militer 1 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2009, hal.192].

Di Surabaya terbentuk *Polisi Tentara Keamanan Rakyat (PTKR)* dengan markas di bekas Markas *Kempei Tai* yang mereka duduki. *PTKR* terbentuk 3 Oktober 1945 dan menjadi instansi resmi setelah diumumkannya *Dekrit 5 Oktober 1945*. Polisi Militer itulah yang mengawal perundingan antara wakil-wakil Pemerintah Indonesia dan Inggris memakai seragam rapi dengan ban lengan (*MP*) dan bersenjata pistol.

Seluruh kekuatan *Kempei Tai* dapat dievakuasi ke kamp POW (*Prisoners of War*) di *Jaar Markt* di Ketabang dengan meninggalkan seluruh persenjataan dan ratusan pedang samurai. Kemenangan terakhir ini menimbulkan konsep militer untuk menyerbu semua pos tentara Jepang di semua keresidenan Surabaya dan memindahkan seluruh persediaan senjata, amunisi, dan bahkan peledak tentara Jepang dan bekas tentara Belanda yang sangat besar di gudang-gudang bawah tanah di daerah Batu Poron Pulau Madura, ke daerah Madiun dan Kediri. [Hario Kecik, 2009, hal.199].

Menurut Hario Kecik, mungkin latar belakang *Dekrit Pemerintah 5 Oktober 1945* asal inspirasinya dari fakta bahwa rakyat Surabaya sudah mendapat semua senjata ringan, senjata berat, dan lain-lain alat perang Jepang dan bekas Belanda yang ada di Jawa Timur dan secara nyata dapat membentuk kekuatan bersenjata terdiri atas kurang lebih 140.000 orang. [Hario Kecik, 2009, hal. 201].

Di kala Amir Sjarifuddin menjabat Menteri Keamanan, dengan ditandatangani Presiden Soekarno 7 Januari 1945, pemerintah mengeluarkan Ketetapan No 2/S.D. yang menetapkan nama *Tentara Keamanan Rakyat* menjadi *Tentara Keselamatan Rakyat*, singkatnya tetap *TKR*; Kementerian Keamanan diubah menjadi Kementerian Pertahanan.

Menurut Kolonel Cba Dr.Ir.Drs. Djoko Susilo, MT, TNI pada awal kelahirannya hingga sekarang ini merupakan hasil metamorfosis lebih 5 kali. Mulai dari *BKR (Badan Keamanan Rakyat)* – *TKR (Tentara Keamanan Rakyat)* –

TKR (Tentara Keselamatan Rakyat) – *TRI (Tentara Republik Indonesia)* – *TNI (Tentara Nasional Indonesia)*. Dalam perkembangan selanjutnya berubah sampai menjadi ABRI dan kemudian menjadi TNI kembali. [Kolonel Cba Dr.Ir.Drs. Djoko Susilo, MT, Wakil Kepala (Waka) Dinas Sejarah Angkatan Darat., *TNI dalam Refleksi Sejarah Dikotomi Sipil-Militer dan Unintended Result*, 12 Oktober 2012]

Dalam pembentukan Angkatan Bersenjata RI, mencuat masalah pucuk pimpinannya. “Pada waktu itu disebut dua nama, yaitu Soedirman bekas Daidanco PETA dan Oerip Soemohardjo bekas kapten *KNIL (Koningkelijke Nederlandsch Indische Leger—Tentara Kerajaan Hindia Belanda)* yang dipensiun sebagai mayor. Masalah itu ternyata menimbulkan pertentangan di kalangan politik. Golongan intelektual penganut Sjahrir mendukung bekas Mayor Oerip Soemohardjo dan golongan intelektual kelompok Nasionalis dan pemuda pejuang bersenjata mendukung Soedirman. Hal ini mungkin karena Soedirman ikut dalam pertempuran di Ambarawa yang pernah terjadi antara pemuda pejuang Semarang—Magelang melawan kekuatan satu batalyon tentara Inggris yang diboncengi beberapa elemen bersenjata dari *NICA (Belanda)*, sedangkan kelompok Tan Malaka atau *Murba* tidak setuju dengan kedua calon itu. Mereka memperjuangkan Tan Malaka sebagai “*Bapak Republik*” yang tidak setuju diadakannya perundingan dengan Belanda dan Inggris [Hario Kecik, 2009, hal.250—251]. Kalangan yang mendukung Oerip menentang Soedirman dengan menyatakan bahwa Soedirman hanyalah sebagai “*de dorps onderwijzer*” (guru sekolah desa yang tidak mengerti bahasa Belanda).

Dalam tahap permulaan pembentukan Markas Besar Tentara pada waktu itu sudah nampak upaya-upaya dari kelompok politik tertentu untuk menempatkan orangnya. Mayor Jenderal Oerip Soemohardjo adalah jagonya para intelektual pemuda kelompok sosialis. [Hario Kecik, 2009, hal.253].

Akhirnya diputuskan oleh pemerintah bahwa Soedirman sebagai Panglima Besar dan Oerip Soemohardjo sebagai Wakil Panglima Besar. Para bekas opsir *KNIL* yang dikalahkan oleh Jepang akhirnya masuk jajaran *TRI* di eselon teratas tingkat komando tentara Indonesia. Hal ini akan mempunyai pengaruh dalam rangka panjang perkembangan selanjutnya Tentara Republik Indonesia. Di samping Tahi Bonar Simatupang, terdapat Abdul Haris Nasution yang berasal dari perwira *KNIL*, menduduki jabatan menentukan dalam pucuk pimpinan Angkatan Darat. Sejak semula T.B. Simatupang sudah bersikap tegas anti komunis.

T.B. Simatupang yang sempat menjabat *Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP)* RI adalah perwira tinggi yang anti-komunis, yang mempunyai

pandangan strategis, setelah menarik pelajaran dari perkembangan perjuangan rakyat negeri-negeri Amerika Latin dan Tiongkok. Simatupang berpendapat harus “mencegah terulangnya pengalaman di daratan Cina yang akhirnya Partai Komunis mengalahkan Partai Kuomintang dan komunisme menggantikan San Min Chui”. [T.B. Simatupang, *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991, hal.157 – 158].

Simatupang menyatakan bahwa “di daratan Cina pada suatu waktu Kuomintang telah dikalahkan Kun Chan Tang dan bahwa San Min Chui telah diganti dengan komunisme”.... “maka pada suatu ketika dapat timbul di Indonesia partai komunis merebut kekuasaan dan bahwa Pancasila diganti dengan komunisme.” [Ibid, hal.165].

Dalam buku *Membuktikan Ketidakbenaran Sebuah Mitos*, Simatupang memaparkan perbedaan pendapatnya mengenai hal ini dengan Presiden Soekarno. [Ibid, hal.162 – 167].

Dalam rangka menciptakan syarat buat pelarangan PKI, pada awal 1961 Simatupang menulis makalah yang memaparkan argumentasi bahwa “Marxisme-Leninisme adalah bertentangan dengan Pancasila.” Ini terjadi pada saat mulai berlakunya Demokrasi Terpimpin di bawah pimpinan Bung Karno, dan tokoh-tokoh pimpinan PKI mulai masuk ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara.

Demikian pula A.H. Nasution. Bahkan A.H. Nasution dengan menduduki jabatan KSAD, Wakil Panglima Besar Angkatan Bersenjata dan Menteri Pertahanan, banyak melahirkan gagasan-gagasan yang berlawanan dengan politik Bung Karno, terutama dalam menentang persatuan nasional berporos *nasakom*, melahirkan gagasan strategi pertahanan *Perang Wilayah*, dan dalam melahirkan gagasan *dwifungsi ABRI* serta melahirkan *orde baru* menggantikan *orde lama*. [Baca Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai, Perjalanan Hidup A.H. Nasution*, Grafitipers, Jakarta, cetakan kedua, 2002, 405 halaman].

Dalam berbagai kedudukannya, terutama sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Menteri Pertahanan, Nasution mengendalikan Angkatan Darat untuk dengan tangguh bersikap *anti komunis*, dan berusaha menempatkan militer pada pucuk kekuasaan negara. Ini berlawanan dengan politik-politik Bung Karno yang memelopori realisasi semboyan *persatuan nasional* berporoskan *nasakom*. Sudah semenjak tahun 1948, dengan realisasi “Red Drive Proposals”, dalam pelaksanaan program Kabinet Hatta, Nasution adalah arsitek “Rera” , “reorganisasi dan rasionalisasi” Angkatan Bersenjata yang bermuara pada disingkirkannya unsur-unsur kiri dari Angkatan Bersenjata RI; [PDAT, 2002, hal.59].

Perkembangannya memuncak pada “Peristiwa Madiun” dengan Musso dan pimpinan tertinggi PKI dibunuh, termasuk mantan PM Amir Sjarifuddin, Nasution lah yang membuat perintah pada Angkatan Perang RI menindak dan menangkap para tokoh juga membubarkan organisasi-organisasi pendukung dan simpatisan PKI. [Idem, hal.61].

Pelaksanaan “Rasionalisasi” menyebabkan tersingkirnya unsur-unsur kiri dari Angkatan Bersenjata. Ini menimbulkan ketidakpuasan yang melahirkan aksi-aksi perwira dan prajurit yang diwakili Kolonel Bambang Supeno, bekas perwira PETA Jawa Timur, bekas Komandan Akademi Militer, Candra Dimuka.

Tanggal 13 Juli 1952, Bambang Supeno berkirim surat kepada pemerintah, presiden, parlemen, dan semua pejabat teras AD. Isinya antara lain menyatakan bahwa jiwa patriotisme revolusioner telah meluntur karena – dengan rencana “perampingan” itu – para pejabat AD lebih mengutamakan profesionalisme teknik kemiliteran dan menempatkan patriotisme sebagai hal sekunder.” [Idem, hal.85].

Peristiwa ini memicu parlemen melahirkan mosi Manai Sophiaan dari PNI yang menuntut perubahan pimpinan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang serta menghentikan program MMB (*Misi Militer Belanda*). Mosi ini menyebabkan kecewanya Nasution sebagai KSAD. Inilah yang memicu Nasution memelopori peristiwa “17 Oktober 1952”, yaitu peristiwa menyampaikan petisi dengan aksi demonstrasi yang digerakkan AD dengan mengarahkan meriam-meriam ke istana presiden dan menuntut presiden membubarkan parlemen. Nasution jadi jurubicara menyampaikan petisi. Tuntutan petisi ini ditolak dan dijawab presiden dengan menyatakan tidak bersedia menjadi diktator. [Idem, hal.86 – 87].

Peristiwa ini berkembang sampai Nasution dipecat dari KSAD. Pemilihan ganti KSAD menimbulkan kekisruhan kalangan pucuk pimpinan Angkatan Darat. Wakil KSAD Zulkifli Lubis banyak berperan dalam upaya mempersatukan kembali AD. Upaya Lubis menghasilkan “rapat kolejial” di Jogjakarta 15–21 Februari 1955 yang menghasilkan kesepakatan berupa “Piagam Jogjakarta”, piagam keutuhan Angkatan Darat RI yang prinsipnya mengikis sisa-sisa benih perpecahan akibat Peristiwa 17 Oktober 1952.

Tanggal 7 November 1955, kabinet memutuskan mengangkat kembali Nasution jadi KSAD dengan pangkatnya dinaikkan jadi mayor jenderal. Nasution tetap mencengkam *pendirian anti-komunisnya* dan *usaha menempatkan militer dalam pucuk kekuasaan negara*. Nasution tampil dengan konsep peran TNI yang “tepat” di dalam kehidupan kenegaraan, yaitu lewat

konsepsi “*Jalan Tengah Tentara*”, cikal bakal dwifungsi ABRI, yang kemudian bermuara pada *Dekrit Presiden 5 Juli 1959*. [*Idem*, hal.100].

Maka terjadi dan berkembanglah kerja sama presiden dengan Nasution. Nasution sendiri tak menyalakan “peluang emas” ini. Ia menggunakan kesempatan emas ini sebagai *political bargaining* untuk memasukkan sejumlah aspirasinya. Nasution menawarkan sejumlah produk kontemplasinya kepada Soekarno.

Yaitu *pertama*, Nasution bersedia menjadi *co-formateur* kabinet tanpa diekspos kepada khalayak dan media massa.

Kedua, mendesak Soekarno agar anasir-anasir PKI – sebagai lawan politik pihak militer – tidak disertakan di dalam kabinet.

Ketiga, ada wakil militer yang duduk di kabinet. Untuk itu Nasution menunjuk Kolonel Suprajogi (Menteri Urusan Produksi) serta Kolonel Nazir (Menteri Perhubungan). Dan mengusulkan agar sistem kerja Kabinet Karya yang akan dipimpin Juanda itu menggunakan sistem pengorganisasian seperti di MBAD. Serta mengusulkan dibentuknya Kementerian Negara Urusan Kerja Sama Sipil–Militer untuk mengakhiri polemik dikotomi sipil–militer. [*Idem*, hal.113].

Dalam pembentukan *Dewan Nasional* yang merupakan salah satu program Kabinet Juanda, Nasution berhasil memasukkan wakil-wakil militer lewat pengertian diakuinya militer sebagai *golongan fungsional*. Selanjutnya Nasution mengusulkan dalam sidang-sidang *Panitia Perumus Demokrasi Terpimpin* tanggal 14–15 Agustus 1958 agar militer diberi tempat di Dewan Nasional, DPR, maupun kabinet. [*Idem*, hal.114].

Menurut Nasution, TNI tak akan bertindak sebagai penonton di pinggir arena politik, akan tetapi TNI akan turut terlibat dalam kebijakan nasional di bidang politik, ekonomi, keuangan, dan internasional. [*Idem*, hal.115].

Sidang-sidang Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar baru bagi RI. Nasution tampil dengan usul kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun Bung Karno atas nama pemerintah mengajukan usul kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Konstituante pun gagal mengambil keputusan.

Pada tanggal 5 Juli pagi, Soekarno bertemu dengan kabinet inti. Dan sorenya di hadapan ribuan massa, yang sekali lagi dikumpulkan atas “inisiatif” Nasution, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato. Pidatonya itu ternyata adalah *Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD '45*. [*Idem*, hal.123].

Demokrasi Terpimpin ternyata memberi syarat bagi perkembangan PKI. Kemajuan dan sepak terjang PKI meresahkan pihak AD. Dengan wewenang

yang masih melekat sebagai *Peperpu (Penguasa Perang Pusat)*, Nasution bersama para panglima di pusat maupun daerah berupaya mencegah pengaruh PKI. Nasution memperoleh kesempatan untuk meredam aktivitas politik PKI sebagai sebuah partai yang sah dan konstitusional atau tidak.

Tanggal 31 Desember 1959, pemerintah mengeluarkan Penpres No 7-1959 mengenai: *Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Partai*. Nasution berpendapat, bahwa dalam konsep semula ditentukan bahwa partai-partai yang memberontak dibubarkan. Dengan itu terkenallah bukan saja partai-partai yang tokoh-tokohnya terlibat dalam PRRI, melainkan juga PKI. Karena itu Nasution mendukungnya. [Dr. A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 5, CV Haji Masagung, Jakarta MCMLXXXIX, hal.21].

Menurut Penpres itu akan ditentukan, apakah sebuah partai memiliki hak hidup berorganisasi atau dibekukan. Tak terkecuali PKI. Presiden Soekarno membentuk *tim penguji* yang terdiri dari Mendagri Ipik Gandamana, Menteri Pembina Jiwa Revolusi Dr. Roeslan Abdulgani, dan Menteri Keamanan Nasional KSAD A.H. Nasution. Kedua anggota lainnya menolak untuk “menguji” PKI, mereka mempercayakan kepada Nasution.

Menurut asumsi Nasution, walaupun dalam Penpres itu dirumuskan partai-partai yang sedang memberontak, PKI tetap tak akan lulus untuk persyaratan ideologis. Persoalannya adalah, menurut Nasution, bagaimanakah cara mempertautkan Marxisme dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Nasionalisme. Bukankah PKI juga terikat secara internasional dengan partai-partai komunis lainnya?

Tak tercapai kebulatan antara ketiga anggota panitia mengenai klasifikasi terhadap PKI. Diserahkan pada Presiden Soekarno. Presiden mengambil jalan tengah, minta PKI mengubah Peraturan Dasarnya dengan menyatakan menerima ketentuan-ketentuan yang dituntut oleh Penpres No.7. Dengan Kongres Nasional Luar Biasa, PKI mengamendir Peraturan Dasarnya, dengan menyatakan bahwa PKI menerima Pancasila sebagai dasar negara. Berbeda dengan harapan Nasution, PKI lulus, diakui sebagai partai yang sah.

Tidak berhasil dengan metode legal-konstitusional, maka Nasution berdasar wewenang keadaan darurat menggunakan metode inkonvensional. Nasution memang memiliki legitimasi untuk menindak PKI berdasarkan kriteria aktivitas yang dianggap dapat membahayakan keutuhan nasional dan bangunan sistem demokrasi terpimpin.

Tindakan represif diambil Nasution. Berbagai aktivitas rapat umum dan pemogokan buruh yang diadakan PKI dan partai-partai lainnya dilarang. Demikian pula “organ” PKI *Harian Rakjat* yang berupaya bertahan hidup

dengan sirkulasi terbatas karena tekanan embargo jatah kertas koran. Beberapa penerbitan majalah dan brosur PKI dilarang.

Karena tekanan AD yang terus-menerus sebagai representasi penguasa perang terhadap PKI, secara perlahan polarisasi dalam realitas politik makin mengarah pada dua kubu. Yaitu Soekarno dan PKI di satu pihak serta AD dari faksi yang anti-PKI di lain pihak untuk membedakan dengan mereka yang pro-Nasakom dan Soekarno.

Ketidak-harmonisan “mitra” Soekarno—Nasution makin kentara dan melebar, apalagi ketika Soekarno mau memasukkan orang-orang PKI ke dalam kabinetnya. Atas dasar persatuan nasakom, Soekarno mencoba untuk memasukkan unsur-unsur PKI sejak akhir tahun 1960-an. Upaya Soekarno tersebut ditentang hebat faksi AD anti-PKI.

Dan akhirnya upaya tadi baru terwujud pada bulan Maret 1962. Ketika itu D.N. Aidit dan M.H. Lukman – masing-masing sebagai ketua dan wakil ketua PKI – selain menduduki jabatan yang telah diemban sebelumnya sebagai wakil ketua MPRS dan wakil ketua DPR-GR, mereka dimasukkan juga ke dalam formasi kabinet dengan kedudukan *quasi-cabinet status*, termasuk di dalam *Badan Musyawarah Pimpinan Negara*.

Presiden Soekarno juga memperjuangkan agar anggota dan simpatisan PKI bisa ditempatkan sebagai gubernur kepala daerah. Keinginan Presiden Soekarno ini ditentang Nasution. Presiden setuju, tapi mengambil jalan tengah, supaya membolehkan jadi wakil gubernur.

Memenuhi politik TNI yang direkayasa Nasution, menyerahnya kaum pemberontak *PRRI—Permesta* yang disusul dengan kembalinya Burhanuddin Harahap, Syafruddin Prawiranegara, dan Ventje Sumual ke “pangkuan ibu pertiwi” telah melahirkan perbedaan pendapat.

Pada bulan Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk menahan dan menangkap para pemimpin PSI—Masyumi. Termasuk mereka yang dianggap tidak terlibat di dalam *PRRI*. Sebaliknya, Nasution melihat dalam dimensi strategis-politis lain, yaitu kembalinya pemimpin-pemimpin *PRRI—Permesta* dapat memperkuat barisan anti-komunis dalam menghadapi gerakan komunisme di Indonesia.

Ketidakpuasan atas pembentukan *DPR-GR* dan menghadapi kian meningkatnya kedudukan PKI dalam lembaga-lembaga tinggi negara melahirkan reaksi dan perlawanan dalam bentuk dibangunnya organisasi *Liga Demokrasi*, yang didukung tokoh-tokoh partai IPKI, PSI, Masyumi, Katolik, Parkindo.

Guy Pauker, agen CIA, konsultan *RAND Corporation* menilai, “aktor intelektual di balik pendirian *Liga Demokrasi* adalah *SUAD*. Tujuannya

adalah menciptakan krisis, hingga TNI dapat melakukan kup dengan dukungan partai-partai tersebut. Tentu saja, setelah sebelumnya menentang komposisi *DPR-GR* serta PKI. [*Ibid*, hal.135].

Menurut Nasution, pendirian *Liga Demokrasi* itu muncul atas inisiatif dan prakarsa sekelompok perwira intel AD seperti Kolonel Sukendro dan para tokoh IPKI. Selanjutnya menurut Nasution, Sukendro pernah mengaku sebagai pendiri *Liga Demokrasi*.

Baik kawan, maupun lawan meramalkan, jika berlangsung pemilihan umum demokratis, PKI akan tampil sebagai pemenang. Untuk menghindari ini, Nasution dan Angkatan Darat berusaha mencegah berlangsungnya pemilihan umum, dengan menuntut pemerintah menundanya. Pemerintah menyetujuinya.

Dalam menentang semboyan persatuan nasional berporos *nasakom*, Nasution menampilkan usul menggunakan istilah *Politik Karya (Polkar)*. Sementara itu, Bung Karno maju terus dengan rencana *retoolingnya*, termasuk *retooling* DPR dengan membentuk *DPR Gotong-Royong*. Untuk membicarakan masalah ini, presiden mengundang ke Tampaksiring, Ali Sastroamidjojo (PNI), Idham Chalid (NU), D.N. Aidit (PKI), dan Nasution (ABRI). Nasution mengutus Kolonel Wiluyo Puspojudo dengan mengemban instruksi untuk mengamendir *Nasakom* dengan *Politik Karya (Polkar)*, yaitu parpol-parpol plus golongan-golongan karya sebagai istilah menghimpun secara potensi sejalan dengan konsensus di Dewan Nasional. Dengan demikian, posisi partai politik (parpol) dan golkar adalah sederajat. Dalam *Nasakom* terasa dominasi bahkan monopoli parpol. [Dr.A.H. Nasution, 1989, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 5, cetakan kedua, CV Haji Masagung, Jakarta MCMLXXXIX, hal.7].

Setelah memperoleh jaringan yang diinginkan, AD berinisiatif untuk menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional di luar *Front Nasional* dengan nama *Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)*. Wadah baru ini dimaksud untuk menandingi *Front Nasional* yang jelas-jelas pro-nasakom, dan sekaligus untuk menghadapi PKI dalam bentuk penggalangan massa. [PDAT, 1998, hal.136].

Sekber Golkar inilah yang menjadi cikal-bakal *Partai Golkar* penyangga rezim orba Soeharto.

Berbagai gagasan diajukan dan diambil Nasution untuk mencegah kemajuan PKI. Antara lain mengusulkan presiden seumur hidup, menentang berlangsungnya *Nasakomisasi* dalam Angkatan Bersenjata, menentang pengangkatan wakil PKI jadi gubernur, memelopori penerbitan

surat-surat kabar *Berita Yudha, Angkatan Bersenjata, Suara Islam*, untuk mengatasi pencabutan izin surat-surat kabar yang anti *Nasakom*.

Di bawah pimpinannya sebagai Ketua MPRS, menolak pidato Bung Karno "*Nawaksara*" hingga menurunkan Bung Karno dari kedudukan Presiden RI. Salah satu kontribusi terbesar Nasution, yang saat itu menjabat Ketua MPRS, adalah *mengakhiri kekuasaan Presiden Soekarno*. [Tim PDAT, *Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai, Perjalanan Hidup A.H. Nasution, Grafitipers*, cetakan kedua, Jakarta, 2002, hal.232 dan Dr. A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 5, cetakan kedua, Grafitipers, CV Haji Masagung, Jakarta MCMLXXXIX].

Tanggal 6 Maret 1964, Dubes AS, Jones, mengirim telegram kepada Departemen Luar Negeri AS tentang pembicaraannya dengan Nasution perihal menguatnya posisi PKI di Indonesia. Dinyatakan bahwa Nasution memberi jaminan bahwa bagaimanapun AD akan *tetap anti-komunis dan pro AS*. Dalam laporan itu Jones menambahkan, dirinya mengakui akan melanjutkan percakapan dengan menghubungi para pemimpin AD lainnya, terutama Ahmad Yani.

Telegram Dubes Jones lainnya kepada Deplu AS tanggal 22 Januari 1965 mengungkapkan, bahwa salah seorang staf kedutaan (mungkin Kolonel Willis Ethel yang disinyalir anggota CIA, *ed.*) telah mendiskusikan suatu rencana sehubungan dengan masa pasca Soekarno dengan Jenderal S. Parman. Diskusi itu disebut-sebut sebagai bukti yang menunjukkan sentimen kuat di pucuk pimpinan AD untuk mengambil kekuasaan sebelum Soekarno yang telah sakit-sakitan itu meninggal dunia. [PDAT, 2002, hal.151].

Semenjak masa pembentukannya, di kalangan kaum kiri terdapat pandangan, bahwa tentara adalah dilahirkan oleh revolusi, adalah berasal dari anak-anak tani dan buruh. Sampai pada tahun enam puluhan, pandangan ini dipertahankan terus oleh pimpinan PKI.

Dalam pidato kuliahnya di depan *Seskoad*, 1 Juli 1964, D.N. Aidit menyatakan bahwa tentara adalah alat revolusi, anti imperialisme. "Angkatan Bersenjata RI adalah anti-fasis, demokratis, anti-imperialis, dan bercita-cita sosialisme Indonesia. Ia adalah alat untuk mengabdikan Revolusi Indonesia, untuk mengubah masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis sebagai landasan untuk menuju ke sosialisme." [D.N. Aidit, *Angkatan Bersenjata dan Penyesuaian Kekuasaan Negara dengan Tugas2 Revolusi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal.7].

Satu penilaian yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan *Red Drive Proposals* hasil pertemuan rahasia Sarangan, Juli 1948, maka dengan plan *Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera)* pemerintahan Hatta, berlangsunglah pembersihan Angkatan Bersenjata RI dari anasir-anasir kiri. Walaupun yang jadi Panglima Besar adalah Sudirman yang bukan didikan militer Belanda, pada pokoknya pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata didominasi oleh perwira-perwira bekas KNIL, atau hasil didikan militer Belanda. Mulai dari Jenderal Mayor Oerip Soemohardjo, Kolonel Abdul Haris Nasution, Kolonel Tahi Bonar Simatupang, Kolonel Kawilarang, dan lain-lainnya.

Untuk membendung PKI dan mengusahakan pelarangannya, berlangsung pelaksanaan Penpres No.7/1959 dan Perpres No.13/1960 yang menetapkan, bahwa partai-partai politik harus memiliki dasar yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan tujuannya tidaklah untuk mengubah dasar negara. Oleh karena PKI menganut ideologi pembimbing Marxisme Leninisme, maka dikampanyekanlah bahwa *Marxisme-Leninisme bertentangan dengan Pancasila*. Inilah yang dilakukan T.B. Simatupang. [Baca H. Rosihan Anwar, *Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006].

Generasi selanjutnya yang mendominasi pimpinan Angkatan Darat adalah hasil didikan akademi-akademi militer Amerika, Fort Benning, Fort Leavenworth, Fort Bragg. Di antaranya terdapat Achmad Yani, Brigjen. Soewarto, Brigjen. Sukendro, Sarwo Edi Wibowo.

Pada tahun 1965, perwira Angkatan Darat yang dididik di akademi-akademi militer Amerika sudah berjumlah 2000 orang. Generasi perwira-perwira didikan akademi-akademi militer Amerika inilah yang mendominasi pimpinan Angkatan Darat sampai saat ini.

Menurut David Jenkins, selama tahun 1957—1959, "para pemimpin militer menolak segala gagasan para pemimpin sipil tentang kedudukan militer sebagai alat negara non-politik dan berdampingan dengan Presiden Soekarno. Mereka menolak menjadi salah satu dari dua pilar pemerintah menghadapi *musuh besar mereka, Partai Komunis Indonesia (PKI)*, yang sangat populer di kalangan para pemilih dan berada di luar pemerintahan. Kuatnya pengaruh militer secara dramatis di masyarakat pertama kali mendapat legitimasinya ketika diterapkannya keadaan darurat, kemudian dengan doktrin dwifungsi ABRI yang digagas Jenderal Nasution." [David Jenkins, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975—1983*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010, hal.2, *huruf miring Pen.*].

Dalam periode 1959—1965, para pemimpin tentara, dengan tokohnya Jenderal Abdul Haris Nasution yang tangguh anti-komunis memperluas dan

mempertahankan kedudukan mereka dalam sektor non-militer. Sementara itu doktrin mereka—dengan rumusan yang dikembangkan oleh Brigjen. Soewarto, Komandan *Seskoad* di Bandung—digunakan untuk melegitimasi apa yang kemudian disebut sebagai “jalan tengah tentara”. Untuk memastikan berlanjutnya peran militer di masyarakat, upaya ini setidaknya sebagian didorong oleh persetujuan pihak militer dengan PKI yang pada masa 1962–1965 membangun kekuatan dalam “segitiga kekuatan” Soekarno-tentara-PKI.

Seskoad adalah candradimuka, tempat penggemblengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat. Di bawah pimpinan Brigjen. Soewarto yang bekerja sama erat dengan CIA dan *RAND Corporation*, *Seskoad* menjadi tempat lahirnya doktrin Angkatan Darat yang anti-komunis.

Doktrin Angkatan Darat *Tri Ubaya Shakti* dihasilkan oleh seminar pertama Angkatan Darat tahun 1964 di bawah prakarsa Jenderal Achmad Yani. Doktrin ini memaklumkan kesetiaan Angkatan Darat pada Pancasila dan ajaran-ajaran Bung Karno.

Tahun 1966, *Seskoad* menyelenggarakan lagi Seminar Angkatan Darat ke-2 yang merombak *Tri Ubaya Shakti*, membuang semua ajaran revolusioner Bung Karno, “membersihkan” bau Soekarnoisme dan paham kiri. [David Jenkins, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba*, hal.6, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010].

Bahkan mukadimahny menyatakan bahwa Komunisme, Marxisme-Leninisme, Maoisme, bertentangan dengan jiwa Pancasila, menyatakan menolak Marxisme-Leninisme dan ajaran-ajaran Mao. Tri Ubaya Shakti juga jadi bernapas rasialisme anti-ras Tionghoa. Seminar merumuskan gagasan dwifungsi ABRI dengan menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata mengemban dua tugas sebagai “kekuatan militer” dan sebagai “kekuatan sosial-politik”. Sebagai “kekuatan sosial-politik” tugas tentara meliputi bidang “ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama”. *Tri Ubaya Shakti* adalah doktrin perjuangan Angkatan Darat yang melandasi usaha penggulingan kekuasaan Bung Karno, yaitu pembentukan *orde baru menggantikan orde lama*, yang dijelajahi *komunisto-fobi*. Di dalamnya dirumuskan: bahwa “masih ada kekuatan PKI dan pendukung-pendukungnya yang tidak bisa menerima usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan pembaharuan dari orde lama ke orde baru.”

Dengan demikian, doktrin Angkatan Darat telah berubah, dari mendukung ajaran-ajaran revolusioner Bung Karno, jadi mencampakkan ajaran-ajaran revolusioner itu, akhirnya menjadi tegas anti-komunis. Inilah yang jadi ideologi pembimbing Angkatan Darat semenjak tahun 1966.

Dengan ideologi pembimbing ini, Angkatan Darat telah jadi fobi revolusi, fobi kiri, jadi *aparatus pembasmian komunisme di Indonesia*.

Angkatan Darat menyempurnakan doktrinnya pada Agustus 1966 dengan menetapkan *Catur Dharma Eka Karya*,—doktrin Cadek—empat tugas satu karya—yang menetapkan bahwa di samping tugas di bidang pertahanan dan keamanan, terdapat juga tugas di bidang-bidang lainnya dalam masyarakat yang non-militer. Angkatan Darat jadi menyusup dan berkuasa di semua bidang kemasyarakatan. Mulai dari kedudukan gubernur, bupati, camat sampai kepala desa dipegang oleh Angkatan Darat

Dengan penyempurnaan *Tri Ubaya Shakti*, Angkatan Darat menjadi *fobi-kiri dan fobi-revolusi*. Pada 1983 dilakukan pemurnian lebih lanjut. Terdapat pandangan yang berkembang di kalangan Angkatan Darat, bahwa doktrin *Catur Dharma Eka Karya*, meski masih mencerminkan filsafat dasar angkatan bersenjata, perlu diamandemen dengan mempertimbangkan adanya perubahan struktur sejak 1969 dan seterusnya ... “kata revolusi tidak cocok lagi dengan pandangan ABRI.” [David Jenkins, 2010, hal.6].

CIA mempunyai hubungan erat dengan Angkatan Darat, terutama dengan Kepala Badan Intelijen, Achmad Sukendro. Di awal tahun 1960 melanjutkan studi di Universitas Pittsburg, tapi Sukendro dan sebagian besar anggota komando tertinggi Angkatan Darat mempunyai hubungan erat dengan atase militer di Kedutaan Besar Amerika. [Baca: David Ransom, *Ford Country: Building an Elite for Indonesia*, Oktober 1970].

Di bawah bimbingan Nasution dan Soewarto, *Seskoad* mengembangkan satu doktrin strategi baru, yaitu *strategi Perang Wilayah*, yang memberikan prioritas pada *kontra-pemberontakan* sebagai tugas tentara. Terutama sesudah tahun 1962, ketika pemerintah Kennedy membantu Angkatan Darat Indonesia mengembangkan program “*Civic Mission*” atau “*Civic Action*”, yang ini berarti organisasi infrastruktur politik mereka atau “organisasi teritorial” yang dalam hal-hal tertentu sampai ke tingkat desa. Sebagai hasil dari usul resmi Kementerian Luar Negeri Amerika dalam tahun 1962, Pauker membantu menyusun rencana untuk mendirikan di Jakarta, Grup Penasihat Latihan Militer (*Miltag*)—*Military Training Advisory Group*—, Amerika untuk membantu pelaksanaan program “*Civic Mission*” dari *Seskoad*.

Seskoad juga mendidik perwira-perwira Angkatan Darat di bidang ekonomi dan administrasi hingga beroperasi sesungguhnya bagaikan setengah-negara, bebas dari pemerintah Soekarno. Dengan demikian, Angkatan Darat mulai bekerja sama, bahkan menandatangani kontrak-kontrak dengan Amerika Serikat, korporasi-korporasi asing di bidang-bidang yang kini berada di bawah kontrolnya. “Pelaksanaan program

pendidikan ini dipercayakan kepada para perwira dan pejabat sipil yang dekat dengan PSI.” [Southwood dan Flanagan, *Indonesia: Law*, h.35; Scott, *Exporting*, h.233].

Pejabat-pejabat Amerika mengakui, bahwa para pejabat sipil itu, yang mendapat dana dari Ford Foundation menjadi terlibat dalam apa yang oleh attase militer Amerika waktu itu disebut “*contingency planning*” untuk mencegah PKI merebut kekuasaan negara.

Para pejabat Amerika mengakui bahwa program latihan itu adalah “*perencanaan menyeluruh untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh PKI.*” Bantuan militer termasuk kontrak rahasia untuk menyerahkan 200 Aero Commanders bagi militer Indonesia. Ini adalah pesawat terbang ringan yang bisa dipakai untuk kegiatan “*civic action*” atau operasi kontra-pemberontakan yang dilakukan Korps Penerbang Militer, yang semua perwira seniornya sesungguhnya dapat pendidikan di Amerika.

Lewat proses pelaksanaan *strategi dua puluh tahun* Ford Foundation yang dikendalikan CIA, dan *pelaksanaan contingency planning*, maka terjadilah perubahan TKR, *Tentara Keselamatan Rakyat* yang dilahirkan revolusi Agustus 1945. *TKR berubah wajah dan berganti hati, menjadi pasukan anti revolusi, anti ajaran Bung Karno dan jadi pasukan pembunuh kaum kiri di Indonesia.*

8. Kubu Soeharto – CIA

RAND Corporation dan Ford Foundation yang berkolaborasi dengan CIA, mendalangi pembentukan *kubu Soeharto—CIA di Indonesia*.

Semenjak tahun 1949, Ford Foundation sudah memiliki *strategi 20 tahun* untuk membangun jaringan di Indonesia yang bisa berfungsi sebagai aparat untuk merealisasi *the policy of containment* dan gagasan *politik rollback* terhadap pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Ini berarti dilaksanakannya “*contingency planning*” untuk mencegah PKI merebut kekuasaan negara. Maka dibangunlah kekuatan yang dikendalikan CIA, yang meliputi tenaga-tenaga yang bergerak di bidang politik, militer, ekonomi, dan sosial. Tercatat kegiatan Guy Pauker, konsultan RAND Corporation di Indonesia, merajut jaringan intelektual yang selanjutnya mengabdikan pada pelaksanaan “*contingency planning*”. Dalam proses itu, terbentuklah *kubu Soeharto—CIA* yang akhirnya memegang puncak kekuasaan orba.

Menurut Subandrio, “Soeharto membangun kubu sendiri. *Kubu Soeharto* terbentuk ketika kepercayaan AS terhadap Nasution mulai luntur. Ini disebabkan oleh fungsi Nasution terhadap pemberontakan Permesta, kampanye pembebasan Irian Barat, dan slogan Ganyang Malaysia tidak efektif. Tiga hal itu membuat kepentingan AS terhadap Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya, terganggu, sehingga AS tidak lagi akrab dengan Nasution. Keakraban AS dengan Nasution—dari perspektif AS—awalnya perlu untuk mengimbangi kebijakan Bung Karno yang cenderung lunak pada PKI. Di saat kepercayaan AS terhadap Nasution luntur dan Soeharto sudah menjadi Pangkostrad, Soeharto membangun kubu sendiri. [Subandrio, *Tentang G30S*].

Awal Januari 1965, di kantor Kedutaan Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd, datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Dubes RI untuk Yugoslavia, Yoga Soegama (kelak dijadikan Kepala Bakin oleh Soeharto). Pengirimnya adalah Pangkostrad Soeharto. Isinya: Yoga ditawarkan pulang ke Jakarta dengan jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Tawaran itu menarik bagi Yoga. Karena itu, pada 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di Jakarta, langsung menghadap Panglima Kostrad di rumahnya, Jalan H. Agus Salim. Mereka bermusyawarah di sana. Itulah awal terbentuknya Kubu Soeharto. [Subandrio, *Idem*].

Pemanggilan Yoga Soegama dari Beograd oleh Soeharto itu mengandung tiga indikasi:

Pertama, Yoga kembali ke Indonesia tidak melalui jalur normal. Seharusnya penarikan Yoga dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd dilakukan oleh Menpangad Yani, sebab Yoga adalah perwira AD. Tetapi, kenyataannya Yoga ditarik oleh surat panggilan Pangkostrad Mayjen. Soeharto.

Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah bersama-sama Soeharto menyabot (sabotase) politik-politik Bung Karno.

Ketiga, mereka bertujuan menghancurkan PKI. Tiga indikasi ini bukan kesimpulan saya. Tetapi, ini diungkapkan oleh Ali Moertopo (salah satu anggota trio Soeharto—Yoga) dengan rasa bangga dan tanpa tedeng aling-aling (secara blak-blakan). Ali mengungkapkan hal itu dengan gaya seperti orang tidak berdosa. [Subandrio, *Idem*].

Terlepas dari apakah Yoga berbohong atau tidak soal koordinator rapat gelap itu, tetapi rangkaian pernyataan Yoga dan Ali Moertopo itu menunjukkan *adanya suatu komplotan Soeharto*. Komplotan yang bergerak dalam operasi intelijen. Soeharto adalah dalang yang sedang memainkan

wayang-wayangnya. Tentu, dalangnya tidak perlu terjun langsung. [Subandrio, *Idem*].

Dalam pelaksanaan *strategi dua puluh tahun*, sebagai langkah awal, Ford Foundation mengirimkan tim aju yang terdiri atas “akademisi” dari Universitas Cornell dan MIT, di antaranya Prof. Guy Pauker yang dikenal sebagai analis pada RAND Corporation, di samping jabatan akademisnya sebagai Ketua Pusat Studi Asia Tenggara pada Berkeley University. Tugas tim tersebut sederhana, yaitu mencari dan mengidentifikasi individu-individu dari lapisan elite intelektual Indonesia yang memiliki prospek untuk dipilih menjalani proses rekrutmen selanjutnya. Dalam rangka memudahkan proses identifikasi dan *spotting*, Guy Pauker membentuk suatu organisasi *Friends of the United States* di Jakarta (yang di kemudian hari berkembang menjadi Usindo). Secara alamiah, organisasi sosial tersebut menarik minat banyak kalangan elite Indonesia yang berasal dari kalangan aristokrat dan intelektual.

Berdasarkan proses *spotting* yang dilakukan oleh tim terhadap lapisan elite Indonesia tersebut, teridentifikasi dua nama, yakni Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo dan Soedjatmoko dari Universitas Indonesia (UI). Keduanya adalah intelektual Indonesia dengan *cultural breeding* Belanda yang dikenal sebagai tokoh terkemuka dari Partai Sosialis Indonesia (PSI).

Di samping dua nama tersebut, tim juga menyebutkan adanya “*a very small group*” di komunitas elite Indonesia baik dari kalangan sipil dan militer yang dikategorikan “potensial”. Dari kalangan sipil, disebutkan nama-nama antara lain Ali Boediardjo dan Miriam Boediardjo (kemudian dibina di bawah MIT), Selo Sumardjan (kemudian dibina di bawah Cornell University), dan lain sebagainya. Dari kalangan militer, dipilih antara lain Kolonel Soewarto (yang menempuh pendidikan Sesko di US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth) yang kemudian menjabat sebagai Wakil Komandan Seskoad

Dalam hal ini, Cornell University dan MIT berperan dalam membangun serta memperdalam kontak-kontak yang telah dirintis oleh tim aju dengan lapisan elite Indonesia tersebut di atas, sementara pendidikan dan *breeding* Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) yang kemudian dikepalai oleh Widjojo Nitisastro sebagai direktur.

Di kemudian hari, kader-kader yang dihimpun ini lebih dikenal dengan julukan *Berkeley Mafia*. Mafia ini terbukti berperan vital sebagai penerus pengaruh dan penguasaan Amerika Serikat atas Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) pasca pengasingan Soemitro

Djojohadikoesoemo akibat keterlibatan PSI dalam pemberontakan PRRI/Permesta.

Para ekonom masa depan Indonesia diserahkan pada UC Berkeley University. Berdasarkan rekomendasi Soemitro Djojohadikoesoemo, tim memberangkatkan gelombang pertama akademisi Fakultas Ekonomi UI untuk menempuh Ph.D. di bidang ekonomi dan pembangunan di UC Berkeley. Gelombang pertama ini dipimpin oleh orang kepercayaan Soemitro, yakni Widjojo Nitisastro dan beranggotakan Soedjatmoko, Mohammad Sadli, Emil Salim, Ali Wardhana, Subroto, dan Barli Halim.

Pada tataran institusional, pembentukan jaringan ini berjalan seiring dengan pengembangan kelembagaan pada institusi akademis kedua negara, sesuai dengan cetak-biru yang terdapat dalam *Modern Indonesia Project*, yakni menciptakan kampus sebagai pusat pengaruh dan penggodokan cetak-biru strategis pembangunan negara sasaran. Sebagai contoh, segera setelah tiba di UC Berkeley, Mohammad Sadli langsung bermitra dengan Prof. Guy Pauker untuk mengelola Pusat Studi Asia Tenggara, sementara Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo juga membentuk Lembaga. [StarBrain Indonesia, I Posted: Selasa, 15 Maret 2011: *Intelijen, Universitas, dan Jaringan Spionase Internasional dalam Perspektif Strategi Raya era Global*].

Peter Dale Scott menulis, bahwa sekitar tahun 1953, NSC sudah mengesahkan satu dari sejumlah dokumen kebijaksanaan yang menyerukan untuk “mengambil aksi diperlukan dengan berkolaborasi dengan negeri-negeri sahabat, untuk mencegah komunis mengontrol Indonesia secara permanen.” Dengan putusan NSC 171/1, pada tahun itu sudah diperhitungkan latihan militer untuk mempertinggi pengaruh Amerika, bahkan melalui CIA ditempuh usaha pertama yang ditujukan pada partai-partai politik kanan (“kanan yang moderat” menurut sebutan NSC 171) terutama partai Islam Masyumi dan partai “sosialis” PSI. Jutaan dolar yang sudah dikurcurkan CIA buat Masyumi dan PSI pada pertengahan tahun 1950-an adalah faktor yang mempengaruhi peristiwa-peristiwa 1965, dan para perwira yang cenderung pada PSI – terutama Soewarto dan Sarwo Edhie menjadi tokoh-tokoh perencanaan dan melaksanakan tugas anti PKI, menghadapi G30S.

Guy Pauker adalah agen CIA yang paling terkemuka beraksi di Indonesia. Dia mengajar di Universitas California, Berkeley, bekerja sebagai seorang konsultan RAND Corporation, di mana dia sering mengadakan hubungan dengan perwira-perwira militer Indonesia. Dalam salah satu buku terbitan RAND Corporation yang dicetak Princeton University Press, ditulis bahwa Pauker telah mendesak perwira militer yang dihubunginya untuk

“mengambil tanggung jawab penuh” bagi kepemimpinan bangsanya dan untuk “memenuhi tugas ... memukul, membersihkan rumah.”

Sahabat Pauker yang paling akrab di kalangan militer adalah Brigjen. Soewarto yang dapat pendidikan akademi militer Fort Leavenworth Amerika tahun 1959, yang memainkan peranan dalam menciptakan gagasan *kontra-pemberontakan*. Soewarto membangun Seskoad di Bandung menjadi tempat latihan untuk mengambil alih kekuasaan politik. Seskoad menjadi titik pusat pemberian bantuan dari Pentagon, CIA, RAND Corporation, dan Ford Foundation. Di samping latihan militer dan *kontra-pemberontakan*, Seskoad melatih para perwira dalam hal ekonomi dan administrasi, dan karena itu mendidik mereka sesungguhnya untuk beroperasi sebagai setengah negara yang bebas dari pemerintah.”

Seskoad juga mendidik perwira-perwira Angkatan Darat di bidang ekonomi dan administrasi hingga beroperasi sesungguhnya bagaikan setengah-negara, bebas dari pemerintah Soekarno. Dengan demikian, Angkatan Darat mulai bekerja sama, bahkan menandatangani kontrak-kontrak dengan Amerika Serikat, korporasi-korporasi asing di bidang-bidang yang kini berada di bawah kontrolnya. “Pelaksanaan program pendidikan ini dipercayakan kepada para perwira dan pejabat sipil yang dekat dengan PSI”. [Southwood and Flanagan, *Indonesia: Law*, h.35; Scott, *Exporting*, h.233].

Pejabat-pejabat Amerika mengakui, bahwa para pejabat sipil itu, yang mendapat dana dari Ford Foundation menjadi terlibat dalam apa yang oleh atase militer Amerika waktu itu disebut “*contingency planning*” untuk *mencegah PKI merebut kekuasaan negara*.

Para pejabat Amerika mengakui bahwa program latihan itu adalah “*perencanaan menyeluruh untuk mencegah perebutan kekuasaan oleh PKI*.” Bantuan militer termasuk kontrak rahasia untuk menyerahkan 200 *Aero Commanders* bagi militer Indonesia. Ini adalah pesawat terbang ringan yang bisa dipakai untuk kegiatan “*civic action*” atau operasi kontra-pemberontakan yang dilakukan Korps Penerbang Militer, yang semua perwira seniornya sesungguhnya dapat pendidikan di Amerika.

Sebuah penyelidikan Senat Amerika mengungkapkan, bahwa penyuplai militer Amerika yang punya hubungan dengan CIA, terutama Lockheed, telah merundingkan penjualan peralatan dengan pembayaran lewat perantara dengan cara sebegitu rupa, hingga pembayarannya tidak melibatkan Nasution atau Yani, tetapi pada pimpinan yang *kurang dikenal dari faksi ketiga tentara, Jenderal Mayor Soeharto*. Dana rahasia yang diatur oleh Angkatan Udara Amerika Serikat atas nama CIA yang dicucikan sebagai

“komisi” tentang penjualan alat-alat dan servis Lockheed, demi untuk upah politik bagi pejabat-pejabat militer – yaitu *faksi Soeharto yang didukung CIA*.

Titik pusat paling penting dari latihan dan bantuan Amerika adalah untuk hubungan-hubungan organisasi teritorial dengan “administrasi sipil, organisasi-organisasi agama dan kebudayaan, kalangan pemuda, veteran, serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi tani, partai-partai politik, dan kelompok-kelompok di tingkat-tingkat regional dan lokal.” Hubungan-hubungan politik dengan kelompok-kelompok sipil ini *memberikan jaringan struktur untuk penindasan kejam terhadap PKI dalam waktu dekat*.

Roger Hilsman, yang punya karier lama dalam CIA dan Kementerian Luar Negeri, mencatat bahwa tahun 1963, sebagai hasil pelaksanaan program latihan, “militer Amerika dan Indonesia sudah saling mengenal lebih baik. Terdapat hubungan dan saling menghargai antar sesama pribadi.”

Komite Luar Negeri *Congress* Amerika mengakui pada waktu berlangsungnya kup tahun 1965, lebih dari 1200 perwira Indonesia, termasuk tokoh-tokoh militer senior sudah mendapat didikan di Amerika Serikat.

Tahun 1965, sekelompok perwira militer muda didorong oleh CIA, supaya berusaha melakukan kup terhadap Presiden Soekarno dan membunuh enam pucuk pimpinan tentara. CIA merebut kesempatan ini untuk mengganti Presiden Soekarno dengan Jenderal Mayor Soeharto. CIA menggalakkan kampanye propaganda masif menimpakan dosa pembunuhan enam jenderal itu pada PKI. Kampanye bohong media memainkan peranan penting membangkitkan kemarahan rakyat terhadap PKI. Potret mayat-mayat jenderal yang membusuk dipertunjukkan pada semua surat kabar dan siaran tv. Diiringi dengan kisah-kisah bikinian CIA yang secara palsu dinyatakan, bahwa para jenderal sudah dipotong-potong dan matanya dicongkel oleh wanita-wanita komunis yang bersenjatakan pisau silet. CIA juga menyebarkan desas-desus dalam berita pers bahwa Tiongkok sudah menyeludupkan senjata bagi PKI untuk membangkitkan pemberontakan tak lama lagi.

Dalam pada itu, sekelompok militer Indonesia dan pemimpin-pemimpin ekonomi yang sudah mendapat pendidikan CIA di *Centre for South and Southeast Asian Studies* di UC Berkeley yang kemudian terkenal dengan “*Berkeley Mafia*”, sudah kembali ke Indonesia dan menjadi pendorong di belakang kup militer 1 Oktober 1965. Selanjutnya mereka menjadi tulang punggung *kubu Soeharto* dan pemerintahan Soeharto. Anggota-anggota utama dari “*Berkeley Mafia*” ini adalah: Widjojo Nitisastro, yang kemudian

menjadi Menteri Ketua Badan Perancang Nasional (Bappenas) 1967–1983, Menko Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian (1973–1983), Penasihat Bappenas (1983–1998), Penasihat Presiden Bidang Ekonomi (1993–1998), Ketua Tim Pembantu Ekonomi (1999–2001); Ali Wardhana, Menteri Keuangan (1973–1983), Menko Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian (1983–1988); Mohammad Sadli, Menteri Pertambangan; Subroto, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi (1973–1978), Menteri Pertambangan dan Energi (1978–1988); Emil Salim, Wakil Ketua Bappenas (1967–1971), Menteri Aparat Negara (1971–1973), Menteri Pengangkutan, Komunikasi, dan Turisme (1973–1978), Menteri Pengawasan Perkembangan dan Lingkungan Hidup (1978–1983), Menteri Kependudukan dan Lingkungan.

Tahun 1961, Angkatan Darat menugaskan Letkol. Suhardiman untuk mendirikan organisasi buruh, SOKSI,—Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Suhardiman mengakui, bahwa pembentukan SOKSI adalah untuk membendung perkembangan PKI, untuk mencegah kemenangan PKI dalam pemilihan umum yang akan datang. SOKSI menjadi anggota *International Confederation of Free Trade Unions* (ICFTU) yang disponsori CIA.

Pada tahun 1964, untuk menghadapi kekuatan PKI dan Bung Karno, Angkatan Darat menugaskan Letkol. Suhardiman dari SOKSI menghimpun berpuh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam *Sekretariat Bersama Golongan Karya* (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir untuk menghadapi perkembangan PKI dan organisasi-organisasi yang dipimpin PKI. Sekber Golkar inilah yang kemudian berubah menjadi *Golongan Karya*, yang kemudian menjadi *Partai Golkar*.

Untuk menguasai kehidupan bidang informasi, Angkatan Darat menerbitkan surat kabar sendiri, yaitu harian *Berita Yudha* (1965) dan *Angkatan Bersenjata*. Di samping itu, para wartawan anti-komunis dipelopori Harmoko mendirikan organisasi *Badan Pendukung Soekarnoisme* (BPS). BPS didirikan pada tanggal 1 September 1964 dengan menyatakan mempopulerkan “Soekarnoisme” sebagai senjata untuk mendukung penyelesaian revolusi dan terbentuknya masyarakat sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan berpedoman Manipol, Usdek. Menurut siaran BPS, simpati langsung diperolehnya dari Jenderal A.H. Nasution, sejak awal juga sudah menerima dukungan dari Amerika Serikat. Namun dukungan Washington dikritik sendiri sebagai satu kekeliruan, karena menimbulkan kecurigaan rakyat Indonesia.

Tugas BPS sebenarnya dinyatakan dalam program perjuangannya, yaitu berperan sebagai *champion social* dengan melakukan *economic reform* dan *political reform*, satu tatanan baru yang menolak tatanan ekonomi dan politik yang sedang operasional, seperti yang digariskan Bung Karno dan sudah disahkan menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh MPRS.

Pada tanggal 17 Desember 1964, Presiden Soekarno membubarkan BPS dan pada 23 Februari 1965 memerintahkan supaya semua atribut BPS ditutup dan dihentikan kegiatannya. “Soekarnoisme” yang dimaksudkan sebagai ajaran Bung Karno, di tangan BPS menjadi lain artinya, yaitu menunggu momentum untuk menghancurkan ajaran itu. Pada tahun 1983, diterbitkan buku yang berjudul *Perlawanan Pers Indonesia BPS terhadap gerakan PKI*, yang ditulis oleh Tribuana Said dan D.S. Muljanto. Buku ini membuka baju penyamaran BPS dan memakai baju aslinya sambil mengakui adanya hubungan BPS dengan unsur-unsur Angkatan Darat dan beberapa partai politik seperti Murba, NU, IPKI, PSII, dan Partai Katolik. [Manai Sophiaan, *Penghargaan Bagi Yang Berhak*, VisiMedia, 2008].

David Jenkins menulis, bahwa ketika Soeharto meraih kekuasaan pada pertengahan 1960-an, ia benar-benar menyandarkan diri pada sekelompok kecil penasihat dari Angkatan Darat. Inilah bagian dari *kubu Soeharto-CIA*. Pada Agustus 1966, ia membentuk Staf Pribadi (SPRI) yang terdiri dari enam orang perwira tinggi AD serta dua tim sipil, para spesialis bidang ekonomi.

Pada 1968, SPRI beranggotakan 12 orang. Mereka secara luas dipandang sebagai “pemerintah bayangan” yang punya kekuasaan lebih besar dibanding kabinet, utamanya dalam penyusunan kebijakan. Para anggota SPRI bertanggung jawab terhadap soal-soal keuangan, politik, intelijen dalam dan luar negeri, kesejahteraan sosial, masalah-masalah pemilu, juga dengan “masalah umum” dan “masalah khusus”.

Koordinator SPRI, Mayjen. Alamsjah Ratu Prawiranegara menjadi teman dekat Soeharto sejak mereka bertugas bersama di Markas Besar AD pada tahun 1960. Tiga orang lainnya, Ali Murtopo, Sudjono Humardhani, dan Yoga Sugama menjadi pembantu Soeharto ketika ia menjadi Panglima Kodam Diponegoro, Jawa Tengah pada akhir 1950-an. Mereka kemudian bertugas bersama Soeharto lagi ketika di Kostrad. Alamsjah dan Sudjono Humardhani memiliki latar belakang keuangan militer, sedangkan Ali Murtopo dan Yoga Sugama adalah perwira intelijen yang dinamai Opsus (Operasi Khusus) yang didirikan di dalam Kostrad pada 1964 untuk mencari cara mengakhiri “konfrontasi” dengan Malaysia. [David Jenkins, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975–1983*, Komunitas Bambu, 2010, hal.27–28].

David Jenkins juga menulis: “Di bawah Soeharto, kekuasaan bukan saja terpusat, tetapi berada pada segelintir tangan. Dalam analisa terakhir, presiden tergantung pada bantuan kira-kira 12 orang tokoh kunci militer, masing-masing memimpin organisasi dengan ketat dan sering saling bertentangan dalam piramida kekuasaan.

Pada pertengahan 1970-an anggota “kelompok inti” ini termasuk Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima ABRI; Letjen. (kemudian Jenderal) Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri; Letjen. (kemudian Jenderal) Yoga Sugama, Kepala Bakin, sebelumnya menjabat ketua “dapur kabinet” urusan politik; Laksamana Sudomo, Kepala Staf Kopkamtib; Mayjen. (kemudian Jenderal) Benny Murdani, asisten intelijen Menteri Pertahanan; Letnan Jenderal Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara; Letjen. (kemudian Jenderal) Darjatmo, Kepala Staf urusan non-militer Menteri Pertahanan; Letjen. Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina; selanjutnya mungkin ada satu atau dua orang lagi.” [David Jenkins, *Soeharto & Barisan Jenderal Orba, Rezim Militer Indonesia 1975–1983*, Komunitas Bambu, 2010, hal.25–26].

Mayjen. Soeharto menjelang September 1965 berada pada puncak kekuasaan teritorial dan ekonomi, apalagi militer/intelijen, karena faktor-faktor penunjang bantuan dana dari CIA/AS, Pertaminaanya Ibnu Sutowo, Freeport Sulphur dari Irian-Jaya, melalui para perantara A.M. Dasaad, Alamsyah Ratuprawira, Walandouw, dan Bob Hasan. Di bidang militer Soeharto menguasai selain Kostrad, juga bekas-bekas pasukan dan komandan di Jawa Tengah, Jawa Timur (Basuki Rahmat), dan RPKAD serta dinas-dinas kavaleri dan artileri Jawa Barat.

Ford Foundation di bawah pimpinan Paul Hoffman dan bekerja sama erat dengan Rockefeller Foundation, bergerak cepat memenuhi kata-kata Dean Rusk untuk Indonesia. Sebagai Kepala dari Marshall Plan di Eropa, Hoffman memberi bantuan mengatur kemerdekaan Indonesia dengan memotong bantuan Marshall Plan bagi Belanda, bahkan mengancam akan memotong habis bantuan itu, jika Belanda terus membahayakan kemerdekaan Indonesia. Karena Amerika adalah penyuplai bagi Belanda, Hoffman dan Ford Foundation bekerja sama melalui universitas-universitas Amerika – MIT, Cornell, Berkeley, dan akhirnya Harvard – untuk *mencetak baru hierarki Indonesia* menjadi administrator modern, terlatih untuk bekerja dalam kekuasaan yang tidak langsung dari orang-orang Amerika. Dalam jargon Ford sendiri, mereka menciptakan satu “*elite yang dimodernisasi*”

Ford Foundation berkolaborasi dengan RAND Corporation menyusun dan melaksanakan *strategi dua puluh tahun* untuk menghadapi Indonesia.

Tahun 1949, Soedjatmoko dan Soemitro Djojohadikoesoemo adalah dua orang yang direkrut CIA lewat Ford Foundation dan RAND Corporation untuk melaksanakan strategi Ford Foundation di Indonesia. Setelah pemberontakan bersenjata PRRI tahun 1958 ditumpas, Soemitro Djojohadikoesoemo yang menjadi salah seorang tokohnya, diselamatkan CIA di luar negeri, di Singapura.

Sebelum itu, Soemitro lewat kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sudah sempat merajut jaringan sejumlah intelektual muda ahli ekonomi didikannya. Antara lain terdapat Selo Soemardjan, Widjojo Nitisastro, Emil Salim, Sadli. Ketika Soemitro di pengasingan, fakultasnya tetap jalan terus. Kedudukannya tidak digantikan orang. Siswa-siswanya dapat menemuinya dalam perjalanan dari dan ke Amerika Serikat. Seorang tokoh buruh seperti Jay Lovestone, ketua program internasional CIA, memelihara hubungan erat dan menyaksikan pesan-pesan Soemitro lewat sahabat-sahabat Indonesiannya.

Tahun 1959, Pauker menguraikan pelajaran yang ditarik dari kekalahan PSI dalam pemilihan umum dan dari kegagalan pemberontakan di luar Jawa dalam sebuah tulisan berjudul “*Southeast Asia as a Trouble Area in the Next Decade*”. Partai-partai seperti PSI adalah “tidak cocok untuk kompetisi yang sengit,” dan menurut dia, “komunisme akan menang di Asia Tenggara ... jika tidak didapatkan kekuatan melawannya yang efektif.” Menurut dia, kekuatan-kekuatan saingan “yang dipersenjatai dengan paling baik” adalah anggota-anggota perwira korps nasional sebagai perseorangan dan tentara nasional sebagai kekuatan yang terorganisasi.”

Soeharto mengakui, bahwa setelah dia diputuskan untuk belajar di Seskoad, “segeralah Pak Gatot Soebroto mengontak Brigjen. Soewarto, seorang komandan Seskoad sekaligus *agen aktif CIA*, yang kemudian berhasil menatar dan membekaliku dalam suatu kursus regular sebagai staf komando Angkatan Darat. [Hafis Azhari, *Catatan Harian Seorang Mantan Presiden (Membongkar Dokumen Soeharto)*]. Brigjen. Soewarto adalah lulusan dari Fort Leavenworth pada tahun 1959. Menjabat Wakil Komandan Seskoad. Di Seskoad mereka digabungkan dengan orang-orang PSI dan Masyumi lainnya, bersama Brigjen. Syarif Thajeb—seorang yang digembleng di Harvard, jadi menteri pendidikan. [Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia].

Demikianlah, di bawah kendali Guy Pauker berlangsung proses perajutan jaringan, hingga terbentuknya *grup Soeharto-CIA*. Ke dalamnya termasuk Adam Malik yang jadi wakil presiden, dua belas jenderal: Jenderal Maraden Panggabean, Menteri Pertahanan dan Keamanan dan Panglima

ABRI; Letjen. (kemudian Jenderal Amir Machmud, Menteri Dalam Negeri; Letjen. (kemudian Jenderal) Yoga Sugama, Kepala Bakin, sebelumnya menjabat ketua “dapur kabinet” urusan politik; Laksamana Sudomo Kepala Staf Kopkamtob; Mayjen. (kemudian Jenderal) Benny Murdani, asisten intelijen Menteri Pertahanan; Letnan Jenderal Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara; Letjen. (kemudian Jenderal) Darjatmo, Kepala Staf urusan non-militer Menteri Pertahanan; Letjen Ibnu Sutowo, Presiden Direktur Pertamina; dan sekelompok sarjana Mafia Berkeley: Widjojo Nitisastro, yang kemudian menjadi Menteri Ketua Badan Perancang Nasional (Bappenas) 1967—1983, Menko Ekonomi, Keuangan dan Perindustrian (1973—1983), Penasehat Bappenas (1983—1998), Penasihat Presiden Bidang Ekonomi (1993—1998), Ketua Team Pembantu Ekonomi (1999—2001); Ali Wardhana, Menteri Keuangan (1973—1983), Menko Ekonomi, Keuangan, dan Perindustrian (1983—1988); Mohammad Sadli, Menteri Pertambangan; Subroto, Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi (1973—1978), Menteri Pertambangan dan Energi (1978—1988); Emil Salim, Wakil Ketua Bappenas (1967—1971), Menteri Aparat Negara (1971—1973), Menteri Pengangkutan, Komunikasi, dan Turisme (1973—1978), Menteri Pengawasan Perkembangan dan Lingkungan Hidup (1978—1983); Menteri Kependudukan dan Lingkungan.

Kubu Soeharto-CIA inilah yang berhasil menggulingkan Bung Karno, menjadi pucuk kekuasaan orba yang fasistis anti-komunis. Sesuatu yang diidamkan oleh pemerintrah Amerika Serikat.

Dengan demikian, lewat pengendalian CIA, dengan mengoperasikan RAND Corporation, Ford Foundation, Universitas-Universitas Berkeley, Cornell dan MIT, serta penggemblengan Seskoad, dengan pengucuran dana dari Ford Foundation, menggunakan kekuatan kalangan Masyumi, PSI, Murba, serta Katolik, dengan tulang punggung Angkatan Darat, terbentuklah *kubu Soeharto-CIA*. *Kubu* ini meliputi kekuatan politik, militer, ekonomi, persuratkabaran, gerakan buruh. Grup inilah yang jadi eksekutor doktrin *the policy of containment* – Doktrin Truman – dan *gagasan rollback* John Foster Dulles. Inilah *aparatus* pembasmian kekuatan kiri di Indonesia dan penggulingan Bung Karno tahun 1965. Dan NSC Amerika Serikat, *Politbiro Perang Dingin*, adalah otak, inisiator, perekrut, *dalang* semua pembasmian kekuatan komunis dan kekuatan kiri di dunia, termasuk di Indonesia.

IX

GERAKAN BURUH INDONESIA, TULANG PUNGGUNG KEKUATAN ANTI IMPERIALISME

INDONESIA jelita dijuluki *untaian zamrud khatulistiwa*. Negeri kepulauan dengan belasan ribu pulau tersebar di samudera biru antara Lautan Teduh dan Samudera Indonesia. Alamnya indah, subur, dan kaya. Beriklim nyaman sepanjang masa. Berpenduduk nomor empat terbesar di dunia sesudah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Rakyatnya rajin, ulet bekerja. Punya tradisi heroik membela kebebasan negeri. Tapi, sempat tiga setengah abad dikuasai penjajah Belanda.

Dalam sejarah tercatat, demi kebebasan, rakyat berjuang melancarkan berbagai perang melawan penjajahan Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis dari Maluku, Sultan Babullah Ternate berperang selama 5 tahun (1570–1575) melawan Portugis; 1617, berkobar gerakan perlawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara untuk mengusir kolonial Spanyol; tahun 1643, pecah perang Minahasa Serikat melawan Spanyol; dan terus-menerus berlangsung berbagai perang melawan penjajah Belanda: Perang Hasanuddin melawan VOC (1667), Perang Banten melawan VOC (1682, 1886, 1888), Perang Surapati (1686 dan 1706), Perang Tondano (1807–1809), Perang Diponegoro (1825–1830), Perang Pattimura (1817), Perang Palembang, Perang Banjar/Dayak, Perang Bali (pertempuran penghabisan tahun 1908), Perang Batak, Perang Lombok (1894–1895), Perang

Banjarmasin (1906), Perang Jambi (1907), *Perang Paderi* di Minangkabau (tahun 1821 hingga 1837), Perang Tapanuli (Singa Mangaraja ke-10 tewas tahun 1907), Perang Riau (1913), Perang Aceh (1873–1908). Berguguran pahlawan di medan tempur. Tradisi heroik rakyat melawan penjajahan menghiasi sejarah bangsa Indonesia.

Demi kebebasan dan keadilan, semenjak pertengahan abad XIX, dunia dilanda cita-cita sosialisme. Tahun 1848, Marx dan Engels berhasil merumuskan *Manifes Partai Komunis*, yang dimulai dengan kalimat: “Ada hantu berkeliaran di Eropa – hantu komunisme.” Dan ditutup dengan kalimat: “Kaum proletar tidak akan kehilangan apa pun kecuali belenggu mereka. Mereka akan memperoleh dunia.” [Karl Marx, Friedrich Engels, *Manifes Partai Komunis*, Penerbit Indonesia Progresif, 1973, hal.51 dan 114].

Cita-cita yang terkandung dalam Manifes ini adalah menyapakan penghisapan manusia oleh manusia, *membangun sosialisme*. Cita-cita ini menjalar ke Asia, masuk Indonesia.

Kolonialisme Belanda mengeruk laba besar-besaran dengan mencengkamkan kuku kapitalisme. Sebelum tahun 1870, eksploitasi yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat Indonesia didasarkan atas peraturan “*Cultuur Stelsel*” . Peraturan ini dilahirkan dalam tahun 1830 di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal van den Bosch.

“*Cultuur Stelsel*” mewajibkan kaum tani: 1. menyerahkan sebagian hasil buminya kepada pemerintah Hindia Belanda, 2. kerja paksa (rodi) untuk pemerintah 3. memikul berbagai macam pajak.

Kemudian, kewajiban “menyerahkan sebagian hasil buminya” dan “kerja paksa” diganti dengan menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami bahan-bahan ekspor yang laku pada waktu itu (kopi, teh, indigo).

Rakyat diwajibkan mengerjakan tanah bagian pemerintah mulai dari membuka tanah, menanam, memelihara, menjaga, memetik hasilnya, mengangkut ke gudang, menjaga gudangnya, hingga bahan-bahan itu terjual. Pekerjaan ini semua dikerjakan dengan paksaan.

Maka kemelaratan menimpa rakyat yang ditindas “*Cultuur Stelsel*”. Sedangkan Belanda menguras beratus-ratus juta florin (gulden Belanda).

Kekejaman “*Cultuur Stelsel*” dikritik dengan tajam oleh Eduard Douwes Dekker (Multatuli) dengan karya sastranya *Max Havelaar*. Multatuli dalam tahun 1856 menjadi asisten residen di Lebak.

Mengkritik “*Cultuur Stelsel*”, Frederick Engels dalam suratnya kepada Karl Kautsky menulis: “Di Jawa berlangsung ... Belanda mengorganisasi produksi atas dasar masyarakat komunisme kuno di bawah pengawasan negara.... Hasilnya, rakyat hidup dalam taraf keterbelakangan yang primitif,

dan 70 juta marks (sekarang pasti lebih) setiap tahun dikuras masuk perbendaharaan nasional Belanda.” [Surat Engels kepada Karl Kautsky, 16-2-1884, *Marx and Engels Selected Correspondence, second edition*, Progress Publishers, Moscow, 1965, hal.368].

Imperialisme telah menghancurkan “*Cultuur Stelsel*” dan monopoli negara, karena sistem ini sudah tidak cocok lagi dengan tingkat kapitalisme yang sudah mencapai puncaknya. Apa yang disebut oleh kaum liberal dengan sistem “baru” dan “kerja merdeka” kemudian berwujud sistem “baru” dalam mengeksploitasi dan “kerja merdeka” bagi kapital monopoli. Sedangkan bagi kaum buruh dan kaum tani, sebagaimana juga di zaman “*Cultuur Stelsel*” dan sistem monopoli negara, yang tersedia hanyalah kemelaratan.

Di samping kemewahan luar biasa hidup para pemilik kapital, berjuta-juta kuli bangsa Indonesia, yang diikat oleh kontrak-kontrak yang berdasarkan “ordonansi kuli” (yang pertama untuk Sumatera Timur tahun 1880), dan jika mereka bekerja kurang keras sedikit saja, mereka mendapat pecut dengan rotan. Mereka terikat pada apa yang dinamakan “*poenale sanctie*”, yaitu ketentuan hukuman dari pemerintah Hindia Belanda bagi mereka yang menyalahi kontrak. Misalnya bagi mereka yang melarikan diri karena tidak tahan siksaan.

“Dari 100 kuli kontrak saban tahun meninggal 30 orang. Wanita-wanita muda tidak sedikit yang juga diangkut ke daerah-daerah perkebunan, jauh dari tempat kelahirannya, dengan upah beberapa sen sehari, dan mereka pada akhirnya banyak terpaksa menjalankan prostitusi.” [D.N. Aidit, *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1952, hal.23].

Dalam tahun 1923 saja ditaksir kapital asing di Indonesia berjumlah 2.650 juta gulden. Laba yang dikurasnya tiap tahun berjumlah 500 juta gulden. [Sanoesi Pane, *Indonesia Sepanjang Masa*].

Muncullah berbagai usaha perkebunan modern dan perindustrian yang dikuasai kapitalis Belanda. Kapitalisme melahirkan kelas buruh. Kontradiksi kelas muncul dalam masyarakat Indonesia. Kelas buruh melawan penghisapan kapitalis Belanda. Untuk perjuangan ini kaum buruh mulai bersatu, membentuk organisasinya sendiri.

Tahun 1905, lahirlah organisasi buruh pertama di Indonesia berupa SS Bond, yaitu persatuan pegawai Perusahaan Kereta Api (*Staatsspoorweg Maatschappij*). Tahun 1908, terbentuklah Persatuan Pegawai Kereta Api dan Tram, *Vereniging van Spoorweg en Tram Personeel (VSTP)* di Semarang. Banyak anggota SS Bond pindah ke VSTP.

Tahun 1913, dari Belanda datanglah ke Indonesia, H.J.F.M. Sneevliet, seorang revolusioner. Dia berpengaruh besar dalam VSTP dan menjadi seorang anggota pimpinan penting, kemudian jadi sekretaris dan penanggung jawab bagian propaganda dari VSTP. Sneevliet membawa aliran Marxisme ke Indonesia.

Bulan Mei 1914, di Semarang berkumpul Sneevliet dan teman-temannya yang sepaham, yaitu, antara lain: J.A. Brandsteder, P. Bergsma, dan H.W. Dekker. Mereka mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereniging (ISDV)* yang bertujuan untuk menyebarkan Marxisme. Sesudah terbentuknya ISDV, bermunculanlah organisasi-organisasi buruh di Indonesia. Buruh-buruh Jawatan Pegadaian Negeri bersatu membentuk organisasi Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPP); buruh-buruh Pekerjaan Umum membentuk serikat buruh BOW (*Burgerlijke Openbare Werken—Pekerjaan Umum—*) kemudian lahir *Vereniging Inheemsche Personeel BOW (VIPBOW)*; juga berdiri Serikat Buruh Guru Bangsa Indonesia, Perhimpunan Guru Hindia Belanda (PGHB), Perhimpunan Guru Bantu (PGB), dan Perserikatan Guru Ambachtsschool (PGAS), buruh-buruh Jawatan Candu berserikat dalam “*De Opiumregiebond Nederlands-Indie*” tahun 1915, dan *de Opiumregiebond Luar Djawa Madura* tahun 1917, buruh duane berserikat dalam Perhimpunan Bumiputera Pabean, dan banyak serikat-serikat buruh kecil lainnya.

Tahun 1919, di Jogja didirikan *Personeel Fabrieks Bond (PFB)* yang mula-mula hanya bertujuan memberi bantuan kepada keluarga buruh pabrik gula di Jogja. Tetapi kemudian PFB meluas ke seluruh Jawa dan tujuannya juga diperluas tidak lagi hanya terbatas memberi bantuan pada keluarga. Pemimpin PFB yang terkemuka yaitu Raden Mas Surjopranoto, terkenal dengan julukan “*stakings koning*” (raja pemogok) karena di bawah pimpinan PFB, dalam tahun 1920 telah terjadi pemogokan besar yang diikuti oleh ratusan ribu kaum buruh gula.

Sejak tahun 1916, ISDV sudah mengusahakan pembentukan vaksentral (gabungan serikat-serikat buruh). ISDV berpendapat bahwa perlawanan terhadap kaum kapitalis akan lebih mudah diatur dan akan lebih hebat pukulannya jikalau kaum buruh Indonesia sudah tergabung dalam vaksentral. Oleh Semaoen, murid dari Sneevliet telah diusahakan mendirikan vaksentral lewat VSTP, tapi gagal.

Pertengahan tahun 1918 diusahakan lagi dengan mengundang pengurus-pengurus serikat buruh ke Semarang. Masalah yang hangat ketika itu adalah soal “*duurtetoeslag*” —tunjangan kemahalan. Usaha ini gagal lagi.

Dalam bulan Maret 1917, disiarkan dalam koran *De Indier* tanggal 19 Maret 1917 tulisan Sneevliet berjudul “*De Zegepraal*”, “Kemenangan” menyambut meletusnya revolusi Februari di Russia, dan menganjurkan rakyat Indonesia berteladan pada Revolusi ini. Kemenangan Revolusi Oktober 1917 di Rusia menimbulkan kegembiraan dan keyakinan di kalangan ISDV berpropaganda tentang revolusi dan sosialisme. Dengan dibantu oleh Brandsteder, sekretaris organisasi pegawai marine dan redaktur surat kabar serdadu dan matros, berlangsung propaganda semangat perlawanan di kalangan angkatan bersenjata Belanda.

Atas anjuran Sneevliet, di Surabaya dibentuk semacam Sovyet, yaitu “*Dewan Matros dan Marine*”, dan kepada serdadu-serdadu dianjurkan untuk juga membentuk dewan-dewan yang serupa. Kegiatan ini dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena itu, 5 Desember 1918, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk mengusir Sneevliet. Pengusiran berlanjut terhadap Brandsteder, Bergsma, dan Baars. Pengusiran-pengusiran ini tak banyak pengaruhnya, karena di kalangan bangsa Indonesia telah lahir pemimpin-pemimpin kaum buruh yang revolusioner.

Dalam Kongres PPPB di Bandung bulan Mei 1919, pemimpin PPPB Raden Sasrokardono, menganjurkan supaya semua serikat buruh bersatu dalam satu federasi. Dalam Kongres ini tercapai persetujuan antara pemimpin PPPB, Raden Sasrokardono, dan pemimpin VSTP, Semaoen, mengenai perlunya mempersatukan serikat-serikat buruh, dan tentang tujuan gerakan buruh untuk mencapai pemerintah sendiri dan mengubah masyarakat menjadi masyarakat sosialis.

Pada waktu itu, ISDV dan Sarekat Islam kian berpengaruh dalam masyarakat, termasuk dalam gerakan buruh. Usaha pembentukan sebuah vaksentral kian berlanjut. Terdapat perbedaan antara ISDV dengan Sarekat Islam mengenai nama vaksentral yang dibentuk. ISDV menginginkan nama *Revolutionnaire Socialistische Vakcentrale* (Gabungan Serikat Buruh Sosialis Revolusioner). Sarekat Islam menginginkan nama Persatuan Pergerakan Kaum Buruh (PPKB).

Akhir Desember 1919, dalam pertemuan wakil-wakil serikat buruh di Jogjakarta, ISDV mengalah, menyetujui terbentuknya vaksentral dengan nama PPKB. Dalam pertemuan ini dibentuk sebuah komisi yang terdiri dari pemuka-pemuka kaum buruh: Surjopranoto, Sosrokardono, Alimin, dan Reksodiputro, untuk merumuskan Peraturan Dasar vaksentral.

Situasi sesudah Perang Dunia pertama sangat menguntungkan kapitalis besar, karena besarnya permintaan akan ekspor Indonesia. Perseroan

Dagang Belanda *Handels Vereniging Amsterdam (HVA)* mendapat laba besar. Harga gula meningkat luar biasa, dari f5.25 per pikul dalam bulan Juli tahun 1918, menjadi f66.00 dalam bulan Mei 1920; kopi robusta dari f16.12 per pikul dalam bulan Juli 1918 menjadi f76.25 dalam bulan November 1919. [D.N. Aidit, *Sedjarah Gerakan Buruh Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1952, hal.42].

Tetapi sebaliknya bagi rakyat, tahun-tahun pertama se usai perang berarti musim kelaparan. Kemiskinan berjangkit, kesulitan hidup memuncak. Ketidaksenangan rakyat terus bertambah terutama tidak senang terhadap bangsa Eropa. Upah riil kaum buruh sangat turun, karena naiknya harga barang-barang impor, termasuk barang-barang keperluan sehari-hari, sedangkan upah tidak ikut naik, atau kalau naik tidak sepadan dengan naiknya harga barang kebutuhan sehari-hari.

Keadaan upah yang sangat buruk menyebabkan pimpinan PFB merencanakan aksi buruh gula. Dalam bulan Maret 1920, pimpinan PFB menyampaikan surat edaran kepada direksi dan administrasi *onderneming-onderneming* dan kepada sindikat-sindikat gula, di mana diajukan permintaan supaya PFB diakui sebagai wakil buruh dan bersamaan dengan itu juga dituntut perbaikan upah bagi buruh.

Di mana-mana terjadi pemogokan besar-besaran yang diikuti oleh ratusan ribu buruh gula. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah, umumnya di perusahaan-perusahaan gula HVA.

Pemogokan yang hebat ini telah memaksa sindikat-sindikat gula mengadakan kontak dengan pihak buruh, untuk berunding. Semaoen dari Vaksentral PPKB memerintahkan supaya pemogokan dihentikan.

Akan tetapi Surjopranoto tidak mau mentaati perintah PPKB dan terus mengadakan agitasi-agitasi untuk melanjutkan aksi. Malah pada tanggal 9 Agustus 1920 dikeluarkan ultimatum untuk mengadakan pemogokan umum.

Oleh pemerintah Hindia Belanda, agitasi Surjopranoto ini dianggap membahayakan apa yang dinamakannya “ketertiban umum”. Larangan mengadakan aksi dikeluarkan, karena menurut pemerintah aksi ini “bukan untuk perbaikan nasib kaum buruh, tetapi sebetulnya aksi politik untuk mengadakan kerusuhan.” Bersamaan dengan larangan mengadakan aksi, pemerintah juga “mengingatkan majikan untuk sebaiknya menambah upah buruh.” Pemerintah meletakkan tanggung jawab pada pengurus PFB jika terjadi pemogokan umum. Akhirnya, Surjopranoto kena delik dalam bicara dan dihukum dua bulan. Karena itu PFB menjadi lumpuh.

Kongres PPKB yang pertama diselenggarakan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1920. Kongres ini dihadiri oleh wakil 22 serikat buruh, dengan

anggota seluruhnya 72.000 orang. Dalam kongres ini mulai kelihatan pertentangan antara aliran revolusioner yang diwakili oleh kaum komunis dan aliran reformis yang diwakili oleh beberapa pemimpin Sarekat Islam. Semaoen dan kawan-kawannya menyesali Surjopranoto yang dalam aksi melawan pabrik gula telah mengecilkan arti rol daripada vaksentral, dan tidak menghubungkan aksi-aksi buruh gula dengan soal-soal politik menghantam penjajahan. Surjopranoto menyatakan keberatannya jika vaksentral mencampuri soal-soal dalam *PFB*.

Dalam kongres ini juga terjadi perdebatan hangat tentang tempat kedudukan vaksentral. Kaum komunis menghendaki supaya berkedudukan di Semarang, sedang orang-orang *SI* menghendaki Jogja, yaitu kota pusat *SI*. Diputuskan untuk sementara tempat kedudukan PPKB di Jogja, di mana bertempat tinggal 4 dari 7 orang pengurus Besar PPKB. Susunan Pengurus Besar *PPKB* pilihan kongres ialah: Semaoen sebagai ketua, R.M. Surjopranoto sebagai wakil ketua, dan Haji Agus Salim sebagai sekretaris.

Kaum komunis mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam *PPKB*. Dalam hal ini besar sekali peranan dari *VSTP* yang militan itu. Sejak mulai berdirinya, *PPKB* sudah dihadapkan pada pekerjaan yang banyak, karena di mana-mana timbul pemogokan-pemogokan.

Dalam bulan Agustus 1920 itu juga pada maskapai *Semarang-Cheribon-Stoomtram Maatschappij (SCS)* timbul konflik antara buruh dengan maskapai. Segera *VSTP* menyampaikan ultimatum pada direksi maskapai. Direksi menyanggupi memberikan syarat-syarat kerja yang sama seperti yang berlaku bagi pegawai *SS*, tetapi maskapai menolak tuntutan-tuntutan *VSTP* yang lain. *VSTP* menganggap putusan direksi ini tidak cukup dan menuntut kenaikan upah serta 8 jam kerja sehari. Suasana menjadi hangat, dan dalam keadaan demikian timbul provokasi, yaitu pecahnya pemogokan di seluruh jalan kereta-api Semarang—Tjirebon dengan tidak setahu *VSTP*. Tapi pengaruh *VSTP* atas kaum buruh sangat besar dan dengan tindakan yang diambil *VSTP*, pemogokan bisa dihentikan dengan segera.

Juga di Sumatera Timur pada permulaan September 1920, timbul pemogokan di kalangan kaum buruh kereta-api *Deli Spoor Maatschappij (DSM)* yang juga menuntut kenaikan upah. Aksi mogok ini juga menjalar sampai kepada buruh *Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)* di Pangkalan Brandan. Dengan dipenuhinya tuntutan buruh, segera pemogokan berhenti.

Dalam bulan November 1920, terjadilah sejumlah konflik perburuhan di Surabaya. Atas usaha pemimpin-pemimpin dari *PPKB* dapat diorganisasi buruh penjahit, buruh pelabuhan, dan buruh perusahaan teknik, dan serikat buruh-serikat buruh ini digabungkan ke dalam vaksentral setempat.

Tuntutan kenaikan upah ditolak oleh majikan. Ini menyebabkan pecahnya pemogokan-pemogokan di berbagai perusahaan. Pemogokan-pemogokan ini ada juga yang mengakibatkan penutupan perusahaan (*lock-out*) sampai tuntutan kaum buruh dikabulkan, dan ada yang memakan waktu sampai dua bulan.

Baru pada akhir Desember 1920, kaum buruh perdagangan dan industri di Surabaya bekerja kembali, dan keadaan ini membikin ramai kembali kehidupan perusahaan yang tadinya dibikin sunyi oleh pemogokan.

Pemogokan-pemogokan dalam tahun 1920 umumnya berakhir dengan kemenangan kaum buruh. Kemenangan-kemenangan ini memberikan semangat dan kegembiraan berjuang pada kaum buruh, mendidik kaum buruh akan pentingnya organisasi dan disiplin, dan membukakan pada kaum buruh dan rakyat umumnya kebobrokan dari peraturan perburuhan kolonial dan pemerintah kolonial.

Karena aksi-aksi kaum buruh, pemerintah terpaksa membicarakan soal upah minimum bagi kaum buruh. Untuk ini oleh pemerintah dibentuk satu komisi perburuhan. Tetapi setelah komisi ini memberikan laporannya pada akhir Juni 1920, pemerintah kemudian menyatakan pendapatnya, bahwa laporan ini “lebih bersifat menyatakan keinginan-keinginan teoretis dari komisi daripada menyatakan apa yang mungkin dalam praktik. Menurut pemerintah, peraturan upah minimum yang diusulkan oleh komisi adalah “secara teori tidak bisa dipertahankan dan dalam praktik tidak bisa dilaksanakan.” Dengan perkataan lain, pemerintah tidak bertindak apa-apa untuk perbaikan nasib buruh.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh gerakan buruh membikin khawatir pihak pemerintah. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi ialah, bahwa rencana kaum komunis dalam serikat-serikat buruh makin lama makin besar. Dengan melalui orang-orangnya, pemerintah Hindia Belanda berusaha memecah-belah gerakan buruh dan mempengaruhi aliran-aliran tertentu dalam *SI*. Dengan segala jalan, pemerintah Hindia Belanda mempertajam pertentangan antara kaum komunis (*PKI*) dengan golongan Islam (*SI*) untuk memecah *PPKB*. Aliran reformis dalam *PPKB* dengan sendirinya mendapat sokongan dan dorongan dari pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, pertentangan antara aliran revolusioner dengan aliran reformis makin lama makin tajam dalam *PPKB*.

Atas usul *VIPBOW* dengan maksud untuk “meredakan pertentangan” yang ada dalam *PPKB*, pada tanggal 18—20 Juni 1921, di Jogja diadakan rapat umum dihadiri oleh semua anggota *PPKB*. Tetapi dalam rapat ini, pertentangan bukan makin reda, tetapi malahan menjadi lebih tajam dan

lebih terang. Di satu pihak, kaum komunis belum mampu menjalankan taktik yang tepat untuk menggalang front persatuan buruh yang luas, dan di pihak lain orang-orang seperti Hadji Agoes Salim, cs. dan pembesar-pembesar *PID* (Jawatan Penyelidik Politik Hindia Belanda) dengan segala jalan menggunakan tiap-tiap kesempatan untuk menimbulkan kekacauan dan perpecahan. Dalam rapat ini, *PPKB* pecah menjadi dua pihak: “golongan Semarang” yang dipimpin oleh kaum revolusioner, dan di pihak lain “golongan Jogja” yang dipimpin oleh kaum reformis Hadji Agoes Salim, cs.

Di bawah pimpinan kaum komunis didirikan vaksentral baru dengan nama *Revolutionaire Vakcentrale (RV)*, yang berkedudukan di Semarang. Dalam *RV* ini tergabung 14 serikat buruh pelabuhan, tambang, supir, percetakan, penjahit, dsb., dengan *VSTP* sebagai tulang punggungnya. *RV* dipimpin antara lain oleh Semaoen, P. Bergsma, Najoan, dll.

Surjopranoto bersama Hadji Agoes Salim meneruskan aktivitasnya dengan nama *PPKB* di Jogja dengan *PPPB* sebagai tulang punggungnya.

Kaum komunis berhasil menarik serikat-serikat buruh yang penting seperti *VSTP*, serikat buruh pelabuhan, tambang, dsb., ke dalam *RV*, tetapi dua serikat buruh yang besar dan penting, yaitu serikat buruh gula (*PFB*) dan *PPPB*, tidak dapat ditariknya. Kedua serikat buruh itu berada di bawah pimpinan kaum reformis. Demikian juga serikat buruh guru berada dalam pimpinan kaum reformis. Keadaan ini mempunyai pengaruh pada gerakan buruh selanjutnya.

Dalam bulan Agustus 1921, terjadi pemogokan buruh pelabuhan di Surabaya, ialah sebagai perlawanan terhadap majikan yang mau menurunkan upah buruh. Kejadian ini segera dicampuri oleh *RV* dengan mengirimkan Semaoen ke Surabaya.

Pada tanggal 11 Januari 1922, terjadi pemogokan buruh pegadaian di bawah pimpinan *PPPB* (anggota *PPKB*), mula-mula di Jogja, tetapi dua minggu kemudian menjalar ke beberapa daerah di Jawa. Berbeda dengan pemogokan-pemogokan lain yang sudah diterangkan di atas, pemogokan ini bukan karena soal upah, tetapi disebabkan oleh sikap pegawai atasan peranakan bangsa Belanda yang bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai Indonesia. Dengan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, pegawai atasan yang umumnya terdiri dari bangsa Belanda menyuruh pegawai-pegawai bangsa Indonesia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap hina, misalnya disuruh mengangkat barang-barang yang akan dilelang ke dalam los. Pegawai menuntut supaya ada pesuruh yang khusus untuk mengangkut barang-barang itu, dan menuntut supaya di kalangan

pegawai juga, juga oleh pegawai atasan, dipergunakan bahasa Jawa Dipo yang demokratis.

Tuntutan-tuntutan ini tidak mendapat perhatian, dan inilah yang menyebabkan pemogokan besar-besaran, 79 dari 360 rumah gadai ambil bagian dalam pemogokan ini. Untuk menindas pemogokan ini, pemerintah Hindia Belanda menggunakan ketentuan hukuman-jabatan, artinya kepala-kepala pegadaian begitu saja bisa memperhentikan pegawai yang dianggap “menolak pekerjaan” atau “mengadakan tentangan”. Dengan demikian, kaum pemogok, sejumlah kira-kira 1.000 orang, yaitu 20% dari seluruh pegawai jawatan pegadaian, dipecat dari pekerjaannya.

Aksi kaum buruh pegadaian yang hebat ini mengalami kegagalan, karena pemimpin *PPPB* yang reformis tidak memberikan tuntunan tegas. Pemimpin-pemimpin yang terlalu banyak berusaha ke atas, misalnya beraudiensi kepada pembesar-pembesar pemerintah, dan kurang mengorganisasi serta membangunkan semangat kaum pemogok. Kesalahan yang besar lagi ialah, bahwa kaum pemogok tidak dikumpulkan secara teratur untuk diberi penjelasan tentang jalannya dan hasilnya perundingan serta bagaimana sikap pemogok selanjutnya. Ketika kaum pemogok dipecat dari pekerjaannya, sama sekali tidak ada petunjuk dari pimpinan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya; dengan putusan sendiri-sendiri ada yang pergi ke desa untuk bertani, ada yang berdagang, ada yang mencari pekerjaan lain, dan sebagian mengabdikan diri sepenuhnya pada organisasi revolusioner. Keadaan yang tidak teratur ini, oleh reaksi dan kaum reformis kemudian dipergunakan untuk menakut-nakuti kaum buruh, terutama buruh pegadaian, agar tidak berani mengadakan aksi-aksi.

Hal yang sangat baik ialah, bahwa dalam menghadapi pemogokan buruh pegadaian yang ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda, baik pihak *RV* maupun pihak *PPKB*, kedua-duanya mengeluarkan pernyataan tentang betapa pentingnya pemogokan ini dan menyerukan supaya seluruh kaum buruh Indonesia menyokong pemogokan, dan dinyatakan juga supaya kaum buruh bersiap-siap agar sewaktu-waktu diperlukan bisa mengadakan pemogokan umum. Di berbagai tempat diorganisasi rapat-rapat penerangan di mana juga dijelaskan kebobrokan pemerintah kolonial. Pemerintah menganggap ini sudah “keterlaluan” dan berpendapat bahwa hak berapat sudah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya. Aktivitas kaum buruh dianggap mengganggu “ketertiban umum” dan atas dasar inilah di daerah Jogjakarta hak berapat dipersempit. Di samping itu, beberapa pemimpin buruh antara lain P. Bergsma dipisahkan dari gerakan buruh Indonesia dengan jalan mengeluarkannya dari Indonesia.

Semaoen tidak ikut serta dalam memimpin pemogokan pegadaian, karena dalam bulan Oktober 1921 dia pergi ke luar negeri untuk menghadiri kongres kaum buruh Timur Jauh di Moskow, di mana dibicarakan juga masalah organisasi buruh di negeri-negeri jajahan. Dia baru kembali pada akhir Mei 1922.

Atas inisiatif anggota-anggota PKI, 25 Juni 1922 di Surabaya diadakan rapat bersama dari serikat-serikat buruh, di mana dalam rapat ini dinyatakan perlunya diadakan fusi antara *Revolutionnaire Vakcentrale* dengan *PPKB*. Usaha ini berhasil, dengan tercapainya fusi dalam rapat yang sengaja diadakan untuk itu di Madiun pada tanggal 3 September 1922. Demikianlah perpecahan dalam gerakan buruh bulan Juni 1921 sebagai hasil pekerjaan memecah-belah dari elemen-elemen reaksioner dapat kembali dipersatukan atas usaha kaum komunis dalam satu vaksentral yang diberi nama Persatuan Vakbond Hindia (*PVH*). Dalam *PVH* tergabung *VSTP*, *PPPB*, *PFB*, *Kweekschoolbond*, *Perhimpunan Guru Bantu* (*PGB*), dll., serikat buruh pemerintah maupun partikelir, dan seluruhnya meliputi 20.000 anggota.

Sasaran yang pertama dari *PVH* adalah maklumat pemerintah tentang akan dicabutnya tambahan upah karena kemahalan, yang telah berjalan beberapa tahun. Alasan pemerintah ialah untuk menghemat belanja pemerintah. Seluruh kaum buruh bersatu dalam menghadapi tindakan pemerintah ini.

Keadaan upah kaum buruh dalam tahun-tahun 1922 adalah sangat buruk. Ini menyebabkan timbulnya desakan yang sangat keras dari kaum buruh untuk mengadakan pemogokan, dan dalam berbagai kongres soal mogok menjadi pembicaraan yang hangat. Dalam menghadapi desakan kaum buruh semacam ini, pemimpin-pemimpin reformis menunjukkan tidak setianya kepada kepentingan kaum buruh dan mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri. Dengan demikian, kaum buruh mengenal siapa pemimpinnya yang sejati dan siapa yang bukan.

Dalam Kongres *PPPB*, bulan Agustus 1922 di Ambarawa, soal mogok juga menjadi pembicaraan yang hangat. Dalam kongres ini ditekankan oleh pemimpin-pemimpin reformis dari *SI* yang duduk dalam *PPPB* supaya jangan sampai diadakan pemogokan karena pemogokan hanya akan membikin lebih celaka nasib kaum buruh. "Lihatlah pengalaman pemogokan yang kalah bulan Agustus 1921," demikian kata pemimpin-pemimpin reformis. Kongres *PPPB* kali ini sangat tidak memuaskan para pengunjung kongres, karena dalam keadaan nasib kaum buruh berada dalam ancaman, pemimpin-pemimpin tidak memberikan jalan dan

pembelaan. Mereka hanya memberikan jalan sebagai yang diinginkan oleh majikan, yaitu supaya tidak mogok.

Sebaliknya dalam lingkungan *VSTP*, kaum komunis mendapat pengaruh yang lebih besar. Tentang maksud pemerintah untuk mencabut tambahan upah karena kemahalan dan tentang maklumat pemerintah mengenai penghematan menjadi pembicaraan yang hangat dalam rapat-rapat kaum buruh kereta api.

Juga dalam kongres *PVH* di Semarang pada akhir Desember 1922, dan dalam pimpinan serikat-serikat buruh di Surabaya pada akhir tahun itu juga, soal pemogokan menjadi pembicaraan hangat.

Bulan Januari 1923, *VSTP* mengeluarkan surat sebaran yang berisi pernyataan akan mengadakan pemogokan jika peraturan pemerintah tentang penghematan dijalankan. Ini masuk akal, karena jika terjadi penghematan maka akan terjadi *massa-ontslag* (pemecatan besar-besaran). Surat sebaran ini dibagikan dan ditempelkan di stasiun serta dibaca oleh kaum buruh dengan penuh perhatian.

Dalam rapat umum *VSTP* bulan Februari 1923, soal pemogokan dibicarakan dan dalam rapat ini diingatkan kepada direksi-direksi maskapai spoor dan tram supaya "tidak bermain dengan api".

Dalam kongres *VSTP* tanggal 3—4 Maret 1923 diputuskan bahwa *VSTP* menggabungkan diri pada Gabungan Serikat Buruh Internasional (*Profintern*). Ini adalah langkah untuk menghubungkan aksi-aksi kaum buruh Indonesia dengan kaum buruh sedunia untuk menanamkan solidaritas internasional pada kaum buruh Indonesia, bahwa perjuangan kaum buruh Indonesia adalah bagian dari perjuangan kaum buruh sedunia. Dalam kongres *VSTP* ini, Semaoen mendapat kekuasaan untuk mengadakan perundingan-perundingan dulu dengan pembesar-pembesar kereta api sebelum *VSTP* mengadakan pemogokan. Di sini kelihatan tindakan yang hati-hati dari pihak *VSTP*, tidak gegabah dalam mengadakan aksi-aksi. Tetapi pemimpin *VSTP* tidak menekankan kaum buruh supaya jangan mengadakan pemogokan, seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin reformis.

Tanggal 12 April 1923 diadakan rapat antara kepala-kepala dinas kereta api dengan pengurus besar *VSTP*.

Dan dalam pertemuan ini, pimpinan *VSTP* mengajukan tuntutan pokok sebagai berikut:

1. tetap mempertahankan "*duurtebijslag*" (tambahan kemahalan, tambahan kenaikan upah),
2. dijalankan 8 jam kerja sehari,

3. supaya diadakan badan arbitrase jika ada perselisihan antara majikan dan buruh.

Selain dari itu dituntut upah minimum f1,— sehari, sedangkan upah yang sudah diakui tahun 1921 tidak boleh dikurangi.

Usul-usul *VSTP* tidak ada yang diterima. Mengenai 8 jam kerja sehari dijanjikan akan diadakan *enquete* tentang waktu kerja dan waktu istirahat dan tentang badan arbitrase kepala inspektur SS tidak mempunyai keberatan prinsipil, tetapi dianggapnya bahwa badan demikian tidak perlu untuk pegawai negeri.

Setelah nyata bahwa perundingan tidak membawa hasil, Semaoen menerangkan bahwa selanjutnya kaum buruhlah yang akan berbicara dan dia tidak tanggung akan akibatnya.

Berhubung dengan kegagalan perundingan *VSTP* – SS, di mana-mana diadakan rapat-rapat penerangan oleh *VSTP*. Kegiatan-kegiatan dalam mengadakan penerangan-penerangan, di mana kolonialisme mendapat serangan yang sengit, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengadakan peringatan pada Semaoen supaya perkataan dan perbuatannya jangan “terlalu galak”. Peringatan pemerintah ini dijawab dengan kontan, bahwa kaum buruh tidak bisa menjamin keinginan pemerintah.

Tanggal 29–30 April 1923, di Surabaya diadakan rapat vaksentral *PVH*. Dalam rapat ini diputuskan bahwa pemogokan umum dari kaum buruh spoor dan tram akan dilangsungkan jika salah seorang pemimpin buruh ditangkap oleh pemerintah.

Dalam rapat *VSTP* di Semarang, tanggal 6 Mei, sekali lagi diterangkan oleh Semaoen, bahwa pemogokan harus diadakan jika terjadi penangkapan atas salah seorang pemimpin buruh.

Pemerintah Hinda Belanda memprovokasi pemogokan dengan menangkap Semaoen pada tanggal 6 Mei 1923 dengan alasan *persdelict*. Segera buruh kereta api mengadakan rapat, di mana diproklamasikan pemogokan yang dimulai pada hari itu juga, mula-mula di Semarang kemudian meluas ke Madiun dan Surabaya. Pemogokan kemudian bersifat umum dan diikuti oleh 13.000 dari 20.000 buruh kereta api. Juga buruh bangsa Eropa ambil bagian dalam pemogokan ini. Pemogokan ini oleh pemerintah dinyatakan di luar hukum. Di daerah-daerah di mana terjadi pemogokan, hak berapat sangat dipersempit, sedangkan propaganda pemogokan diancam dengan hukuman (artikel 161 bis *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*).

Dengan sangat membatasi hak berapat dan dengan larangan berpropaganda, pemerintah berusaha memisahkan pemimpin-pemimpin buruh dari massa kaum buruh. Dalam bulan Mei itu juga pemogokan dapat ditindas oleh pemerintah. Dengan putusan Pemerintah tanggal 1 Agustus 1923, Semaoen diasingkan ke Timor, tetapi atas permintaannya sendiri, Semaoen diberi kesempatan untuk meninggalkan Indonesia.

Demikianlah pemerintah Hindia Belanda membikin lumpuh serikat-serikat buruh yang terbesar; PFB dalam bulan Agustus 1920, PPPB dalam bulan Januari 1922; dan *VSTP* dalam bulan Mei 1923. Tetapi dengan ini sama sekali tidak berarti bahwa aktivitas gerakan buruh revolusioner menjadi berhenti, dan juga tidak berarti bahwa pengaruh kaum komunis menjadi berkurang. Malahan pemecatan-pemecatan terhadap buruh pegadaian dan buruh kereta api, telah menyebabkan lahirnya pemimpin-pemimpin baru dari kalangan pemogok yang dipecat. Ini juga antara lain yang menyebabkan, bahwa sehabis tiap-tiap pemogokan besar, timbul beberapa serikat buruh baru yang dipimpin oleh kaum pemogok yang dipecat. Dan dari mereka tidak sedikit yang kemudian menjadi pemimpin Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, dan PKI.

Kaum buruh Indonesia mendapat pengalaman, bahwa dalam keadaan yang paling sulit, di mana krisis menimpa nasib kaum buruh yang memang sudah celaka, kaum komunis Indonesia dengan PKI sebagai partainya, berdiri di depan memberikan pimpinan dan pembelaannya, walaupun kaum komunis sendiri berada dalam ancaman penjara dan buangan. Pengalaman kaum buruh Indonesia sendiri memberi pelajaran bahwa hanya kaum revolusioner yang setia pada perjuangan kaum buruh, sebagai kebalikan daripada kaum reformis, yang meninggalkan barisan kaum buruh di kala taufan reaksi sedang mengamuk.

Kaum buruh Indonesia mendapat pelajaran, bahwa omongan-omongan “keras” dan “radikal” dari pemimpin-pemimpin reformis dalam keadaan di mana tidak ada perjuangan hidup-mati antara buruh dengan majikan belum bisa dijadikan ukuran bahwa dalam keadaan pertarungan melawan majikan mereka akan memihak kaum buruh.

Atas inisiatif Gabungan Serikat Buruh Internasional Merah (*Profintern*), dalam bulan Juni 1924 diadakan konferensi buruh transportasi Pasifik di Kanton. Dalam konferensi ini hadir wakil-wakil buruh pelayaran dan pelabuhan dari pelabuhan-pelabuhan yang penting di daerah Pasifik. Dari Indonesia hadir Alimin dan Budisutjito, dan mereka kecuali menghadiri konferensi juga bertemu dengan Dr. Sun Yat Sen, yang ketika itu memimpin revolusi Tiongkok.

Dalam konferensi ini antara lain diputuskan, untuk mengeratkan hubungan buruh transportasi di daerah Pasifik, membentuk kantor yang berkedudukan di Kanton dengan bagian-bagiannya untuk Tiongkok, Filipina, Jepang, India, dan Indonesia.

Pada akhir Desember 1924, di Surabaya diadakan Konferensi Buruh Pelabuhan dan Pelayaran. Dalam konferensi ini nampak sekali betapa besarnya pengaruh Konferensi Kaum Buruh Transportasi di Kanton dan ini telah mendorong buruh pelabuhan dan pelayaran Indonesia untuk lebih mempersatukan diri. Demikianlah terjadi penggabungan antara Serikat Laut dan Gudang di Semarang dengan Serikat Kaum Buruh Pelabuhan di Jakarta dan Surabaya menjadi Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan (*SPPL*), dan *SPPL* dirancang untuk digabungkan menjadi Serikat Pegawai Laut Indonesia (*SPLI*), yaitu organisasi anak kapal Indonesia yang didirikan oleh Semaoen di Amsterdam pada kira-kira pertengahan tahun 1924.

Selain daripada itu, juga di Surabaya, dalam rapat yang dihadiri serikat-serikat buruh kereta api, pegadaian, duane, gula, minyak, dll., diputuskan mengadakan Sekretariat Serikat Buruh Indonesia Merah, yang akan masuk menjadi anggota Gabungan Serikat Buruh Internasional Merah (*Profintern*) di Moskow dan juga menjadi anggota *Pan Pacific Labour Union* di Kanton.

Tanggal 21 Juli 1923, pecahlah pemogokan buruh percetakan di bawah pimpinan Serikat Buruh Cetak di Semarang. Mula-mula hanya di satu perusahaan, tapi kemudian menjalar ke perusahaan-perusahaan lain.

Tanggal 1 Agustus 1925, pecah pemogokan di Rumah Sakit Umum Negeri (*CBZ*) Semarang, sebagai protes terhadap perbuatan angkuh dan keras dari dokter bangsa Belanda. Serikat Buruh Pegawai Rumah Sakit Umum adalah anggota dari vaksentral *PVH*, yang pada waktu itu mengikat 20 serikat buruh yang meliputi 30.000 anggota. Bersamaan waktunya, terjadi juga pemogokan buruh transportasi pada *Semarangse Stoomboot dan Prauwenveer* di bawah pimpinan *SPPL*, di mana ikut serta 1.000 kapten dan matros-matros kapal bangsa Indonesia.

Pada tanggal 5 Oktober 1925, buruh mesin dan pabrik mesin *Nederlandsch Indie* mengadakan pemogokan dan pada tanggal 19 November 1925 meluas ke pabrik mesin *Braat*. Pemogokan ini berhasil agak baik.

Pada tanggal 2 Desember 1925, Federasi Buruh Pabrik dan Persatuan Buruh Pabrik serta Persatuan Buruh Listrik memutuskan akan mengajukan beberapa tuntutan kepada 7 pabrik mesin dan bengkel di Surabaya. Pada tanggal 14 Desember 1925, timbul pemogokan di semua pabrik mesin dan maskapai *Droogdok*. Di Jakarta pada bulan September 1925, pegawai Rumah Sakit Sentral (*CBZ*) melakukan pemogokan. Di Medan, pegawai pemerintah

dan partikelir yang terorganisasi dalam *SPPL* pada bulan Oktober 1925 juga mengadakan pemogokan.

Takut kalau-kalau pemogokan menjalar lebih jauh, dan untuk menjaga apa yang dinamakan “ketertiban umum”, pemerintah Hindia Belanda berusaha memisahkan pemimpin buruh yang masih ada (sebagian sudah dibuang) dari massa kaum buruh. Dengan putusan pemerintah tanggal 17 Desember 1925, tiga orang yang tersangkut sebagai pemimpin pemogokan, yaitu Aliarcham, Mardjohan, dan Darsono, diinternir, sedang Alimin dan Musso masih sempat meloloskan diri dari Indonesia. Dalam bulan Januari 1926, Darsono diizinkan meninggalkan Indonesia dan dia pergi ke luar negeri.

Tahun 1926 adalah tahun pecahnya pemberontakan bersenjata nasional yang pertama di Indonesia, di bawah pimpinan PKI. Dalam pemberontakan ini semua pimpinan utama serikat buruh yang anggota PKI tak hanya terlibat, bahkan memainkan peranan memimpin. Mulai dari Aliarcham, Alimin, Musso, Budisutjito, dan lain-lain.

Aksi-aksi pemogokan kaum buruh telah mendahului pemberontakan bersenjata. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penindasan berdarah. Menangkapi, memenjarakan, sampai menghukum gantung sejumlah tokoh pemberontakan, dan melakukan pembuangan ke Boven Digul. Alimin dan Musso dapat meloloskan diri ke luar negeri, sedangkan Aliarcham, Budisutjito, Sardjono, Najoan dibuang ke pembuangan. Pemberontakan dapat dipadamkan oleh kekuasaan bersenjata pemerintah kolonial. Pemberontakan nasional bersenjata 1926 adalah sangkakala revolusi Indonesia.

Walaupun gerakan buruh di Indonesia telah banyak sekali mengalami pukulan-pukulan yang berat dari pemerintah kolonial Belanda, dan akibatnya untuk beberapa waktu tidak tampak kegiatan-kegiatannya yang besar dalam kalangan kaum buruh, tetapi ini tidak berarti semangat persatuan dan perjuangan kaum buruh Indonesia terhenti.

Pada bulan Juli 1927, di Bandung telah didirikan organisasi dari kaum buruh kereta api yang dinamakan *Persatuan Beambte Spoor dan Tram (PBST)* yang pada tingkat pertama menjauhkan diri dari lapangan politik. Majalah *PBST “Kereta Api”* merupakan juru bicara dan penghubung dengan anggota.

Di samping itu juga didirikan di Jakarta berbagai organisasi seperti *Hogere Kweekscholen Bond (HKSB)*, *Perserikatan Normaal School (PNS)*, *Kweekschool Bond (KB)*, *Perhimpunan Guru Bantu (PGB)*, *Perhimpunan Guru Ambachtsschool (PGAS)*, *Persatuan Guru Desa (PGD)*, dan begitu juga bangkit kembali serikat buruh yang dahulu pernah didirikan seperti *Pegadaian*

(PPPB), *Opium Regie Bond* (ORB), *Persatuan Pegawai Garam Hindia Belanda* (PPGHB), *Perkumpulan Personeel Afdelings Bank* (PPAB).

Pada bulan Juli 1928, didirikan suatu bentuk gabungan serikat buruh yang diberi nama Sarekat Kaum Buruh Indonesia (*SKBI*) yang dipimpin oleh Marsudi, tetapi yang setahun kemudian (Juli 1929), karena tanda-tanda kegiatannya telah mulai nampak dan dianggap merupakan ancaman baru bagi pemerintah Hindia Belanda, maka *SKBI* dilarang berdiri, rumah-rumah pengurusnya digeledah dan pimpinannya ditangkap.

Sementara itu dalam kalangan pegawai negeri telah timbul semangat untuk mempersatukan organisasi pegawai negeri. Dalam konferensi yang dihadiri oleh hampir semua organisasi kaum buruh pegawai negeri, di Jogjakarta telah berhasil didirikan sebuah gabungan serikat buruh pegawai negeri yang dinamakan Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (*PVPN*) yang dipimpin oleh Raden Pandji Soeroso.

Pada tahun 1929 bulan Mei, di Surabaya telah diusahakan juga penggabungan serikat-serikat buruh partikelir dan berdirilah Pusat Persatuan Buruh Indonesia (*PPBI*), tetapi organisasi ini tidak dapat meluas dan anggotanya hanya berjumlah 10.000 orang. Kedua Vaksentral ini memusatkan perhatiannya pada akibat-akibat krisis ekonomi yang dihadapi oleh dunia kapitalis dan yang juga mengancam kehidupan kaum buruh Indonesia, dalam bentuk *bezuiniging* (penghematan), pemecatan, penurunan upah, pengurangan jaminan sosial dan sebagainya.

Kegelisahan umum ini tidak saja dihadapi oleh kaum buruh negeri dan swasta, tetapi juga oleh kaum pekerja golongan lainnya seperti kaum tani, pengusaha kecil, bahkan juga oleh anggota angkatan bersenjata.

Kegelisahan ini memuncak pada tanggal 3 Februari 1933, ketika para kelas bangsa Indonesia bekerja sama dengan kelas bangsa Belanda dan dengan kaum buruh pelabuhan dan pelayaran. Mereka memberontak melawan pemerintah Belanda dalam peristiwa yang terkenal dengan "*Peristiwa Kapal Tujuh*". Pemberontakan ini didahului oleh gerakan revolusioner kaum buruh di *Marine Establishment* Surabaya.

Oleh karena kurang siapnya semua kekuatan yang menjadi pendukung pemberontakan maka pemberontakan dapat ditindas dengan serangan biadab yang menimbulkan banyak sekali korban manusia. Dengan kekalahan pemberontakan ini tidak berarti perjuangan rakyat Indonesia melawan penindasan Belanda padam. Sebaliknya, semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan nasional makin meluas, sampai ke dalam lingkungan Angkatan Bersenjata Belanda.

Pada tanggal 21 Mei 1937, di Jakarta didirikan Gabungan Politik Indonesia (*GAPI*) yang menetapkan satu tuntutan pokok kepada pemerintah Hindia Belanda, yaitu agar dibentuk parlemen. Semboyan yang diputuskan sebagai pokok kegiatan dalam Kongres Rakyat Indonesia pada tahun 1939 di Jakarta, yang sangat luas dikampanyekan oleh pimpinan *GAPI* pada waktu itu adalah "Indonesia Berparlemen".

Belanda mengambil tindakan dengan membubarkan *Partindo* 18 November 1936. Golongan progresif di Indonesia tersebar dalam berbagai organisasi. Maka pada tahun 1937, atas inisiatif Musso didirikan organisasi baru yang diberi nama Gerakan Rakyat Indonesia (*Gerindo*), di bawah pimpinan Mr. Sartono, Mr. Amir Sjarifoeddin, dan Mr. Muh. Yamin.

Program perjuangannya adalah:

1. Melawan semua aliran yang hendak menghancurkan demokrasi,
2. Mendirikan dewan-dewan perwakilan yang bertanggung jawab kepada rakyat,
3. Hak memilih langsung dan umum,
4. Hak-hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak berapat dan berserikat, kebebasan pers, kebebasan perseorangan, dan
5. Menghapuskan hak-hak luar biasa gubernur jenderal untuk menangkap dan mengirim orang ke tempat pembuangan, antara lain ke Boven Digul atau Ende, dan membuang seseorang tanpa diadili terlebih dahulu.

Gerindo membukakan pintu yang luas bagi kebangkitan gerakan nasional, dan *Gerindo* menyokong perjuangan organisasi-organisasi serikat buruh dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Ia pun melakukan usaha untuk mendirikan organisasi serikat buruh di kalangan kaum buruh industri minyak, tetapi dilarang oleh pemerintah.

Dalam kongresnya yang kedua pada bulan Mei 1939, gerakan ini telah memiliki 73 cabang di seluruh Indonesia. Berhubung dengan pecahnya Perang Dunia kedua, *Gerindo* mengeluarkan pernyataan yang antara lain berbunyi sebagai berikut: "Gerindo mempunyai kepentingan bersama partai-partai borjuis untuk menghancurkan fasisme, tetapi *Gerindo* menganut cita-cita ideologi kerakyatan. Kontradiksi besar dunia ini tidak disebabkan oleh pertentangan antara bangsa-bangsa, atau pun antara Asia dan dunia Barat, tetapi disebabkan oleh pertentangan antara demokrasi dan fasisme. *Gerindo* harus menahan pengaruh fasisme yang mencoba memasuki Indonesia." [Dewan Nasional SOBSI, *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*, disusun kembali oleh Sadali, Pustaka Pena, Jakarta 2002, hal.47].

Usaha menyatukan serikat-serikat buruh berlangsung terus. Di Semarang dibentuk gabungan semua serikat buruh perusahaan swasta dengan nama Gabungan Serikat-Serikat Sekerja Partikelir Indonesia (GASPI). Atas ajakan GASPI, terbentuklah panitia untuk mendirikan sebuah vaksentral nasional yang luas di Jakarta dengan pimpinan Mr. Hendromartono dan Mr. Suprpto. Segera berdirilah cabang-cabang GASPI di Jogjakarta, Surakarta, dan sebagainya.

Pada 24–26 Juli 1941, di Semarang diadakan konferensi besar yang dihadiri 7 serikat buruh besar vertikal, 22 serikat buruh lokal, dan gabungan lain-lainnya. Segera terbentuk gabungan antara GASPI dan PVPN yang diberi nama GASBI. Dalam pimpinan GASBI duduk antara lain: R.P. Suroso, Mr. Hendromartono, Mr. Suprpto, Harjono, dan S.K. Trimurti.

Salah satu putusan penting konferensi adalah tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar serikat buruh diakui dan diberikan kebebasan berorganisasi. Kekuatan persatuan buruh mendukung GASBI menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menunjuk Mr. Hendromartono sebagai penasihat pemerintah dalam konferensi *International Labour Organisation* (ILO) di Jenewa. GASBI mendesak pemerintah agar Mr. Hendromartono bukan dijadikan penasihat, tapi sebagai anggota delegasi Indonesia.

Gerindo adalah satu-satunya organisasi di Indonesia yang mengambil sikap tegas terhadap Jepang dan berusaha menghimpun kekuatan nasional melawan bahaya besar fasisme. Tapi politik anti-fasis itu belum sempat disebar dan ditanamkan di kalangan rakyat luas. Berbagai semboyan dilontarkan oleh kaum fasis Jepang seperti “Asia untuk Asia”, “Asia Timur Raya”, “Jepang adalah saudara Tua”, “Ramalan Djojobojo” yang menyebutkan kedatangan bangsa kulit kuning sebagai penolong orang Jawa. Semua itu dimaksudkan untuk menimbulkan kepercayaan terhadap fasisme Jepang. Oleh karena itu Jepang dapat masuk ke Indonesia dengan mudah sekali, hampir tanpa perlawanan, sehingga pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Perang Belanda, Ter Poorten, menyerah kalah tanpa syarat kepada Jenderal Jepang Imamura di Kali Jati, dekat Bandung.

Di bawah kekuasaan fasis Jepang, dalam keadaan yang sangat sulit, gerakan buruh Indonesia berlangsung terus. Tindakan pertama pemerintahan fasis Jepang adalah mengejar kekuatan progresif dan demokratis rakyat Indonesia. Semua organisasi rakyat Indonesia, termasuk partai-partai politik, serikat buruh, organisasi pemuda, wanita, sampai juga organisasi koperasi dan organisasi sosial lainnya harus mendaftarkan diri. Kemudian pemerintah melarang berdirinya semua organisasi. Yang

diperkenankan hanya yang bermaksud memperkuat langsung kedudukan Jepang di Indonesia. Organisasi-organisasi demikian ini adalah misalnya *Gerakan Tiga A*, yang berarti mengakui Dai Nippon adalah *Pemimpin, Pelindung, dan Cahaya Asia, Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa), Kumiai*, dan sebagainya.

Di samping itu, dengan segera kaum fasis Jepang mendirikan organisasi yang bermaksud mengerahkan tenaga manusia Indonesia sebanyak-banyaknya untuk melakukan kerja paksa membangun benteng-benteng perlindungan, parit-parit, penyimpanan logistik untuk perang jangka panjang, dan lain-lain untuk keperluan perang. Organisasi pengerahan tenaga ini dinamakan *Romusha* (buruh yang dipekerjakan dengan paksa) Untuk kepentingan memperkuat usaha perang, Jepang mengorganisasi pemuda-pemuda dalam dinas ketentaraan bernama Pembela Tanah Air (*PETA*) dan pasukan sukarela *Heiho* (pasukan pembantu).

Oleh pemerintahan militer Jepang, hal berapat, mengeluarkan pendapat, hak berserikat, dan semua hak-hak demokrasi ditiadakan. *Gerindo* dan organisasi-organisasi berpikiran maju terus-menerus menggerakkan perlawanan terhadap Jepang. Banyak pemimpin *Gerindo* dan serikat buruh ditangkap, disiksa di luar batas perikemanusiaan, dipenjarakan, dan dibunuh, antara lain Pamoedji, Soekajat, Haji Abdoel Azis, Hadji Abdoel Rahim, dan lain-lain. Beratus-ratus lainnya dihukum penjara dari lima tahun sampai seumur hidup seperti Subianto Koesoemo. Mr. Amir Sjarifuddin dijatuhi hukuman mati. Berkat pembelaan Bung Karno, hukuman matinya tidak dilaksanakan.

Penindasan melahirkan perlawanan rakyat dengan berbagai sabotase, penggulingan kereta-api seperti yang terjadi di Blitar dan Madiun. Bahkan terjadi pemberontakan di Madiun, *Pemberontakan Tani Lohbener Indramayu*; Februari 1944, *Pemberontakan Tani Singaparna*; November 1944, Sindang (Kabupaten *Indramayu*); pemberontakan bersenjata *PETA* yang dipimpin Soeprijadi di Blitar, Februari 1945.

Para kader dan aktivis *PPST* berusaha menghubungi “orang-orang lama” dari zaman *VSTP* yang pernah ambil bagian dalam pemogokan *VSTP* tahun 1923, sehingga terjadilah perpaduan antara kader-kader tua bawah tanah dengan kader-kader muda.

Grup Jakarta memainkan peranan penting dalam menggerakkan kegiatan di kalangan buruh kereta api di kota-kota lainnya. Di antaranya terdapat anggota-anggota pimpinan seperti Legiman, Harjono, Atmodihardjo, Soekiran, Mansoer Loebis, Tjokropoespito, Soeharjono,

Alinoer, Ambas, Zoelkifli, B.S. Anwir, Goerdali, Soeko, Darso, Soetarto, Soewarno, dan Rachmat.

Mereka yang berperan dalam koordinasi itu di antaranya ialah: Mr. Hendromartono, Mr. Samjono, Soeratin, dan Soedarso. Perluasan grup-grup revolusioner berlangsung terus. Grup Bandung dipimpin oleh masinis Sutrisno, Cikampek oleh Soetarman. Kemudian meluas ke Cirebon, Purwokerto, Kroya, Surabaya, Semarang, Solo, dan tempat-tempat lainnya.

Dengan meningkatnya semangat anti-Jepang di kalangan rakyat, terutama setelah tersiar kabar pemberontakan Indramayu, Singaparna, Blitar, dan lain-lainnya, maka buruh kereta api juga kian meningkatkan aktivitasnya, antara lain ikut menyelamatkan orang-orang yang dicari oleh *Kempeitai* (polisi militer Jepang yang sangat ganas dan kejam), melakukan gerakan antara lain bekerja secara “*slow down*”, memperlambat datangnya kereta api tertentu, memperlambat pengiriman bahan makanan untuk kepentingan perang dan sebagainya.

Di samping aktivitas buruh kereta api, juga di daerah-daerah tumbuh gerakan di bawah tanah. Ketika terjadi perlucutan senjata terhadap tentara Jepang, pemuda-pemuda buruh kereta api bersama pemuda-pemuda lainnya siap ambil bagian di kota-kota besar, antara lain di Surabaya, Semarang, Solo, Jogjakarta, dan Bandung. Dalam perlucutan senjata Jepang inilah gugur di antaranya Arifin, pemuda buruh sepatu, ketika bertempur melawan *Kempeitai* di markasnya di daerah Pasar Pon Solo. Para pemuda tersebut akhirnya berhasil melucuti dan mengambil alih senjata Jepang dan menundukkan *Kempeitai* Jepang tersebut.

Berkat serangan Tentara Merah Sovyet di Timur Laut Tiongkok hingga memasuki semenanjung Korea, dan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh pasukan Amerika, Jepang bertekuk lutut. Berakhirlah Perang Dunia kedua.

17 Agustus 1945, Indonesia memproklamlirkan kemerdekaan. Pemuda Indonesia memainkan peranan penting mendukung usaha merebut kemerdekaan dan melucuti senjata Jepang. Tidak sedikit pemuda gugur melawan Jepang. Dalam pada itu, organisasi pemuda bermunculan di banyak tempat.

“Di Jawa Barat muncul *Angkatan Pemuda Indonesia* di bawah pimpinan Wikana dan Chaerul Saleh dibantu oleh Hanapi, Koesnandar, Pardjono, Djohar Nur, dan D.N. Aidit. Organisasi ini bertujuan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan memperjuangkan susunan masyarakat yang berdasarkan sama rata sama

rasa serta bersifat anti fasis.” [Hardjito, *Risalah Gerakan Pemuda*, Pustaka Antara, Djakarta, 1952, hal.31].

Di samping API, terdapat Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI), berpusat di Semarang di bawah pimpinan Ibnu Parna, Pemuda Republik Indonesia (PRI) berpusat di Surabaya di bawah pimpinan Soemarsono; Gerakan Pemuda Republik Indonesia (GERPRI) berpusat di Jogjakarta di bawah pimpinan Lagiono. Selain organisasi-organisasi tersebut, juga berdiri Gabungan Pegawai Angkatan Muda (GPAM) yang kemudian menjadi badan federasi dari segenap organisasi pemuda jawatan-jawatan dan akhirnya menjadi Angkatan Pemuda Pembangunan Indonesia (APPI).

Tanggal 9–10 November 1945, berlangsung Kongres Pemuda Indonesia di Jogjakarta untuk menggabungkan organisasi-organisasi pemuda yang ada. Kongres berhasil mendirikan Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BKPRI). BKPRI dibantu oleh 1. Dewan Pekerja Perjuangan dan 2. Dewan Pekerja Pembangunan.

Pada tanggal itu, terbentuk pula organisasi Pemuda Sosialis Indonesia (*Pesindo*), penggabungan 7 organisasi pemuda:

1. Angkatan Pemuda Indonesia,
2. Gerakan Pemuda Republik Indonesia,
3. Angkatan Muda Republik Indonesia,
4. Pemuda Republik Indonesia,
5. Angkatan Muda Kereta Api,
6. Angkatan Muda Gas dan Listrik,
7. Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon.

Pesindo memiliki kekuatan bersenjata.

Dalam perkembangannya, dalam kongres III tahun 1950, *Pesindo* berubah menjadi *Pemuda Rakyat*. Dalam Peraturan Dasar hasil kongres V dinyatakan bahwa *Pemuda Rakyat* adalah pembantu setia dan terpercaya dari PKI.

Kongres VI tahun 1961 merumuskan bahwa *Pemuda Rakyat* sebagai pembantu yang setia dan terpercaya dari PKI akan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang ditumpahkan kepadanya dan dengan sekuat tenaga akan melaksanakan secara aktif program PKI. Ini berarti *Pemuda Rakyat* harus setia mengabdikan cita-cita revolusi Agustus 1945 dan kepentingan-kepentingan vital massa pemuda dengan jalan lebih memperkuat persatuan dan mengeratkan hubungannya dengan massa pemuda, giat belajar teori fundamental Marxisme-Leninisme dan meningkatkan pengetahuan umumnya serta memperhebat kegiatannya di bidang olahraga dan kesenian untuk menjadikannya pejuang-pejuang muda yang sehat dan gembira.

Tanggal 27 November 1945, dengan sebuah pengumuman, dinyatakan berdirinya susunan Dewan Pekerja Perjuangan dengan Pemimpin Umum Soemarsono, Wakil Pemimpin Umum Soerjantokoesoemo, Ketua Sekretaris Bb. Kaslan, Ketua Bagian Penerangan Widarta, Ketua Bagian Penghubung S. Moestapha, Ketua Bagian Pengawas Pramono, Ketua Bagian Pertahanan Ks. Koesnandar.

Kongres Pemuda Indonesia II dilangsungkan di Jogjakarta 8—9 Juni 1946. Dalam kongres, berpidato Presiden Soekarno; Menteri Pemuda, Wikana; dan Menteri Pertahanan, Amir Sjarifuddin. Kongres memutuskan Dewan Pimpinan Pusat BKPRI terdiri dari: Soepardo, Pemimpin Umum; A. Boechari, Wakil Pemimpin Umum I; Soepeno, Wakil Pemimpin Umum II; Warsana, Penulis. Dan Badan Pekerja BKPRI dengan Soemarsono, Pemimpin Umum; Soepardi, Penulis I; Bb. Kaslan, Penulis II. Kongres memutuskan menyediakan dua orang untuk kandidat bagi Dewan Pertahanan Negara, yaitu Soemarsono dan Soepardo.

Di Australia, proklamasi kemerdekaan Indonesia mendapat sambutan yang hangat sekali. Masyarakat Indonesia di Australia, terutama mereka yang bekerja sebagai buruh pelabuhan dan pelayaran, sangat tanggap terhadap situasi tanah airnya. Kapal-kapal Belanda untuk tujuan Indonesia yang sudah penuh muatan, mereka tunda keberangkatannya. Kelasi-kelasi Indonesia yang bekerja di kapal Belanda menolak untuk berlayar.

Sementara itu di kalangan buruh pelabuhan Australia yaitu *Australian Seamen's Union* dan *Australian Waterside Workers Union* melakukan aksi bersama. Sampai melakukan pemogokan dan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda. Kaum buruh Australia menuntut "*Kapal-kapal Belanda supaya segera menghentikan pengangkutan senjata dan amunisi yang digunakan untuk memerangi rakyat Indonesia.*"

Akhirnya di seluruh kapal Belanda di Australia berlangsung boikot dan pemogokan sampai pekerja-pekerja dapur menolak bekerja sama dengan Belanda. [Dewan Nasional SOBSI, *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*, disusun kembali oleh Sadali, Pustaka Pena, Jakarta 2002, hal.58].

Restoran-restoran Tionghoa di Brisbane sampai membantu memberi makan gratis kepada kaum buruh Indonesia yang sedang mogok. Solidaritas ini juga terjadi di Singapura. Sekitar 7.000 buruh India dan Tionghoa melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda.

Aksi-aksi juga terjadi di Amerika. Sekitar 200 orang buruh pelayaran Indonesia yang ada di Amerika Serikat pada tanggal 19 Oktober 1945 melakukan pemogokan dan demonstrasi di New York. Selama berbulan-bulan mereka berhasil memboikot 11 kapal Belanda dengan mengikatnya di

pelabuhan. Kapal-kapal itu semula hendak mengangkut alat-alat perang Belanda yang didapatkan dari Amerika Serikat. Berkat perjuangan kaum buruh pelayaran Indonesia yang gigih dan berkat solidaritas *Serikat Buruh Pelayaran Amerika Serikat (National Maritime Union of USA)*, maka alat-alat perang Belanda itu terpaksa dibongkar.

Di samping mencurahkan tenaga di garis depan, kaum buruh Indonesia pun dengan serentak ikut mengambil alih kekuasaan atas semua pabrik, perusahaan, perkebunan, tambang, dan sebagainya, dari tangan Jepang dan menyerahkannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Semua pabrik dan perkebunan diberi plakat bertulisan "*Milik Republik Indonesia*". Untuk penjagaan keamanan dan mencegah sabotase, di mana-mana didirikan laskar buruh. Ada Laskar Buruh Minyak, Laskar Buruh Kereta Api, Laskar Buruh Gula, dan sebagainya.

Tanggal 13 Maret 1946, berdiri Serikat Buruh Kereta-api (SBKA); 1 November 1945, berdiri *Serikat Buruh Postel*; 12 Oktober 1945, berdiri Serikat Buruh Jawatan Pekerjaan Umum (SBPU); 3 Maret 1946, berdiri Serikat Buruh Gula (SBG); 24 November 1945, berdiri Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); 17 Februari 1947, berdiri Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (*Sarbupri*).

Untuk lebih mempersatukan seluruh kekuatan kaum buruh dan mengkoordinir semua kegiatannya, maka oleh beberapa serikat buruh pegawai negeri diusahakan terbentuknya satu organisasi gabungan yang dinamakan *Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI)*. Tapi karena adanya pertentangan yang agak hebat dalam GASBI, terutama disebabkan oleh perebutan kedudukan pimpinan, maka elemen-elemen yang tidak puas memisahkan diri dari gabungan tersebut, dan mendirikan *Gabungan Serikat Buruh Vertikal (SBV)*.

Baru pada tanggal 29 November 1946, atas inisiatif golongan progresif, telah berhasil diadakan pertemuan antara semua organisasi vaksentral dan serikat-serikat buruh, termasuk GASBI dan GSBV, di mana dicapai kata sepakat untuk melebur gabungan-gabungan serikat buruh tersebut ke dalam satu vaksentral dengan nama *Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI)*.

Pada bulan Mei 1947, dilangsungkan Kongres Nasional pertama SOBSI di Malang yang mendapat kunjungan dari hampir semua serikat buruh yang terdapat di daerah Republik Indonesia. Kongres juga dihadiri oleh utusan-utusan kaum buruh dari daerah-daerah yang diduduki Belanda dan utusan kaum buruh dari luar negeri.

Program perjuangan yang diputuskan oleh kongres yang sangat penting ini adalah:

1. Mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.
2. Melakukan pembangunan ekonomi dan sosial.
3. Dalam lapangan perbaikan nasib kaum buruh, juga diputuskan untuk memperbaiki peraturan gaji bagi pegawai negeri Republik Indonesia dan menyusun Undang-Undang Perburuahan yang di antaranya memuat ketentuan mengenai 7 jam bekerja sehari.
4. Dalam lapangan organisasi, kongres memutuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, di mana dirumuskan adanya demokrasi terpimpin, prinsip susunan organisasi bersifat federasi, tentang keanggotaan dan ketentuan-ketentuan mengenai iuran serta dibentuknya satu presidium dan pimpinan harian dari SOBSI.
5. Selanjutnya diputuskan untuk menggabungkan diri dengan *Gabungan Serikat Buruh Sedunia (GSS)* atau *World Federation of Trade Unions (WFTU)*.
6. Sebagai pimpinan terpilih antara lain: Harjono, Oei Gee Hwat, Njono, Asraroeuddin, Djokosoejono, K. Werdojo, S.K. Trimurti, R.H. Koesnan, dan lain-lain.

Dengan demikian, kian terkonsolidasilah kekuatan organisasi buruh di Indonesia. Tidak saja di dalam negeri, bahkan telah punya hubungan luar negeri dengan SOBSI menjadi anggota GSS. GSS adalah Gabungan Serikat Buruh Sedunia, *World Federation of Trade Unions (WFTU)* yang didirikan 3 Oktober 1945 di Praha.

Kemenangan yang penting lainnya adalah di bawah pemerintahan Amir Sjarifuddin dengan S.K. Trimurti sebagai Menteri Perburuahan dihasilkan Undang-Undang Kerja tahun 1947. Dalam Undang-Undang Kerja ini dicantumkan pengakuan bahwa Hari Satu Mei adalah hari raya resmi, ditetapkan 7 jam kerja sehari dan 40 jam kerja seminggu, diadakan larangan kerja berat untuk buruh wanita.

Kekuatan reaksioner dalam negeri secara terus-menerus berusaha memecah-belah persatuan kaum buruh. Dengan berkedok semboyan-semboyan “menentang *Persetujuan Linggarjati* dan *Renville*” mereka mendirikan organisasi buruh di luar persatuan yang telah ada dengan nama Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang menjadi bagian dari Partai Masjumi dan Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI) dari Partai Murba. GASBRI tahun 1951 mengubah namanya menjadi SOBRI (*Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia*).

Tahun 1948 adalah permulaan ber kobarnya *Perang Dingin*, realisasi *Doktrin Truman, the Policy of Containment*, politik pembendungan komunisme sejagat. Tak ayal lagi, adanya pemerintah Indonesia dengan Amir Sjarifoeddin sebagai perdana menteri, adalah bagaikan duri di mata Amerika Serikat. Dengan “*Red Drive Proposals*”, usul pembasmian kaum kiri di Indonesia, maka meletuslah “*Peristiwa Madiun*” September 1948. Amir Sjarifoeddin terbunuh, bersama pucuk pimpinan PKI, termasuk Musso, sekjen CC PKI., Suripno, dll., ketua umum dan pimpinan utama SOBSI, Harjono, Oei Gee Hwat, D. Mangku, dan tokoh-tokoh gerakan buruh lainnya terbunuh.

Gerakan buruh mengalami pukulan berat karena usaha pecah-belah.. Dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sama sekali tidak demokratis, elemen-elemen reaksioner memaksa serikat buruh untuk keluar dari SOBSI, satu-satunya gabungan serikat buruh yang ada waktu itu. Seperti Serikat Buruh Gula, Serikat Buruh Listrik dan Gas Indonesia, juga PGRI, Serikat Buruh Jawatan Pekerjaan Umum, Serikat Buruh Pegadaian, Serikat Buruh Radio Republik Indonesia. Perang Dingin merasuk ke dalam gerakan buruh, nasional dan internasional. Anggota-anggota SOBSI dicerai-beraikan. Demikian pula GSS mendapat saingan dengan lahirnya *International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)* yang disponsori CIA 7 Desember 1949 di London. ICFTU didirikan oleh organisasi-organisasi serikat buruh yang anti-komunisme, menentang GSS.

Peristiwa Madiun yang merupakan pelaksanaan *Doktrin Truman*, yaitu pelaksanaan *the policy of containment*, politik pembendungan komunisme sejagat, adalah salah satu halaman gelap dalam sejarah Indonesia. Dengan *Peristiwa Madiun*, pemerintah Hatta berhasil menyingkirkan kekuatan kiri dari Angkatan Bersenjata RI. Ini sesuai dengan “*Red Drive Proposals*”, yang diajukan Amerika Serikat pada pemerintah Indonesia dalam “*Pertemuan rahasia Sarangan*”.

Sesudah kaum kiri disingkirkan dari pemerintah dan angkatan bersenjata, maka 19 Desember 1948 berlangsunglah agresi kolonial Belanda kedua terhadap Republik Indonesia. Belanda berhasil menduduki ibukota republik dan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta.

Kehidupan Republik Indonesia berlanjut dengan terbentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di bawah pimpinan Sjafoeddin Prawiranegara. berkedudukan di Suliki, Sumatera Tengah. Dan rakyat dengan kekuatan bersenjata yang setia kepada republik melancarkan perang gerilya yang kian lama kian berkobar. Belanda melancarkan aksi diplomatik

dengan dukungan Amerika Serikat, hingga berhasil melangsungkan Konferensi Meja Bundar di Den Haag yang menelorkan *Persetujuan KMB*.

Terbentuklah negara *Republik Indonesia Serikat (RIS)*, dengan negara-negara bagiannya terdiri dari:

A. Daerah Kekuasaan RIS 1 mencakup: Negara Pasundan, Republik Indonesia, Negara Jawa Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Selatan, Negara Sumatera Timur,

B. Daerah Kekuasaan RIS 2 meliputi: Negara Riau, Negara Jawa Tengah, Negara Dayak Besar, Negara Bangka, Negara Belitung, Negara Kalimantan Timur, Negara Kalimantan Barat, Negara Kalimantan Tenggara, Negara Banjar, Negara Dayak Besar.

Dengan *Persetujuan KMB* berarti hasil Revolusi Agustus 1945 dilikuidasi. Indonesia kembali jadi tempat investasi kapital asing, jadi sumber bahan mentah bagi industri negeri-negeri kapitalis, jadi sumber tenaga kerja yang murah, dan jadi pasar komoditi negara-negara imperialis. Indonesia harus membayar hutang kepada negara Belanda sebesar 4,5 miliar gulden. Irian Barat tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Dan *RIS* berada di bawah naungan mahkota Kerajaan Belanda.

Di bawah kekuasaan *RIS*, gerakan buruh tak pernah henti, bahkan berlangsung pembangunan kembali serikat-serikat buruh. Tenaga-tenaga pimpinan yang berhasil menangkis pembasmian selama kontra-revolusi dalam *Peristiwa Madiun*, menghimpun kembali sedikit demi sedikit, dengan sekuat tenaga berusaha menghidupkan dan membangun kembali *SOBSI*. Pada waktu itu telah ada beberapa gabungan serikat buruh seperti Gabungan Serikat Buruh Republik Indonesia (*GASBRI*), Himpunan Serikat Buruh Indonesia (*HISBI*), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (*GSBI*), di samping *SOBSI*, dan mereka menyetujui untuk membentuk suatu koordinasi mengenai aktivitas-aktivitas bersama.

Dalam rangka usaha mempertahankan Republik Proklamasi 1945, maka oleh kaum buruh dan rakyat Indonesia diadakan aksi-aksi bersama untuk melikuidasi negara-negara bagian *RIS* yang diciptakan oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Aksi-aksi demonstrasi, boikot, serta pemogokan dilakukan oleh massa kaum buruh di berbagai daerah, hingga pada 17 Agustus 1950 tuntutan yang mendapat dukungan yang sangat luas berhasil dengan dihapuskannya negara-negara bagian *RIS* satu demi satu dan diwujudkannya *Negara Kesatuan Republik Indonesia* dengan satu pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Perjuangan buruh berlanjut dengan tuntutan pembatalan *Persetujuan KMB*. Tuntutan ini mendapat dukungan luas di kalangan kaum buruh dan massa rakyat. Setelah membayar sekitar 4

miliar gulden antara tahun 1950—1956, Indonesia secara sepihak membatalkan persetujuan *KMB*.

Dengan modal kekuatan *SOBSI* cabang Surakarta dan Jogjakarta dan beberapa Serikat Buruh (*SBG*, *SBTI*, *SBKA*, *SB Mobil*, *SB Kehutanan*, *Sarbupri* dan lain-lain) dan berpedoman pada tugas pokok yang telah ditentukan dalam Kongres Nasional I *SOBSI* ialah: untuk menggalang persatuan kaum buruh guna memperjuangkan perbaikan nasib, hak-hak demokrasi dan kemerdekaan tanah air sepenuhnya, maka dalam waktu yang singkat dapat dibangun serikat-serikat buruh vertikal dan cabang-cabang *SOBSI* di seluruh Indonesia.

Untuk perbaikan nasib, *SOBSI* mengajukan tuntutan tunjangan lebaran sebanyak satu bulan gaji kotor bagi semua buruh negeri dan swasta, baik bagi buruh tetap dan buruh harian. Tuntutan ini terbukti dipenuhi, sekalipun tidak sepenuhnya. Dalam waktu hampir setahun sesudah pembangunan kembali *SOBSI* telah dapat menghimpun tidak kurang dari 25 serikat buruh vertikal dan serikat buruh lokal yang kesemuanya meliputi anggota tidak kurang dari 2.500.000 orang buruh.

September 1950 berlangsung pemogokan besar buruh perkebunan di bawah pimpinan *Sarbupri* menuntut kenaikan upah. Pemogokan ini menang. Ini meningkatkan kesadaran buruh berorganisasi. *SOBSI* giat menyelenggarakan pendidikan kader serikat buruh, memberantas buta huruf di kalangan buruh perkebunan, kehutanan dan industri lainnya. Untuk penerangan dan pendidikan juga menerbitkan majalah "*Bendera Buruh*". Anggota *SOBSI* juga menerbitkan "*Suara SBKA*", "*Suara Sarbupri*", dan lain-lain.

Sesudah berhasilnya tuntutan pembatalan *Persetujuan KMB*, tuntutan berkembang jadi untuk pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda. Berlangsung berbagai macam kegiatan kaum buruh, mulai dari mengajukan resolusi-resolusi kepada pemerintah, melakukan aksi-aksi rapat umum dan demonstrasi-demonstrasi. Amerika Serikat jadi terlibat dalam masalah penyelesaian sengketa Indonesia—Belanda mengenai Irian Barat. Aksi-aksi kaum buruh Indonesia mendapat simpati dan solidaritas dari kaum buruh semua benua. Berkat dukungan GSS, solidaritas kaum buruh jadi meluas ke semua benua. Sebagaimana solidaritas kaum buruh sedunia menghadapi masalah nasionalisasi Terusan Suez dan melawan agresi Inggris—Perancis dan Israel tahun 1956, kaum buruh Asia—Afrika memberikan solidaritasnya terhadap kaum buruh Indonesia untuk pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia. Solidaritas ini ditunjukkan oleh kaum buruh pelabuhan dan pelayaran Birma, Sri Lanka, Mesir, Italia, Perancis, Belanda,

yang turut memboikot kapal-kapal Belanda. Solidaritas ditunjukkan pula oleh kaum buruh dan rakyat negeri-negeri sosialis Uni Sovyet dan Eropa Timur.

Aktivitas gerakan buruh Indonesia di bawah pimpinan SOBSI mendapat perhatian internasional. Ini dibuktikan dengan banyak fungsi internasional yang telah dipegang oleh serikat-serikat buruh Indonesia. Njono, Sekretaris Jenderal SOBSI, dipilih menjadi Wakil Presiden GSS. Sugiri, anggota Sentral Biro SOBSI, menjadi Sekretaris GSS, yang kemudian digantikan oleh Setiati Surasto, Wakil Ketua Dewan Nasional SOBSI. Tjugito, Sekretaris Dewan Nasional SOBSI terpilih sebagai Presiden Serikat Buruh Agraria dan Kehutanan Sedunia. Wakil-wakil serikat buruh Indonesia selalu diikutsertakan dalam persidangan badan-badan internasional dari PBB sebagai wakil GSS, seperti dalam ILO, Ecafe, Ecosoc, Unesco, dan sebagainya.

Aksi-aksi kaum buruh dan massa rakyat mendukung pemerintah Bung Karno melancarkan perjuangan untuk pengembalian Irian Barat kian menggelora. Lewat perjuangan diplomatik yang ditempuh pemerintah, dan lewat “jalan lain” yang diserukan Bung Karno, maka Irian Barat kembali ke bawah naungan kedaulatan Republik Indonesia.

Berbagai keputusan politik yang sangat strategis telah pula dikeluarkan oleh pemerintah Bung Karno pada tahun 1957 sampai dengan 1959, antara lain: perjuangan pembebasan Irian Barat, pembatalan *Persetujuan Konferensi Meja Bundar*, ambil alih/nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, dan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; Konstituante dibubarkan, dan Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik liberal ditinggalkan, dan dimulai sistem politik yang dikenal dengan *Demokrasi Terpimpin*.

Dalam pada itu, *Perang Dingin* kian berkecamuk di Asia. Puncaknya adalah Perang Vietnam dengan pengerahan seperempat juta pasukan Amerika untuk membasmi komunis Vietnam dan Indocina. Perang Dingin merasuk juga ke dalam gerakan buruh nasional dan internasional. Di bidang internasional, dengan rekayasa CIA terbentuklah organisasi *International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU)* yang anti komunis untuk menandingi WFTU (GSS).

Di Indonesia, 21 September 1962, atas prakarsa Angkatan Darat dengan petugasnya Brigjen. Suhardiman S.E. dan Brigjen. Djuhartono dibentuk Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) untuk menghadapi SOBSI. Aslinya, menurut gagasan Suhardiman, yang akan dibentuk adalah Sentral Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia. Tokoh SOKSI, Suhardiman,

mengakui bahwa pembentukan SOKSI adalah untuk mencegah kemenangan PKI dalam pemilihan umum yang akan berlangsung. Diramalkan banyak pihak, bahwa jika berlangsung pemilihan umum, PKI akan mendapat kemenangan besar. Maka kekuatan kanan Angkatan Darat dengan dipelopori Nasution menuntut ditundanya pemilihan umum untuk enam tahun. Pemerintah Djuanda memutuskan untuk menunda pemilihan umum.

SOKSI tampil memandulkan gerakan buruh di Indonesia. Dengan menghimpun 97 organisasi massa non-partisan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan membentuk Sekretariat Bersama Golongan Karya (*Sekber Golkar*), inti kekuatan pokok ialah SOKSI, Kosgoro, MKGR, yang diketuai oleh Brigjen. Djuhartono, dengan restu Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal A. Yani.

Suhardiman, tokoh pendiri SOKSI, mengakui bahwa didirikannya SOKSI adalah untuk mencegah kemenangan PKI dalam pemilihan umum. Konsep *karya dan kekaryaan* ialah melumpuhkan gerakan buruh Indonesia. Konsep ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perjuangan buruh di dalam perusahaan negara, perusahaan yang diambil alih dan perusahaan vital lainnya. Berdasarkan konsep karya dan kekaryaan inilah dihapus istilah “buruh” dan menggantinya dengan istilah “karyawan”, dengan dalih perjuangan melawan Belanda sudah berakhir, perusahaan Belanda di Indonesia sudah diambil alih, dan istilah “buruh” sudah tidak tepat lagi, perlu dicegah dan ditiadakan perjuangan kelas.

Tanggal 17–25 September 1964 di Jakarta berlangsung Kongres Nasional IV SOBSI. SOBSI telah jadi organisasi buruh terbesar. Telah tergebleng dengan mengatasi berbagai tantangan seperti reaksi dalam luar negeri, dan sesudah “*Peristiwa Madiun*” menghadapi Peraturan Kekuasaan Militer Pusat No.1/1950 dan Undang-Undang Darurat No.16/1951 yang berisi larangan dan membatasi hak mogok, menghadapi Razia Agustus pemerintah Sukiman tahun 1951 yang melakukan penangkapan atas banyak pimpinan gerakan buruh, dan dilakukannya SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) yang mengekang hak-hak demokrasi, membatasi kebebasan mogok kaum buruh.

Di bawah pimpinan SOBSI, kaum buruh Indonesia telah memainkan peranan sangat penting dalam aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik kapital asing, kapital Belanda pada masa aksi pengembalian Irian Barat. 1 Mei 1963, pemerintah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya gerakan buruh berkembang meningkat menghadapi kapital Amerika Serikat. Puncaknya sampai pada pengambil alihan kapital perusahaan minyak Amerika *Caltex* dan *Stanvac*.

Di bawah pimpinan Bung Karno, pemerintah mengeluarkan kebijakan UU No.86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol negara. Kaum buruh di bawah pimpinan *SOBSI* dengan gairah mendukung politik anti imperialisme Amerika Serikat Bung Karno. Politik ini mencapai puncaknya: 26 Maret 1964, dalam suatu rapat umum, Bung Karno menyatakan: *"Go to hell with your aids!"* yang ditujukan kepada Amerika Serikat. Di Indonesia bergelora suasana anti Amerika. Kelas buruh Indonesia di bawah pimpinan *SOBSI* merupakan kekuatan pokok dalam gerakan anti Amerika ini. 7 Januari 1965, Indonesia menyatakan keluar dari *PBB*.

X

PKI DAN BUNG KARNO BAGAIKAN HANTU BAGI AMERIKA

1. Lahirnya Gerakan Nasional, Peranan Penting *Sarekat Islam*

PADA awal abad XX di Indonesia mulai lahir kecambah gerakan nasional. 20 Mei 1908 di Jakarta, atas inisiatif Dr. Wahidin Soedirohoesodo terbentuk organisasi *Boedi Oetomo*, yang bercita-citakan memajukan pendidikan. Keanggotaannya terdiri dari para intelektual, pegawai negeri, mahasiswa kedokteran, yang pada umumnya berasal dari kalangan bangsawan feodal Jawa yang berpikiran maju.

Baru mulai tahun 1930 *Boedi Oetomo* menerima anggota yang berasal dari luar Jawa. Walaupun komposisi kelas keanggotaan organisasi ini tidak meliputi kaum buruh dan tani, tapi dalam proses perkembangan situasi Indonesia, *Boedi Oetomo* juga terlibat atau ikut pada gerakan politik, ikut *Radical Concentratie* pada bulan November 1918. Pembentukan *Boedi Oetomo* dinilai sebagai permulaan Kebangkitan Nasional Indonesia. Maka hari itu diperingati setiap tahun sebagai *Hari Kebangkitan Nasional*.

Tahun 1911, di Bogor berdiri *Sarekat Dagang Islam*. Keanggotaannya terdiri dari para pedagang dan pengusaha kecil penganut Islam yang mendapat dukungan dari para intelektual Bumiputera.

Diilhami nama *Sarekat Dagang Islam*, tahun 1912 berdiri organisasi *Sarekat Islam* yang berintikan anggota-anggota dari kalangan pedagang dan pengusaha batik Surakarta dan Solo. Pada permulaannya, *Sarekat Islam* dimaksudkan untuk menghadapi persaingan dengan pedagang dan

pengusaha Tionghoa. [Ir. S.J. Rutgers, *Indonesie, Het Koloniale System in de periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog,—Indonesia, Sistem Kolonial dalam periode antara perang dunia pertama dan kedua—*Uitgeverij Pegasus Amsterdam, 1947, halaman 141—142].

Pada awal abad XX, penganut Islam di Sumatera Barat mulai membangun organisasi. Dari badan kerja sama untuk kebutuhan sehari-hari, berkembang sampai lahirnya organisasi yang memperkenalkan cara pendidikan yang modern. Atas anjuran Haji Djalaloeddin Thaib, lahirlah organisasi *Sumatera Thawalib*. Dalam perkembangannya, “politik mulai masuk dalam sekolah-sekolah Islam Thawalib di Padang Panjang, dan terutama komunisme. Satu politik radikal terhadap Belanda ketimbang satu ideologi materialisme historis, menyelinap ke dalam kalangan pengikut Thawalib.

Salah seorang dari gurunya, Datoek Batoeah memperkenalkan komunisme pada tahun 1923, setelah dia kembali dari kunjungan ke Jawa. Dia dibantu oleh guru lainnya, Natar Zainoeddin. Kedua-duanya menggunakan metode propaganda yang sudah biasa, yaitu tabligh dan publikasi-publikasi. Masalah-masalah yang berhubungan dengan Sarekat Islam menjadi buah pembicaraan di kalangan mereka, terutama sesudah Abdoel Moeis, wakil ketua partai Sarekat Islam pada bagian kedua tahun 1910-an sering berkunjung ke daerah kampung halamannya untuk berpropaganda dan meneliti kepentingan rakyat setempat.” [Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement In Indonesia 1900-1942*, Kuala Lumpur Oxford University Press, Oxford, New York, Jakarta, *second impression*, 1978, hal.46—48].

Pada 18 November 1912, atas inisiatif Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan organisasi *Muhammadiyah* di Jogjakarta, dengan tujuan menyebarkan Islam di kalangan penduduk Indonesia, dan meningkatkan ke-Islaman di kalangan anggotanya. *Muhammadiyah* berwatak kemasyarakatan dan pendidikan. Waktu mudanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat pendidikan agama Islam di Mekah. Kembali dari Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan perubahan-perubahan atas kebiasaan Islam yang berlaku selama ini. Termasuk menunjukkan arah kiblat yang benar, yaitu ke Mekah. Tahun 1909, Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah masuk Boedi Oetomo dengan tujuan memberikan pendidikan agama bagi anggota-anggotanya. Muhammadiyah cepat berkembang ke luar Jogjakarta.

Menurut Deliar Noer: “Pada permulaan, diperkenalkannya *Muhammadiyah* di Minangkabau mendapat perlawanan dari pihak *Sumatera Thawalib* Padang Panjang yang sudah dapat pengaruh komunisme.”

“*Sumatera Thawalib* Padang Panjang berada di bawah pengaruh komunisme ‘dalam arti pengaruh politik radikal melawan Belanda, bukannya ideologi berdasarkan materialisme dialektis’. Perkembangan ini menyebabkan terdapatnya dua kelompok di dalam *Thawalib*, yaitu kelompok yang pro-komunis yang ikut orang komunis berjuang melawan Belanda, dan kelompok lain yang anti-komunis, yang memusatkan dirinya pada perjuangan untuk *reform* pendidikan tanpa mempersoalkan kedudukan Belanda.” [Deliar Noer, 1978, hal.77].

Lahirnya *kekuatan kiri* dalam Thawalib di Padang Panjang adalah berkat peranan Haji Datoek Batoeah dan Natar Zainoeddin, yang kemudian diasingkan Belanda ke Digul dan dalam perkembangannya menjadi tokoh terkemuka komunis di Sumatera Barat.

“Para propagandis Muhammadiyah di pantai Timur Sumatera, yang kebanyakan berasal dari Minangkabau sering berkonflik dengan pejabat pemerintah setempat atau para pendukung kesultanan yang umumnya adalah pengikut mazhab Syafi’i. Gerakan kaum reformis Islam di Minangkabau sungguh mempunyai ciri khusus yang sering berjaln dengan politik. Banyak pemimpinnya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda, salah seorang pemimpinnya yang terkemuka adalah Haji Rasoeil, yang sebenarnya tidak tergabung pada satu organisasi pun, tapi dituduh Belanda sebagai membahayakan tata tertib dan keamanan.” [*Idem*, hal.95].

Pemerintah kolonial Belanda memperhatikan perkembangan Sarekat Islam. “Haji Agus Salim, anggota Seksi Politik Badan Kepolisian, mendapat tugas untuk memasuki dan menyelidiki Sarekat Islam dari dalam. 1915, Haji Agus Salim masuk *Sarekat Islam*, mula-mula tidak begitu dikenal, akhirnya tampil sebagai salah seorang anggota pimpinan, terutama mempunyai peranan dalam menyusun politik keorganisasian dengan warna Islam.” [Deliar Noer, *Idem*, hal.109—110].

Di samping masuk *Sarekat Islam*, Haji Agus Salim juga menjadi anggota *ISDP*. [*Idem*, hal.111].

Bersamaan dengan itu, prestise Abdoel Moeis meningkat dalam *Sarekat Islam*, dalam Kongres tahun 1916 dia dipilih menjadi seorang Wakil Ketua *Centraal Sarekat Islam*. “Bekerja sama dengan Haji Agoes Salim, Abdoel Moeis membentuk jaringan dalam *Sarekat Islam* melawan pengaruh komunisme terhadap Sarekat Islam.” [*Idem*, hal.111].

Sedangkan H.O.S. Tjokroaminoto mempunyai pandangan yang berbolak-balik, pandangan yang dualis menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Di tahun 1912 dia menyatakan bahwa “menurut syari’ah Islam, kita harus menaati komando (perintah) pemerintah Belanda, kita harus dengan

tegas setia pada dan mengikuti undang-undang serta peraturan-peraturan pemerintah...." [*Idem*, hal.111—112].

Di samping itu dia membantah bahwa *Sarekat Islam* adalah partai politik, adalah partai yang revolusioner...." [*Idem*].

Ciri politik dari *Sarekat Islam* dirumuskan dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Program Aksi yang disahkan kongres nasional kedua tahun 1917. Antara lain dirumuskan: bahwa "Partai menganut agama Islam yang 'memuja cita-cita demokrasi', sebagaimana halnya 'agama itu sendiri adalah untuk mendidik jiwa rakyat'. Dinyatakan bahwa *Centraal Sarekat Islam* 'berjuang melawan kapitalisme yang haram, yang merupakan sumber dari keadaan ekonomi yang kian buruk dewasa ini'. Salah satu pasal dari Program Aksi menyatakan tuntutan untuk 'mendirikan Dewan-Dewan Daerah, sebagai perpanjangan hak-hak Volksraad (Dewan Rakyat yang didirikan pemerintah Belanda) dengan tujuan untuk mengubahnya menjadi badan perwakilan rakyat yang sungguh-sungguh." [*Idem*, hal.115].

Perbedaan pendapat penting terjadi dalam *Sarekat Islam* mengenai keikutsertaan *Sarekat Islam* dalam Volksraad (dewan rakyat yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda). Berbeda dengan Abdoel Moeis dan Haji Agoes Salim, Semaun, salah seorang pemimpin *Sarekat Islam* dari Semarang berpendapat, bahwa "Volksraad adalah semata-mata satu pertunjukan omong-kosong, satu akal-akalan kapitalis untuk membohongi rakyat dengan maksud untuk mengeruk laba yang lebih besar."

Tapi *Sarekat Islam* menyetujui pendapat Abdoel Moeis dan merestuiannya masuk Volksraad. Masalah ini muncul kembali pada tahun 1918, ketika tanggal 23 Februari, ketika Tjokroaminoto diangkat pemerintah jadi anggota Volksraad. Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis menggunakan Volksraad untuk menyuarakan tuntutan mereka dengan bekerja sama dengan wakil *Partai SDAP*, (*Sociaal Democratische Arbeiders Partij*), Ch. G. Cramer. Dalam perkembangannya, H.A. Salim pun membalik, menyatakan Volksraad adalah hanya *komedie omong*.

Menjelang pecahnya Perang Dunia pertama, sejumlah pimpinan maskapai besar Belanda yang ketakutan akan menyebarnya perang ke daerah Indonesia, mengadakan kegiatan bersama mendirikan Badan untuk menjalankan *Indie Weerbaar Actie* (*Aksi Ketahanan India*). Maksudnya adalah menggerakkan dukungan rakyat untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Mereka minta dukungan pada *Sarekat Islam* dan organisasi-organisasi lainnya seperti Boedi Oetomo dan lain-lain. Dalam *Sarekat Islam*, Abdoel Moeis memelopori dukungan terhadap aksi ini. Tapi ditentang oleh

Semaun dari cabang Semarang. Semaun membawakan suara ISDV yang menentang *Indie Weerbaar Actie*.

Perbedaan pendapat dalam *Sarekat Islam* muncul lagi dalam hubungan dengan gerakan buruh. Kongres III *Sarekat Islam* tahun 1918, memberikan bimbingan untuk memperbaiki syarat-syarat pemogokan, yaitu pemogokan hanya dijalankan bila sudah dilangsungkan langkah-langkah damai menyelesaikan perselisihan, yaitu dilangsungkannya langkah perundingan.

Para pemimpin *Sarekat Islam* memasuki berbagai serikat buruh untuk memberikan bimbingan-bimbingannya. Dengan demikian, terdapat tiga masalah besar yang menjadi pusat pertentangan dalam *Sarekat Islam*: *pertama*, masalah sikap terhadap Volksraad; *kedua*, masalah mendukung atau menentang *Indie Weerbaar Actie*; dan *ketiga*, masalah gerakan buruh.

Para pemimpin *Sarekat Islam* yang anti-komunis mulai mempersoalkan dan mencurigai kegiatan ISDV sebagai kegiatan yang dapat dukungan Belanda sebagai cara untuk memecah-belah *Sarekat Islam* yang pertumbuhannya sungguh menimbulkan ketakutan di kalangan Belanda. [*Idem*, hal.122].

Abdoel Moeis menuduh kedatangan Sneevliet ke Indonesia adalah untuk memecah-belah gerakan rakyat Indonesia, sangat membahayakan tanah air, karena itu menuntut agar pemerintah mengusir Sneevliet dari Indonesia. H.A. Salim dan Sosrokardono, Sekretaris *Centraal Sarekat Islam* memiliki pandangan yang sama. H.A. Salim memandang kegiatan ISDV adalah usaha memindahkan perbedaan-perbedaan di Eropa ke Indonesia.

Tjokroaminoto kurang memperhatikan masalah prinsip tentang bertentangan atau tidaknya komunisme atau nasionalisme dengan Islam. Dia mampu menyesuaikan diri dengan suasana di sekitarnya. Bagi para pemimpin non-komunis lainnya dari *Sarekat Islam*, terutama bagi H.A. Salim dan Abdoel Moeis, juga bagi Soerjopranoto, soal ini adalah masalah prinsip. Mereka memperjuangkan pemecatan orang-orang komunis dari *Sarekat Islam*. Mereka memperjuangkan pikiran, bahwa anggota partai lainnya tak bisa menjadi anggota *Sarekat Islam*. Bagi para anggota *Sarekat Islam*, ini berarti harus memilih antara keanggotaan *Sarekat Islam* atau dipecat.

Semenjak itu, *Sarekat Islam* mengambil langkah-langkah disipliner, yang sesungguhnya ditujukan terhadap orang komunis. H.A. Salim menjadi jurubicara golongan anti-komunis dalam *Sarekat Islam*. Dengan tangguh membela individualisme, H.A. Salim menggunakan ajaran Qur'an untuk menyatakan, bahwa tujuan *Sarekat Islam* adalah menciptakan tata kehidupan politik yang mendatangkan kesamaan dan kebahagiaan bagi

seluruh umat manusia. H.A. Salim membela “individualisme, yang memperbolehkan setiap orang mendapatkan kebutuhannya tanpa mengganggu kebutuhan dan kebahagiaan orang lain, sedangkan sosialisme membikin kesejahteraan dan kebahagiaan setiap orang tergantung pada kesejahteraan dan kebahagiaan semua orang.”

Menghadapi serangan terhadap orang-orang komunis ini, Semaoen berargumentasi, bahwa orang komunis sudah berbuat, mengubah *Sarekat Islam* dari yang asalnya adalah partai kapitalis menjadi partai rakyat. Dia menyatakan bahwa cita-cita PKI dan Sarekat Islam tidaklah bertentangan. Oleh karena itu, dia meminta agar tindakan disipliner terhadap PKI itu tidak dijalankan.

Di kala Tjokroaminoto berada dalam penjara, Kongres Sarekat Islam tahun 1921, memutuskan menyetujui pendapat H.A. Salim dan Abdoel Moeis untuk memecat orang komunis, termasuk cabang-cabang Sarekat Islam Semarang, Solo, Salatiga, Sukabumi, dan Bandung.

Sarekat Islam terpecah menjadi SI Putih yang dipimpin H.A. Salim, Abdoel Moeis, Surjopranoto, dan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dengan berpusat di Jogjakarta. Dan SI Merah dipimpin Semaoen, Alimin, Darsono, yang berhaluan kiri dengan berpusat di Semarang. Tjokroaminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut.

Dalam Kongres SI tahun 1923 di Madiun, diputuskan, menetapkan disiplin partai terhadap PKI, mengeluarkan anggota-anggota PKI dari SI, menetapkan sikap non-koperasi terhadap pemerintah Hindia Belanda, mengubah SI menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia,

Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern yang menentang cita-cita Pan-Islamisme. Pada saat kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, H. Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu, Agus Salim mengecam SI Merah Semarang yang mendukung PKI.

Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam *beleid Belanda mengenai* keuangan Tjokroaminoto. SI Merah Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Tjokroaminoto lebih condong ke SI haluan kanan (SI Putih).

2. Dari Sarekat Islam ke Sarekat Rakyat

“KAUM komunis menyelenggarakan Kongres Luar Biasa PKI dan SI Merah pada 4 Maret 1923 di Bandung untuk menetapkan langkah selanjutnya sehubungan dengan pemecatan yang dilakukan Kongres SI. Kongres dua hari di Bandung, dan dilanjutkan di Sukabumi. Hadir dalam kongres ini wakil-wakil dari lima belas cabang PKI dan tiga belas cabang SI Merah serta tiga belas serikat buruh.” [Ruth T. McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Cornell University Press, Ithaca, New York, 1965, hal.155].

Pimpinan PKI diwakili hanya oleh Semaoen, Soebakat, dan Soekarsono. Sedangkan yang lainnya: Tan Malaka, Bergsma, Harry Dekker, Gondojoewono, dan Dengah berada dalam penjara atau sedang di luar negeri.

Dalam kongres ini, Semaoen dan pimpinan PKI lainnya menyerang Tjokroaminoto dan pimpinan Centraal Sarekat Islam. Dinyatakannya, bahwa SI tidaklah lagi mewakili kepentingan rakyat; hanyalah PKI yang bisa berbuat untuk ini, yang jadi pembela rakyat miskin dan berjuang untuk kemerdekaan dari kekuasaan kapitalis asing.

“Haji Misbach dan Sugono menekankan bahwa ajaran-ajaran Marxis sama dengan ajaran-ajaran Qur’an, dan PKI berjuang untuk kemerdekaan beragama dan membela hak-hak penduduk Muslim Indonesia untuk tak dihalang-halangi melakukan ibadah agama. Darsono menyatakan bahwa sebelum masuknya kapital asing, rakyat menikmati kemakmuran dan keadilan sosial, PKI berjuang untuk kembali ke zaman yang demikian.” [Idem, hal.155—156].

Karena SI menggunakan alasan agama untuk menentang komunisme, maka dalam kongres ini PKI menyatakan dukungannya pada Islam tanpa mencampakkan pendirian, bahwa agama dan politik, tidak bisa dicampur-adukkan.

Kongres memutuskan untuk membangun cabang SI Merah di mana ada SI Putih. Selanjutnya, SI Merah akan menggunakan nama *Sarekat Rakyat* (SR). Kongres mengambil resolusi, antara lain: menentang keputusan pemerintah mengenai pajak dan sistem kuli kontrak, dan menyatakan bermaksud membela kepentingan kaum tani. Untuk bisa efektif menyelesaikan masalah-masalah tani, diputuskan untuk membentuk Komite Tani pada setiap cabang Sarekat Rakyat.

Sarekat Rakyat berkembang pesat, terutama di Jawa Tengah dan Timur. Aktivis-aktivis yang bekerja dalam Sarekat Rakyat umumnya adalah para pimpinan gerakan buruh yang bergabung dalam VSTP.

Pertengahan tahun 1924, PKI dan Sarekat Rakyat menjadi sasaran utama serangan pemerintah. Banyak orang non-komunis menjadi korban serangan pemerintah. Korban ini mendapat penghargaan di mata rakyat. Ini menjadi sebab meningkatnya keanggotaan Sarekat Rakyat. Serangan pemerintah terhadap kegiatan PKI dan Sarekat Rakyat mengkhawatirkan pimpinan PKI, yang membayangkan akan munculnya larangan melakukan kegiatan.

Jawaban terhadap serangan-serangan pemerintah itu adalah, PKI mengurangi jumlah rapat-rapat terbuka Sarekat Rakyat, memusatkan pada rapat-rapat kecil. Pada waktu itu, semua rapat dihadiri oleh petugas pemerintah dengan mencatat yang hadir dan isi rapat, mengontrol kartu anggota para hadirin. Pengunjung rapat kian mengecil, tapi propaganda berjalan lebih intensif.

Tanggal 27 dan 28 September 1924, pimpinan PKI menyelenggarakan rapat yang memutuskan untuk mengintensifkan pekerjaan di kalangan kaum buruh terutama perkebunan, kereta api, perhubungan, pelabuhan, pertambangan, dan mengurangi gerakan yang bersifat massal.

Terjadi pergeseran dalam pimpinan PKI dengan tampilnya grup Ali Archam. Menurut Ruth McVey, "Ali Archam, menginginkan seharusnya partai memimpin aksi-aksi proletariat yang murni untuk tujuan mempersiapkan revolusi." [*Idem*, hal.262].

Maka dipertimbangkan untuk mengubah seksi-seksi Sarekat Rakyat menjadi cabang PKI. Tanggal 11 s/d 15 Desember berlangsung konferensi khusus di Kutagede untuk membicarakan masalah ini. Hadir 96 utusan dari 38 Seksi PKI mewakili 1.140 anggota, dan wakil dari 46 cabang Sarekat Rakyat mewakili 31.000 anggota. Dalam konferensi ini, Ali Archam mempertahankan rencana yang diajukan oleh pimpinan PKI mengenai pembubaran Sarekat Rakyat. Dalam kongres ini diajukan tesis Ali Archam mengenai "membangun satu partai kelas buruh yang bebas, barisan depan yang paling konsekuen."

"Tetapi mempunyai kekeliruan dalam membubarkan organisasi massa Sarekat Rakyat yang menampung kaum tani, sesuatu yang seharusnya dilakukan adalah memperbesar organisasi Sarekat Rakyat. Sebagai akibat selanjutnya, organisasi PKI menjadi kurang meluas dan keanggotaannya menjadi terbatas. Gelombang besar kaum tani yang ingin masuk PKI menjadi terhalang." [Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Bab II].

Pembubaran Sarekat Rakyat mendapat perhatian dari Komintern. Sesudah mendengar laporan Semaon, sidang Komite Eksekutif VI yang diperluas Komintern, di Moskow 21 Maret sampai 6 April 1925, mengkritik pembubaran Sarekat Rakyat. Tindakan ini menunjukkan bahwa "PKI

belum menjadi partai yang benar-benar bersifat proletar." [Ir. S. Rutgers, 1947, hal.159].

Pemerintah menindak Sarekat Rakyat dengan melakukan larangan terhadap sekolah-sekolah yang didirikannya. Larangan ini mendapat perlawanan keras. Maka terjadi bentrokan-bentrokan bersenjata. Sejumlah pimpinan Sarekat Rakyat dan PKI ditangkap dan dipenjarakan. Tahun itu juga PKI dan Sarekat Rakyat dinyatakan terlarang, dan kegiatan-kegiatannya dinyatakan ilegal.

3. Lahirnya PKI

PADA tanggal 9 Mei 1914, berlangsung rapat pertama penganut paham sosialisme, kaum sosial demokrat Indonesia, yang melahirkan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV)—Perhimpunan Sosial Demokrat Hindia—dengan dipimpin oleh Henk Sneevliet.

Dari delapan pasal program ISDV terdapat antara lain rumusan-rumusan berdasarkan paham sosialisme: memperjuangkan kemerdekaan atas kehancuran kapitalisme; kaum buruh dan tani karena senasib harus bersatu melawan; mendidik rakyat dengan pengetahuan sosialisme; dan menyebarkan buku-buku sosialisme. Inilah *gerakan kiri yang anti-kolonialisme dan diilhami cita-cita sosialisme*.

Dengan program delapan pasal itu, ISDV berusaha mengadakan persatuan dengan Sarekat Islam, Budi Utomo, dan Indische Partij. Mulailah terdapat kecambah tiga aliran besar dalam masyarakat Indonesia. Sarekat Islam mewakili kalangan Islam, Budi Utomo dan Indische Partij kalangan nasionalis, dan ISDV kalangan Marxis.

Kemenangan Revolusi Oktober tahun 1917, memberi inspirasi bagi gerakan sosialisme dunia. Salah satu pelajaran yang diberikannya adalah: keharusan membangun partai tipe baru, yaitu partai yang berdasarkan *prinsip organisasi sentralisme demokratis*. Marxisme dan ajaran tentang partai tipe baru menjalar ke Indonesia. ISDV adalah *kekuatan kiri yang bercita-citakan sosialisme, melawan sistem kolonialisme*, tapi belum merupakan partai tipe baru.

Gerakan sosialisme internasional berpengaruh pada ISDV. Ketika Internasionale II telah merosot menjadi Internasionale kuning, yaitu memihak pada borjuasi dalam perang-perang imperialis Perang Dunia pertama, kaum sosialis revolusioner dipimpin Lenin mencampakkan Internasionale II, dan tahun 1919 mendirikan Internasionale III, yaitu Komintern (Internasionale Komunis).

Di Indonesia, dalam ISDV terjadi perpecahan antara kaum sosial-demokrat yang diwakili J.E. Stokvis dengan kaum sosialis revolusioner diwakili Henk Sneevliet. Jadi, perjuangan melawan pandangan sosial demokrat (sosialis kanan) sudah berlangsung semenjak dari ISDV.

J.E. Stokvis mengikuti pandangan Internasionale kedua, tidak setuju jalan revolusioner yang ditempuh di Russia. J.E. Stokvis takut, kalau jalan ini ditempuh di Indonesia, akan membahayakan kedudukan Belanda.

Maka J.E. Stokvis dan kawan-kawannya meninggalkan ISDV, membentuk *Indische Sociaal Democratische Partij* (ISDP)—Partai Sosial Demokrat India—dan menjadi cabang *Sociaal Democratische Arbeiders Partij* (SDAP)—Partai Buruh Sosial Demokrat—Belanda. SDAP adalah anggota Internasionale II. Sedangkan Henk Sneevliet bertahan dalam ISDV.

Sesuai dengan keputusan Komintern agar semua partai sosial demokrat mengubah namanya menjadi Partai Komunis, timbul tuntutan dalam ISDV, terutama dari cabang Semarang, dengan Semaoen sebagai tokohnya, agar ISDV diubah menjadi Partai Komunis. Tapi tuntutan ini ditentang oleh C.Hartoch yang ketika itu menjadi Ketua Tahunan ISDV.

Tanggal 23 Mei 1920 berlangsung Konferensi Tahunan VII ISDV. Terjadi perdebatan sengit dalam konferensi, antara Semaoen dan Bergsma di satu pihak, lawan C. Hartoch di pihak lain. Perbedaan adalah mengenai ikut Internasionale II atau Internasionale III. Isinya adalah menyangkut sikap terhadap diktator proletariat ajaran Marx, menerima atau menolak diktator proletariat, masalah jalan menuju sosialisme; jalan revolusi menggulingkan kapitalisme atau jalan mengubah kapitalisme jadi sosialisme; *jalan revolusioner* atau jalan *reformisme*.

Konferensi memutuskan untuk mengubah nama ISDV menjadi *Perserikatan Komunis di India* atau *Partij der Komunisten in Indie* (PKI) dengan hanya mendapat tentangan dari C. Hartogh. Yang terpilih jadi ketua adalah Semaoen dan wakil ketua Darsono. Putusan ini direferendumkan lagi dengan mengikutsertakan semua cabang. Hasilnya adalah: 33 setuju, 1 blanko, dan 2 tidak setuju.

Sesudah terpilih sebagai ketua partai, *awal Oktober Semaoen meninggalkan Indonesia ke Uni Sovyet untuk menghadiri Kongres Rakyat Negeri-Negeri Timur dan Kongres Kaum Buruh Timur Jauh*.

Juni dan Juli 1921, Darsono menghadiri Kongres III Komintern di Moskow. [Ruth Thomas McVey, *The Rise of Indonesian Communism, Southeast Asia studies, Yale University, by arrangement with HRAF Press, 1963, hal.129*].

Kepergian Semaoen ke Uni Sovyet, menyebabkan pimpinan PKI berada di tangan Bergsma dan Tan Malaka—yang baru beberapa bulan masuk

PKI—sedangkan Darsono sudah berada di Eropa, bekerja untuk Komintern dan menghadiri Kongres III Komintern di Moskow. [*Idem*, hal.128].

Dalam bulan Desember 1921, berlangsung Kongres Luar Biasa PKI. Dalam kongres ini diputuskan secara resmi, PKI bergabung ke dalam Internasionale III atau Komintern. Tan Malaka terpilih menggantikan Semaoen sebagai ketua partai.

Februari 1922, Tan Malaka ditangkap, dan Maret dibuang ke Belanda.

Tanggal 4 Juni 1922, sekitar sepuluh hari sekembali dari Uni Sovyet, Semaoen berpidato dalam rapat yang dihadiri 3000 orang, menyampaikan kesannya dari kunjungan ke Uni Sovyet. Dia menyatakan bahwa Lenin berpesan: “bagi partai-partai komunis di Asia, janganlah menjiplak taktik yang ditempuh oleh Partai Bolsyewik, karena kondisi Rusia tidak sama dengan negeri-negeri Asia; haruslah menempuh jalan yang sesuai dengan kondisi negerinya sendiri.” [*Idem*, hal.133—134].

Dalam tahun 1923, perlawanan kaum buruh terhadap penindasan kapital meningkat. Aksi-aksi buruh, termasuk berbagai pemogokan yang merugikan kapital Belanda. Berlangsung pemogokan besar buruh kereta api dipimpin VSTP. Semaoen yang jadi pemimpin pemogokan ditangkap. Dikirim ke pembuangan.

Di samping pemogokan, terjadi aksi-aksi melempar granat ke rumah pembesar-pembesar Belanda. Termasuk rumah Gubernur Jenderal Fock. Aksi-aksi ini mengkhawatirkan kekuasaan kolonial. Para pemimpin PKI ditangkap, di antaranya Haji Misbach. 20 Oktober 1923 ditangkap pula Ali Archam. 28 Maret 1924 diadili di Pengadilan Negeri Semarang, dijatuhi hukum penjara 4 bulan karena tuduhan menghina pegawai negeri. Ali Archam naik banding, pengadilan tinggi memutuskan hukuman 6 bulan.

Juni 1924 berlangsung Kongres II PKI di gedung Alhambra Jakarta. Kongres mengambil keputusan-keputusan antara lain:

1. Mengubah nama Perserikatan Komunis di India menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).
2. Mengesahkan Anggaran Dasar Partai yang baru.
3. Hoofdbestuur disingkat H.B. (CC) dipindahkan dari Semarang ke Jakarta.
4. Mengesahkan terjemahan Manifest Partai Komunis dalam bahasa Indonesia oleh Partondo.
5. Mengesahkan “Thesis” tentang Masyarakat Indonesia yang disusun oleh Sukandar, Kepala Agitprop.

6. Memilih pimpinan sentral PKI. Alibasah Winata sebagai ketua, Boedisoetjito sebagai sekretaris, dan Ali Archam, Alimin, serta Moesso sebagai komisaris.

Program Partai dirumuskan lebih luas dari program delapan pasal ISDV. Program PKI sudah mengandung watak nasional dan menyangkut massa yang luas, meliputi program untuk kaum buruh, kaum tani, wanita, pemuda, intelektual, dsb. Juga ada program umumnya yang bertujuan membentuk pemerintah Sovyet Indonesia. Tujuan perjuangan ialah menciptakan masyarakat sosialis, dan sifat perjuangan adalah internasional. [Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Jakarta, 1965].

Pada tanggal 24 November, lima bulan sesudah berlangsungnya Kongres II, Winata ditangkap dan dipenjarakan bersama beberapa orang pimpinan sentral lainnya dan pimpinan daerah.

Situasi mendorong untuk diadakannya Kongres III yang berlangsung dalam bulan Desember 1924 di Jogjakarta.

Kongres memilih Sardjono sebagai Ketua menggantikan Winata. Anggota Komisaris ditambah dengan Mardjohan untuk Semarang, Prawiro Sardjono untuk Surabaya, Kusno untuk Bandung, Suwarno untuk Solo, A.B. Assor untuk Ternate, Abdul Xarim M.S. untuk Sumatera Timur/Aceh dan Sutan Said Ali untuk Sumatera Barat. Kongres ke-III dijiwai oleh fikiran Ali Archam mengenai *pemberontakan untuk merebut kekuasaan politik*.

4. Pemberontakan Nasional 1926, Sangkakala Revolusi Indonesia

UNTUK menghancurkan PKI, pemerintah kolonial Belanda menyatakan pemimpin-pemimpin PKI, Ali Archam, Natar Zainoeddin, Haji Misbach, Haji Datoek Batoeah, Mardjohan, dll., sebagai orang-orang yang membahayakan ketertiban umum dan harus diasingkan. Penangkapan Ali Archam disusul pula dengan penangkapan-penangkapan atas Boedisoetjito, Partondo, Ambijah, Soeradi, Samsi, Soemantri, Soendoro, Rabijah, Ngadino, Brotosewojo, dll. Banyak yang dipenjarakan dan ada yang dibuang ke pengasingan. Haji Misbach diajukan ke pengadilan. Tahun 1925 dibuang ke Manokwari.

Tanggal 25 Desember 1925, PKI melangsungkan konferensi di Candi Prambanan. Hadir dalam konferensi ini Sardjono, Boedisoetjito, Soegono, Koesnogoeno, Najoan, Heroejojowono, Winanta, Gondojojowono, Said Ali, Abdoel Moentalip, dan Marco. Sardjono menganjurkan agar diadakan aksi

bersama, dimulai dengan pemogokan-pemogokan dan disambung aksi bersenjata. Kaum tani supaya dipersenjatai dan serdadu-serdadu pun harus ditarik dalam pemberontakan. Sesudah konferensi, oleh Hoofdbestuur PKI dibentuk Komite Pemberontakan (CP) yang terdiri dari Dahlan sebagai ketua, Sukrawinata sebagai sekretaris, Heroejojowono, Samoedro, Baharoedin Saleh, sebagai anggota, CP berpusat di Bandung.

Untuk mendapatkan pertimbangan dari Komintern, oleh Hoofdbestuur diutus Alimin menemui wakil Komite Eksekutif Komintern di Timur Jauh, kemudian disusul lagi oleh Musso. Karena agak lama belum ada berita dari utusan itu, dikirim lagi Sardjono dan Boedisoetjito ke Singapura untuk menemui Tan Malaka yang pada waktu itu menjadi salah seorang anggota sekretariat Komite Eksekutif Komintern untuk Timur Jauh.

Tan Malaka yang sedang berada di Filipina menyatakan menentang putusan Konferensi Prambanan. Tan Malaka meninggalkan PKI. Dan selanjutnya, bersama Soebakat dan Djamaloeddin Tamin di ibukota Thailand, 22 Juni 1927 memproklamasikan berdirinya Partai Republik Indonesia (PARI), menjauhkan diri dari Komintern. Tahun 1948 mendirikan Partai Murba di Jogjakarta.

Tindak-tanduk Tan Malaka menentang putusan Konferensi Prambanan mengenai rencana pemberontakan nasional, sikapnya mencampakkan PKI dan mendirikan partai sendiri Partai Republik Indonesia (PARI) tahun 1927; tahun 1928 menghadiri Kongres VI Komintern, Tan Malaka mengkritik pimpinan Komintern yang tidak menyimpulkan pengalaman gerakan dan pemberontakan-pemberontakan di Tiongkok yang gagal, hingga Bukharin menyatakan Tan Malaka adalah Trotskis. Tan Malaka menjauhi Komintern dan berkolaborasi dengan fasisme Jepang, yang berarti menentang putusan Komintern untuk melawan fasisme; berhubungan erat dengan Partai *Revolutionnaire Communistische Partij Nederlandsch*, seksi dari Internationale IV (Internasionale Trotskis).

Dalam kenyataannya, Tan Malaka berhubungan erat dengan Internasionale IV, Internasionale Trotskis. Anggota Internasionale IV di Belanda, *De Revolutionnaire Communistische Partij Nederlandsche Sectie van de Vierde Internationale*, menerbitkan tulisan Tan Malaka dalam publikasinya *De Tribune*. [Tan Malaka-archief, *Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief*].

Dan tahun 1948, Tan Malaka mendirikan Partai Murba, yang dalam perkembangannya menempuh jalan anti-PKI, menentang politik nasakom Bung Karno. Akhirnya tahun 1965 dinyatakan bubar oleh Bung Karno.

Penangkapan-penangkapan yang dilakukan terhadap kurang lebih dari 50 orang kader PKI sebagai akibat pemogokan buruh kereta api tahun 1923

tidak melemahkan PKI, bahkan semakin memperkuat dan memperbanyak anggota PKI. [Baca: Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Jakarta, 1965].

PKI dinyatakan terlarang. Semenjak awal perjuangan melawan kolonialisme, *kekuatan kiri telah jadi pelopor*.

Puncak perlawanan terhadap kolonial Belanda pecah pada 12 November 1926. Di bawah pimpinan PKI meletus pemberontakan nasional bersenjata pertama. Pemberontakan ditumpas Belanda dengan kekerasan senjata. Berguguran pahlawan anti kolonial, ditembak mati atau dihukum gantung seperti yang dialami Si Patai, Si Manggulang di Minangkabau, dan Egom, Hasan, serta Dirdja dihukum gantung di penjara Tjiamis, 9 September 1927. Haji Sukri dan lima kawannya digantung di penjara Pandeglang, Haji Hasan di Tjimareumeuh, Garut; Kartawirya dan Aman di Padalarang, Ojod di Ngagrek di Jawa Barat. Si Patai gugur tertembak dalam perlawanan di Gunung Bukit Pauh Sembilan, Sumatera Barat. Kepala Si Patai dipotong dan ditancapkan pada sepotong bambu dan dengan kejam diarak keliling kota. Si Manggulang, M. Joesoef Sampono Kajo, Badaroeddin gelar Said dihukum gantung di penjara Sawah Lunto bulan Maret 1927. Tujuh pahlawan putra Priangan, lima pahlawan Banten, empat pahlawan putra Minang telah dihukum gantung dan banyak lagi putra terbaik Indonesia telah gugur. Ribuan ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang ke pembuangan Digul.

Egom sewaktu mendapat kunjungan keluarganya sehari sebelum dilaksanakan hukuman gantung dengan tenang berpesan agar sanak keluarganya jangan gusar atas celaan-celaan musuh. Ia meyakini itu untuk membela rakyat yang tertindas dan untuk kemerdekaan tanah airnya. Ia yakin bahwa cita-cita perjuangannya yaitu komunisme pasti menang. Demikian pula waktu Manggulang dan kawan-kawannya menjalani hukuman gantung

Menurut J.Th. Petrus Bloemberger, sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dibuang ke Boven Digul. Tercatat tokoh-tokoh PKI dikirim ke pembuangan: Ali Archam, Haji Datoek Batoeah, Kiai Haji Achmad Dasoeki Siradi, Kiai Ki Anom Dardiri Soeromidjojo (Ramidjo) bersama istri dan tiga anak, Darsono, Darsini, serta Trikojo yang masih bayi, Natar Zainoeddin, Xarim M.S., dan lain-lain. Perlakuan yang kejam di luar perikemanusiaan bukan hanya terjadi selama penangkapan dan pemeriksaan, tetapi juga selama di dalam penjara.

Dalam pembuangan, Ali Archam diserang malaria hitam. Untuk pengobatannya diusahakan pemindahan ke tempat yang ada rumah sakit. Tapi di perjalanan, Ali Archam meninggal dunia. Diadakan upacara

pemakaman yang dihadiri oleh banyak kawan seperjuangan dan sepembuangan. Di bagian kepala jenazah tertulis sajak dalam bahasa Belanda yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

Bagi kami, kau tak hilang. Tidak !

Masa-kini kami, tumbuh dari masa-lampau mu.

Tangan kami yang meneruskan. Kerja agung juang hidupmu.

Kami tancapkan kata mulia hidupmu.

Dengan penuh harapan. Obor yang dinyalakan dalam malam gelapmu

Kami serahkan kepada angkatan kemudian.

Walaupun pemberontakan ini dipadamkan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan kekerasan senjata, pemberontakan nasional bersenjata ini telah memainkan peranan penting bagi kebangkitan bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bahwa kolonialisme Belanda bisa dilawan. Pemberontakan ini menggoyahkan kekuasaan kolonial Belanda. Ia merupakan sangkakala revolusi nasional Indonesia. *Kekuatan kiri* di bawah pimpinan PKI merupakan kekuatan pokok dan pelopor dalam perjuangan ini.

Banten adalah suatu daerah di mana pemberontakan berlangsung dengan seru dan agak lama dibanding dengan daerah lainnya di Jawa. Banten yang terkenal sebagai daerah pengaruh Islam, ternyata gigih melakukan pemberontakan di bawah pimpinan PKI. Pemberontakan dipadamkan Belanda dengan serangan bersenjata. Kekuasaan kolonial Belanda tak kenal ampun menindas PKI. PKI jadi partai terlarang.

5. Krisis Kapitalisme, Indonesia di Bawah Fasisme

DUNIA dilanda krisis kapitalisme. Menghadapi krisis ini, di Jerman, Itali, dan Jepang, muncul fasisme, perkembangan lebih tinggi dari imperialisme. Menghadapi bahaya fasisme yang siap mengobarkan Perang Dunia kedua, Komintern dalam Kongresnya yang ke-7 tahun 1935, menyimpulkan bahwa fasisme berarti bahaya peperangan, menyerukan agar Partai-Partai Komunis semua negeri melakukan pembentukan Front Anti Fasis.

Sebagai anggota Komintern, PKI mengikuti garis Komintern, bergerak melawan bahaya fasisme Jepang. Tahun 1935, Musso dapat menyelundup masuk Indonesia, membawa garis Komintern. Menghimpun kader-kader PKI yang tersisa, mendirikan CC PKI ilegal. Kader-kader PKI bergerak, berhasil membangun organisasi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo dipimpin oleh Dr. A. Kapau Gani, Mr. Amir Sjarifoeddin.

Secara rahasia, di bawah pimpinan PKI ilegal, kaum komunis tetap aktif, berorganisasi menggerakkan rakyat. Terbentuk dan bergeraklah organisasi Gerindo di bawah pimpinan Amir Sjarifoeddin. Tahun 1939, di Jakarta terbentuk organisasi Gerakan Rakyat Anti Fasis (Geraf) dipimpin kader-kader PKI ilegal. Pembentukannya dihadiri antara lain: Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Widarta, Armunanto, Dr. Liem Koen Hien.

Di Jakarta, kader-kader PKI seperti Wikana, D.N. Aidit, Hoetabarat, Soemarto, Ronosoedarmo, Sojas, dan lain-lainnya, aktif ambil bagian dalam memimpin berbagai organisasi legal, semi-ilegal, dan ilegal. Mereka menghimpun massa dan menggunakan organisasi-organisasi itu untuk mendidik dan melatih massa melawan fasisme Jepang.

Wikana menggunakan kesempatan politik Kaigun (Angkatan Laut Jepang) untuk menarik pemuda-pemuda dengan mendirikan “Asrama Indonesia Merdeka”, dalam kegiatan pendidikan dimasukkan pikiran-pikiran anti-fasis.

D.N. Aidit juga menggunakan “Asrama Menteng 31” untuk mempropagandakan ide-ide anti-fasis. Pada akhir tahun 1944, D.N. Aidit bersama dengan M.H. Lukman, Sidik Kertapati, dll., mendirikan satu organisasi yang lebih tegas coraknya anti-fasis dan yang bertujuan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yaitu Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom).

Di samping itu, Wikana, D.N. Aidit, dll., juga mempunyai hubungan dengan berbagai grup dan kelompok anti-fasis di Jakarta. Kekuasaan fasis Jepang mencium kegiatan orang-orang komunis, dan melakukan penangkapan-penangkapan. Jepang menangkap Koesnandar, Soebijanto Koesoemo, Hardjo Soepingi. Juga Sudisman, Tjoegito, Sjaifoellah, Fatah Jasin. Di Semarang ditangkap Kasim dan Broto, di Nganjuk ditangkap Tarmoedji, di Tulung Agung ditangkap Soeparto, di Blitar ditangkap Noto. Tak lama kemudian ditangkap Azis di Sidoardjo. Pamoedji, Ketua CC PKI juga ditangkap di Purworejo. Menyusul ditangkap di Jakarta, Mr. Amir Sjarifuddin. Selanjutnya bukan hanya kader-kader PKI, tokoh-tokoh lainnya Dr. Kajadoe, Mr. Soemanang, Ki Mangoensarkoro, Dr. A. Kapau Gani juga ditangkap. Akibat siksaan, banyak di antara mereka yang meninggal dunia seperti Pamoedji, Sjaifoellah. Soekajat dan Azis serta Abdoerrahim dijatuhi hukuman mati dengan dipenggal kepalanya di Kantor Kenpeitai di Jalan Alun-Alun Tjontong Surabaya. Mr. Amir Sjarifoeddin dijatuhi hukuman mati, tapi berkat perjuangan kekuatan progresif, terutama berkat jaminan yang diberikan Bung Karno, hukuman itu diubah menjadi hukuman seumur

hidup. Prof.Dr. Moechtar dan Dr. Kajadoe dibunuh dengan dipenggal lehernya di Jakarta.

6. Revolusi Agustus 1945

AGUSTUS 1945, Jepang bertekuk-lutut pada Sekutu. Kader-kader PKI yang ilegal aktif ambil bagian mempersiapkan Indonesia Merdeka. Adalah sangat menonjol kegiatan mereka yang aktif dalam pendidikan Asrama Menteng 31. Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, Amir Sjarifoeddin yang dipenjarakan Jepang di penjara Lowokwaru Malang, dibebaskan pemuda, di bawah pimpinan Roedhito, pimpinan Pesindo. Dalam kabinet pertama RI, Amir Sjarifuddin menjadi menteri penerangan.

Pada tahun-tahun revolusi ini buku-buku teori Marxisme-Leninisme telah mulai masuk ke Indonesia yang dibawa oleh kaum komunis Indonesia yang kembali dari Australia dan Negeri Belanda. Tetapi buku-buku teori ini dalam bahasa asing, terutama Inggris dan Belanda. Kader-kader yang dapat mempelajarinya sangat terbatas jumlahnya, sehingga pengetahuan teori belum merata menjadi milik kader-kader partai, tetapi hal ini telah memungkinkan lahirnya tulang punggung partai yang mempelajari teori Marxisme-Leninisme.

Januari 1947, berlangsung Kongres Nasional PKI ke-4 di Solo. Dalam Kongres ini diputuskan antara lain mengenai program “*terwujudnya masyarakat sosialis di Indonesia*” pada waktu itu juga. Di samping itu, disetujui politik “*Persetujuan Linggarjati*”, yang bersifat kapitulasi terhadap kaum imperialis Belanda. Mengenai organisasi, kongres pada pokoknya masih memakai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 1924.

Kongres IV memilih CC baru yang terdiri dari kawan-kawan: Sardjono, Winanta, Ngadiman Hardjosoebroto, Maroeto Daroesman, Soetrisno, Soeripno, dll. Dalam kongres itu juga atas usul CS Surakarta, terpilih kawan Aidit sebagai anggota CC. Sesudah Kongres IV ini, CC PKI pindah dari Solo ke Jogjakarta. [Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Bab IV, Jakarta, 1965].

Pulanginya Moesso bersama Soeripno, Mei 1948, membawa gagasan baru bagi PKI dan Revolusi Indonesia. Atas desakan keras dari Musso dan kesediaan sebagian besar kader-kader partai, maka bulan Agustus 1948 itu juga diadakan konferensi partai, yang melahirkan satu resolusi *Jalan Baru untuk Republik Indonesia*. Pekerjaan Musso mengoreksi kesalahan-kesalahan

pimpinan partai dipermudah berhubung dengan sudah adanya sayap Leninis di dalam CC Partai.

Resolusi Jalan Baru ini adalah hasil diskusi yang serius dan diambil oleh konferensi tersebut secara bulat. Konferensi Nasional Partai Luar Biasa ini telah mengumumkan CC yang baru, yang terdiri antara lain kawan-kawan: Moesso, Tan Ling Djie, Maroeto Daroesman, Ngadiman Hardjosebroto, Amir Sjarifoeddin Alimin, Sardjono, Achmad Soemadi, Djoko Soedjono, Wikana, Soeripno, Aidit, Loekman, Njoto, Sudisman, Soetrisno, Roeskak, dll.

Resolusi Jalan Baru bagi Republik Indonesia. Ini adalah *self-kritik* pimpinan PKI atas kesalahan-kesalahannya di masa lampau. Resolusi ini mengoreksi kesalahan-kesalahan PKI, di bidang organisasi, politik, dan ideologi. Yang paling penting di bidang organisasi adalah harus membangun satu partai kelas buruh yang mampu memimpin revolusi Indonesia. Untuk itu harus disatukan partai-partai kelas buruh yang ada, hingga menjadi satu-satunya partai kelas buruh, dengan menggunakan nama PKI yang sudah punya tradisi dalam sejarah Indonesia.

Maka direncanakan untuk menyelenggarakan kongres untuk melangsungkan fusi antara partai-partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme, yaitu penyatuan PKI, Partai Buruh Indonesia, dan Partai Sosialis serta mengesahkan konstitusi baru partai. Kebangkitan PKI merupakan duri dalam daging di mata penguasa Amerika Serikat. Maka pelaksanaan Doktrin Truman, *The Policy of Containment*, bermuara pada *Peristiwa Madiun*, tahun 1948.

7. Provokasi Madiun

DALAM sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 20 September 1948, Perdana Menteri Hatta menyatakan: “Seperti diketahui PKI – Muso telah mengadakan *coup*, *perampasan kekuasaan di Madiun*, dan mendirikan di sana suatu pemerintahan baru sebagai permulaan untuk merobohkan pemerintah Indonesia.

Sudah tersiar ucapan dari Soemarsono, yang bunyinya dari ‘Madiun mulai kemenangan’. Dan nyatalah bahwa pemberontakan ini bermaksud untuk merobohkan pemerintah dan menguasai seluruh republik.

Tersiar pula berita – entah benar entah tidak – bahwa Musso akan menjadi presiden republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin perdana menteri.” [Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Mendajung Antara Dua Karang*, keterangan pemerintah diutjapkan oleh Drs. Mohammad Hatta di muka Sidang B.P.K.N.P. di Djokja pada tahun 1948, hal.87].

Penggulingan kabinet Amir Sjarifuddin, yang terjadi sebelum kembalinya Musso ke Indonesia, adalah permulaan langkah penting yang berkembang menjadi aksi pukulan terhadap PKI. Dalam peristiwa ini, kekuatan kiri berhasil disingkirkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Walaupun ada Panglima Besar Soedirman, kekuatan bersenjata RI jadi berada di bawah pimpinan A.H. Nasution dan Tahi Bonar Simatupang, dua tokoh perwira yang sadar anti-komunis.

Pimpinan tertinggi PKI, Musso, tertembak mati dalam satu pertempuran. Dan sejumlah kader tinggi PKI, termasuk Amir Sjarifuddin, Maroeto Daroesman, Setiadjit, Suripno, Oey Gee Hwat, Sardjono, Harjono, Sukarno, Djokosoejono, Katamhadi, dan D. Mangku, ditembak mati di Ngaliyan.

Peristiwa Madiun adalah teror putih kedua yang melanda PKI dalam sejarahnya. Ini adalah realisasi Doktrin Truman, adalah salah satu puncak realisasi *the policy of containment*, politik pembendungan dan pembasmian komunisme sejagat yang digalakkan Amerika Serikat di Asia. Inilah permulaan *Perang Dingin* yang melanda Asia. [Baca: Suar Suroso, *Peristiwa Madiun, Realisasi Doktrin Truman di Asia*, Hasta Mitra, Jakarta, 2010].

Tapi PKI dan gerakan kiri tidak punah.

Tahun 1950, dalam proses perlawanan menuntut pembatalan Persetujuan KMB, organisasi-organisasi revolusioner bermunculan.

Tanggal 17 Agustus 1950, terbentuk Lembaga Kebudayaan Rakyat yang didirikan oleh kira-kira 15 orang, antara lain: D.N. Aidit, Njoto, Joebaar Ajoeb, Henk Ngantung, Soedjojono, dll. Mukadimah Lekra dengan jelas memaparkan perjuangannya melawan kebudayaan imperialisme dan feodalisme yang dekaden, yang direstorasi lewat persetujuan KMB.

Tanggal 4 Juni 1950, terbentuk *Gerakan Wanita Sedar (Gerwis)*, yang dipimpin oleh Umi Sardjono, Nj. Moedigdo, Suwarti, S.K. Trimurti. Dalam Kongres ke-2, Maret 1954, *Gerwis* berubah nama menjadi *Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani)*.

Pada November 1950, dalam Kongres ke-3, Pesindo mengubah namanya menjadi *Pemuda Rakyat*, dipimpin oleh Ir. Setiadi Reksoprodjo, Baharoeddin, Francisca Fanggalid, Asmoedji, Soekatno, Iskandar Soebekti, Soerjono Hamzah. Ini sesuai dengan tuntutan *Resolusi Jalan Baru* yang menuntut adanya hanya

satu partai pelopor, dan Pesindo yang dulunya memainkan peranan partai serta gerakan pemuda dikonsekuenkan menjadi organisasi massa pemuda.

Bulan September 1950 atas inisiatif Komite Seksi Surakarta dengan dorongan anggota Politbiro CC yang berada di Jakarta, telah dilakukan pemakaman kembali jenazah 11 pemimpin dan kader partai yang ditembak mati oleh pemerintah Hatta di Ngaliyan pada tanggal 19 Desember 1948. Meskipun usaha melakukan pemakaman kembali itu mengalami rintangan-rintangan yang luar biasa dari pemerintah, namun akhirnya mencapai sukses. Puluhan ribu anggota, pencinta PKI dan massa rakyat dari daerah Surakarta dan daerah lainnya hadir dalam upacara pemakaman itu, di mana panji-panji PKI dikibarkan dengan megahnya. CC PKI mengirimkan wakilnya untuk menghadiri upacara penting ini. Peristiwa yang mengharukan ini telah menghapuskan suasana panik di kalangan massa anggota partai, dan lebih lanjut telah membuka tabir kejahatan pemerintah Hatta, dan ini merupakan pendorong kebangkitan kembali PKI sesudah luka parah akibat teror putih Madiun.

8. Kebangkitan Kembali PKI

JANUARI 1951, terbentuk Politbiro CC PKI yang baru yang terdiri dari D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, Alimin. Di bawah pimpinan Politbiro ini, PKI dibangun kembali. Dengan garis politik melaksanakan *Resolusi Jalan Baru*, berlangsung penyatuan pikiran, menyatukan ideologi, politik, dan organisasi.

Di bidang organisasi, politbiro atas nama CC bekerja dengan mengadakan Komisaris-Komisaris CC (KCC) di provinsi-provinsi. Sebagai sambungan dan petugas dari CC, KCC membangun partai di daerah-daerah. Para anggota KCC adalah: Sumatera Timur, Joesoef Adjitorop; Sumatera Tengah, Bachtaroeudin; Sumatera Selatan, M. Zaelani; Jawa Barat, Lagiono; Jawa Tengah, Pak Karto; Jawa Timur, B. Oloan Hutapea; Indonesia Timur, Karel Supit. Para KCC berfungsi mendaftar kembali dan menghimpun anggota, melakukan penyaringan bekas anggota-anggota Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis yang akan masuk ke dalam partai; melakukan persiapan-persiapan untuk pembentukan Komite-Komite Partai menurut konstitusi baru (SC, OSC, dan RC—Seksi Komite, Onderseksi Komite, dan Resort Komite).

Tanggal 28 Maret 1951, diumumkan *Program PKI untuk Pemerintah Nasional Koalisi*. Dalam Program ini diajukan tuntutan PKI untuk

pembentukan pemerintah kerja sama berbagai partai. Pembangunan kembali PKI diikuti dengan aktifnya kader-kader PKI membangun kembali serikat-serikat buruh. Kaum reaksi segera mengobarkan kegiatan anti-komunis, dengan menimbulkan perpecahan-perpecahan dalam gerakan buruh. Kegiatan ini didalangi oleh PSI, dengan jalan pembentukan Serikat Buruh Perkebunan menyaingi *Sarbupri* terjadi di Jember. Dan pembakaran gudang tembakau di Besuki, dituduhkan bahwa itu dilakukan oleh PKI. Menyusul kegiatan-kegiatan provokatif terhadap PKI ini, *SOBSI* yang sudah merupakan kekuatan besar mempersatukan serikat-serikat buruh yang ada mendapat saingan dengan terbentuknya *SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Revolusioner Indonesia)* oleh Partai Murba.

Tanggal 16 Agustus 1951, berlangsung *Razia Agustus*, yaitu penangkapan besar-besaran yang dilancarkan pemerintah Sukiman terhadap kader-kader PKI. Provokasi serangan terhadap pos polisi Tandjung Priok, dinyatakan pemerintah Sukiman sebagai serangan komunis terhadap pemerintah. Dengan alasan ini, penangkapan terjadi di seluruh negeri. Lebih dari 2000 kader PKI ditangkap dan ditahan polisi. CC PKI melakukan perlawanan dengan protes keras. Yang terjadi adalah waktu itu meningkatnya aksi-aksi menentang politik pemerintah Sukiman yang membikin persetujuan kerja sama militer dengan Amerika Serikat, yaitu persetujuan tentang keamanan *Mutual Security Act (MSA)* yang secara rahasia ditandatangani Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo. Persetujuan ini adalah dalam rangka usaha Amerika menarik Indonesia masuk pakta militer SEATO.

Atas dukungan PKI, perlawanan yang terus-menerus meningkat terhadap kabinet Sukiman, menyebabkan kejatuhannya dan digantikan oleh kabinet Wilopo, mewakili PNI. Untuk pertama kali, PNI menduduki pimpinan kabinet RI. Dalam kabinet terdapat wakil-wakil Masyumi dan PSI. PKI menyambut dan mendukung kabinet Wilopo, dengan politik: mendukung politiknya yang maju, dan menentang politiknya yang reaksioner.

Dalam usaha menyatukan barisan, berlangsung diskusi mengenai tulisan D.N. Aidit, *Mengatasi Kelemahan Kita*, segera sesudah terjadinya *Razia Agustus* Sukiman. Artikel yang ditulis atas nama *Alamputra*, mempunyai arti dan peranan penting dalam pendidikan ideologi anggota-anggota partai. Isinya menganalisa situasi, yang menyimpulkan adanya bahaya fasisme yang melancarkan aksi anti komunis. Dan menganalisa keadaan partai menghadapi pukulan reaksi ini. Dipaparkan terdapatnya dua kecenderungan kanan dan “kiri”, yaitu kelemahan-kelemahan dalam partai, kelemahan dalam sikap-sikap anggota partai menghadapi pukulan reaksi.

Dan ditunjukkan jalan keluar mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Pokoknya, dilakukan penjernihan ideologi, yang mempunyai peranan mempersatukan partai.

Tulisan ini mengutip Lenin mengenai arti penting *self-kritik*: “Sikap suatu partai politik terhadap kesalahannya sendiri adalah salah satu cara yang paling penting dan terpercaya untuk mengukur kesungguhan partai itu dan bagaimana ia dalam praktik menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap kelasnya dan massa pekerja. Terus terang mengakui suatu kesalahan, menyelidiki sebab-sebabnya, menganalisa keadaan-keadaan yang telah menimbulkannya – itulah tandanya partai yang sungguh-sungguh, itulah caranya ia harus menunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah caranya ia harus mendidik dan melatih kelas, dan kemudian massa.” [D.N. Aidit, *Mengatasi Kelemahan Kita*, Pilihan Tulisan, Jilid I, cetakan kedua, Panitia Penerbitan Karya-Karya D.N. Aidit, 1965, hal.14–46].

Di samping mendiskusikan tulisan Aidit, *Mengatasi Kelemahan Kita*, itu, beredar dan banyak didiskusikan brosur berisikan tulisan Kian Ling berjudul *Cara Berfikir, Cara Bekerja, Kritik dan Self-kritik*. Secara sangat populer, dalam brosur ini dipaparkan masalah memperbaiki cara berpikir, tentang belajar dari massa, tentang pikiran yang harus diutamakan dalam melalui jalan massa, tentang alam pikiran heroisme, tentang mengejar kesenangan, tentang sifat suka dipuji-puji (cari muka), tentang sikap tegas dan sikap berdasar sentimen, dan tentang sikap bekerja bertanggung jawab. [Kian Ling, *Berfikir, Bekerja, Kritik & Selfkritik*, Penerbitan Demos, Surabaya, tjetakan ke-6].

Brosur ini memaparkan, bahwa Mao Zedong sangat mengutamakan masalah *cara berpikir*. Dalam mendidik cara berpikir yang paling utama ialah memberi kesempatan pada kader-kader kita untuk berani mengutarakan pendapat-pendapatnya. [Idem, hal.5].

Brosur ini juga mengajarkan, bahwa belajar Marxisme-Leninisme, belajar sejarah, belajar mengetahui pengalaman-pengalaman perjuangan rakyat di negeri-negeri asing, ini semua dapat menambah pengetahuan kita. Tetapi yang paling penting adalah belajar dari rakyat. Sebab pengetahuan rakyat dan pengalaman rakyat adalah nyata dan terkaya, daya pencipta dari rakyat adalah tenaga yang terbesar.” [Idem, hal.6–7].

Dikemukakan, bahwa *kritik dan self-kritik adalah senjata yang kuat* bagi kemajuan partai politik, juga suatu alat yang penting bagi kemajuan pahlawan kerakyatan untuk seterusnya. Hanya organisasi dan anggota partai revolusioner yang dapat memahami dan menggunakan ini. Apabila alat ini tergenggam dalam tangan dan digunakan oleh anggota organisasi revolusioner, maka organisasi akan mewujudkan sifat aktif dan semangat tanggung jawab dari semua kader dengan sebaik-baiknya. Maka salah satu

bagian yang pokok dan pekerjaan terpenting dalam usaha meluaskan cara-cara demokrasi, ialah *memimpin massa dalam hal kritik dan self-kritik*.” [Idem, hal.26].

Mengenai kegiatan diskusi tentang brosur Kian Ling ini, Aidit menulis, “Belakangan ini kader-kader dan anggota-anggota partai banyak membicarakan brosur kecil tulisan Kian Ling tentang *cara berfikir, cara bekerja, kritik dan self-kritik*. Tersiarnya brosur kecil ini tepat pada waktunya, yaitu di waktu kelemahan-kelemahan dalam partai sedang menonjol kelihatan, dan untuk mengatasinya hanya jika kader-kader dan anggota-anggota partai mempunyai cara berpikir yang tepat, cara bekerja yang tepat pula, dan dengan rajin dan sungguh-sungguh mengadakan kritik dan *self-kritik*.” [PTA, Jilid I, hal.43].

Diskusi dan belajar dari tulisan *Mengatasi Kelemahan Kita* berarti mempersenjatai anggota-anggota partai dengan kesadaran revolusioner dan pendirian kelas sebagai seorang Marxis. Dikemukakan, bahwa “untuk menjadi seorang Marxis, kita harus menghidupkan teori-teori yang kita pelajari, menghubungkan teori-teori ini dengan nasib dan perjuangan rakyat sehari-hari. Dengan demikian, kita bisa menciptakan dan memimpin aksi-aksi untuk memperbaiki nasib rakyat. Jadi, seorang Marxis mesti mencipta, dan memang tiap-tiap Marxis adalah pencipta, sebagaimana rakyat banyak adalah juga pencipta.” [PTA, Jilid I, hal.27].

Dalam tulisan ini, Aidit mengingatkan bahwa segenap anggota partai harus berpegang teguh pada *Program Umum Partai*, yang merumuskan bahwa kewajiban PKI ialah: Ke dalam “mengorganisasi dan mempersatukan kaum buruh dan kaum tani, kaum intelektual, pengusaha kecil, pengusaha nasional, dan semua anasir anti-imperialisme dan anti-feodalisme, dan semua golongan warga negara keturunan asing.”

Sedangkan ke luar, kewajiban PKI adalah: “bersatu dengan proletariat internasional, dengan semua rakyat yang tertindas, bangsa-bangsa yang terjajah, dan nasion-nasion yang memandang kita sederhana, yang mencintai kemerdekaan nasional, demokrasi rakyat, dan perdamaian dunia.” [Idem, hal.38].

Awal 1952, CC PKI menyelenggarakan Konferensi Nasional Partai. Dalam konferensi ini dibicarakan secara mendalam politik partai terhadap pemerintah Sukiman—Subardjo—Wibisono, soal politik anti DI-TII, soal pengalaman front persatuan dengan borjuasi nasional, soal memperkuat ideologi partai, soal perluasan anggota, dan soal-soal organisasi lainnya. Konferensi Nasional ini telah mempersenjatai anggota-anggota dan kader-kader partai dalam meneruskan perjuangan untuk membatalkan persetujuan

KMB, menyelamatkan demokrasi, dan yang lebih mendesak lagi ialah untuk menjatuhkan pemerintah Sukiman. Direncanakan, perluasan anggota partai dari 10.000 waktu itu, menjadi 100.000 dalam waktu enam bulan. Untuk pertama kalinya dilakukan usaha perluasan anggota yang berencana.

Dalam memperingati ulang tahun ke-32 PKI, Mei 1952, Aidit menyampaikan pidato berjudul *Menempuh Jalan Rakyat*. Dalam pidato ini dipaparkan semenjak terbentuknya PKI, kata-kata Marxisme dan sosialisme menjadi populer di kalangan kaum buruh. Demikian populernya, hingga kekuatan-kekuatan anti komunis pun menggunakannya sebagai topeng. Ini ditunjukkan oleh kenyataan, adanya Partai Buruh Tejasukmana yang membikin undang-undang merugikan kaum buruh, dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sutan Sjahrir yang partainya mengusung gambar-gambar Marx, dan mengaku Marxisme sebagai dasar partainya. Dalam hal ini, Aidit mengutip ucapan Lenin: *“dialektika sejarah adalah demikian rupa, sehingga kemenangan teoretis Marxisme memaksa musuh-musuhnya menyamar sebagai kaum Marxis.”* [Idem, hal.54].

Perjuangan melawan kaum sosialis kanan ini ditekankan pentingnya oleh Aidit dengan mengutip ucapan Lenin bahwa: *“Perjuangan ini harus dilakukan dengan tidak mengenal ampun, dan ia harus dijalankan tidak boleh tidak, sampai pada titik di mana semua pemimpin oportunisme dan sosial-sovinisme yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi menjadi diskredit sama sekali dan diusir dari serikat-serikat buruh.”* [Idem, hal.55].

Masyarakat Indonesia yang bagaikan lautan borjuasi kecil merupakan sumber bermunculannya kaum sosial demokrat, kaum sosialis kanan, yang dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme Belanda mengambil posisi kompromi dengan kolonialisme, sangat merugikan perjuangan revolusioner rakyat. Oleh karena itu, pimpinan PKI sejak semula telah mengambil sikap yang tegas melawan kaum sosialis kanan, menentang kaum sosial demokrat.

Ciri utama dari kaum sosial demokrat adalah, walaupun menyatakan bahwa mereka mengakui sebagai pengikut Marx dan menerima Marxisme, tapi mereka menentang ajaran pokok Marx *diktator proletariat*. Dalam politik praktis, jadi menentang Uni Sovyet, *negara diktator proletariat* yang didirikan di bawah pimpinan Lenin. Di bidang teori, kaum sosial demokrat jadi menentang ajaran-ajaran Lenin, menentang Leninisme. Di Indonesia, mereka jadi penentang politik-politik besar Bung Karno, menentang PKI.

Dalam pidatonya, *Menempuh Jalan Rakyat*, untuk memperingati 32 tahun lahirnya PKI, Aidit memaparkan sikap PKI yang tegas melawan kaum sosial demokrat. Dikemukakan, *“Tiap-tiap komunis, tiap-tiap pemimpin buruh dan pemimpin rakyat yang jujur, wajib melakukan perjuangan yang sengit terhadap*

pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sosialis kanan. PKI didirikan 32 tahun yang lalu justru dengan maksud supaya PKI menjadi suatu partai yang bebas dari penyakit oportunisme, yaitu penyakit dari Internasionale ke-2, dan supaya PKI berjuang sengit melawan tiap-tiap oportunisme di dalam dan di luar partai seperti yang diajarkan oleh Lenin dan partainya. [Idem, hal.54].

Dalam gerakan buruh Indonesia sudah banyak bukti, bahwa kaum sosialis kanan adalah pemecah gerakan buruh. Mereka adalah agen-agen majikan yang menempatkan dirinya di tengah-tengah kaum buruh. Perpecahan di kalangan kaum buruh perkebunan, buruh gula, buruh tekstil, buruh minyak, buruh penerbangan, dll., adalah hasil dari pekerjaan pemalsu-pemalsu Marxisme, yaitu majikan-majikan dari Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh, dan pengikut-pengikut trotskis Tan Malaka dengan SOBRI-nya.

Membantah pandangan yang menyatakan PKI akan melenyapkan demokrasi dan menegakkan kediktatoran, Aidit menyatakan bahwa PKI memang menghendaki *diktator demokrasi rakyat*, yaitu diktator rakyat Indonesia atas musuh-musuh rakyat. Inilah perwujudan kesetiaan PKI pada ajaran Marx *diktator proletariat* yang dimusuhi oleh kaum sosial demokrat. Rakyat wajib mengetahui, bahwa kaum reaksioner ini adalah musuh rakyat, dan kaum reaksioner hanya bisa ditindas untuk selama-lamanya dengan *diktatur dari demokrasi rakyat*. *Diktator demokrasi rakyat* tidak ditujukan kepada perseorangan, tetapi ditujukan kepada kaum reaksioner serta agen-agensya yang berada di luar dan di dalam negeri.

Sejak awal tahun lima puluhan, pimpinan PKI dengan teguh mengangkat semboyan anti imperialisme, terutama imperialisme Amerika. Aidit menyatakan bahwa, “keinginan untuk damai adalah sangat besar pada rakyat Indonesia. Pengalaman pendudukan fasis Jepang dan pengalaman dua perang kolonial Belanda lebih meyakinkan rakyat Indonesia akan kebenaran perjuangannya untuk perdamaian. Semangat perdamaian ini pula yang membikin rakyat Indonesia di waktu yang akhir-akhir ini sangat menentang politik imperialis Amerika. Politik-politik Amerika yang tidak senonoh, yang antara lain berwujud embargo (embargo yang dilakukan Amerika dalam rangka perang Korea), Frisco (Persetujuan kerja sama dengan Jepang yang tercapai di San Fransisco) dan MSA (*Mutual Security Act*) telah menimbulkan semangat anti Amerika yang bernyala-nyala di dada putra-putra Indonesia yang terbaik. PKI yakin, bahwa perjuangan rakyat untuk mencapai perdamaian abadi pasti akan mengalahkan persiapan-persiapan perang Amerika.” [Idem, hal.68].

Kemenangan revolusi Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong sangat mengilhami kader-kader PKI. Tahun 1953, di kala *masalah jalan revolusi Indonesia* menjadi persoalan yang hangat di kalangan kader partai. Aidit menulis “*Jalan Mao Tjetung, adalah satu-satunya Jalan Bagi Revolusi Indonesia*”.

Dalam tulisannya ini, Aidit memaparkan pokok-pokok pikiran Mao Zedong yang intinya adalah masalah pembangunan partai dan pembangunan Front Persatuan Nasional. “Kita harus belajar dari Kawan Mao Tjetung tentang kelas-kelas dalam masyarakat, tentang karakter revolusi, tentang tenaga pendorong dalam revolusi, tentang hegemoni proletariat, tentang pertumbuhan revolusi borjuis demokratis menjadi revolusi sosialis, tentang rol Partai Komunis dalam perjuangan besar seluruh rakyat dan tentang arti hubungan yang erat antara partai dengan massa. Bersamaan dengan itu, kita harus mempelajari sifat-sifat nasional yang khusus dari ekonomi Indonesia, politik Indonesia, kebudayaan Indonesia, adat-istiadat dan tradisi Indonesia.” [Majalah Teori dan Politik Marxisme-Leninisme, *Bintang Merah* No.12, Tahun IX, Desember 1963, hal.540—544].

Tapi Aidit tidak menekankan ajaran Mao Zedong mengenai arti menentukan dari perjuangan bersenjata sebagai bentuk utama dari revolusi. Tidak diperkenalkan ajaran Mao Zedong: “*Tanpa Tentara Rakyat, Rakyat tidak mempunyai apa-apa*” dan ajaran “*Kekuasaan politik lahir dari laras senapan*”. Aidit memusatkan perhatian pada masalah taktik Front Persatuan Nasional, masalah kerja sama dengan burjuasi nasional, yang bentuk konkretnya membangun dan menggalang kerja sama dengan Bung Karno. Aidit menulis: “*Taktik front nasional adalah taktik bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dalam bentuk apa pun.*” [D.N. Aidit, *Front Persatuan Nasional dan Sejarahnya*, PTA, Jilid I, hal.70—78].

“Revolusi Tiongkok telah memberikan pelajaran tentang bentuk perjuangan pokok revolusi di negeri jajahan, setengah jajahan dan setengah feodal, yaitu perjuangan rakyat bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Sesuai dengan hakikat revolusi adalah revolusi agraria, maka hakikat perjuangan rakyat bersenjata itu adalah perjuangan bersenjata kaum tani dalam revolusi agraria di bawah pimpinan kelas butuh. Praktik revolusi Tiongkok pertama-tama adalah merupakan penerapan Marxisme-Leninisme berdasar kondisi-kondisi konkret Tiongkok. Bersamaan dengan itu ia juga mengungkapkan hukum umum bagi revolusi-revolusi rakyat di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan, dan setengah feodal.” [Politbiro CC PKI, *Tegakkan PKI yang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia*, *Otokritik Politbiro CC PKI September 1966*, Diterbitkan oleh Delegasi CC PKI, September 1971, hal.114—115].

Dalam pidatonya berjudul *Menuju Indonesia Baru* untuk memperingati ulang tahun ke-33 PKI, Aidit dengan tajam memblejeti peranan kaum pengkhianat nasional yang jadi alat imperialis dalam revolusi. Dinyatakannya, “*Imperialis Amerika terang-terangan mencampuri soal-soal intern Republik Indonesia. Mereka mengirimkan agen-agen seperti Gerald Hopkins, Campbell, dll., yang berkewajiban menghancurkan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh komunis. Mereka mengadakan intrik-intrik supaya Persetujuan Renville diterima, tetapi bersamaan dengan itu mereka mengorganisasi semacam ‘perlawanan’ dari pemimpin-pemimpin Masjumi dalam kabinet Amir Sjarifuddin; pemimpin-pemimpin Masjumi kemudian diperintah oleh agen-agen Amerika untuk menyatakan ‘tidak setuju’ pada Persetujuan Renville dan selanjutnya menolak untuk terus ambil bagian dalam pemerintah Amir Sjarifuddin. Dengan perbuatan busuk ini mereka mau membubarkan pemerintah Amir Sjarifuddin dan membentuk suatu pemerintah tanpa komunis.*”

Secara sukarela Amir meletakkan jabatan, terbentuk kabinet baru di bawah pimpinan Hatta dengan inti Masjumi. Program kabinet ini justru adalah untuk melaksanakan Persetujuan Renville. Kabinet Hatta melaksanakan program *rekonstruksi dan rasionalisasi (Re-Ra)*, yang dalam praktiknya adalah membersihkan kaum kiri dari pasukan bersenjata RI. Inilah realisasi “*Red Drive Proposals*”, hasil pertemuan rahasia Sarangan.

Program Re-Ra ini mendapat tentangan dari berbagai pasukan. Terjadilah aksi-aksi demonstrasi, sampai konflik-konflik yang berkembang menjadi konflik bersenjata, sampai saling lucu-melucuti. Puncaknya terjadi di Madiun. 19 September 1948, Perdana Menteri Hatta berpidato di depan sidang BP KNIP, menyatakan “*entah benar entah tidak, bahwa Musso akan menjadi presiden republik rampasan itu dan Mr. Amir Sjarifuddin perdana menteri.*” [Kementerian Penerangan RI, *Mendajung Antara Dua Karang*, Pidato PM Hatta di depan BP KNIP, 20 September 1948, hal.87].

Peristiwa Madiun mengakibatkan tertembaknya Musso dalam satu pertempuran, dan ditembakmatinya pimpinan tertinggi PKI lainnya termasuk Amir Sjarifuddin, Maroeto Daroesman, Setiadjit, Sardjono, Harjono, Soeripno, Sukarno, Ronomarsono, Katamhadi, Oey Gee Hwat di Ngaliyan.

Politik partai yang tepat dalam berposisi, diikuti usaha pembangunan partai dan penggalangan front persatuan nasional, akhirnya berhasil menjatuhkan kabinet Sukiman yang anti demokratis, terbentuklah kabinet Wilopo. Dengan jatuhnya kabinet Sukiman yang anti-demokrasi, terbentuk kabinet baru di bawah pimpinan Wilopo yang komposisi dan programnya dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan maju. Untuk pertama kalinya

PNI memimpin kabinet, walaupun kekuatan Masyumi dan PSI cukup besar di dalamnya. PKI mendukungnya, selama kabinet ini menjalankan programnya yang demokratis.

Di bawah pengendalian Sultan Hamengku Buwono sebagai Menteri Pertahanan, dengan T.B. Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dan A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, akan dilanjutkan usaha rasionalisasi dalam Angkatan Bersenjata. Ini berarti pengurangan jumlah pasukan yang menyebabkan pemecatan sejumlah besar perwira dan prajurit. Rencana ini mendapat perlawanan dari sejumlah perwira, yang dipelopori Kolonel Bambang Soepeno. Karena langkah-langkah yang diambilnya menentang rasionalisasi ini, Bambang Soepeno dipecat dari kedudukannya sebagai Panglima Teritorium oleh A.H. Nasution. Perbedaan pendapat dalam pimpinan Angkatan Perang ini merembes ke parlemen, maka muncullah mosi tidak percaya dari Manai Sophian terhadap kebijaksanaan Menteri Pertahanan, Sultan Hamengku Buwono. Walaupun ditentang oleh Masjumi dan PSI, mosi Manai Sophian diterima parlemen. Jatuhlah kabinet Wilopo. Ini satu pukulan bagi Masyumi dan PSI.

Kesalahan-kesalahan Masyumi—PSI dan pemimpin-pemimpin militeris lainnya di bidang politik menyebabkan mereka kian mata gelap. Terjadilah usaha kup 17 Oktober 1952. Persekutuan kaum soska Masyumi dan pengikut aliran trotskis dengan didukung kaum militeris mengerahkan massa berdemonstrasi dengan moncong meriam diarahkan ke Istana Merdeka, yang menuntut Bung Karno membubarkan parlemen. Bung Karno menolak, menyatakan: “Tidak mau jadi diktator”. Usaha kup ini gagal. Biang keladinya ditindak. Instansi Staf Angkatan Perang dihapuskan, berarti T.B. Simatupang dibebaskan dari kedudukan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Di samping itu, A.H. Nasution dibebaskan dari KSAD. Berlangsung kekusutan dalam pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, terutama dalam masalah menentukan pengganti Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam pada itu, kabinet Wilopo melakukan kesalahan mengenai *Peristiwa Tanjung Morawa*, yang terkenal dengan *peristiwa traktor maut*. Menteri Dalam Negeri Moh. Roem dari Masyumi bertanggung jawab atas terjadinya penembakan terhadap kaum tani yang menentang ditraktornya tanah garapan milik kaum tani.

Tanggal 14 Maret 1953, rakyat di Tanjung Morawa mulai beraksi menentang pentraktoran tanah garapan mereka. Ormas-ormas Petani, BTI, STI, dan Sakti yang mempunyai anggota yang terlibat bakal digusur bersatu-padu menentang pentraktoran itu.

Pada 16 Maret pagi, polisi diperintahkan melakukan penembakan. Sebanyak 21 orang kena sasaran, 6 di antaranya tewas, (dua orang anggota Petani dan 4 orang turunan Tionghoa pekebun sayur-sayuran, yang lainnya luka-luka berat dan ringan [B. Mohammad Said, *Wilopo dan “Tanjung Morawa”*, dalam *Wilopo 70 tahun*, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXIX, hal.337].

Tanggal 23 Maret 1953, PM Wilopo menerima delegasi Front Persatuan Tani, yang dipimpin oleh Sidik Kertapati, Ketua Umum Sakti, mengenai penembakan Tanjung Morawa. Di situ, Kertapati dkk. telah memberitahu, bahwa ia akan mengeluarkan kembali usul mosi tidak percaya yang sudah dipeti-eskan beberapa waktu yang lalu, dalam mana dinyatakan kecaman keras atas kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri. Moh. Roem. [*Idem*, hal.339].

Karena mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati, kabinet Wilopo jatuh.

Bulan Juli 1953, terbentuk kabinet Ali Sastroamidjojo tanpa Masyumi—PSI, yang programnya lebih demokratis dan lebih maju dari program kabinet Wilopo. Walaupun belum merupakan kabinet front persatuan nasional, PKI memberi dukungan pada kabinet Ali ini.

9. Kongres Nasional Ke-5 PKI

OKTOBER 1953 berlangsung sidang pleno CC PKI mempersiapkan Kongres Nasional V PKI. Sidang ini memutuskan Laporan Umum CC, Rencana Program PKI, Rencana Konstitusi PKI, Soal-soal Pemilihan Umum dan Pemilihan CC baru. Setelah mendengar laporan Politbiro tentang putusan Komisi Kontrol mengenai kawan Tan Ling Djie, dan setelah membicarakan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh kawan Tan Ling Djie di lapangan ideologi, politik, maupun organisasi, sidang pleno CC memutuskan memberhentikan Kawan Tan Ling Djie dari keanggotaannya dalam CC.

Sidang memilih Kawan-Kawan D.N. Aidit, M.H. Lukman, dan Njoto masing-masing sebagai Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal I, dan Wakil Sekretaris Jenderal II. Atas permintaannya sendiri, mengingat aktivitas dan kesehatan Kawan Alimin, maka sidang pleno CC memutuskan mengganti Kawan Alimin dengan Kawan Sakirman sebagai anggota Politbiro CC PKI.

Dengan dikeluarkannya Kawan Tan Ling Djie dari CC, maka anggota CC PKI adalah:

1. Achmad Soemadi;
2. Adjitorop, J;

3. Aidit, D.N.;
4. Alimin;
5. Bachtaroeddin;
6. Djokosoedjono;
7. Lukman, M.H.;
8. Njoto;
9. Pardede, P.;
10. Sakirman;
11. Sudisman,
12. Wikana;
13. Zaelani.

Politbiro CC PKI terdiri dari: Aidit, D.N.; Lukman, M.H.; Njoto; Sudisman; Sakirman.

Sekretariat CC PKI terdiri dari: Aidit, D.N.; Lukman, M.H.; dan Njoto.

Sidang Pleno menyimpulkan, bahwa pikiran Kawan Tan Ling Djie sudah menguasai partai selama revolusi tahun 1945—1948 sampai permulaan tahun 1951, sehingga telah menghambat perkembangan partai. Pikiran Tan Ling Djie di bidang organisasi “menghendaki adanya Partai Kelas Buruh di luar PKI, yang anggotanya terdiri dari mereka yang pro komunis tapi tidak berani masuk PKI.” Di bidang politik: “mengecilkan kekuatan massa, membesarkan kekuatan reaksi, membikin kelas buruh jauh dari soal-soal politik, mengutamakan perjuangan perundang-undangan dan parlementer semata-mata; di bidang ideologi adalah “subjektivisme, dengan manifestasinya sebagai aliran dogmatisme, dan empirisisme.” [Baca: Manuskrip 45 Tahun PKI, Bab V].

Maret 1954 berlangsung Kongres Nasional V PKI. Kongres mewakili 49.042 anggota serta 116.164 calon anggota. Kongres mengesahkan dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Sidang Pleno CC Oktober 1953 berupa laporan politik D.N. Aidit berjudul *Jalan ke Demokrasi Rakyat Bagi Indonesia, Konstitusi Baru PKI, Program PKI*. Juga disahkan koreksi besar Musso, *Resolusi Jalan Baru untuk Republik Indonesia*. Diputuskan memperluas susunan CC hingga menjadi terdiri dari: Achmad Soemadi, D.N. Aidit, Bachtaroeddin, Djoko Soedjono, Jusuf Adjitorop, M.H. Lukman, Njoto, Noersoehoed, Peris Pardede, Sakirman, Sudisman, Karel Supit, dan M. Zaelani. Calon-calon anggota CC: Anwar A.Z., Anwar Kadir, Siswojo.

Kongres menyimpulkan bahwa Indonesia adalah negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Untuk menjadi negeri merdeka, demokratis, makmur dan maju, maka soal yang pokok adalah mengganti pemerintah tuan-tuan feodal, dan komprador, serta *menciptakan pemerintah rakyat, pemerintah demokrasi rakyat*. Jalan keluar terletak dalam mengubah imbang kekuatan

antara kaum imperialis, kelas tuan tanah, dan borjuasi komprador di satu pihak, dan kekuatan rakyat di pihak yang lain. Jalan keluar terletak dalam membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, terutama kaum buruh dan kaum tani. Kongres yakin, bahwa *revolusi agraria* adalah hakikat revolusi demokrasi rakyat di Indonesia. Dengan suara bulat disetujui untuk tidak lagi menggunakan semboyan “*nasionalisasi tanah*” atau semboyan “*semua tanah menjadi milik negara*” tetapi semboyan yang tepat adalah “*tanah untuk kaum tani*”, “*pembagian tanah untuk kaum tani*”, dan “*milik perseorangan tani atas tanah*”.

Dalam Laporan Umum Aidit yang disahkan kongres dikemukakan, dua kewajiban partai yang sangat mendesak, yaitu *menggalang front persatuan nasional* dan *masalah melakukan pembangunan partai*. Partai harus secara benar memecahkan masalah front persatuan, masalah bersatu, dan berpisah dengan borjuasi nasional, dan masalah persekutuan kaum buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan. Mengenai pembangunan partai dikemukakan, bahwa kita harus mempunyai partai model Partai Komunis Uni Sovyet dan model Partai Komunis Tiongkok. Dengan tiada teori Marxisme-Leninisme tidak mungkin kita mempunyai partai yang demikian. Hanya apabila kita menguasai ilmu Marxisme-Leninisme dan mempunyai kepercayaan kepada massa, berhubungan erat dengan massa dan memimpin massa maju ke depan, hanya dengan demikian kita bisa mendobrak semua rintangan dan mengatasi semua kesulitan dan dengan demikian kekuatan kita akan menjadi tak terkalahkan.

Kongres juga mengesahkan *Manifes Pemilihan Umum PKI*. Manifes ini mengajukan seruan: *Bersatu menuju ke kotak pemilihan untuk suatu pemerintah demokrasi rakyat!* Menjelang berlangsungnya pemilihan umum, sidang Politbiro CC 29 September 1955 mendiskusikan secara mendalam hakikat pemerintah demokrasi rakyat dan syarat-syarat pembentukannya, maka mengambil sebuah resolusi yang mengoreksi seruan ini dengan rumusan baru: “*Lewat pemilihan umum yang akan datang membentuk pemerintah koalisi nasional!*”

Dalam resolusi ini ditegaskan, tujuan PKI memenangkan pemilihan umum bukanlah untuk membentuk pemerintah demokrasi rakyat, tapi membentuk pemerintah koalisi nasional. Pemerintah ini tidak sama dengan pemerintah demokrasi rakyat yang menjadi tujuan dalam Program PKI. Dengan semboyan baru ini, PKI tampil berkampanye untuk mengalahkan Masyumi dan PSI yang anti-komunis, untuk memenangkan partai-partai demokratis lainnya dalam pemilihan umum. PKI memblejeti politik-politik reaksioner anti komunis dari Masyumi dan PSI. Hasil pemilihan umum

adalah: PKI tampil sebagai salah satu dari empat partai besar. PSI mengalami kekalahan besar. Pemilihan umum untuk parlemen disusul oleh pemilihan untuk anggota Konstituante. PKI tampil menghadapi pemilihan anggota Konstituante dengan semboyan *Pertahankan Republik Proklamasi 1945!*

Seselesainya pemilihan umum yang memberikan kemenangan bagi PKI, Juli 1956 dilangsungkan sidang pleno ke-4 CC Kongres V. Sidang menyimpulkan pengalaman dan merumuskan taktik serta politik baru demi menyelesaikan revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya. Disimpulkan adanya *tiga kekuatan*, yaitu *kiri, tengah, dan kepala batu*; dan adanya *tiga konsep* mengenai penyelesaian revolusi Agustus. Maka sidang pleno CC menyimpulkan: *Dengan sekuat tenaga dan tak jemu-jemunya mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah, dan memencilkan kekuatan kepala batu.*

10. Usaha Reaksi Melawan PKI

SESUDAH Kongres Nasional V PKI, kekuatan anti komunis tidak redanya mengusahakan provokasi demi menghancurkan PKI. Salah satu usaha Masyumi adalah dengan menggunakan nama Badan Koordinasi Organisasi Islam (BKOI) mengerahkan ratusan ribu massa berdemonstrasi berdarah di Jakarta. Semboyan-semboyan yang diusung adalah *anti-komunis*.

Dalam peristiwa ini terjadi tindak kekerasan, perusakan, dan penghancuran perabot rumah tangga serta gugurnya seorang perwira Angkatan Darat, Kapten Supartawidjaja. Karena peristiwa ini, pemerintah mengeluarkan larangan berdemonstrasi. PKI memprotes larangan ini, karena ini berarti mengekang hak-hak demokrasi.

Tanggal 14 September 1953, *Harian Rakjat* mengumumkan *statement* Politbiro CC PKI berjudul "*Peringati Peristiwa Madiun Secara Intern!*" Politbiro CC PKI mengeluarkan *statement* itu, karena pada tanggal 4 September 1953, *Harian Abadi* menyiarkan pernyataan Bekas Pejuang Islam Indonesia (BPII), menuntut pemerintah Indonesia untuk *menetapkan hari pemberontakan kaum komunis PKI cs. di Madiun tanggal 18 September itu menjadi hari berkabung nasional dan supaya seluruh rakyat diperintahkan menaikkan bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung.*"

Harian Pedoman, 7 September menyiarkan pernyataan BKOI Jakarta mengenai Peristiwa Madiun yang isinya sama dengan pernyataan BPII tersebut di atas. *Harian Abadi*, 10 September 1953 memuat pengumuman Liga

Pembela Demokrasi yang isinya pada pokoknya sama dengan pernyataan BPII tersebut.

Sebagai penanggung jawab *statement* Politbiro tersebut, Aidit diajukan ke meja Pengadilan Negeri Jakarta. Tuduhan jaksa adalah, Aidit "*menghina dan menyerang kehormatan Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta.*"

Dalam proses pengadilan ini, Aidit tampil dengan pidato *Menggugat Peristiwa Madiun*. Dari tergugat, Aidit berubah jadi menggugat. Aidit menyatakan bahwa Peristiwa Madiun memang adalah provokasi dan tangan Hatta—Sukiman—Natsir, cs., memang berlumuran darah, demi menghancurkan PKI. Aidit menuntut Hatta diajukan ke pengadilan, sebagai seorang yang bertanggung jawab atas terjadinya Peristiwa Madiun itu, yang bertanggung jawab atas realisasi program anti-komunis dari Amerika, yaitu *The Red Drive Proposals*, yang diajukan pada pemerintah Hatta. [Aidit D.N., *Menggugat Peristiwa Madiun*, PTA, Jilid I, hal.351—380]. [Baca juga: Suar Suroso, *Peristiwa Madiun, Realisasi Doktrin Truman di Asia*, Hasta Mitra, Jakarta, 2010].

Aidit bebas dari semua tuntutan pengadilan. Serangan terhadap PKI dengan menggunakan Peristiwa Madiun berubah menjadi "*senjata makan tuan*".

Berlawanan dengan keinginan AS yang giat menarik Indonesia untuk masuk pakta militer SEATO demi membendung negara sosialis RRT, pemerintah Ali Sastroamidjojo mempersiapkan penyelenggaraan Konferensi Asia—Afrika dengan mengundang RRT. Menjelang berlangsungnya Konferensi Asia—Afrika di Bandung, Amerika mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya, termasuk dengan aksi CIA menyabot pesawat terbang yang membawa delegasi RRT. Usaha untuk membunuh PM Zhou Enlai yang mestinya menumpang pesawat itu gagal.

Bulan April 1955, di bawah pemerintahan Ali Sastroamidjojo, dengan sukses berlangsung Konferensi Asia—Afrika yang bersejarah. John Foster Dulles, Menlu Amerika Serikat bersuara sumbang terhadap konferensi ini. Politik netral yang dianut oleh banyak negara Asia—Afrika dinilai adalah *immoril* oleh Wakil Presiden Nixon dan John Foster Dulles.

11. Pemilihan Umum Pertama dalam Sejarah Indonesia, Gagasan Bung Karno Membentuk Kabinet Gotong Royong.

PKI mengerahkan semua kekuatannya untuk memenangkan Pemilihan Umum tahun 1955. Pemilihan ini dilangsungkan bulan September adalah

untuk memilih anggota parlemen dan Desember untuk anggota dewan Konstituante. Hasilnya, empat besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen). PKI tampil sebagai pemenang, menjadi salah satu dari empat partai besar: PNI, Masjumi, NU, dan PKI. PSI memperoleh 5 kursi di parlemen.

Sesudah Pemilihan Umum, situasi politik jelas bergeser ke kiri. Presiden Soekarno dalam pidatonya 21 Februari 1957 mengumumkan *Konsepsi Presiden* yang berisikan rencana pembentukan *Kabinet Gotong Royong*, kabinet berkaki empat, kabinet yang berisikan wakil partai-partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Politbiro CC PKI menyambut dan mendukung *Konsepsi* Presiden ini. Maka ditampilkanlah semboyan: *Ubahimbangan kekuatan untuk melaksanakan Konsepsi Presiden 100%*!

Kekuatan kepala batu kian kalap. Terjadi “*Peristiwa 13 Agustus 1956*”, percobaan penahanan oleh Kolonel Zulkifli Lubis atas diri Menlu Roeslan Abdoelgani dari kabinet Ali II yang pada waktu itu akan ke London menghadiri konferensi mengenai masalah Terusan Suez. Terjadi lagi kudeta Lubis tanggal 16 November 1956, percobaan perebutan kekuasaan di Jakarta oleh Kolonel Zulkifli Lubis dengan jalan mengerahkan pasukan RPKAD (*Resimen Para Komando Angkatan Darat*) dari Bandung ke Jakarta dengan maksud mengepung dan melucuti ABRI yang ada di Jakarta. Usaha kup ini gagal, Zulkifli Lubis dipecat.

Dalam pada itu, “sikap AS juga menjadi jelas: *Gulingkan Presiden Soekarno*. Sikap AS ini didukung oleh komplotannya, Inggris dan Australia. Sejak AS menghentikan bantuannya, mereka malah membangun hubungan dengan faksi-faksi militer Indonesia. Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia. Melalui operasi intelijen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno. Usaha kudeta muncul pada bulan November 1956. Deputy Kepala Staf TNI AD, Kolonel Zulkifli Lubis, berusaha menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintah. Namun usaha ini dipatahkan.” [Soebandrio, *Kesaksianku Tentang G30S*].

4 Juli 1957, terjadi pelemparan granat ke Kantor CC PKI dan Kantor Dewan Nasional SOBSI. 30 November 1957 Bung Karno diteror dengan pelemparan granat ketika menghadiri acara pada sebuah sekolah di Jalan Cikini. Presiden Soekarno selamat, sejumlah murid luka-luka dan meninggal. Kaum reaksi yang tak lagi mampu menempuh jalan demokrasi, kini beralih

ke teror berdarah dan usaha pembunuhan atas Presiden Soekarno. Dan berlanjut pada pemberontakan sampai mendirikan pemerintah tandingan terhadap Republik Indonesia.

12. Tiga Kekuatan dan Tiga Konsep Penyelesaian Revolusi

SELESAINYA Pemilihan Umum yang memberikan kemenangan bagi PKI, Juli 1956 dilangsungkan sidang pleno ke-4 CC Kongres V. Sidang menyimpulkan pengalaman dan merumuskan taktik serta politik baru demi menyelesaikan revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya. Disimpulkan adanya *tiga kekuatan*, yaitu *kiri, tengah, dan kepala batu*; dan adanya *tiga konsep* mengenai penyelesaian revolusi Agustus. Maka sidang pleno CC menyimpulkan: Garis politik PKI menghadapi tiga kekuatan dan tiga konsep penyelesaian tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus ialah: *Dengan sekuat tenaga dan tak jemu-jemu mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah, dan memencilkan kekuatan kepala batu*.

Konsep PKI menyelesaikan tuntutan-tuntutan revolusi Agustus 1945 adalah: *Menghapuskan imperialisme dan feodalisme sampai ke akar-akarnya*. Ini adalah konsep rakyat. Berdasarkan konsep ini, mereka yang tidak anti-imperialisme dan tidak anti-feodalisme adalah bukan rakyat, tetapi anti-rakyat, anti-Revolusi Agustus 1945.

Mengenai Front Persatuan Nasional, laporan menyatakan bahwa PKI menghargai semboyan yang juga dianjurkan oleh Bung Karno, yaitu semboyan tentang ‘*kerja sama kaum agama, nasionalis, dan komunis*’. Ini adalah semboyan yang cocok dengan kebutuhan yang mendesak dari rakyat Indonesia sekarang, yaitu *persatuan*.

Mengenai jalan parlementer, laporan menyatakan, bahwa kalau tergantung pada kaum komunis, maka bentuk yang sebaik-baiknya, bentuk yang ideal dari peralihan ke sistem kekuasaan Rakyat yang demokratis, yaitu tingkat persiapan ke sistem sosialis, ialah bentuk yang damai, bentuk yang parlementer. Jadi, jika tergantung pada kaum komunis, jalan damai yang dipilih. Di samping itu, dalam Program PKI dinyatakan: “bahwa perjuangan parlementer saja tidaklah cukup untuk mencapai tujuan membentuk suatu pemerintah Demokrasi Rakyat. Ini adalah satu kebenaran, karena pekerjaan PKI bukan pekerjaan parlementer saja, tetapi juga dan terutama pekerjaan-pekerjaan di kalangan massa kaum buruh, kaum tani, inteligensia, dan massa pekerja serta massa demokratis lainnya. Pekerjaan PKI ialah mengubah imbalanced kekuatan antara kaum imperialis, kelas tuan tanah, dan borjuasi komprador

di satu pihak, dan kekuatan rakyat di pihak lain. [D.N. Aidit, *Bersatulah untuk Menyelesaikan Tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945*, PTA, Jilid II, cetakan kedua, hal.20—80].

13. Sidang-Sidang Konstituante, PKI Membela Pancasila Dasar Negara

TANGGAL 22 April 1956 dibuka sidang Konstituante. Bung Karno menyampaikan pidato pembukaan dengan judul: *Susunlah Undang-Undang Dasar yang Res Publik*. Dengan menduduki 80 dari 550 kursi Konstituante, wakil-wakil PKI aktif dalam perdebatan penyusunan Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia.

Dalam sidang-sidang Kontituante, berlangsung perjuangan sengit dalam bentuk perdebatan antara pembela dan penentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pidatonya tanggal 20 Mei 1957, berjudul *Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945*, di depan sidang Konstituante, D.N. Aidit memaparkan pendirian PKI.

“PKI menghendaki Undang-Undang Dasar yang akan kita susun, seharusnya kita beri tempat yang terhormat kepada unsur kesatuan bangsa yang modern (nasion) yang bersumber pada Sumpah Pemuda 1928.” [D.N. Aidit, *Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945*, PTA, Jilid kedua, cetakan kedua, Panitia Penerbitan Karja-Karja D.N. Aidit, 1965, hal.136].

Sidang-sidang Konstituante mencapai titik jalan buntu, dalam menetapkan *dasar negara* Republik Indonesia. Pihak Masyumi dan kalangan Islam lainnya *menentang Pancasila* dan menghendaki *Islam* sebagai dasar negara. Kaum nasionalis PNI dan PKI menghendaki *Pancasila* sebagai dasar negara. Sedangkan PSI, Partai Murba, menghendaki *sosio-ekonomi* sebagai dasar negara. Dalam pemungutan suara, walaupun pendukung Pancasila adalah mayoritas, tapi tidak mencapai dua pertiga jumlah suara yang dituntut oleh Tata Tertib Sidang. Alasan-alasan Masyumi menentang Pancasila sebagai dasar negara dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, Moh. Natsir, Isa Ansari, dan Zainal Abidin Achmad dalam sidang-sidang Konstituante.

Alasan-alasannya adalah: Pancasila itu “sila-silanya bertentangan, terutama sila ke-Tuhanan dan sila Kedaulatan Rakyat; Pancasila kalah universal daripada Islam; Pancasila ‘tidak berakar’ di dalam masyarakat dan di dalam kalbu rakyat; kalau masyarakat kita digali, maka yang ada sebenarnya ‘lebih dari lima sila’; Pancasila itu hanya titik pertemuan dalam

kata-kata; perumusan serangkai ide yang ada dalam Pancasila itu dirasakan hampa tak dapat berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam; ia tidak mendapat akar sama sekali dalam kalbu rakyat; Pancasila itu adalah suatu abstraksi, suatu ‘*pure concept*’ yang dalam kenyataan tidak bisa berdiri sendiri; kita dapat membandingkannya dengan angka-angka yang kita pakai, angka 5 umpamanya dalam realitas tidak berdiri sendiri, dalam kenyataan kita hanya dapat menemui umpamanya lima kuda, 5 kursi, 5 orang, 5 kapal, dan seterusnya; Islam adalah sesuatunya yang ‘*dialektis Indonesia*’; Pancasila itu sekuler, dan sekulerisme itu di dalam kehidupan perseorangan tidak memberi petunjuk-petunjuk yang tegas; Islam memberikan kepada kita dasar-dasar yang abadi dan tidak berubah”.

Bahkan perdebatan berlangsung sampai-sampai Isa Ansari mengajukan ancaman, bahwa “soal DI itu tak akan bisa selesai jika Pancasila tetap jadi dasar negara, dan bahwa soal DI itu akan selesai jika Islam dijadikan dasar negara.” Semua alasan yang menentang Pancasila ini dibantah dengan argumen-argumen yang meyakinkan oleh Njoto dalam pidatonya. Dan dikemukakannya sikap PKI yang tangguh *membela Pancasila* sebagai dasar negara. [Njoto, *PKI dan Pantjasila*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1958].

Njoto membantah alasan Kasman Singodimedjo yang menyatakan “Pancasila kalah universal daripada Islam”. Njoto menyatakan bahwa “tidak ada kedengaran bantahan terhadap keterangan Saudara-saudara dari fraksi Katolik yang menyatakan bahwa ‘Rakyat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai golongan dengan berbagai-bagai kepercayaan atau keyakinan yang bersifat universal masing-masing’. Sdr. Asmara Hadi malahan membuktikan bahwa Pancasila itu lebih universal daripada Islam. Saya hanya ingin menambahkan ini: walaupun saudara-saudara dari golongan Islam tidak mau dikatakan Pancasila ‘mencakup’ juga Islam, baiklah, tetapi sudah jelas Pancasila mencakup Katolisisme, Protestantisme, Hinduisme, dll.—adakah Katolisisme, Protestantisme, Hinduisme di dalam Islam?”

Mengenai alasan Moh. Natsir menentang Pancasila bahwa Pancasila itu ‘tidak berakar’ di dalam masyarakat dan di dalam kalbu rakyat. Njoto membantahnya dengan menyatakan: “Tetapi jika lebih dari 50% kaum pemilih di dalam pemilihan umum untuk Konstituante tempo hari memberikan suaranya untuk partai-partai yang mempertahankan Pancasila, bagaimana lagi mau dibuktikan bahwa Pancasila itu ‘tidak berakar’? Bukankah sesuatu yang dikatakan masuk akal itu adalah sesuatu yang bukan hanya diucapkan tetapi yang dapat dibuktikan akan kebenarannya?”

Terhadap alasan Zainal Abidin Achmad, bahwa kalau masyarakat kita digali maka yang ada sebenarnya “lebih daripada 5 sila”, Njoto menyatakan:

“Sdr. Zainal Abidin Achmad barangkali tidak menduga, bahwa keterangannya ini, daripada melemahkan, justru menguatkan Pancasila. Justru karena bermacam ragam yang ada dalam masyarakat kita dan karena itu bermacam-ragam pula yang dapat digali daripadanya, maka tidak mungkin masyarakat kita hidup dengan satu agama, satu kepercayaan atau satu aliran saja”.

Moh. Natsir menentang Pancasila dengan alasan: “Pancasila itu hanya titik pertemuan dalam kata-kata”. “Perumusan serangkai ide yang ada dalam Pancasila itu dirasakan hampa, tak dapat berkata apa-apa kepada jiwa umat Islam”. “Ia tidak mendapat akar sama sekali dalam kalbu rakyat”. “Kita dapat membandingkannya dengan angka-angka yang kita pakai. Angka 5 umpamanya dalam realitas tidak berdiri sendiri. Dalam kenyataan kita hanya dapat menemui umpamanya 5 kuda, 5 kursi, 5 orang, 5 kapal, dan seterusnya.”

Njoto membantahnya dengan menyatakan: “Kalau tujuannya merendahkan Pancasila, barangkali akan lebih baik jika Sdr. Natsir tidak berhenti membandingkan Pancasila dengan ‘5 kuda’, tapi juga misalnya dengan ‘5 picis’, atau ‘5 sen’ Tapi apakah begini ini argumentasi yang berharga, apakah begitu ini argumentasi! Lagi pula benarkah Pancasila itu tanpa substansi? Yang kita bicarakan bukan panca tok, tetapi Pancasila! Pancasila ‘suatu abstraksi’? Tetapi keyakinan mana, kepercayaan mana yang sesungguhnya bukan suatu abstraksi atau suatu pengabstraksian? Pancasila itu ‘kata-kata saja’? Tapi kalau dituruti jalan pikiran Sdr. Natsir ini—a p a yang bukan ‘kata-kata saja’? *San Min Cu I* Dr. Sun Yat-sen yang terdiri dari nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme apakah hanya ‘kata-kata’ saja? Slogan yang telah menghancurkan Perancis feodal yang mengemukakan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan apakah hanya ‘kata-kata saja’? Tentu saya dapat melanjutkan pertanyaan-pertanyaan saya ini, saudara Ketua, dengan misalnya menanyakan kepada Sdr. Natsir apakah dia kalau mengatakan dalam perjuangan kemerdekaan ini ‘setia’, ‘tulus’, ‘rela’, dll. bukan hanya ‘kata-kata saja’! Pancasila ‘mau tetap berdiri sendiri’ dan tidak mau ‘mengakarkan diri’ kata Sdr. Natsir. Pancasila bukannya mau berdiri sendiri, Pancasila mau dan sudah dan akan terus berdiri bersama-sama umat Kristen, Protestan, Hindu Bali, Nasionalis, Sosialis, Komunis, Islam, semua! Pancasila bukannya tidak mau mengakarkan diri, Pancasila mau dan sudah, dan akan terus mengakarkan diri pada rakyat, rakyat Indonesia.”

Akhirnya, Sdr. Kasman Singodimedjo yang juga berkeberatan terhadap Pancasila memuji Islam sebagai sesuatu yang—kata beliau—‘dialektis Indonesia’. Terlebih dulu saya harus mengakui bahwa saya tak mengerti

sama sekali apa yang dimaksudkan ‘dialektis’ oleh Sdr. Kasman. Sejak Herakleitos melalui Spinoza sampai ke Hegel dan Marx, dialektika itu selalu berarti hukum berpikir, metode berpikir. Kini tiba-tiba Sdr. Kasman menggunakan istilah filsafat ini dengan begitu jauh diperosotkan. Sehingga artinya seolah-olah hanyalah identik dengan perkataan ‘cocok’—‘dialektis Indonesia’, beliau katakan dengan menterengnya, sedangkan yang dimaksud hanyalah ‘cocok’ atau mungkin ‘dicocok-cocokkan’. Berbicara tentang cocok tak cocok, teringatlah saya akan pepatah Italia ‘*meterre la coda dove con va il capo*’ – masukkan dari ekornya, kalau dari kepalanya tak bisa masuk. Tentang apa yang dikatakan Sdr. Kasman ‘dialektis Indonesia’ saya hanya ingin mengingatkan, *pertama*, akan yang diterangkan Sdr. Asmara Hadi, bahwa kebajikan-kebajikan yang diuraikan golongan Islam itu tidak spesifik Islam, dan *kedua*, akan kenyataan bahwa Islam itu tidak khas Indonesia. [Njoto: *PKI dan Pantjasila*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1958, hal.26—33].

Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil menyusun UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang *Demokrasi Terpimpin*. Perdana Menteri Djuanda atas nama pemerintah mengajukan usul dalam sidang Konstituante untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 kali pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota yang terdiri dari fraksi-fraksi PNI, PKI, dan kaum nasionalis menginginkan kembali ke UUD 1945, namun ditentang oleh Masyumi dan kalangan Islam hingga terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah pemungutan suara ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga Konstituante, dan memutuskan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945.

14. Amerika dan Pemberontakan PRRI – Permesta

DENGAN gagalnya usaha kup di pusat, kegiatan reaksi berkembang menjadi gerakan separatis petualangan militer di daerah. 20 Desember 1956, Kolonel Achmad Husein mendirikan *Dewan Banteng* di Bukittinggi, Sumatera Tengah. Tanggal 10 Februari 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia

yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya 15 Februari 1958 memproklamkan berdirinya *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)* yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden. Sebelum itu, 22 Desember 1956, Kolonel Maludin Simbolon mendirikan *Dewan Gajah* di Sumatera Timur, Di Manado, Sulawesi Utara 18 Februari 1957 dengan dipelopori oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba didirikan *Dewan Manguni*. Di Sumatera Selatan oleh Kolonel Harun Sohar dibentuk *Dewan Garuda*. Dewan-Dewan yang dipimpin oleh perwira-perwira Angkatan Darat ini mengambil sikap menentang Pemerintah Pusat. *Dewan Banteng* bahkan mengeluarkan ultimatum menuntut pembubaran Pemerintah Pusat. Dengan didukung oleh dewan-dewan lainnya, akhirnya tanggal 15 Februari 1958, memproklamasikan berdirinya *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)*. Dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) duduk tokoh-tokoh Masyumi dan PSI: Sjafroeddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo.

Atas instruksi Presiden Eisenhower, pihak Amerika melakukan suatu operasi tertutup, artinya tidak diakui secara resmi, berbeda dengan operasi di Vietnam misalnya, untuk mendukung pemberontakan, dengan Dulles bersaudara, Direktur CIA, Allen Dulles, dan Menteri Luar Negeri, John Foster Dulles, bertindak sebagai operatornya. *Keputusan untuk menjatuhkan Presiden Soekarno ini telah diambil oleh Presiden Eisenhower pada tanggal 25 September 1957, lima bulan sebelum Proklamasi PRRI*" [Tim Weiner, *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.186].

Dalam arsip CIA yang berhasil didapat oleh Weiner, ada tiga poin rencana yang akan dilakukan untuk menjalankan program penggulingan Soekarno ini, yaitu:

1. Menyediakan senjata dan bantuan militer lainnya bagi para komandan militer yang anti Soekarno.
2. Memperkuat determinasi, kemauan, dan kepaduan dari perwira-perwira pemberontak Angkatan Darat di Sumatra dan Sulawesi
3. Mendukung dan mendorong, agar bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, elemen-elemen anti komunis dan non komunis di kalangan partai-partai politik di Pulau Jawa.

Bantuan persenjataan pertama dari Amerika untuk PRRI seperti peluncur roket, granat, senapan, dan amunisi yang cukup untuk mempersenjatai 8.000 tentara, tiba pada pertengahan Januari 1958 di

pelabuhan Teluk Bayur, Padang. Bantuan-bantuan lain tiba secara bergelombang ke dua basis utama pemberontakan, Sumatra dan Sulawesi Utara, memanfaatkan keberadaan fasilitas dan pangkalan militer Amerika dan Inggris yang berada di Filipina, Singapura, Malaya, dan Taiwan. Derasnya bantuan dari luar negeri, khususnya AS ini disebabkan oleh sikap konsisten anti komunis PRRI/Permesta, sebagai alasan utama pemberontakannya.

Kerja sama Amerika dengan PRRI/Permesta ini tidak hanya dengan tokoh-tokoh militernya saja, namun juga dengan tokoh-tokoh sipil anti Soekarno dan anti komunis, termasuk tokoh-tokoh politik papan atas, khususnya dari dua partai politik, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), hal mana menyebabkan kedua partai tersebut dilarang oleh pemerintah pada tahun 1960. Tokoh PSI, Dr. Soemitro Djojohadikusumo, pada tanggal 15 Januari 1958 meninggalkan Sumatra Barat menuju ke Singapura dan kemudian ke Eropa Barat, untuk menggalang dana dan bantuan-bantuan lainnya dari luar negeri, termasuk upaya mendapatkan senjata. [Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hal. 322].

Seorang pilot berkebangsaan Amerika yang merupakan seorang agen CIA, Allen Pope, ditangkap setelah pesawatnya ditembak jatuh oleh pasukan Indonesia, saat ia sedang melaksanakan sebuah misi pemboman untuk kepentingan Permesta di atas perairan Maluku, pada tanggal 18 Mei 1958. Pada hari berikutnya, Direktur CIA, Allen Dulles, mengirim telegram kepada semua personel CIA yang berada di Indonesia, Filipina, Taiwan, dan Singapura, berisi perintah agar mereka segera meninggalkan posisi, menghentikan pengiriman uang, menutup jalur pengiriman senjata, memusnahkan semua bukti dan mundur teratur. [Tim Weiner, hal.194].

Selama PRRI—Permesta berkuasa, telah dibunuh sejumlah besar kader dan anggota PKI serta organisasi-organisasi revolusioner, *SOBSI, Pemuda Rakyat, Perbum, CTN*. Terkenal dengan peristiwa pembunuhan di kamp tahanan Situjuh, Suliki, Atar, Simun, Sumatera Barat, atas perintah Achmad Husein. Antara lain, terbunuh kawan Djamhur Hamzah, Wakil Sekretaris II Komite Provinsi PKI Sumatera Barat.

Dalam pidatonya di depan parlemen, 11 Februari 1957, D.N. Aidit menyatakan, bahwa "Kejadian-kejadian di Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, adalah rentetan kejadian yang sengaja ditimbulkan oleh sebuah partai kecil yang kalah dalam pemilihan umum yang lalu yang berhasil mendalangi sebuah partai besar dan oknum-oknum liar, yang tidak melihat kemungkinan dengan jalan demokratis dapat duduk

kembali dalam kekuasaan sentral, dan yang hanya melihat dengan jalan menggunakan saluran partai-partai lain, dengan jalan mempertajam pertentangan antara partai-partai agama dengan PKI dan PNI, dengan bikin-bikinan menimbulkan kemarahan rakyat di daerah-daerah supaya memberontak terhadap pemerintah pusat, dengan jalan mengadu-domba suku satu dengan lainnya dan dengan jalan menghasut orang-orang militer supaya memberontak kepada atasannya. Kedua: kejadian-kejadian tersebut terang sejalan dan berhubungan dengan rencana kaum imperialis, yang dipelopori oleh Amerika Serikat untuk menarik Indonesia ke dalam pakta militer SEATO.... Adalah sepenuhnya sejalan dengan rencana Amerika Serikat yang diatur oleh Pentagon (Kementerian Pertahanan) dan *State Department* (Kementerian Luar Negeri) Amerika Serikat, oleh 'jenderal-jenderal' DI/TII, serta kakitangan-kakitangan Amerika Serikat yang ada di Indonesia." [D.N. Aidit, *Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948)—Peristiwa Sumatera (1956)*, PTA, Jilid II, hal.103—104].

Keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa PRRI—Permesta ditunjukkan oleh kenyataan, bahwa Menteri Pertahanan Robert McNamara memberi informasi pada Presiden Johnson, bahwa program bantuan militer terutama selama masa Soekarno telah "menyumbang secara berarti bagi Tentara yang pro Amerika dan yang berani bergerak menentang PKI, begitu ada kesempatan untuk bertindak." [*Foreign Relations of the US 1964—1968*, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia—Singapore; Philippines, *U.S. Department of State*, October 27, 1966]. Dalam karya-karya George Kahin ditunjukkan, bahwa intervensi CIA di Indonesia berakar pada Pemerintahan Eisenhower.

Kolonel Leroy Fletcher Prouty, (*January 24, 1917 – June 5, 2001*), mantan Kepala Operasi-Operasi Khusus dari Gabungan Kepala Staf dalam Pemerintahan Presiden J.F. Kennedy menulis, bahwa "pemberontakan di Indonesia yang digalakkan oleh CIA, tidaklah seperti invasi di Teluk Playa Giron, Kuba, tahun 1961, tapi adalah betul-betul satu operasi militer yang menyeluruh. Invasi di Playa Giron tahun 1961 dilakukan oleh satu pasukan kecil sekitar 1500 orang Kuba di pengasingan yang dilatih oleh CIA di Guatemala. Tetapi pemberontakan di Indonesia tahun 1958 melibatkan tidak kurang dari 42.000 pemberontak bersenjata yang didukung CIA dengan menggunakan seperangkatannya bombar dan sejumlah besar pesawat pengangkut bermesin empat ditambah lagi dengan bantuan kapal selam dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Juga melibatkan usaha bantuan pelatihan dan logistik dari pihak Filipina, Okinawa, Taiwan, dan Singapura. Tapi walaupun pakai kekuatan bersenjata yang sedemikian rupa, pemberontakan tahun 1958 seperti invasi di Playa Giron, adalah sepenuhnya gagal total.

Angkatan Darat Soekarno mengusir pemberontak di Sumatera dan Sulawesi masuk laut." [L. Fletcher Prouty, *Indonesia 1958: Nixon, the CIA, and the Secret War*, appeared in the August, 1976 issue of *Gallery* magazine].

15. Demokrasi Terpimpin

DENGAN kembali diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945, berlaku lagi sistem presidensial. Bung Karno menampilkan gagasan *Demokrasi Terpimpin*. PKI mendukung *Demokrasi Terpimpin* sebagaimana dinyatakan oleh D.N. Aidit, 24 Oktober 1958: "PKI menerima *Demokrasi Terpimpin* dengan pengertian bahwa yang diterima adalah demokrasi, dan demokrasi yang tidak liberal. Segi positif dari *Demokrasi Terpimpin* ialah, di satu pihak anti-diktator-militer dan diktator perseorangan, dan di pihak lain anti liberalisme. Anti-liberalisme di lapangan politik, tidak bisa diartikan lain kecuali pelaksanaan *Konsepsi Presiden Soekarno* 100%, yaitu pembentukan kabinet *Gotong Royong* berdasarkan perwakilan berimbang dan tanpa "dagang sapi". Anti liberalisme di lapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain kecuali anti "*free fight liberalism*" di lapangan ekonomi, dan ini berarti mengutamakan sektor negara untuk memimpin sektor partikelir. Segi-segi positif dari *Demokrasi Terpimpin* harus dikembangkan dan ditujukan untuk pelaksanaan *Konsepsi Presiden* 100%. *Demokrasi Terpimpin* dan *Konsepsi Presiden Soekarno* adalah satu kesatuan, yang pertama adalah jalan untuk mencapai yang kedua." [D.N. Aidit, *Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Yang Paling Revolusioner!*, PTA, Jilid II, cetakan kedua, hal.477—479].

Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan: pembubaran Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Untuk melaksanakan Pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur Pembentukan MPRS sebagai berikut: MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Jumlah Anggota MPRS ditetapkan oleh presiden. Yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya. Anggota tambahan MPRS diangkat oleh presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh presiden. MPRS mempunyai

seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh presiden. Jumlah anggota MPRS pada waktu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 Anggota DPR-GR, 241 Utusan Golongan Karya, dan 118 Utusan Daerah. Ciri-ciri baru dari lembaga-lembaga negara yang dibentuk menurut Peraturan Presiden ini adalah mencerminkan perwakilan dari tiga golongan masyarakat Indonesia, yaitu golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis, perwujudan dari kerja sama berporoskan Nasakom ajaran Bung Karno. Maka terbentuklah MPRS dengan Pejabat Ketua Chairul Saleh, Wakil-Wakil Ketua Ali Sastroamidjojo, Idham Chalid, D.N. Aidit, dan Kol. Puspojudjo.

16. Manifesto Politik RI (Manipol)

DALAM peringatan hari 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno berpidato dengan judul *Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik)*. Dewan Pertimbangan Agung membentuk sebuah Komisi yang diketuai D.N. Aidit untuk memerinci pidato presiden tersebut. Dalam sidang-sidangnya tanggal 23 s/d 25 September 1959, Dewan Pertimbangan Agung menyetujui hasil kerja komisi perumus, yang isinya sebagai berikut: I Preambul, II Persoalan-Persoalan Pokok Revolusi Indonesia: 1. Dasar/Tujuan dan Kewajiban Revolusi Indonesia, 2. Kekuatan-Kekuatan Sosial Revolusi Indonesia, 3. Sifat Revolusi Indonesia, 4 Musuh-Musuh Revolusi Indonesia. III Usaha-Usaha Pokok (Program Umum) A. Bidang Politik, B. Bidang Ekonomi, C. Bidang Sosial, D. Bidang Mental dan Kebudayaan, E. Bidang Keamanan, F. Pembentukan Badan-Badan Baru. G. Pelaksana. [Departemen Penerangan R.I., *Manifesto Politik Republik Indonesia, 17 Agustus 1959*, Pertjetakan Negara, Djakarta, 1959, hal.8].

Sidang pertama MPRS yang dibuka 10 November 1960, memutuskan Ketetapan MPRS tentang *Manifesto Politik Republik Indonesia* sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara". Atas dasar itu tercapailah penetapan Garis-Garis Revolusi Nasional Indonesia yang terang dan tandas untuk mencapai Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan menjadi jelaslah oleh karenanya bagi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh dunia garis-konsepsional mengenai Ideologi Nasional Indonesia untuk menuju kepada Masyarakat Adil dan Makmur, berdasarkan Pancasila atau Sosialisme Indonesia." [MPRS dan Departemen Penerangan, *Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara-Republik Indonesia*, Pertjetakan Negara, Djakarta, 1961, hal.10—11].

Dengan rumusan hasil komisi D.N. Aidit ini, *program PKI telah terintegrasi ke dalam Manipol*, ke dalam program negara. Seiring dengan itu tokoh-tokoh pimpinan PKI mulai masuk dalam pucuk pimpinan negara, duduk dalam kabinet sebagai Menteri *ex-officio* dan anggota presidium kabinet. Maka sementara peneliti menilai, bahwa sedang berlangsung proses *bertambah kuatnya "aspek pro rakyat dalam kekuasaan negara"* dan proses ini adalah realisasi *"revolusi dari atas"* dalam pelaksanaan program umum PKI. [Lembaga Sejarah PKI, *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Bab V]. Perkembangan ini jelas-jelas merisaukan kalangan anti-komunis yang didalangi Amerika Serikat.

Demikian pula pimpinan lembaga-lembaga tersebut. Hingga D.N. Aidit, MH. Lukman, Sakirman, masuk ke dalam pimpinan DPR Gotong Royong, MPRS, DPAS, dan Depernas. Dan dalam presidium kabinet yang langsung dipimpin presiden terdapat Njoto. Dalam pada itu, di daerah-daerah mulai terdapat wakil gubernur komunis, Walikota Jakarta Raya dijabat oleh Henk Ngantung, wakil-wakil ketua DPRD-DPRD, walikota atau wakil walikota komunis. Dan dalam dua kali *regrouping* kabinet yang dilakukan presiden, Wakil-Wakil Ketua MPRS dan Parlemen dijadikan Menteri *ex-officio*, Menteri tanpa portofolio. Dengan demikian, D.N. Aidit dan M.H. Lukman jadi menteri *ex-officio*. Sedangkan Njoto jadi menteri diperbantukan pada presidium kabinet. Setapak demi setapak berlangsung Nasakomisasi dalam pimpinan lembaga-lembaga negara. Tapi di lain pihak, wakil-wakil militer, terutama Angkatan Darat juga menyusup ke semua pimpinan lembaga negara.

17. Yo Sanak, Yo Kadang, Yen Mati Aku Sing Kelangan, Amerika Musuh Rakyat Paling Berbahaya

7 sampai dengan 14 September 1959 di Jakarta berlangsung Kongres Nasional VI PKI. Kongres dihadiri oleh delegasi-delegasi persahabatan Dito Ditchew dari Partai Komunis Bulgaria; Lerzy Albrecht, Partai Buruh Persatuan Polandia; Morris Hughes, Partai Komunis Australia; Ursinio Rojas, Partai Sosialis Rakyat Kuba; Pal Ilku, Partai Buruh Sosialis Hongaria; Kurt Barthels, Partai Persatuan Sosialis Jerman; Giuseppe Boffa, Partai Komunis Italia. Kongres menyimpulkan dan menarik pelajaran dari pengalaman semenjak Kongres Nasional V. Dalam Kongres ini, D.N. Aidit menyampaikan laporan umum berjudul: *Untuk Demokrasi Dan Kabinet Gotong Royong*. Resepsi penutupan kongres dihadiri Bung Karno yang

menyampaikan pidato berjudul: “*Yo sanak, yo kadang, yen mati aku sing kelangan*”.

Dalam pidatonya, Bung Karno menyatakan: “Ya, Saudara-saudara, barangkali sayalah satu-satunya presiden sesuatu negara di dunia ini, negara yang bukan dinamakan negara sosialis, yang menghadiri satu kongres partai komunis (*tepuk tangan lama*). Nah betapa tidak, Saudara-saudara! Betapa tidak hendak saya hadir, kan Saudara-saudara juga orang Indonesia, warga negara Indonesia pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, pejuang-pejuang menentang imperialisme yang membela kemerdekaan Indonesia ini (*tepuk tangan yang gemuruh*). Saudara-saudara adalah utusan-utusan daripada sebagian rakyat Indonesia, Saudara-saudara adalah sama-sama orang-orang bangsa Indonesia. Malah saya akan berkata dalam bahasa Jawa, Saudara-saudara itu “*yo kadang, yo sanak, malah yen mati aku sing kelangan*.” (*tepuk tangan gemuruh lama*).

Yah, Saudara-saudara, demikianlah keadaannya maka oleh karena itu pun saya amat bergembira sekali tatkala saya hendak datang di ruangan gedung ini, dari muka istana telah meliwati barisan, barangkali pemuda-pemuda komunis (*tepuk tangan*), semua menyerukan yel: *Gotongroyong, gotongroyong ... ho lopis kuntul baris, ho lopis kuntul baris, gotongroyong ... ho lopis kuntul baris, ho lopis kuntul baris* (*semua hadirin bersama-sama menyerukan “ho lopis kuntul baris”*). Saya amat gembira oleh karena ya, memang Saudara-saudara, jikalau kita hendak menyelesaikan revolusi nasional kita ini, tidak ada jalan lain melainkan gotong royong dan *ho lopis kuntul baris* (*tepuk tangan*).

Di belakang ada ditulis, “*Kongres Nasional VI PKI Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong Royong*.” (*tepuk tangan*). Saya dengan tegas berkata kepada Saudara-saudara, *Kabinet Gotong Royong tetap menjadi cita-cita Bung Karno!* (*tepuk tangan lama*). Sebab sebagai tadi saya katakan, menyelesaikan revolusi nasional kita, apalagi revolusi kita setelah memasuki fase sosial ekonominya untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat penderitaan rakyat, tidak ada jalan lain melainkan dengan gotong royong dan *ho lopis kuntul baris*. Maka oleh karena itu, Saudara-saudara, saya tadi berkata, tetap bercita-cita kabinet gotong royong dan di samping itu, Saudara-saudara melihat bahwa saya telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung atas dasar gotong royong, telah membentuk Depernas atas dasar gotong royong dan insya Allah, saya akan membentuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, atas dasar gotong royong pula (*tepuk tangan lama*). [Bung Karno, *Yo Sanak, Yo Kadang, Malah Yen Mati Aku Sing Kelangan*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, halaman 7—8].

Laporan D.N. Aidit menyatakan bahwa imperialisme Belanda masih tetap musuh pertama rakyat Indonesia. Di samping itu dinyatakan bahwa “*imperialisme Amerika Serikat adalah musuh rakyat Indonesia yang paling berbahaya*” berhubungan imperialisme ini adalah yang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud-maksud jahat, berhubungan dengan penanaman modalnya yang makin besar di Indonesia, berhubungan masih agak banyak orang-orang Indonesia yang berkedudukan penting tetapi naif mengira imperialisme AS tidak begitu jahat. Politik anti-imperialisme tanpa melawan infiltrasi-infiltrasi dan intrik-intrik AS adalah omong-kosong. *Imperialisme AS pada waktu sekarang adalah musuh Rakyat Indonesia yang lebih berbahaya daripada imperialisme yang mana saja*. Karena jika ia sudah masuk, maka sukarlah untuk menendangnya ke luar.” [D.N. Aidit, *Untuk Demokrasi Dan Kabinet Gotong Royong*, PTA, Jilid III, hal.94]. Ini jelas menimbulkan hal yang tak menyenangkan bagi Amerika Serikat.

Selanjutnya Aidit menyatakan, “Kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa-sisa kolonialisme Belanda, dengan teguh melawan kegiatan subversif Amerika Serikat dengan SEATO-nya, mencegah bertambahnya penanaman modal AS dan negeri-negeri imperialis lainnya, dan memperlakukan perusahaan-perusahaan AS sama dengan perusahaan-perusahaan Belanda apabila AS terus-menerus mempersenjatai gerombolan-gerombolan kontra-revolusioner atau memberikan bantuan senjata kepada Belanda dalam agresi terhadap Republik Indonesia.” [*Idem*, hal.95].

Laporan memaparkan masalah-masalah: “Indonesia masih tetap berada dalam cengkeraman krisis ekonomi; harus memperluas perdagangan dengan negeri-negeri sosialis; masalah pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial; masalah memperbaiki pekerjaan front nasional dan memencilkan lebih lanjut kekuatan kepala batu; masalah PKI mempertahankan republik proklamasi sesudah gagalnya Konstituante merumuskan Undang-Undang Dasar baru; sikap PKI terhadap kabinet Soekarno—Djuanda adalah: PKI bisa menyokong dengan syarat-syarat jika programnya maju, komposisinya dan menteri-menterinya cukup baik untuk melaksanakan program, kedua, ialah beroposisi, jika programnya reaksioner atau sekedar hanya sebagai demagogi saja, sehingga sangat tidak memenuhi tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi yang paling minimum dari rakyat.”

18. Dwi-Tunggal Rakyat dan Tentara

“MASALAH Angkatan Perang merupakan faktor yang tidak boleh dianggap kecil dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif, dalam memencilkan kekuatan kepala baru, dan dalam usaha rakyat membentuk kabinet yang maju.”

“Usaha kup yang dikendalikan kaum sosialis kanan dan kaum militeris mencoba melakukan kudeta 17 Oktober 1952, 13 Agustus 1956, dan 16 November 1956, dapat digagalkan. Kegagalan ini disebabkan tiga faktor penting: *Pertama*, Presiden Soekarno yang menyatukan diri dengan rakyat mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan angkatan bersenjata, dan Presiden Soekarno menolak menjadi diktator militeris. *Kedua*, APRI adalah anak kandung revolusi rakyat, karena itu mayoritas dari para perwira, bintara, dan tamtama APRI tidak mudah dipaksa untuk menjalankan perintah yang ditujukan untuk melikuidasi republik proklamasi dengan jalan membentuk diktator militer atau diktator perseorangan. *Ketiga*, rakyat Indonesia tidak hanya mencintai demokrasi, tetapi di bawah pimpinan partai yang waspada, rakyat aktif membela demokrasi itu. Itulah sebab-sebab pokok mengapa kudeta Masyumi—PSI dan kaum militeris yang memihak mereka menemui kegagalan.”

Laporan melanjutkan: “Pada waktu-waktu yang diperlukan, PKI dan rakyat bisa memberikan kekuasaan sampai batas-batas tertentu kepada angkatan perang yang patriotik, selama kekuasaan ini tidak disalahgunakan. Kita harus mencegah timbulnya kontradiksi yang tidak perlu atau yang tajam antara rakyat dan angkatan perang, dan hal-hal yang mungkin menuju ke arah pertajaman kontradiksi harus dihindari. Pelaksanaan garis ‘*dwi-tunggal rakyat dan tentara*’ yaitu garis ‘*rakyat bantu tentara dan tentara bantu rakyat*.’ atau ‘*saling bantu rakyat dan tentara*’ adalah jaminan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia.” Di sini terjadi kesalahan dalam menilai kualitas tentara. Dalam perkembangannya, di luar kemauan PKI, di bawah pengendalian Soeharto, tentara yang dibantu inilah yang membasmi PKI habis-habisan.

Mengenai memperkuat dan memperluas demokrasi, laporan menyatakan: “Dengan pemberontakan kontra-revolusioner PRRI—Permesta pada awal tahun 1958, tokoh-tokoh Masyumi—PSI dapat menjadi ‘Raja Sehari’ di Sumatera Barat dan Sumatera Utara, berkat bayonet orang-orang militer yang sepaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara-negara imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat.”

“Cepatnya kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses: *Pertama*, proses kesadaran rakyat Indonesia sendiri yang berdasarkan pengalamannya sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi dan ketidak-mampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan pokok dan penting dari rakyat Indonesia. *Kedua*, karena agitasi anti-parlemen, yang pada hakikatnya anti kehidupan demokratis oleh promotor-promotor junta-militer dan elemen-elemen fasis lainnya.” Menghadapi krisis demokrasi liberal “di dalam tangan rakyat Indonesia sudah ada senjata untuk mengatasinya, yaitu Konsepsi Presiden Soekarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin. Inilah jawaban rakyat Indonesia pada waktu sekarang, supaya krisis demokrasi liberal berakhir dengan kemenangan rakyat.”

“PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanya adalah demokrasi, meskipun bukan demokrasi rakyat, tetapi demokrasi yang anti-liberalisme, anti diktator-militer, dan anti diktator perseorangan. Segi positif dari Demokrasi Terpimpin ialah, di satu pihak anti-diktator militer dan anti diktator-perseorangan, dan di pihak lain anti-liberalisme. Anti liberalisme di lapangan politik, tidak bisa diartikan lain kecuali pelaksanaan Konsepsi Presiden Soekarno 100%, yaitu pembentukan Kabinet Gotong Royong berdasarkan perwakilan berimbang di antara partai-partai dan golongan pendukung konsepsi presiden.”

Laporan memaparkan sikap PKI di bidang internasional, yaitu “*untuk memperkuat front internasional anti-kolonial dan cinta damai*.” Diblejeti politik luar negeri Hatta dan Sjahrir yang menggantungkan diri pada imperialisme. Menurut Hatta: “berhubung dengan letak tanah air kita di tengah-tengah perhubungan internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negara-negara besar kapitalis, adalah suatu politik yang bijaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita.” “Kata-kata ini diucapkan oleh Hatta justru pada saat semangat anti-imperialisme dari rakyat sedang meluap-luap dan ketika AS lewat penasihat-penasihatnya secara langsung mencampuri persoalan dalam negeri Republik Indonesia untuk mengadakan pengejaran terhadap kaum komunis.” “Sesungguhnya tradisi politik luar negeri Republik Indonesia semenjak berdirinya adalah berdasar hubungan dan kerja sama persahabatan dengan Timur, walaupun Sutan Sjahrir merintangi ini. Pembelaan pertama terhadap RI oleh wakil Sovyet Ukraina dalam PBB, D. Manuilsky, adalah salah satu sendi penting yang telah diletakkan untuk menegakkan kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Ini diperkuat lagi oleh berhasilnya perlawanan rakyat terhadap politik pro-Barat Sjahrir dengan diadakannya hubungan

diplomasi pertama dengan Republik Ceko-Slowakia waktu itu dalam tahun 1947 dan kemudian hubungan konsuler dengan Uni Soviet dalam bulan Mei 1948. Negara-negara sosialis adalah pembela-pembela dan penyokong-penyokong setia yang sejak tahun-tahun pertama revolusi sudah membela Republik Indonesia.” Semua persetujuan ini tidak diratifikasi, bahkan dianulir oleh Pemerintah Hatta; dan Suripno yang bertugas duta mewakili RI dalam merundingkan persetujuan-persetujuan ini dipanggil pulang.

Laporan juga memaparkan masalah *pembangunan partai*, tentang perkembangan partai antara Kongres Nasional V dan VI. Dicatat, bahwa ketika Kongres Nasional V tercatat anggota berjumlah 49.042 dan calon anggota 116.164 orang, kini berjumlah lebih dari 1.500.000. Ketika Konferensi Nasional Partai awal tahun 1952 tercatat jumlah anggota 7.910. Konferensi ini memutuskan meluaskan keanggotaan menjadi 100.000 dalam 6 bulan. Ketika akhir tahun 1952 diperiksa hasil peluasan, maka tercatat 126.671 anggota dan calon anggota. Pada waktu Kongres Nasional V Partai, yaitu bulan Maret 1954, tercatat anggota dan calon anggota 165.206. Pada pertengahan 1959 sudah tercatat lebih dari 1.500.000 anggota dan calon anggota di mana terdapat kira-kira 250.000 wanita atau 17% wanita. Penyebaran partai secara merata dan intensif lebih didorong lagi dengan dilaksanakannya *Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi dan Pendidikan* yang diputuskan oleh Sidang Pleno IV CC dalam bulan Juli 1956.

19. Pentingnya Pendidikan Marxisme-Leninisme

LAPORAN menyatakan, “pendidikan Marxisme-Leninisme syarat mutlak untuk persatuan di dalam partai. Garis umum pembangunan partai yang ditetapkan oleh Kongres Nasional V Partai, yaitu *‘meneruskan pembangunan PKI yang dibolsyewikkan, yang meluas di seluruh negeri, yang mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik, dan organisasi’* pada pokoknya sudah kita kerjakan dengan baik. Penyempurnaan pelaksanaan garis pembangunan partai masih harus kita teruskan.” Tepat sekali kesimpulan yang pernah diambil oleh partai kita yaitu, bahwa ‘Persatuan di dalam partai hanya mungkin jika didasarkan atas persatuan pikiran, persatuan ideologi, yaitu pikiran atau ideologi Marxisme-Leninisme. Hanya jika ada persatuan pikiran dari orang-orang komunis, barulah ada persatuan yang sungguh-sungguh di dalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan di dalam aksi-aksi rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis.” Ditegaskan lagi bahwa, “salah satu tugas terpenting

sekarang, ialah meneruskan pembangunan partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi.” Selanjutnya dikemukakan, bahwa “di dalam partai harus dibangun keberanian melakukan kritik, terutama kritik dari bawah kepada atasan, dengan berpegang pada pedoman yang dikemukakan oleh Kawan Mao Zedong yaitu *‘bertitik pangkal pada kemauan bersatu, dan melalui kritik dan self-kritik, mencapai persatuan baru atas dasar yang baru.’* Dengan setia mengamalkan kritik dan self-kritik berarti kita memerangi subjektivisme dan dengan demikian kemungkinan membikin kesalahan menjadi diperkecil serta persatuan di dalam partai lebih diperkuat.”

Kongres ditutup dengan satu resepsi meriah, yang dihadiri sejumlah menteri dan para pejabat tinggi negara, di mana Bung Karno menyampaikan sambutannya dengan pidato berjudul “*Yo sanak, yo kadang, yen mati aku sing kelangan!*” Dalam pidatonya, antara lain Bung Karno berkata: “Ya, saudara-saudara barangkali sayalah satu-satunya Presiden sesuatu negara di dunia ini, negara yang bukan dinamakan negara sosialis, yang menghadiri satu Kongres Partai Komunis ... (*tepuk tangan lama*). Nah, betapa tidak saudara-saudara! Betapa tidak hendak saya hadir, kan udara-saudara juga orang Indonesia, warganegara Indonesia, pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia, pejuang menentang imperialisme yang membela kemerdekaan Indonesia ini. (*tepuk tangan yang gemuruh*) Saudara-saudara adalah utusan-utusan daripada sokoguru Rakyat Indonesia, saudara-saudara adalah sama-sama orang bangsa Indonesia. Malah saya akan berkata dalam bahasa Jawa, saudara-saudara itu *‘yo kadang, yo sanak, malah yen mati aku sing kelangan’* (*tepuk tangan gemuruh lama*). [Bung Karno ... *yo sanak, yo kadang, malah yen mati aku sing kelangan*, Jajasan Pembaruan, Jakarta 1959, halaman 7]

Yah saudara-saudara, demikianlah keadaannya, maka oleh karena itupun saya amat bergembira sekali tatkala saya hendak datang di ruangan gedung ini, dari muka istana telah meliwati barisan, barangkali pemuda-pemuda Komunis (*tepuk tangan*), semua menyerukan yel: *Gotongroyong, gotongroyongho lopis kuntul baris, ho lopis kuntul baris, gotongroyong ho lopis kuntul baris, ho lopis kuntul baris (semua hadirin bersama-sama menyerukan “ho lopis kuntul baris”)*. Saya amat gembira oleh karena ya, memang saudara-saudara, jikalau kita hendak menyelesaikan revolusi nasional kita ini, tidak ada jalan lain melainkan gotongroyong dan ho lopis kuntul baris (*tepuk tangan*).

Di belakang ada ditulis, “Kongres Nasional ke-VI PKI Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotongroyong” (*tepuk tangan*). Saya dengan tegas berkata kepada saudara-saudara, Kabinet Gotongroyong tetap menjadi cita-cita Bung Karno! (*tepuk tangan lama*). Sebab sebagai tadi saya katakan, menyelesaikan revolusi nasional kita, apalagi revolusi kita setelah memasuki fase sosial ekonominya untuk menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur sebagai amanat penderitaan Rakyat tidak ada jalan lain melainkan dengan gotongroyong dan ho lopis kuntul baris. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, saya tadi berkata, tetap bercita-cita Kabinet Gotongroyong dan di samping itu, saudara-saudara melihat bahwa saya telah membentuk Dewan Pertimbangan Agung atas dasar gotongroyong, telah membentuk Depernas atas dasar gotongroyong dan insya Allah, saya akan membentuk MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atas dasar Gotong Royong pula (*tepuk tangan lama*). [Bung Karno, *yo sanak, yo kadang, malah yen mati aku sing kelangan*, Jajasan Pembaruan, Djakarta 1959, halaman 7-8]

Pedato Presiden yang sangat bersahabat dengan PKI memberi pengaruh baik bagi meningkatnya martabat PKI. Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang didukung oleh PKI memainkan peranan penting dalam mendorong maju situasi politik di Indonesia..

Dengan dijadikannya Manipol Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka terjadilah pengintegrasian program PKI ke dalam program negara. Ini terjadi berkat hasil kerja D.N. Aidit sebagai Ketua Panitia perincian Manipol. Program PKI untuk penyelesaian tuntutan-tuntutan revolusi Agustus sampai keakar-akarnya, telah berintegrasi dengan Manipol, program negara. Langkah-langkah Bung Karno melakukan dua kali regrouping kabinet menghasilkan kian berkurangnya kekuatan kepala batu dalam kabinet, dan masuknya Ketua dan wakil-wakil Ketua CC PKI ke dalam kabinet, yaitu sebagai wakil-wakil Ketua MPRS dan Parlemen, D.N. Aidit dan M.H. Lukman menjadi Menteri ex-officio, Menteri tanpa portofolio, dan Njoto menjadi Menteri anggota Presidium Kabinet. Perkembangan PKI yang sampai tokoh-tokoh pimpinan bisa masuk Pemerintah Pusat Indonesia adalah menghantui Amerika Serikat. Para penguasa Amerika Serikat sudah membayangkan bahwa di bawah kekuasaan Sukarno, Indonesia segera jatuh ke dalam pelukan kekuasaan komunis.

Desember 1960 berlangsung Sidang Pleno ke-II CC ke-VI PKI di Jakarta. Dalam sidang ini, D.N. Aidit menyampaikan laporan berjudul *Maju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!* Laporan menunjukkan bahwa “periode yang ditinjau ditandai oleh pergulatan antara golongan yang

mendukung dan golongan yang menolak Manipol. Golongan yang menolak dan menentang pelaksanaan Manipol tadinya dipelopori oleh Masyumi-PSI dan ‘Liga Demokrasi’. Sesuai dengan kehendak Rakyat terbanyak partai-partai kepala batu Masyumi-PSI telah dibubarkan oleh Presiden Sukarno. Bubarnya partai-partai yang paling kanan ini merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan nasional kita” [D.N. Aidit, *Maju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1961, hal. 3-4]

Laporan menyatakan, bahwa “Sidang Pleno CC kali ini dilangsungkan dengan dijiwai oleh dua kemenangan besar, kemenangan nasional dan kemenangan internasional. *Kemenangan pertama* ialah kemenangan Rakyat Indonesia berhubung telah ditetapkannya dengan suara bulat oleh MPRS Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. *Kemenangan kedua*, ialah kemenangan gerakan komunis sedunia dengan adanya Pernyataan para wakil Partai Komunis dan Buruh beserta seruannya kepada Rakyat-Rakyat di seluruh dunia yang dengan suara bulat dikumandangkan oleh 81 Partai Komunis dan Buruh, mewakili 36 juta Komunis dari 5 benua dalam bulan November yang baru lalu” [Idem, hal. 6-7]

Laporan menyatakan, bahwa PKI berpendapat bahwa Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional menurut ketetapan nomor II MPRS sampai batas-batas tertentu sesuai dengan watak revolusi Indonesia yang nasional dan demokratis yang anti imperialisme dan anti feodalisme, yaitu tidak mementingkan investasi modal asing, mementingkan ‘landreform’ dan pertanian, mementingkan industrialisasi dan industri berat, dan menempatkan ekonomi sektor negara pada kedudukan memimpin perekonomian negeri.

Maka tak ayal lagi kekuatan reaksi menggalakkan rekayasa demi pembasmian komunis di Indonesia dan penggulingan Presiden Sukarno. Kekuatan reaksi menggerakkan berbagai usaha untuk mengisolasi PKI. Salah satu di antaranya menggunakan Pancasila, yaitu berusaha memfitnah PKI anti Pancasila. Dalam rangka menciptakan syarat untuk melarang PKI, awal 1961, T.B. Simatupang menulis sebuah makalah tentang *TNI dan Masa depan Indonesia*, yang memaparkan argumentasi bahwa “Marxisme-Leninisme adalah bertentangan dengan Pancasila.” Dalam makalahnya ini Simatupang sudah menggunakan istilah “*zaman post-Sukarno*” [H. Rosihan Anwar, *Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan sebelum Prahalah Politik 1961-1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006]. Ini berarti, sudah diperhitungkan digantinya Sukarno sebagai Presiden. Dalam pada itu, Pemerintah telah

mengeluarkan Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960, yang menetapkan, bahwa Pemerintah hanya mengakui Partai-Partai yang dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan tujuannya tidak untuk mengganti dasar negara. Partai-Partai diminta menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya dengan Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960. Pemerintah membentuk Panitia Tiga yang terdiri dari Roeslan Abdoelgani, Ketua DPA, A.H. Nasution Menteri Pertahanan dan Ipi Gandamana, Menteri Dalam Negeri, untuk menyeleksi Partai-Partai sehubungan dengan Penpres dan Perpres ini.

5 September 1960 Politbiro CC PKI mengeluarkan statement yang menyatakan bahwa untuk memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959, Pasal 3, bagi PKI tidaklah mempunyai keberatan apa-apa untuk menyatakan dengan tegas, bahwa PKI menerima dan mempertahankan UUD '45 dan 'Pancasila'. Dalam sidang Pleno ke-II CC PKI akhir Desember 1960, Politbiro CC mengusulkan agar mengamendir Konstitusi Partai dengan menambahkan rumusan berikut: *"PKI menerima dan mempertahankan UUD '45, yaitu Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang dalam Pembukaannya memuat hasrat Rakyat Indonesia untuk hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan memuat Pancasila sebagai dasar-dasar negara; bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian Bangsa Indonesia, dan mendasarkan program kerjanya pada Manifesto Politik Republik Indonesia serta perinciannya yang sudah ditetapkan oleh Sidang Pertama MPRS tanggal 19 November 1960 sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia"*. [Njono, Pengantar diskusi untuk memperkuat statement Politbiro CC PKI mengenai Pen.Pres.No.7/1959, Jajasan Pembaruan, 1961, dokumen Sidang Pleno ke-II CC ke-VI PKI, hal. 29-30]. Usul ini diterima dan menjadi keputusan sidang.

25-30 April 1962 di Jakarta berlangsung Kongres Nasional ke-VII PKI. Dalam laporan politiknya, D.N. Aidit menyampaikan bahwa "Menurut Keputusan Presiden RI No. 123/1961, PKI telah mendapat pengakuan sebagai Partai yang memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam peraturan-peraturan tersebut" [D.N. Aidit, *Untuk Demokrasi, Persatuan Dan Mobilisasi*, Laporan Umum kepada Kongres Nasional ke-VII PKI, 25 April 1962, Depagitprop CC PKI, Jakarta 1962, hal. 5].

Dalam Kongres ini D.N. Aidit menyampaikan laporan politik berjudul *"Untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi"*. Kongres ini adalah Kongres Luarbiasa, yang diadakan berhubung dengan keharusan penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Program PKI dengan ketentuan-ketentuan Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960. Kongres

mengesahkan Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga (Konstitusi) yang dalam Preambulnya antara lain memuat: "Seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori Marxisme-Leninisme dan karena Marxisme-Leninisme bukanlah dogma, melainkan suatu pedoman untuk aksi, maka dalam setiap aktivitasnya PKI berpegang teguh pada prinsip memadukan kebenaran umum Marxisme-Leninisme dengan praktek yang kongkrit daripada perjuangan revolusioner Indonesia. PKI berjuang melawan revisionisme, baik yang lama maupun yang modern, juga melawan tiap fikiran yang tidak kritis, melawan dogmatisme dan empirisme..... Karena PKI telah mengambil bagian yang sangat aktif dalam Revolusi Agustus 1945 dan terus akan mengambil bagian yang sangat aktif dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus sampai ke-akar-akarnya, maka azas dan tujuan PKI tidak bertentangan dengan azas dan tujuan negara Republik Indonesia dan programnya tidak dimaksud untuk merombak azas dan tujuan negara tersebut. PKI menerima dan mempertahankan UUD 1945 yang dalam Pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar-dasar negara dan bertujuan membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut kepribadian bangsa Indonesia. PKI mendasarkan program kerjanya atas Manifesto Politik RI dan perinciannya yang sudah ditetapkan oleh Sidang Pertama MPRS sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara RI. PKI dalam memperjuangkan tujuannya menggunakan jalan-jalan damai dan demokratis. Ini adalah yang dikehendaki dan diperjuangkan dengan sekuat tenaga oleh PKI". [CC PKI, *AD-ART (KONSTITUSI) PKI*, Jakarta, 1962, hal. 5-17]. Dengan rumusan tersebut di atas PKI memenuhi syarat yang dituntut oleh Penpres No. 7/1959 dan Perpres No. 13/1960, maka PKI diakui sebagai Partai yang sah.

Dalam laporan ini D.N. Aidit mengemukakan: "Badan-badan kenegaraan seperti DPA, DPR GR, DEPERNAS, MPRS dan berbagai DPRD dan Pemerintah Daerah, serta belakangan ini penggolongan-kembali atau regrouping (regrouping) Kabinet Kerja dan dibentuknya Musyawarah Pimpinan Negara (MPN) memang semuanya ini merupakan usaha-usaha untuk mengadakan *pengubahan demokratis dalam sistim politik* sesuai dengan tuntutan-tuntutan massa Rakyat. Tetapi semuanya ini adalah usaha yang masih harus dilanjutkan, karena pemerintahan dan alat-alat negara tidak mengalami perubahan-perubahan yang besar seperti yang diinginkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno, Manipol, Djarek, Amanat Pembangunan Presiden dan Resopim. Resopim tegas menghendaki adanya retuling alat-alat negara". Dengan demikian, tetap tidak ada jaminan bahwa Plan Pembangunan 8 Tahun, Triprogram Kabinet dan Trikomando Rakyat tidak akan menjumpai rintangan-rintangan serius dari dalam dan luar aparat

negara, tetap tidak akan ada tindakan tegas dan tepat terhadap imperialisme dan feodalisme, terhadap mereka yang menyeleweng dan mensabot pelaksanaan Ketetapan-Ketetapan MPRS, Triprogram dan Trikomando Rakyat” [D.N. Aidit, *Untuk Demokrasi, Persatuan dan Mobilisasi*, hal. 13]

20. Bung Karno: “Go Ahead!”

KONGRES ditutup dengan sebuah resepsi meriah. Bung Karno menyampaikan pedato sambutan dalam resepsi ini. Dalam pedatonya, Bung Karno menyatakan: “Maka benar ucapan Lenin, revolusioner adalah tiap-tiap orang yang di dalam nationale revolutie menentang kepada imperialisme, tiap-tiap orang yang menghendaki pembebasan nasional daripada sesuatu bangsa, pendek kata, sesuatu manusia yang menghendaki kemerdekaan bangsa, kemerdekaan umat manusia, dia adalah revolusioner. Nah, di dalam analisa yang demikian ini, saya kira, wah payah bagi saya untuk mengatakan bahwa PKI bukan revolusioner. Ya, ada yang bilang, o, PKI itu sebetulnya ‘mau mengacau’. PKI itu sebetulnya, ya, kalau dipikir-pikir sedalam-dalamnya, PKI itu ‘kontra revolusioner’ sebab mengacau perjuangan kita untuk membebaskan Irian Barat’, katanya.

Tidak, tidak. Saya melihat bahwa di dalam perjuangan membebaskan Irian Barat, bahwa di dalam perjuangan menegakkan Republik, di dalam perjuangan untuk mempertahankan Republik, kaum komunis memegang rol yang sangat menguntungkan kepada perjuangan itu.” Selanjutnya Bung Karno menyatakan: “Saya dengan tegas berkata, adanya PKI berkembang biak dari 150.000 orang menjadi 2 juta orang bukan kok saya, karena saya bombong, bukan kok karena suatu ucapan ‘komunis itu, orang komunis Indonesia itu yo kadangk, yo sanakku’. Bukan, PKI menjadi besar, PKI menjadi ndodro di mana-mana, PKI menjadi kuat, yalah oleh karena PKI konsekwen memihak kaum buruh dan kaum tani (*tepek tangan lama*). Karena PKI konsekwen memperjuangkan nasib si jembel, konsekwen hendak memberi kehidupan yang layak kepada Rakyat jelata, konsekwen menentang imperialisme, konsekwen hendak mengibarkan bendera sang Merah Putih di seluruh wilayah tanah air Indonesia, oleh karena itulah PKI menjadi besar (*tepek tangan lama*). Dalam menutup pedatonya, Bung karena menyatakan “Maka oleh karena itulah, maka dengan barisan seluruh Rakyat Indonesia yang berporos *Nas-A-Kom* saya minta sekali lagi pada segenap Rakyat jangan lepaskan tujuan akhir yang ini dari pandangan mata kita. Bahtera yang dikatakan oleh Saudara Aidit, kapal kencana, kata Saudara

Aidit, ya Saudara Aidit memakai perkataan ini, kapal kencana (sambil tertawa), untuk menuju tujuan itu yalah bernama negara Republik Indonesia yang memakai wadah bukan saja Pancasila dan Nasakom dan Manipol tetapi tujuannya oleh Saudara Aidit tadi pula Sosialisme Indonesia itu memang dari tadinya sudah menjadi cita-cita dari Partai Komunis Indonesia..... Maka saya saudara-saudara, menyambut penutupan Kongres ke-VII dari PKI dengan ucapan *Go Ahead!*, *jalan terus*, mari kita bersama-sama menyelesaikan revolusi Indonesia ini.” [Presiden Ir. Dr. Sukarno, *Go Ahead!* Jajasan Pembaruan Djakarta, 1965]

21. Imperialisme Amerika Musuh Nomor Satu Rakyat Indonesia

KEKUATAN anti-komunis kian aktif bergerak menciptakan syarat untuk pelarangan PKI. PKI bukannya mundur, tapi kian berkobar-kobar menggerakkan rakyat melawan imperialisme AS, menuju pembentukan Kabinet Gotong Royong. Sidang Pleno I CC berlangsung 10 Februari 1963, dengan laporan politik D.N. Aidit berjudul: *Berani, Berani, Sekali Lagi Berani*. Putusan sidang merumuskan *imperialisme AS adalah musuh nomor satu dan paling berbahaya dari rakyat Indonesia*. Satu kesimpulan yang membikin Amerika Serikat naik pitam.

Di samping itu, sidang memutuskan menetapkan Tri Tugas Praktis Partai, yaitu:

1. mengonsolidasi kemenangan-kemenangan,
2. menanggulangi kesulitan-kesulitan ekonomi,
3. melawan neo-kolonialisme.

[D.N. Aidit, *Berani, Berani, Sekali Lagi Berani!*, Laporan Politik kepada sidang pleno I CC VII, 10 Februari 1963, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1963, hal.28]

Perkembangan PKI sudah menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kanan. Diperhitungkan, kalau berlangsung pemilihan umum, PKI akan mencapai kemenangan besar, bahkan kedudukan presiden bisa direbut oleh wakil PKI. Maka untuk mencegah terjadinya hal ini, pihak Angkatan Darat mengusulkan penundaan pemilihan umum. Dan A.H. Nasution mengajukan gagasan presiden seumur hidup, agar wakil PKI tidak bisa merebut kedudukan ini. Gagasan ini diajukannya pada Suwirjo, Ketua PNI. Suwirjo mendukung gagasan ini. Maka diusulkan Bung Karno jadi presiden

seumur hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1963. [Baca: Y.T.Taher, *MASHI (Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia)*]

Tanggal 26 Mei 1963, berlangsung rapat umum memperingati Hari Ulang Tahun ke-43 PKI di Istana Olah Raga Gelora Bung Karno. Dalam rapat umum ini, D.N. Aidit berpidato dengan judul *Hayo, Ringkus dan Ganyang Kontra-Revolusi!* [D.N. Aidit, *Hayo, Ringkus dan Ganyang Kontra-Revolusi!*, Pidato Ulang ke-43 PKI di Istana Olah Raga Gelora Bung Karno, 26 Mei 1963, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1963]. Dalam pidato ini dipaparkan: bahwa meningkatnya martabat PKI secara nasional dan internasional menyebabkan kawan dan lawan “*mempelajari PKI*”. Dicatat bahwa pengembalian Irian Barat ke dalam kekuasaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 merupakan peristiwa penting, satu kemenangan dalam perjuangan mengkonsolidasi seluruh wilayah Republik Indonesia. Kemenangan lain yang telah kita capai sebagai hasil kerja sama rakyat dan angkatan bersenjata ialah pemulihan keamanan dalam negeri, dan sejak tanggal 1 Mei 1963, SOB telah dihapuskan di seluruh Indonesia, termasuk Peperti serta Peperda, menurut ketentuan semua kekuasaan pemerintah di pusat dan di daerah-daerah sudah harus diserahkan kembali kepada Pemerintahan Sipil. [*Idem*, hal.6].

22. Teori “Dua Aspek Kekuasaan Negara” dan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP)

DALAM pidatonya ini, Aidit mengemukakan teori *dua aspek kekuasaan negara*, yaitu terdapatnya kekuatan pro-rakyat dan kekuatan anti-rakyat dalam kekuasaan negara. Dikemukakan bahwa “kekuasaan negara Republik Indonesia sekarang ini masih terdiri dari dua segi. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas revolusi sekarang, segi yang mewakili kepentingan-kepentingan rakyat harus dapat mengungguli dan mendesak keluar mereka yang mewakili kepentingan-kepentingan musuh-musuh rakyat di dalam kekuasaan negara.” [*Idem*, hal.17]. “Kaum komunis Indonesia akan terus bekerja keras untuk mengkonsolidasi dan memperkokoh segi rakyat dalam kekuasaan negara, dengan setia kepada azas *revolusi dari atas dan dari bawah*, sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato Djarek.” [*Idem*, hal.17].

‘Teori Dua Aspek’ jelas merupakan penyelewengan oportunisme atau revisionisme, karena mengingkari ajaran Marxisme—Leninisme bahwa ‘negara adalah suatu alat kekuasaan kelas tertentu yang tidak dapat didamaikan dengan anti-podenya (kelas yang berlawanan dengannya).’

Tidak mungkin RI dikuasai bersama oleh rakyat dan musuh rakyat [Politbiro CC PKI, *Tegakkan PKI yang Marxis—Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia*, Otokritik Politbiro CC PKI September 1966, Diterbitkan oleh Delegasi CC PKI, September 1971, hal.136].

“Pimpinan partai telah menggunakan teori tentang kontradiksi dalam kekuasaan negara secara subjektif. Kecuali itu dengan menganggap kedudukan borjuasi nasional sebagai segi rakyat dalam kekuasaan negara RI dan Presiden Soekarno sebagai pemimpinnya, berarti menganggap bahwa borjuasi nasional mampu memimpin revolusi borjuis demokratis tipe baru. Ini bertentangan dengan kenyataan sejarah.

Pimpinan PKI mengatakan bahwa ‘*teori dua aspek*’ sama sekali tidak sama dengan ‘*teori perubahan struktur*’ dari pemimpin-pemimpin Partai Komunis Italia yang revisionis itu. Tetapi baik secara teori maupun berdasarkan kenyataan praktik tidak ada perbedaan antara kedua ‘teori’ itu. Kedua-duanya bertolak dari jalan damai mencapai sosialisme, kedua-duanya mengkhayalkan perubahan secara berangsur-angsur perimbangan intern dan susunan negara; kedua-duanya sama-sama revisionis.

‘Teori dua aspek’ yang anti-revolusi itu jelas dinyatakan dalam keterangan bahwa ‘Perjuangan PKI mengenai kekuasaan negara ialah mendorong supaya aspek pro-rakyat makin besar dan bisa berdominasi, sedangkan kekuatan-kekuatan yang anti-rakyat dikeluarkan dari kekuasaan negara.’ [*Idem*, hal.142—144].

“Oleh pimpinan partai, jalan yang anti-revolusi itu bahkan dinamakan jalan ‘*revolusi dari atas dan dari bawah*’. Dari atas berarti bahwa PKI harus mendorong kekuasaan negara untuk melakukan tindakan-tindakan revolusioner guna mengadakan perubahan-perubahan dalam personalia dan aparatur negara. Sedangkan dari bawah berarti membangkitkan, mengorganisasi, dan memobilisasi rakyat untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut. Sungguh suatu fantasi yang luar biasa! Pimpinan partai tidak belajar dari kenyataan bahwa Konsepsi Presiden Soekarno tentang pembentukan Kabinet Gotong-Royong (Pemerintah Koalisi Nasional tipe lama) sudah delapan tahun sejak diumumkan, belum pernah dan tidak ada tanda-tanda akan dilaksanakan, walaupun terus dituntut. Apalagi perubahan kekuasaan negara!

Lenin memang pernah menunjukkan terbukanya kemungkinan ‘*aksi dari atas*’, yaitu ketika terdapat kemungkinan mengambil bagian dalam pemerintah revolusioner sementara menjelang revolusi Rusia tahun 1905. Ketika itu adalah periode dari pergolakan-pergolakan politik dan revolusi-revolusi telah mulai. Apabila tidak mungkin bertindak dari atas, menurut

Lenin harus dilakukan tekanan dari bawah, dan untuk itu proletariat harus dipersenjatai.

Jelaslah betapa bedanya situasi dan syarat-syarat yang diajukan Lenin tentang terbukanya kemungkinan *'aksi dari atas'* dan syarat-syarat *'aksi dari bawah'*. Yang satu diajukan dalam situasi revolusioner, yang lain diajukan bukan hanya dalam situasi relatif damai, tetapi juga secara oportunis.

'Teori dua aspek' adalah sama dengan pemutarbalikan Kautsky terhadap Marxisme tentang negara. Kautsky secara teori tidak menyangkal bahwa negara adalah alat kekuasaan kelas. Yang dikaburkan atau dihilangkan oleh Kautsky ialah *'bahwa pembebasan kelas tertindas tidaklah mungkin bukan hanya tanpa revolusi yang keras, tetapi juga tanpa penghancuran aparat kekuasaan negara yang diciptakan oleh kelas yang berkuasa....'*

Untuk membersihkan diri dari lumpur oportunisme, partai kita harus membuang *'teori dua aspek dalam kekuasaan negara'* dan menegakkan kembali ajaran-ajaran Marxisme—Leninisme tentang negara dan revolusi." [Idem, hal.144—146]

September 1963, Aidit berkunjung ke Tiongkok dan berpidato di depan Sekolah Sentral PKT. Dalam pidatonya memperkenalkan PKI dan Soal-Soal Pokok Revolusi Indonesia antara lain dikemukakannya: "Untuk dapat memimpin perkembangan politik, PKI menjalankan garis umum meneruskan penggalangan front nasional dan meneruskan pembangunan partai.

Berdasarkan garis umum ini, kaum komunis Indonesia mengibarkan Tripanji Partai untuk menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya, yaitu:

- 1) Panji Front Nasional,
- 2) Panji Pembangunan Partai,
- 3) Panji Revolusi Agustus 1945."

"Mengibarkan panji Revolusi Agustus 1945 tinggi-tinggi berarti menarik sebanyak mungkin rakyat Indonesia berkeliling di sekitarnya dan berjuang untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus sampai ke akar-akarnya, yaitu hapusnya imperialisme dan feodalisme di Indonesia. Panji Revolusi Agustus memakutkan arti penting daripada menggunakan pengalaman-pengalaman perjuangan selama Revolusi Agustus 1945. Pengalaman Revolusi Agustus 1945 memberi pelajaran-pelajaran bahwa untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, adalah sangat penting rol daripada peperangan gerilya. Tapi peperangan gerilya ketika itu akan lebih berhasil dan mencapai kemenangan, jika kita melakukan MKTBP (*Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan*), ialah perjuangan gerilya di desa-desa,

aksi-aksi revolusioner di kota-kota oleh kaum buruh, terutama buruh transportasi, dan bekerja baik dan intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh." [D.N. Aidit, *Revolusi Indonesia dan Tugas-Tugas Mendesak PKI*, Ceramah Ketua PKI D.N. Aidit di Sekolah Tinggi Partai dari CC PKT, 2 September 1963, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1964, hal.37].

"Pimpinan partai mengemukakan bahwa 'Partai tidak boleh menjiplak teori perjuangan bersenjata di luar negeri, tetapi harus menjalankan Metode Kombinasi Tiga Bentuk Perjuangan (MKTBP), yaitu *perjuangan gerilya di desa (terutama terdiri dari buruh buruh tani dan tani miskin); aksi-aksi revolusioner oleh kaum buruh (terutama buruh transportasi) di kota-kota; dan pekerjaan intensif di kalangan kekuatan bersenjata musuh.*" "Pimpinan Partai mengkritik sementara kawan, karena dianggapnya dalam belajar dari pengalaman perjuangan bersenjata rakyat Tiongkok hanya melihat persamaan-persamaannya. Sebaliknya pimpinan partai mengemukakan perbedaan-perbedaan syarat yang harus diperhitungkan, sehingga kesimpulannya ialah bahwa metode yang khas bagi revolusi Indonesia adalah 'MKTBP'.

Menggunakan pengalaman negeri-negeri lain secara dogmatis adalah salah. Tetapi menolak menggunakan pengalaman negeri lain yang telah teruji kebenarannya sebagai salah satu teori revolusi rakyat adalah juga salah. Lenin mengajarkan bahwa *"suatu gerakan yang mulai di sebuah negeri yang muda dapat berhasil baik hanya jika ia mengolah pengalaman negeri-negeri lain secara kritis dan mengujinya secara bebas."*

Kenyataan membuktikan bahwa *"teori MKTBP"* bukan hasil pengalaman secara kritis dari negeri lain yang dipadu dengan praktik konkret Indonesia, sehingga merupakan salah satu teori revolusi yang khas Indonesia; ia bukan metode yang khas Indonesia. Revolusi Rusia tahun 1905 seperti diterangkan oleh Lenin dalam *Kuliah Tentang Revolusi 1905*: adalah merupakan kombinasi daripada pemogokan-pemogokan kaum buruh, perjuangan anti-feodal kaum tani di desa-desa dan pemberontakan tentara dengan pemogokan buruh sebagai pelopornya. Revolusi Tiongkok juga mengombinasikan perang agraria revolusioner, pekerjaan di desa-desa dan kota-kota yang diduduki oleh musuh, dan pekerjaan dalam kekuatan bersenjata musuh dengan perang agraria revolusioner sebagai bentuk pokoknya."

"Tiga bentuk perjuangan yang harus dikombinasi, masing-masing dipimpin bukan menuruti jalan revolusi, tetapi menuruti "jalan damai". Perjuangan kaum tani untuk melawan penghisapan dan penindasan sisa-sisa feodalisme, apabila mendapat pimpinan yang tepat tidak bisa tidak pasti berkembang ke arah bentuknya yang tertinggi yaitu revolusi agraria untuk membebaskan kaum tani dari penindasan tuan tanah. Perjuangan ini hanya

mungkin mencapai kemenangan sempurna apabila dilakukan dengan bersenjata di bawah pimpinan PKI. Tetapi pimpinan partai tidak memusatkan pimpinannya ke arah perkembangan perjuangan tani yang semakin tinggi dan mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi.” [Politbiro CC PKI, *Tegakkan PKI yang Marxis—Leninis*, hal.124—125].

Berpangkal pada pendirian yang salah bahwa ‘*Angkatan Bersenjata RI bukanlah angkatan bersenjata yang reaksioner*’ maka soal ‘bekerja di kalangan kekuatan bersenjata musuh’ diartikan sebagai ‘mengintegrasikan alat-alat negara yang penting dengan rakyat’ atau ‘mengeratkan hubungan dwitunggal rakyat dan angkatan bersenjata’. Ini berarti mengintegrasikan alat kekerasan kelas-kelas penindas dengan kelas-kelas tertindas. Kesalahan demikian terjadi karena pimpinan partai mengingkari ajaran Marxisme—Leninisme tentang negara, memandang RI bukan negara borjuis dan Angkatan Bersenjata RI bukan alat negara borjuis. Pimpinan partai melupakan kenyataan bahwa Angkatan Bersenjata RI secara keseluruhan, walaupun dilahirkan oleh Revolusi Agustus, tetapi sejak revolusi itu gagal dan kekuasaan negara jatuh sepenuhnya di tangan borjuis reaksioner, dengan sendirinya menjadi alat kekuasaan kelas yang menguasai negara itu. Asal kelas dari para bintang dan tamtama yang banyak dari anak-anak kaum buruh dan kaum tani memang dapat merupakan elemen yang memihak rakyat. Tetapi hal ini tidak mengubah kedudukan angkatan bersenjata secara keseluruhan sebagai alat negara yang mengabdikan kepentingan kelas yang berkuasa.

Untuk memenuhi tugas sejarahnya yang besar, berat, tetapi mulia, yaitu memimpin revolusi rakyat anti-imperialisme dan anti-kapitalisme-birokrasi, kaum Marxis—Leninis Indonesia harus tegas meninggalkan jalan damai yang revisionis itu, meninggalkan “teori MKTBP”, dan mengibarkan tinggi panji revolusi rakyat bersenjata. Seperti juga pengalaman revolusi rakyat Tiongkok yang jaya, kaum Marxis—Leninis Indonesia harus menggalang daerah basis revolusioner; mereka harus ‘*membangun desa-desa yang terbelakang menjadi daerah basis yang maju, terkonsolidasi, menjadi benteng-benteng revolusioner yang besar secara militer, politik, ekonomi, dan kebudayaan*’ [Idem, hal.127—129].

23. PKI dan Gerakan Komunis Internasional

MENGENAI kontradiksi-kontradiksi dalam Gerakan Komunis Internasional yang sedang bergejolak waktu itu, Aidit mengemukakan: “Kita tetap mengharap supaya semua polemik dan kecam-mengcam benar-benar dihentikan, baik dalam pidato-pidato dan dalam tulisan-tulisan, baik terhadap Partai Buruh Albania maupun terhadap Partai-Partai Komunis dan Buruh lainnya. Sikap PKI yang *memegang teguh prinsip-prinsip Marxisme—Leninisme, tetapi luwes dalam membawakannya*, juga dalam masalah keretakan GKI ini mendapat sambutan baik dari para kader dan anggota PKI. Partai kita yakin akan kebenaran sikapnya dan mendidik para anggota untuk bersikap kritis, rendah hati, percaya pada diri sendiri, dan bersungguh-sungguh dalam menghadapi masalah persatuan GKI.

“Dalam perjuangan untuk memulihkan persatuan dalam GKI, kita harus terus melawan revisionisme, baik klasik maupun modern, dan terus melawan dogmatisme, baik klasik maupun modern. Deklarasi Moskow 1957 menunjukkan dengan tepat bahwa bahaya utama dalam GKI pada dewasa ini adalah revisionisme modern dan Pernyataan Moskow 1960 menugaskan Partai-Partai Marxis—Leninis untuk menelanjangi terus-menerus dan berjuang aktif melawan revisionisme Yugoslavia yang sekarang makin erat dalam genggaman imperialisme AS. Berhenti melawan revisionisme baik klasik maupun modern berarti berhenti berjuang sungguh-sungguh melawan imperialisme dan musuh-musuh rakyat lainnya. Berhenti melawan dogmatisme baik klasik maupun modern, berarti memisahkan diri dari massa dan nasion, menutup kemungkinan partai menjadi pemimpin massa dan nasion. Kedua-duanya adalah berbahaya dan yang paling berbahaya ialah yang tidak dilawan.” [Idem, hal.22].

24. Partai Massa dan Partai Kader

“**HASIL** lain yang telah kita capai ialah bahwa kita sudah dapat membangun partai massa yang bukan saja merupakan teras dari gerakan komunis yang besar, tapi sejak tahun 1959, sejak Kongres Nasional VI, PKI sudah merupakan organisasi komunis yang besar. Hasil ini kita capai melalui pelaksanaan Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi dan Pendidikan, selesai dalam tahun 1959, yang telah dapat mengaktifkan organisasi basis partai dan mendidik anggota-anggota baik dengan aksi-aksi massa maupun dengan pendidikan teori. Dengan terlaksananya Plan 3

Tahun Pertama, maka mayoritas kader dari tingkat Central sampai ke basis sudah terdidik dalam teori dan semangat Marxisme—Leninisme. Merekalah yang menjadi tulang punggung bagi pembangunan PKI selanjutnya.”

“Plan 3 Tahun Kedua Mengenai Pendidikan dan Organisasi telah mengonsolidasi hasil-hasil itu lebih lanjut. Pengalaman partai kita untuk membangun partai massa ini membuktikan, bahwa dengan pimpinan Central yang bulat dan pendidikan dalam semangat dan teori Marxisme—Leninisme yang terus-menerus, Partai Komunis dapat merupakan partai yang pada satu pihak banyak jumlah anggotanya (massal) tapi pada pihak lain merupakan organisasi yang tersentralisasi dengan disiplin yang kuat. Pengalaman kita membuktikan, bahwa partai massa semacam itu tidak lebur menjadi organisasi massa biasa, tapi tetap merupakan bentuk organisasi yang tertinggi dari kelas buruh dan menjalankan fungsinya sebagai detasemen terdepan, sebagai partai Lenin, partai tipe baru. Partai semacam itu adalah *partai massa dan partai kader sekaligus*. Itulah partai kita.

Dari pengalaman pembangunan partai, pernah kita simpulkan bahwa pada kaum komunis Indonesia terdapat tiga ciri, yaitu *pertama*, kaum komunis Indonesia dijiwai oleh perpaduan patriotisme proletar dan internasionalisme proletar, *kedua*, kaum komunis Indonesia berpendirian, bahwa pembangunan organisasi penting, tetapi pembangunan ideologi lebih penting lagi, dan *ketiga*, kaum komunis Indonesia teguh memegang prinsip Marxisme—Leninisme, tapi luwes dalam membawakannya. Ketiga ciri ini harus kita pelihara dan kita kembangkan, harus menjadi darah-daging kita.” [Idem, hal.26].

Mengenai Plan 4 Tahun, Aidit mengemukakan bahwa, “Tidak berapa lama lagi Plan 3 Tahun Kedua Mengenai Pendidikan dan Organisasi sudah akan berakhir dan Plan kita yang baru, *Plan 4 Tahun mengenai Kebudayaan, Ideologi, dan Organisasi* akan dimulai. Sesuai dengan keputusan Kongres VII Gerakan Akhiran untuk menyelesaikan Plan 3 Tahun Kedua dilakukan dengan poros 4 Meningkatkan, yaitu (1) meningkat Sekolah Politik dan Kursus Rakyat, (2) meningkat anggota partai dan ormas, (3) meningkat jumlah calon menjadi anggota partai, (4) meningkat pemasukan iuran. Pengalaman-pengalaman menunjukkan bahwa kunci untuk mensukseskan 4 Meningkatkan itu ialah dengan *meningkatkan SP dan KR*. Itu berarti bahwa dengan pendidikan teori dan politik yang tepat, aktivitas anggota-anggota menjadi dipertinggi dan dijamin terlaksananya tugas-tugas yang lain.

Tapi kita sekarang bukan saja berkecimpung dalam mengakhiri Plan 3 Tahun Kedua. Partai kita sedang bersiap-siap untuk menyongsong Gerakan Awalan Plan 4 Tahun. Plan raksasa yang akan datang. Dengan Plan ini kita

akan membikin Partai kita lebih mampu dan lebih mahir menghadapi tugas dan pekerjaan apa pun.

Sebagaimana sudah dikatakan dalam Sidang Pleno I CC dalam rangka pelaksanaan segi *Kebudayaan* dari Plan 4 Tahun ini, partai kita harus mengorganisasi gerakan besar-besaran untuk meningkatkan taraf kebudayaan rakyat pekerja, terutama kaum komunis, mulai dari kegiatan PBH, pendidikan-pendidikan umum tingkat SR sampai menengah, pendidikan-pendidikan khusus mengenai kesenian dan kejuruan, sampai kepada berbagai cabang akademi dan fakultas. Melalui pendidikan-pendidikan ini kita akan dapat memenuhi tugas kebutuhan urgen daripada partai pada taraf perjuangan sekarang, yaitu kader-kader komunis atau Marxis-Leninis yang berpengetahuan umum dan khusus (mempunyai keahlian tertentu), kader-kader yang “*komunis dan ahli*.” [Idem, hal.27].

Mengenai ideologi, Aidit mengemukakan, bahwa “dewasa ini ajaran Marxisme—Leninisme sudah berakar di Indonesia. Benih Marxisme yang telah disebarkan di bumi Indonesia sejak tahun 1914 oleh ISDV (PSDH) dan melahirkan PKI (1920) kini telah erat berpadu dengan gerakan revolusioner rakyat Indonesia. Marxisme-Leninisme telah membantu kita untuk menyimpulkan pengalaman-pengalaman revolusi kita, menganalisa masyarakat kita dan memahami soal-soal revolusi kita. Pada gilirannya, Marxisme-Leninisme telah tumbuh dan diperkaya dengan pengalaman-pengalaman revolusioner rakyat kita sendiri. Itulah hasil daripada peng-Indonesiaan Marxisme-Leninisme, hasil daripada perpaduan kebenaran universal Marxisme-Leninisme dengan praktik konkret revolusi Indonesia, hasil penerapan Marxisme-Leninisme di bumi Indonesia dengan gaya-gaya Indonesia. Kini Marxisme-Leninisme sudah mulai dipelajari tidak hanya di dalam partai tetapi juga oleh orang-orang progresif di luar partai dengan bantuan partai. Lambat laun Marxisme akan menjadi milik tidak hanya dari kaum komunis atau proletariat saja tapi akan menjadi milik seluruh nasion. Kita kaum komunis Indonesia menganggap hal ini suatu proses penting yang wajar yang akan mempercepat tercapainya masyarakat sosialis di Indonesia.” [Idem, hal.28—29]

Menutup pidatonya, Aidit mengemukakan, bahwa “dengan semangat yang tinggi dan keberanian yang besar, kita akan dapat mendobrak segala rintangan dalam meneruskan pembangunan Partai Komunis Indonesia yang lebih luas dan lebih terkonsolidasi yang kader-kadernya *pandai, berani, dan berkebudayaan*. PKI yang demikian itu akan mampu memberi sumbangan positif dan besar dalam memperkuat kegotong-royongan nasional

berporoskan Nasakom dalam melaksanakan Manipol, Panca Program Front Nasional, dan Dekon.

Memang adalah hukum perkembangan masyarakat, bahwa bila kelas-kelas revolusioner makin maju dan kelas-kelas reaksioner makin tersudut, maka makin meruncinglah perjuangan kelas dan makin kotor cara-cara yang digunakan oleh kekuatan reaksi untuk mempertahankan diri. [Idem, hal.29—30].

25. Mengobarkan Semangat Berani

23—26 Desember 1963 berlangsung Sidang Pleno II CC PKI yang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central di Jakarta. Dalam sidang ini, D.N. Aidit menyampaikan laporan berjudul *Kobarkan Semangat Banteng! Maju Terus, Pantang Mundur!* Dalam laporan ini Aidit memaparkan dua tema besar: 1. Maju terus untuk *landreform* yang konsekuen, mengganyang ‘Malaysia’, dan membentuk kabinet gotong-royong berporos Nasakom!; 2. Ganyang terus imperialisme dan revisionisme! [D.N. Aidit, *Kobarkan Semangat Banteng! Maju Terus Pantang Mundur!*, laporan politik kepada Sidang Pleno kII CC VII yang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, 23—26 Desember 1963 di Jakarta, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal.12 dan 44].

Laporan memaparkan bahwa: “Partai kita bersama dengan Presiden Soekarno telah berhasil mengobarkan semangat keberanian di kalangan massa rakyat Indonesia yang luas. Tahun 1963 benar-benar telah menjadi ‘tahun keberanian’, dan satu kali keberanian sudah dibangkitkan serta sudah menjadi milik rakyat, semua rintangan dan penghalang pasti akan dapat diganyang.” “Berkat keberanian yang telah tumbuh, kita juga telah lebih tinggi mengibarkan Tripanji Bangsa: *Panji Demokrasi, Panji Persatuan, dan Panji Mobilisasi*. [Idem, hal.7]

Pada peringatan ulang tahun ke-44, 23 Mei 1964, di Surabaya, D.N. Aidit menyampaikan pidato berjudul “*Jadilah komunis yang baik dan lebih baik lagi!*” Dalam pidatonya ini dipaparkan bahwa “sejarah PKI adalah proses pengintegrasian Marxisme dengan revolusi Indonesia”; dan “masalah penemuan teori-teori revolusi Indonesia yang antara lain: revolusi Indonesia bersifat nasional demokratis dan merupakan bagian dari revolusi rakyat-rakyat sedunia; masalah keharusan menggalang front persatuan nasional dan front internasional anti-imperialisme; tentang adanya tiga kekuatan dan tiga konsepsi mengenai revolusi Indonesia; mengenai keharusan melakukan metode kombinasi tiga bentuk perjuangan, yaitu perjuangan di kalangan kaum tani,

kaum buruh di kota-kota dan mengintegrasikan alat-alat negara yang pokok dengan perjuangan revolusioner rakyat.” [D.N. Aidit, *Jadilah Komunis yang Baik dan Lebih Baik Lagi!*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal.45]

Perkembangan pelaksanaan *Demokrasi Terpimpin*, dan dikobarkannya semboyan persatuan nasional berporos Nasakom menyebabkan kian meningkatnya pengaruh PKI. Ini tidak diinginkan oleh kaum kanan. Dengan tujuan untuk membubarkan PKI, maka kaum soska, bekerja sama dengan penganut aliran trotskis menampilkan gagasan pembubaran partai-partai. Dalam rangka kampanye untuk tujuan itu, semenjak 2 Juni 1964 sampai 9 Juli 1964 berlangsung polemik harian *Merdeka* dan *Harian Rakjat*. Polemik terjadi mengenai peranan partai-partai politik dalam *Demokrasi Terpimpin*; Tentang aksi sepihak kaum tani; soal-soal Marxisme, Pancasila, Manipol, *Landreform*, UUPA-UUPBH, Anti-Manikebu, dan lain-lain. 2 Juni 1964, harian *Merdeka* menyiarkan tulisan Induk Karangan berjudul *Gagasan Satu Partai*. Gagasan ini menimbulkan polemik yang berkembang jadi menyangkut masalah peranan partai-partai politik dalam Demokrasi Terpimpin, mengenai aksi sepihak kaum tani; mengenai Marxisme, Pancasila, Manipol, *Landreform*; UUPA; UUPBH; anti-Manikebu dan banyak lainnya. Begitu pentingnya arti Polemik ini, hingga dalam *Kata Pengantar Polemik Merdeka Harian Rakjat*, Njoto menulis, “Polemik ini boleh dibilang sudah sebagian dari sejarah. Tetapi karena membentuk sejarah yang mendatang tak mungkin tanpa belajar dari sejarah yang silam, maka perang argumentasi yang seperti peluru-peluru desing-berdesing dalam pertempuran untuk merebut benteng Manipol ini kiranya bisa dipelajari oleh siapa pun – politikus-politikus dan jurnalis-jurnalis, mahasiswa-mahasiswa, golongan rakyat mana pun” [Penerbit Harian Rakjat, *Polemik Merdeka Harian Rakjat*, Djakarta, 1964, hal.4]. Polemik yang berlangsung sebulan suntuk itu harus dihentikan karena permintaan Kejaksaan Agung.

3 Juli 1964 berlangsung Konferensi Nasional I PKI di Jakarta. D.N. Aidit menyampaikan laporan berjudul *Dengan Semangat Banteng Merah Mengkonsolidasi Organisasi Komunis yang Besar*. Dalam laporan ini dipaparkan masalah mengintensifkan pembajaan diri dan pendidikan diri, ditekankan lagi masalah “Pembangunan organisasi penting, tetapi pembangunan ideologi lebih penting lagi”; “Tahu Marxisme dan kenal keadaan”.

“Dituntut agar tiap-tiap anggota partai memenuhi 9 syarat keanggotaan, yaitu:

- (1) melaksanakan dengan baik semua tugas yang diberikan oleh partai kepada kita;

- (2) menjaga supaya diri kita tidak merosot menjadi pekerja politik yang berpikiran sempit, yang lupa pada tugas sejarah yang besar dan tenggelam mengurus soal-soal *tetek-bengek* yang tidak ada hubungannya dengan revolusi;
- (3) dalam memegang jabatan apa saja kita harus senantiasa menjadi tokoh politik dan tokoh negara tipe Lenin;
- (4) sebagai tokoh masyarakat, kita harus senantiasa bersikap tegas dan jelas, tidak plintat-plintut dalam membela kepentingan rakyat dan revolusi;
- (5) dalam keadaan bagaimanapun tetap bersemangat banteng merah, tidak takut menghadapi pertempuran dan tidak kenal ampun terhadap musuh-musuh rakyat;
- (6) tidak mabuk karena sukses, tidak panik menghadapi segala keruwetan dan bahaya, dan tidak putus asa kalau mengalami pukulan-pukulan dan kegagalan-kegagalan;
- (7) bijaksana dan berhati-hati dalam memutuskan masalah-masalah yang banyak seluk-beluknya, yang menghendaki pandangan-pandangan yang dalam, mengenai masalah-masalah itu;
- (8) lurus dan jujur terhadap partai dan rakyat;
- (9) cinta yang tidak ada taranya kepada rakyat."

[D.N. Aidit, *Dengan semangat Banteng Merah mengonsolidasi organisasi komunis yang besar!*, pidato dalam Konferensi Nasional Partai I, dimuat dalam *Jadilah Komunis yang Baik dan Lebih Baik Lagi!*, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal.14]

26. PKI dan Masalah Tani

2 Februari sampai 23 Maret 1964, Aidit memimpin rombongan riset ke sejumlah desa Jawa Barat, melakukan praktik "*tiga sama*": *sama bekerja*, mengerjakan apa saja yang dikerjakan petani; *sama makan*, makan apa saja yang dimakan petani; dan *sama tidur*, tidur di tempat petani dan secara petani. Dalam hasil riset ini Aidit menulis: "Kita telah menyimpulkan dengan baik tentang maha pentingnya kaum tani atau desa dalam revolusi.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman kita sendiri selama Revolusi Agustus 1945, kita telah menarik kesimpulan bahwa kaum tani atau desa-desa di negeri kita memainkan 4 peranan penting dalam revolusi, yaitu sebagai:

- 1) sumber bahan makanan;

- 2) sumber prajurit revolusioner;
- 3) tempat mundur apabila terpukul di kota-kota;
- 4) pangkalan untuk melakukan serangan dan merebut kembali kota-kota.

Inilah pelajaran maha penting dari Revolusi Agustus 1945. Pelajaran ini kita bayar dengan banyak korban. Oleh karena itu, kita tidak boleh melupakan pelajaran itu.

Pentingnya peranan kaum tani dalam kehidupan bangsa makin lama makin dirasakan dan diakui oleh semua golongan. Di waktu ini, masalah tani sudah diakui secara luas sebagai masalah yang paling pokok dalam kehidupan politik dalam negeri. Tidak ada masalah nasional yang besar yang bisa diselesaikan tanpa menghubungkannya dengan penyelesaian masalah tani. Hal ini bukan hanya keyakinan PKI saja, tetapi makin lama makin menjadi keyakinan setiap Manipolis yang jujur dan konsekuen. Dalam dokumen-dokumen resmi pemerintah telah ditekankan tentang pentingnya pertanian dan perkebunan sebagai dasar perekonomian negeri, tentang pentingnya *landreform*, sedangkan kaum tani sudah diakui di dalam Manipol sebagai sokoguru Revolusi Indonesia di samping kaum buruh." [D.N. Aidit, *Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa*, Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Jawa Barat, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964, hal.11—12].

Lambang Palu Arit yang dijunjung PKI mencerminkan bahwa PKI menjadikan buruh dan tani sebagai sokoguru revolusi. Semenjak semula PKI telah menjadikan masalah tani dan tanah masalah pokok dari revolusi. Oleh karena itu dalam programnya, PKI mengangkat semboyan *nasionalisasi tanah* atau *semua tanah jadi milik negara*. Tapi Kongres Nasional V PKI tahun 1954 merumuskan bahwa, *revolusi agraria* adalah hakikat revolusi demokrasi rakyat di Indonesia. Dengan suara bulat disetujui untuk tidak lagi menggunakan semboyan "*nasionalisasi tanah*" atau semboyan "*semua tanah menjadi milik negara*" tetapi semboyan yang tepat adalah "*tanah untuk kaum tani*", "*pembagian tanah untuk kaum tani*", dan "*milik perseorangan tani atas tanah*."

Menjelang Kongres Nasional V tahun 1956, PKI telah mengadakan banyak diskusi tentang soal-soal agraria dan kaum tani, dan sebagai kesimpulannya, politik agraria partai dirumuskan dalam program partai sebagai berikut: "*semua tanah yang oleh tuan tanah – tuan tanah asing maupun tuan tanah – tuan tanah Indonesia harus disita tanpa penggantian kerugian. Kepada kaum tani, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin, diberikan dan dibagikan tanah dengan cuma-cuma*." Sebagai semboyan ditetapkan "*tanah untuk kaum tani*" dan "*milik perseorangan tani atas tanah*".

Riset di desa-desa Jawa Barat mengenai kehidupan petani ini menunjukkan kenyataan berlangsungnya penghisapan feodal atas kaum tani. Dari analisa kelas, “di desa-desa terdapat *tuan tanah – tuan tanah, tani sedang, tani miskin, buruh tani*. Di samping itu ada *lintah darat, tukang ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, bandit-bandit desa, pekerja-pekerja kerajinan tangan dan pertukangan, kaum intelektual, dan seniman desa*.”

Rakyat pekerja di desa mengalami penghisapan dan penindasan yang kejam dari:

- 1) *tuan tanah jahat*;
- 2) *lintah darat*;
- 3) *tukang-ijon*;
- 4) *kapitalis birokrat*;
- 5) *tengkulak jahat*;
- 6) *bandit desa*;
- 7) *penguasa jahat*.

Mereka sungguh-sungguh merupakan *tujuh setan desa* yang menghisap darah kaum tani. Bahkan di antara mereka ada yang menjadi tuan tanah jahat merangkap lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat, dan lain-lain, sehingga merupakan *setan dasamuka*. Hanya dengan mengakhiri penghisapan dan penindasan setan-setan desa ini kaum tani dapat mencapai pembebasan yang sungguh-sungguh. Tanpa berbuat demikian, adalah omong kosong berbicara tentang penyelesaian revolusi nasional-demokratis, apalagi tentang masyarakat adil dan makmur.” [Idem, hal.27].

27. Gunakan Pancasila Menyerang PKI

MENGHADAPI perkembangan PKI yang pesat, lawan-lawan PKI menggunakan Pancasila untuk menyerang PKI. 20 Oktober 1964, *Harian Revolusioner*, koran *Partai Murba*, memuat tajuk rencana yang isinya antara lain: ‘*secara tegas dan gamblang Menko/Wk. Ketua MPRS dalam ceramah di Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora telah mengatakan bahwa bila kita (Indonesia) telah mencapai tarap hidup adil makmur dan telah sampai pada sosialisme Indonesia, maka kita tak membutuhkan lagi Pancasila*’. Selanjutnya, ‘*Kita katakan saja secara terang-terangan bahwa ucapan itu merupakan satu pengkhianatan terhadap keyakinan 103 juta rakyat Indonesia*’ Tajuk Rencana ini memfitnah D.N. Aidit ‘mengkhianati 103 juta rakyat Indonesia dengan menyatakan tak membutuhkan lagi Pancasila setelah Indonesia sampai pada

sosialisme. Aidit membantah tajuk rencana ini dengan satu surat terbuka yang isinya sebagai berikut:

‘*Pertama*, yang saya katakan dalam kuliah di hadapan Pendidikan Kader Revolusi Angkatan Dwikora di Bank Indonesia, Jakarta, justru kebalikan daripada apa yang ditulis oleh tajuk rencana *Harian Revolusioner*. Dalam rangka menjawab salah sebuah pertanyaan, justru saya mengatakan bahwa di dalam masyarakat sosialis, tahap kedua daripada revolusi Indonesia, Pancasila sebagai alat pemersatu kita butuhkan, karena pada waktu itu juga kita memerlukan persatuan. Saya pun dalam salah satu kuliah pernah mengatakan, bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia, karena Pancasila dapat mempersatukan rakyat Indonesia yang terdiri dari banyak agama, filsafat, ajaran, suku bangsa, dsb.

Kedua, pidato saya di-tape dan didengar oleh ratusan peserta Pendidikan Kader Revolusi yang bisa dijadikan saksi bahwa saya tidak mengucapkan sesuatu yang mirip dengan apa yang ditulis dalam tajuk rencana *Harian Revolusioner*.

Saya mengharap *Harian Revolusioner* dan semua koran yang sudah mengutip tajuk rencana *Harian Revolusioner*, memuat surat terbuka saya ini.

Karena tajuk rencana berbisa dari *Harian Revolusioner* tersebut sudah meracuni udara kerja sama dalam kegotong-royongan nasional berporoskan Nasakom, saya pun mengharap pertolongan koran-koran lain untuk memuat surat terbuka ini, untuk mana saya mengucapkan diperbanyak, terima kasih sebelumnya.

Saya tidak merasa perlu mengembalikan tuduhan ‘pengkhianatan’ kepada *Harian Revolusioner* berhubung dengan pemutarbalikkan ucapan saya, karena sebelum itu pun *Harian Revolusioner* sudah pengkhianat.

Saya hanya mengharap kewaspadaan dari yang berwajib.” [Jajasan Pembaruan, *Aidit membela Pantjasila*, Djakarta, 1964, hal.6—7].

Berkenaan dengan ‘heboh Pancasila’ yang bersumber dari tajuk rencana *Hari Revolusioner* itu, *Harian Rakyat* mengeluarkan editorial tanggal 30 Oktober 1964 yang antara lain memuat: ‘Heboh Pancasila’ jelas hubungannya dengan meningkatnya kegiatan kontra-revolusi dan subversi seperti yang disinyalir oleh Kotrar. Kata-kata yang mereka gunakan adalah kata-kata yang membakar dan menghasut untuk bertindak secara fisik. Mereka menggunakan kata-kata seperti ‘gantung’, ‘talkinkan’, ‘bajingan’, ‘maling’, ‘jahnam’, ‘monyet’, dsb. Untuk apa ini semua? Jelas, untuk apa yang mereka katakan ‘kita harus rame-rame patah cengke mengeroyoknya’ (pojok ‘Revolusioner’ yang dikutip *Berita Indonesia* tanggal 26 Oktober 1964). Semuanya ini bersambung dengan berita-berita radio-radio imperialis yang

menggambarkan akan adanya **coup d'état** di Indonesia dan berita sumber-sumber imperialis yang mengatakan bahwa Bung Karno akan meletakkan jabatan sebagai Presiden RI. Terang bahwa bukan hanya kata-kata yang mereka pergunakan bertentangan dengan Pancasila, tetapi juga terang bahwa mereka sepenuhnya bermain dengan kartu musuh rakyat Indonesia, kartu 'Malaysia', kartu imperialis-imperialis Inggris dan Amerika Serikat yang ada di belakang 'Malaysia'." [*Idem*, hal.16].

28. Deklarasi Bogor – Tata Krama Nasakom

12 Desember 1964, Bung Karno melangsungkan rapat dengan pimpinan partai-partai politik di Istana Bogor. Hadir antara lain: PNI, NU, PKI, Perti, Partindo, PSII, Murba, IPKI, Partai Kristen, dan Partai Katolik yang melahirkan Ikrar 4 Pasal yang dikenal dengan 'Deklarasi Bogor' sebagai berikut:

1. Mendukung politik konfrontasi dengan Malaysia.
 2. Memelihara persatuan nasional yang progresif revolusioner berporoskan Nasakom.
 3. Menempuh musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tanah.
 4. Membantah isu bahwa Bung Karno akan meletakkan jabatan.
- [Manai Sophiaan, *Kehormatan Bagi yang Berhak*, cetakan kedua, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008, hal.164—165].

11 Mei 1965, di Jakarta berlangsung Sidang Pleno IV CC VII yang diperluas. Dalam sidang ini, D.N. Aidit menyampaikan laporan politik berjudul "*Perhebat Ofensif Revolusioner Di Segala Bidang!*" Laporan ini memaparkan masalah *memperhebat ofensif revolusioner untuk menciptakan iklim politik yang sesuai dengan kebijaksanaan banting stir dalam ekonomi dan pembangunan*. Secara khusus ditekankan tentang pentingnya membasmi Trotskisme, dan memperkuat persatuan Nasakom untuk mengembangkan lebih lanjut situasi revolusioner. Dikemukakan bahwa Manipol yang lahir 6 tahun yang lalu telah memainkan peranan dalam meningkatkan ofensif revolusioner, hingga memaksa musuh-musuh Manipol ambruk satu demi satu. Ofensif Manipol ditujukan untuk membela dengan konsekuen *Garis Umum Revolusi Indonesia* menurut ajaran Manipol, yaitu *dengan front nasional yang bersokoguru buruh dan tani, berporos Nasakom dan berlandaskan idiil Pancasila, menyelesaikan revolusi nasional demokratis menuju ke Sosialisme Indonesia.*" [D.N. Aidit, *Perhebat Ofensif Revolusioner Di Segala Bidang!*,

Laporan Politik Kepada Sidang Pleno IV CC VII yang diperluas, 11 Mei 1965, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1965, hal.8].

Dikemukakan, bahwa perkembangan situasi dalam negeri mengalami kemajuan besar sesudah pedato "*Tavip—Tahun Vivere Pericoloso*" (17 Agustus 1964). Presiden Soekarno yang telah membangkitkan seluruh rakyat untuk bemassa aksi dengan kegotong-royongan nasional berporoskan Nasakom menentang nekolim, menentang kaum kapitalis komprador, kapitalis birokrat, dan tuan tanah feodal – khususnya untuk mendobrak kemacetan-kemacetan dalam pelaksanaan UUPA dan UUPBH – mengganyang kaum subversi, kontrarevolusioner, dan Manipolis munafik. Segera sesudah pidato Tavip, 27 Agustus 1964, Presiden Soekarno mengadakan *reshuffle* membentuk kabinet Dwikora I dengan Wakil-Wakil Ketua MPRS dan DPR GR jadi *menteri ex-officio*, dan memasukkan sejumlah tokoh progresif ke dalam kabinet, termasuk Njoto jadi menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet. Kemudian, dengan *reshuffle*, terbentuk kabinet Dwikora II pada 24 Februari 1965. *Reshuffle* dilaksanakan dengan melorot kedudukan beberapa orang menteri yang paling ditentang rakyat, sedangkan beberapa kader PKI, orang progresif simpatisan PKI diangkat menjadi menteri. Di antaranya terdapat: A. Astrawinata, S.H. menjadi menteri kehakiman; Jenderal Mayor Achmadi jadi menteri penerangan diperbantukan pada presiden; Ir. Setiadi Reksoprodjo jadi menteri listrik dan ketenagaan; Joesoef Moeda Dalam, menteri gubernur bank sentral; Armunanto, menteri pertambangan; Ir. Surachman, menteri pengairan & pembangunan desa; Drs. Achadi, menteri transmigrasi & koperasi; Oey Tjoe Tat, menteri negara, diperbantukan pada presidium kabinet.

"Bagaikan halilintar di panas terik, Presiden Soekarno mengomandokan Indonesia keluar dari PBB, dan komando ini didukung serta dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dengan semangat dan antusiasme revolusioner yang tinggi dan mendapat semua kekuatan progresif sedunia. Peristiwa bersejarah ini telah menggugah hati dan pikiran umat manusia di dunia supaya melenyapkan segala ilusi terhadap PBB dan merupakan titik balik dalam kehidupan politik rakyat Indonesia dalam melaksanakan Trisakti Tavip: *berdaulat dalam politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.*"

Garis Trisakti Tavip ini lebih dijelaskan lagi dalam pidato *Berdikari* Presiden Soekarno di hadapan Sidang Umum III MPRS tanggal 11 April 1965, dalam Resolusi MPRS tentang *Deklarasi Peningkatan Perjuangan Melawan Nekolim*, dalam Ketetapan MPRS tentang *Banting Stir untuk Berdiri di Atas Kaki Sendiri di Bidang Ekonomi dan Pembangunan*, dalam Ketetapan MPRS

tentang *Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin* dan dalam pidato *Tetap Maju Terus!* yang bersejarah dari Presiden Soekarno pada upacara Peringatan Dasawarsa Konferensi Bandung tanggal 18 April 1965. Semuanya ini merupakan landasan bagi rakyat Indonesia untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan situasi revolusioner.” [Idem, hal.9—10].

Dalam menanggulangi intrik-intrik dan racun perpecahan yang disebarkan oleh musuh-musuh revolusi dan membikin lebih baik lagi kerja sama Nasakom, PKI telah mengajukan empat pasal ‘*Tata Krama Nasakom*’ sebagai senjata yang paling ampuh untuk mengurus kontradiksi-kontradiksi yang timbul antara semua kekuatan revolusi.

“Untuk lebih membikin harmonis kerja sama Nasakom dalam rangka memperkuat persatuan nasional, PKI telah mengajukan pada rapat raksasa penutupan Kongres Nasional SOBSI tanggal 27 September 1964, 4 kode etik atau 4 pasal totokromo Nasakom, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap aliran politik dalam Nasakom harus setia kepada Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.
- (2) Di kalangan Nasakom dan semua golongan Manipolis tidak boleh ada konfrontasi, tetapi yang ada ialah konsultasi, musyawarah untuk mufakat dan kompetisi Manipolis. Kompetisi Manipolis berarti berlomba dalam mengabdikan rakyat, dalam melaksanakan Ampera.
- (3) Di kalangan Nasakom tidak hanya harus bisa menerima, tetapi juga harus bisa memberi. (Hal ini juga dinyatakan dalam tulisan Bung Karno *Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme*, tahun 1926).
- (4) Masing-masing aliran dalam Nasakom harus menjaga supaya tidak menerobos pekarangan aliran lain sampai merugikan aliran lain; jangan sampai misalnya, sesuatu aliran politik membikin interpretasi tentang ajaran aliran lain yang merugikan aliran lain itu. Jangan sampai terjadi orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang alif-bengkoknya Marxisme atau Komunisme membikin uraian-uraian atau tulisan tentang Marxisme. Serahkan tentang interpretasi tiap aliran kepada aliran yang bersangkutan.

Pada pokoknya, 4 pasal totokromo Nasakom ini sudah diterima oleh seluruh nasion, mula-mula lewat *Deklarasi Bogor* dan kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPRS No.VIII/MPRS/1965 tentang *Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin*, yang antara lain memuat pelarangan propaganda “anti-Nasionalisme, anti-Agama, dan anti-Komunisme.” [Idem, hal.12].

Presiden Soekarno dalam amanat ‘*Berdikari*’-nya dengan tegas menyatakan: ‘*Aku setuju dengan adanya suatu tatakrama Nasakom. Di Indonesia,*

perkembangan Nasionalisme, perkembangan Agama, dan perkembangan Komunisme dijamin. Ketiga-tiga aliran itu harus bekerja sama secara rukun. Masing-masing tidak diperkenankan membicarakan aliran yang lain secara yang merugikan aliran lain itu. Juga propaganda anti-Nasionalisme, anti-Agama, dan anti-Komunisme dilarang’.

Tatakrama Nasakom ini merupakan senjata yang tepat untuk mengurus kontradiksi di antara sesama kekuatan revolusi dan untuk lebih membulatkan tekad rakyat Indonesia baik dalam meningkatkan konfrontasi dengan ‘Malaysia’ maupun untuk merampungkan tugas-tugas revolusi Indonesia.

29. Melawan Trotskisme

“**KOMBINASI** imperialis, kapitalis birokrat (kabir), dan trotskis menandai kegiatan-kegiatan kontra-revolusioner dalam tahun 1964. Tujuan pokok mereka ialah memindahkan kontradiksi antara rakyat Indonesia dengan imperialisme menjadi kontradiksi di kalangan rakyat Indonesia sendiri. Mereka menjalankan politik anti-Komunis dan anti-Soekarno dengan kedok “*Pancasilaisme*” dan “*Soekarnoisme*” dalam bentuk gerakan yang dinamakan *Badan Pendukung Soekarnoisme* (“BPS”). Semuanya bergerak menurut tongkat komando CIA, organisasi intelijen AS. Tetapi karena sangat jelas bagi rakyat bahwa ajaran-ajaran Bung Karno sama sekali tidak anti-Komunisme, maka dalam waktu singkat kedok mereka terbuka dan kemunafikannya menjadi telanjang bulat. Apalagi setelah ada kristalisasi politik dengan tindakan Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia terhadap Partai Murba, termasuk tindakan terhadap beberapa tokoh trotskis yang menjadi tokoh partai itu. Tindakan itu mengandung arti politik yang penting sekali. Kaum Trotskis Indonesia sejak mereka mengkhianati PKI sesudah kegagalan pemberontakan nasional pertama tahun 1926 dan mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) selalu memainkan peranan memecah-belah persatuan nasional. Di zaman Belanda, di dalam pendudukan fasis Jepang, sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga sekarang, pekerjaan mereka terus memecah-belah persatuan nasional. *Trotskisme sudah lama merupakan bukan lagi penyelewengan dari Marxisme, tetapi sepenuhnya komplotan bandit-bandit politik yang pekerjaannya tidak lain daripada membikin intrik-intrik dan kriminalitas politik. Kaum Trotskis menggunakan jubah Marxisme untuk menentang Marxisme, menggunakan semboyan-semboyan “revolusioner” dan “kiri” untuk menentang gerakan revolusioner, sehingga massa rakyat*

yang belum terdidik politik dalam batas-batas tertentu dapat tertarik olehnya. Kaum Trotskis terang bukannya kekuatan kiri dan bukannya kekuatan tengah, tetapi kekuatan ultra-kanan yang sadar anti-Komunis. Oleh karena itu, *penggalangan persatuan nasional berporoskan Nasakom tidak mungkin tanpa bertindak terhadap kaum Trotskis seperti yang sudah dilakukan oleh Presiden Soekarno dan pemerintah Indonesia.*" [D.N. Aidit, *Perhebat Ofensif Revolusioner di Segala Bidang!*, Laporan Politik Kepada Sidang Pleno IV CC VII Yang Diperluas, 11 Mei 1965, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1965, hal.13—14].

Selanjutnya Aidit menyatakan, "Politik anti-demokrasi, anti-Rakyat, anti-Nasakom, dan anti-Komunis dari kaum Trotskis dalam praktiknya tidak berbeda dengan politik partai-partai terlarang Masyumi dan PSI. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dengan jelas sekali dari intrik-intrik dan kampanye-kampanye mereka tentang pembubaran partai-partai, kenaikan harga beras resmi sehingga lebih tinggi harga pasar, usaha kenaikan harga bensin, penyetopan pemboikotan film imperialis AS, melancarkan politik rasialis, dan anti-kerjasama dengan RRT, menghebohkan Pancasila, membikin gerakan "*Soekarno-isme-BPS*", bersekongkol dengan agen-agen Malaysia, dan bernafsu besar untuk mengganti Presiden Soekarno. Tetapi politik dan intrik mereka dilawan oleh rakyat dengan gigih, dan dalam perlawanan-perlawanan itu rakyat mendapat kemenangan satu demi satu dan maksud-maksud jahat mereka menjadi terbongkar pula satu demi satu." [*Idem*, hal.14].

"Dalam bulan-bulan terakhir tahun 1964, puncak-puncak ketegangan di dalam negeri telah ditimbulkan oleh kombinasi imperialis, kapitalis birokrat, dan Trotskis ini. Untuk menarik kekuatan tengah ke pihaknya, mereka memfitnah bahwa kaum komunis akan "merebut kekuasaan" berdasarkan apa yang mereka namakan 'dokumen rahasia PKI' buatan mereka sendiri, yang berisi fitnahan-fitnahan tentang 'bahaya komunis' yang sedang mengancam, berhubung dengan 'kesehatan Bung Karno' yang kata mereka 'makin memburuk'."

"CC PKI dan saya pribadi sangat menyayangkan bahwa WPM III Chairul Saleh ikut menyebarkan dokumen palsu itu. Sementara kaum tengah yang naif, yang belum berpengalaman dengan intrik-intrik dan provokasi-provokasi kaum Trotskis, ada yang tertarik dan hanyut oleh fitnahan mereka. Tetapi kesedaran politik yang tinggi daripada rakyat Indonesia merupakan rintangan utama bagi maksud-maksud jahat mereka. rakyat Indonesia tetap mengarahkan ujung tombak perlawanannya kepada

imperialisme, khususnya proyek bersama Inggris—AS 'Malaysia' dan musuh-musuh yang sesungguhnya di dalam negeri."

"Mengenai apa yang dinamakan 'dokumen rahasia PKI' sudah kita kupas kepalsuannya dalam pertemuan antara Presiden Soekarno dengan semua partai politik di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964. *Tiap orang revolusioner yang berpengalaman mudah mengetahui bahwa apa yang dinamakan 'dokumen rahasia PKI' adalah hasil pekerjaan ceroboh daripada pelaksanaan cara klasik agen-agen provokator Trotski yang bermaksud membikin edisi kedua dari 'Peristiwa Madiun'.* Teknik provokasi mereka kali ini jauh lebih jelek daripada untuk provokasinya dalam tahun 1948 (Peristiwa Madiun), padahal kewaspadaan PKI dan Rakyat Indonesia sekarang sudah jauh lebih tinggi daripada ketika tahun 1948. Pekerjaan mereka menghubungkan 'bahaya komunisme' dengan 'kesehatan Bung Karno' yang kata mereka 'makin memburuk' dan oleh karena itu sudah diperlukan '*troon-opvolger*' hanya mendemonstrasikan satunya mereka dengan kaum imperialis internasional yang juga melancarkan tema yang sama lewat pers dan radio. Tokoh-tokoh mereka dipuji-puji setinggi langit oleh kaum imperialis dan larangan terhadap Partai Murba diratap-tangisi oleh kaum imperialis, termasuk alat-alat propaganda 'Malaysia'. Dengan demikian, semua menjadi terang!"

"Jelaslah, bahwa perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum pemecah-belah, terutama kaum kabir dan Trotskis, telah mencapai puncak kemenangannya dengan diumumkankannya kebulatan tekad semua partai politik pada tanggal 12 Desember 1964, dengan pelarangan 'BPS' dan pelarangan Partai Murba dengan semua ormas-ormasnya dan rituling orang-orang Murba dari Front Nasional dan lembaga-lembaga negara pusat sampai daerah, pencabutan izin terbit koran-koran 'BPS' dan komando presiden untuk membubarkan semua pendukung dan antek-antek 'BPS'. Semuanya ini merupakan kemenangan besar bagi persatuan nasional berporoskan Nasakom dan merupakan tindakan-tindakan penting bagi keselamatan Republik Indonesia." [*Idem*, hal.14—15].

30. 'Situasi Revolusioner'

SELANJUTNYA, laporan menilai bahwa "Rakyat Indonesia sedang hidup dan berjuang dalam situasi revolusioner.

Ciri-ciri utamanya adalah:

(1) *massa rakyat sudah aktif berjuang untuk adanya perubahan yang dapat memperbaiki penghidupan mereka;*

- (2) *segi anti-rakyat dalam kekuasaan politik makin terdesak, segi pro-rakyat makin unggul dan politik pemerintah makin banyak yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan rakyat;*
- (3) *aksi-aksi massa rakyat makin meluas sehingga peranan massa rakyat makin besar dan makin menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara.” [Idem, hal.16].*

Di sini Aidit menggunakan teori “dua aspek”, yaitu terdapatnya aspek pro-rakyat dan aspek anti-rakyat dalam kekuasaan negara.

Karena menilai situasi revolusioner, maka harus dapat ditanggapi dan dipahami dengan baik-baik, oleh siapa saja yang mau terus mengibarkan panji revolusi. Satu kali rakyat menjadi pembentuk politik negeri, seterusnya hal ini harus dipertahankan dan dikembangkan. Dan untuk itu semboyan ialah: “Ofensif berarti sukses dan menang, defensif berarti gagal dan kalah.” [Idem, hal.17]. “Ofensif revolusioner kita juga harus diperhebat untuk membersihkan kabinet dari unsur-unsur anti-rakyat dan untuk membentuk Kabinet Gotong-Royong berporoskan Nasakom.” [Idem, hal.47]

Mengenai bidang internasional, laporan menilai bahwa situasi revolusioner terus menanjak dan matang di poros Nefo; bahwa persekutuan imperialis yang goyah dan penuh kontradiksi yang tajam; Nefo terus bertambah kuat; PBB adalah alat manipulasi imperialis; pentingnya konferensi-konferensi internasional melawan imperialisme, kolonialisme dan neo-kolonialisme.

Di bidang gerakan komunis internasional, laporan menilai adanya 4 tipe Partai Komunis yaitu:

- (1) yang Marxis-Leninis;
- (2) yang pimpinannya dikuasai oleh kaum revisionis, tetapi di dalamnya terdapat oposisi Marxis-Leninis;
- (3) yang sudah sepenuhnya dikuasai kaum revisionis dan orang-orang Marxis-Leninis yang sudah dipecat telah membentuk lingkaran-lingkaran Marxis-Leninis;
- (4) yang sepenuhnya dikuasai kaum revisionis dan sudah didampingi oleh Partai Komunis.

PKI termasuk Partai tipe pertama.” [Idem, hal.76].

Berkali-kali laporan menunjukkan, bahwa kita berada dalam situasi revolusioner. Dalam situasi revolusioner ini, perjuangan antara kekuatan-kekuatan revolusioner dengan kekuatan-kekuatan kontra-revolusioner makin tajam. Satu-satunya sikap yang harus dilakukan oleh kaum revolusioner adalah ofensif dan memperhebat ofensif.

Anggota-anggota Partai harus merupakan pejuang yang berani, berdisiplin, pandai, dan berkebudayaan.” [Idem, hal.82]. Selanjutnya laporan menyerukan: Perhebat amal kepada rakyat sampai mengenai soal-soal kecil sehari-hari; Kembangkan pekerjaan teori untuk lebih meningkatkan daya juang dan seni memimpin partai; Kobarkan ofensif revolusioner di bidang kebudayaan.

Ketua Partai Murba, Sukarni, ditangkap pada bulan Januari 1965. Oleh Keputusan Presiden pada tanggal 21 September 1965, Partai Murba dilarang sepenuhnya.

31. Tesis “45 Tahun PKI”

MENJELANG berlangsungnya peringatan ulang tahun ke-45 PKI, 23 Mei 1965, Politbiro CC PKI mengeluarkan *Tesis 45 Tahun PKI*. Dalam *Tesis* ini dikemukakan, bahwa “tamatnya riwayat kolonialisme Belanda di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran-pergeseran dalam kedudukan musuh-musuh rakyat. Sidang Pleno I CC PKI Kongres VII yang diadakan pada awal 1963, setelah mempertimbangkan kedudukan serta peranan imperialisme AS di Indonesia dari segi politik, ekonomi, militer, dan kebudayaan, telah menyimpulkan bahwa ‘musuh rakyat Indonesia yang nomor satu dan yang paling berbahaya pada waktu sekarang ialah imperialisme AS’.” [Politbiro CC PKI, *Tesis 45 Tahun PKI*, 23 Mei 1920–23 Mei 1965, *Harian Rakjat*, 7 Mei 1965].

“Aksi-aksi anti imperialisme Inggris—AS dimulai dengan petisi-petisi, rapat-rapat protes, demonstrasi-demonstrasi, dan kemudian berkembang menjadi aksi pemboikotan terhadap film-film AS. Dalam waktu yang relatif singkat sekali, perjuangan ini memuncak dalam aksi-aksi pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Inggris dan AS di Indonesia oleh kaum buruh yang mendapat sokongan luas dari rakyat. Suatu faktor yang ikut menentukan suksesnya aksi-aksi itu ialah karena aksi-aksi tidak hanya aksi massa dari bawah, tetapi juga karena dikombinasi dengan perjuangan di atas. Ini realisasi yang sukses dari garis ‘revolusi dari atas dan dari bawah’.

“Sukses-sukses besar dalam pengambil-alihan perusahaan-perusahaan imperialisme Belanda, Inggris, dan AS dan yang dijadikan milik negara atau ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, sesungguhnya adalah lompatan maju, dan merupakan perkembangan ke kiri dari sistem ekonomi Indonesia”.

Mengenai Trotskisme, *Tesis 45 Tahun PKI* memaparkan, bahwa “suatu kemenangan besar yang dicapai oleh gerakan revolusioner rakyat Indonesia

ialah pelarangan oleh pemerintah terhadap kegiatan Partai Murba dan organisasi-organisasi pendukungnya yang merupakan sarang kegiatan kaum pemecah-belah Trotskis di Indonesia.

Sementara orang mengira, bahwa masalah Trotskisme bukanlah masalah nasional, melainkan hanya masalah PKI saja. Pandangan yang demikian didasarkan pada anggapan yang keliru, seakan-akan Trotskisme itu adalah suatu 'sekte' daripada Marxisme. Memang benar, bahwa pada awalnya Trotskisme adalah suatu penyelewengan borjuis kecil dari Marxisme.

Akan tetapi dengan kemenangan yang gilang-gemilang Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia 1917, yang mendemonstrasikan kebenaran ajaran Lenin tentang revolusi sosialis, a.l. tentang mungkin sosialisisme menang di satu negeri, maka Trotskisme sebagai suatu sekte dalam gerakan kelas buruh telah digugurkan sepenuhnya oleh sejarah.

Semenjak itu, Trotskisme telah menjadi gerakan yang sama sekali tidak mendasarkan diri atas ajaran-ajaran Marxisme dan sudah tidak ada lagi baubanya Marxisme sedikit pun. Kaum Trotskis telah menjadi kekuatan ultra kanan yang bersemboyan 'kiri', kekuatan anti-Marxis yang berjubah 'Marxis' dan telah menjadi komplotan penjahat politik dengan semboyan-semboyan 'revolusioner' yang menjadi barisan depan dari kekuatan kontra-revolusioner internasional. Secara politik dan organisasi, mereka adalah alat yang penting untuk memecah-belah gerakan revolusioner kelas buruh dan gerakan pembebasan nasional rakyat-rakyat tertindas di mana-mana. Di Indonesia kaum Trotskis sudah mulai memecah-belah gerakan revolusioner dalam pemberontakan nasional yang pertama rakyat Indonesia dalam tahun 1926, dan melakukan provokasi ketika kaum komunis mengorganisasi gerakan di bawah tanah untuk melawan fasisme Jepang yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban dari kalangan kader-kader revolusioner. Mereka melakukan usaha-usaha kudeta dan usaha-usaha pecah-belah dengan mendirikan 'Persatuan Perjuangan' yang secara munafik menyerukan program dan semboyan-semboyan 'revolusioner' dalam Revolusi Agustus, mereka memecah-belah gerakan buruh, mereka bergandengan tangan dengan kaum revisionis modern dalam usaha untuk menjatuhkan PKI, mereka melancarkan polemik-polemik tentang Pancasila dan 'Soekarnoisme' pada saat-saat gerakan revolusioner justru semakin membutuhkan kebulatan persatuan untuk mengganyang musuh-musuh revolusi.

Sesungguhnya Trotskisme dalam gerakan revolusioner adalah bagaikan penyakit kanker dalam tubuh manusia, yang menyerang pada saat-saat dan tempat-tempat yang tidak diduga-duga. Itulah sebabnya, *mengganyang dan*

mengakhiri Trotskisme merupakan tugas urgen setiap patriot dan orang revolusioner untuk dilaksanakan dalam tahun 1965 juga."

Mengenai Marxisme, *Tesis* mengemukakan, bahwa tugas membantu orang-orang yang jujur dalam mempelajari Marxisme dan menelanjangi pemalsu-pemalsu Marxisme adalah tugas penting proletariat Indonesia dewasa ini dalam rangka membikin Marxisme menjadi milik nasion. Setiap komunis haruslah menyadari benar-benar, bahwa *menjadikan Marxisme milik nasion* pada hakikatnya adalah usaha untuk memenangkan secara penuh revolusi nasional demokratis dan revolusi sosialis. Oleh karena itu, tugas tersebut menuntut dari setiap komunis untuk bekerja lebih keras, memeras energi dan keringat lebih banyak dan memperbesar pengabdianya kepada rakyat dan revolusi Indonesia."

Dengan diterimanya Manipol sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara, RI dengan resmi mempunyai program yang progresif revolusioner bagi seluruh nasion Indonesia untuk menyelesaikan revolusi Indonesia. Kekuatan-kekuatan reaksioner telah mendapat pukulan-pukulan berat dan pengaruh mereka dalam kekuasaan politik sangat berkurang. Pada dewasa ini *kekuasaan negara RI mengandung dua aspek*, yaitu *aspek anti-rakyat* dan *aspek pro-rakyat*. Kekuatan aspek pro-rakyat sudah semakin besar dan memegang inisiatif dan berofensif, sedangkan *aspek anti-rakyat* walaupun masih cukup kuat, semakin terdesak dalam kedudukan terjepit. PKI berjuang agar *aspek pro-rakyat* itu semakin kuat dan akhirnya dapat berdominasi, dan agar *aspek anti-rakyat* dikeluarkan dari kekuasaan negara.

Teori '*dua aspek kekuasaan negara*' ini tidak tepat. Membagi kekuasaan negara ke dalam dua aspek yaitu *aspek pro-rakyat* dan *aspek anti-rakyat* tidaklah sesuai dengan kenyataan objektif. Hakikat kualitas kekuasaan negara ditentukan oleh kualitas angkatan bersenjata yang menjadi tulang-punggung negara. Dalam kenyataan, ABRI adalah utuh sebagai satu-satunya kesatuan yang mendominasi kekuasaan negara. Karena itu, tidak ada aspek yang pro-rakyat dan aspek anti-rakyat dalam kekuasaan negara, kekuasaan negara tetap didominasi oleh Angkatan Bersenjata RI.

Berhubung dengan adanya *dua aspek dalam kekuasaan negara* RI, perjuangan revolusioner rakyat Indonesia dilakukan dengan mengombinasikan perjuangan massa aksi revolusioner rakyat dari bawah, dengan tindakan-tindakan revolusioner badan-badan kekuasaan negara dari atas sesuai dengan prinsip menjalankan '*revolusi dari atas dan dari bawah*'. Aksi-aksi massa rakyat yang berkobar belum bisa dikategorikan revolusi, demikian pula tindakan-tindakan Bung Karno melakukan *retooling* aparat negara belumlah membawa perubahan kualitatif dalam kekuasaan negara.

Karena itu tidaklah tepat menilai perkembangan ini sebagai berlangsungnya *'revolusi dari atas dan dari bawah'*.

Tesis menilai, bahwa Indonesia berada dalam *situasi revolusioner*.

Ciri-ciri utamanya adalah:

- (1) massa rakyat sudah aktif berjuang untuk adanya perubahan yang dapat memperbaiki kehidupan mereka;
- (2) segi anti-rakyat dalam kekuasaan politik makin terdesak, segi pro-rakyat makin unggul dan politik pemerintah makin banyak yang disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan rakyat; dan
- (3) aksi-aksi massa rakyat makin meluas sehingga peranan massa rakyat makin besar dan makin menentukan dalam kehidupan masyarakat dan politik negara.

Dalam situasi demikian, semboyan kita ialah: *'Ofensif berarti sukses dan menang, defensif berarti gagal dan kalah'*.

Tesis menekankan pentingnya dengan konsekuen melaksanakan *Trisakti Tawip*, pentingnya garis umum penggalangan front persatuan nasional dengan rumus do-do-re-mi-fa, (1-1-2-3-4), yaitu: 1. tenaga memimpin ialah kelas buruh, 1 tenaga pokok ialah kaum tani; 2 persekutuan kelas buruh dan kaum tani sebagai basis front persatuan nasional; 3 kekuatan pendorong revolusi ialah buruh, tani, dan borjuis kecil yang merupakan rakyat pekerja, dan 4 kekuatan revolusioner yaitu buruh, tani, borjuis kecil, dan borjuasi nasional yang merupakan kekuatan rakyat yang dirugikan oleh imperialisme dan feodalisme.

Mengenai *Nasakom*, *Tesis* mengemukakan bahwa kerja sama politik Nasakom adalah *ciri yang khas dalam hal penggalangan front nasional revolusioner di Indonesia*. Ide persatuan Nasakom, yang sudah dikemukakan oleh Presiden Soekarno dalam tahun 1926, adalah pencerminan kenyataan kehidupan politik dalam masyarakat Indonesia, di mana tiga aliran politik yang besar, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, berakar dan berpengaruh dalam sejarah gerakan kemerdekaan nasional. Jasa yang besar dari Bung Karno bagi revolusi dan rakyat Indonesia bahwa beliau sebagai putra Indonesia berhasil menggali dan mengembangkan tradisi kegotong-royongan Nasakom itu. Juga Lenin dengan kearifan seorang Marxis yang senantiasa dihangati oleh apinya internasionalisme proletar, telah menunjukkan pada kelas buruh dan rakyat Indonesia, jauh sebelum kelas buruh Indonesia mendirikan partainya, apa yang oleh Bung Karno dicetuskan sebagai ide Nasakom tersebut dalam artikel yang berjudul *'Kebangkitan Asia'* (1913). (Dalam artikelnya ini, Lenin menilai tinggi kebangkitan gerakan nasionalis dengan mengangkat panji Islam, ... dan

sejumlah besar penduduk turunan Tionghoa di Jawa sudah membawa gerakan revolusioner dari tanah airnya." *Pen.*) [Lenin, *Probuždnyeniye Azii—Kebangkitan Asia*, Kumpulan Karya, edisi Rusia, cetakan ke-5, Jilid 23, hal.145—146, Moskwa, 1961].

Dalam menanggulangi intrik-intrik dan racun perpecahan yang disebar oleh musuh-musuh revolusi dan membikin lebih baik lagi kerja sama Nasakom, PKI telah mengajukan empat pasal *'Tata Krama Nasakom'* sebagai senjata yang paling ampuh untuk mengurus kontradiksi-kontradiksi yang timbul antara semua kekuatan revolusi. Empat kode etik atau empat fasal tatakrama Nasakom itu ialah:

Pertama: setiap aliran politik dalam Nasakom harus setia pada Manipol dan pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Kedua: di kalangan Nasakom dan semua golongan Manipolis tidak boleh ada konfrontasi, tetapi yang ada adalah konsultasi, musyawarah untuk mufakat dan kompetisi Manipolis. Kompetisi Manipolis berarti berlomba dalam mengabdikan Rakyat, dalam melaksanakan Ampera.

Ketiga: di kalangan Nasakom tidak hanya harus bisa menerima, tapi juga harus bisa memberi. Hal ini juga dinyatakan dalam tulisan Bung Karno Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme tahun 1926.

Keempat: masing-masing aliran dalam Nasakom harus menjaga supaya tidak menerobos pekarangan aliran lain, sampai merugikan aliran lain; jangan sampai, misalnya sesuatu aliran politik membikin interpretasi tentang ajaran lain yang merugikan aliran lain itu. Jangan sampai terjadi orang-orang yang tidak tahu alif bengkoknya Marxisme membikin uraian-uraian atau tulisan tentang Marxisme atau Komunisme yang bertentangan dengan Marxisme. Serahkan interpretasi tentang ajaran, tiap aliran kepada aliran politik yang bersangkutan.

Presiden Sukarno dalam amanat *'Berdikari'* nya dengan tegas menyatakan: *'Aku setuju dengan adanya suatu tatakrama Nasakom. Di Indonesia, perkembangan Nasionalisme, perkembangan Agama, dan perkembangan Komunisme dijamin. Ketiga-tiga aliran itu harus bekerjasama secara rukun. Masing-masing tidak diperkenankan membicarakan aliran yang lain secara yang merugikan aliran lain itu. Juga propaganda anti Nasionalisme, anti Agama dan anti Komunisme dilarang'*.

Pada pokoknya 4 fasal tatakrama Nasakom itu sudah diterima oleh seluruh nasion, mula-mula lewat *Deklarasi Bogor* dan kemudian diperkuat dengan ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang *Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin*. Tatakrama Nasakom ini merupakan senjata yang tepat untuk mengurus kontradiksi di antara sesama kekuatan revolusi dan untuk lebih membulatkan tekad Rakyat

Indonesia baik dalam meningkatkan konfrontasi dengan ‘Malaysia’ maupun untuk merampungkan tugas-tugas revolusi Indonesia.

Tesis menyatakan bahwa Revolusi Indonesia sekarang sudah mempunyai Garis Umumnya yang tepat, yaitu: ‘*Dengan front nasional yang bersokoguru buruh dan tani, berporos Nasakom dan berlandasan idiil Pancasila, menyelesaikan Revolusi nasional demokratis, menuju ke sosialisme Indonesia*’. Setia kepada Garis Umum ini, PKI tidak hanya menerima, tetapi dengan tak kenal jemu terus menanamkan di dalam pikiran Rakyat Indonesia mahapentingnya Pancasila sebagai alat dan filsafat pemersatu. Kaum Komunisto-phobi memfitnah, bahwa PKI menerima Pancasila ‘*hanya*’ sebagai alat pemersatu. Tetapi PKI telah menjawab, bahwa PKI menerima Pancasila justru sebagai alat pemersatu. Di sinilah bedanya antara PKI dan kaum Komunisto-phobi atau Manipolis-munafik yang meremehkan masalah persatuan kekuatan-kekuatan revolusi. PKI menerima Pancasila tidak sebagai ‘taktik’ dalam arti semacam tipu muslihat, melainkan berdasarkan analisa Marxis yang bertolak dari pandangan materialisme dialektik bahwa Pancasila merupakan kenyataan yang mencerminkan keyakinan-keyakinan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, sehingga PKI menerima Pancasila sebagai suatu keseluruhan yang tidak terpotong-potong, karena kekuatan Pancasila terletak justru di dalam kesatuannya. Atau sebagai yang dikatakan oleh Bung Karno, penggali Pancasila itu sendiri bahwa jika diperas Pancasila menjadi Trisila, dan diperas lagi menjadi Ekasila yaitu gotongroyong.

Sikap PKI yang menerima Pancasila adalah sikap yang objektif dan ilmiah dan sekali-kali tidak berarti bahwa PKI telah menjadi revisionis. Sikap PKI yang tepat terhadap Pancasila ini justru telah membikin makin terpojoknya kaum Komunisto-phobi yang karena kekalapannya telah melakukan usaha dari yang halus sampai yang paling kotor untuk memfitnah bahwa sikap PKI tersebut adalah sikap yang ‘munafik’.

Mengenai Marxisme *Tesis* menilai bahwa berkat anjuran-anjuran Bung Karno, kian banyak orang mempelajari Marxisme. Karena perkembangan ini, pimpinan Partai secara berkelebihan ingin menjadikan Marxisme milik nasion Indonesia. Dikemukakan bahwa menjadikan Marxisme milik nasion pada hakekatnya adalah untuk memenangkan secara penuh revolusi nasional demokratis dan revolusi sosialis. Dalam hal ini telah dilupakan watak klas dari Marxisme, yaitu Marxisme adalah ideologi klas buruh, hingga tidak mungkin untuk dijadikan milik nasion yang terdiri dari berbagai klas.

Tesis mengemukakan bahwa kenyataan objektif yang dihadapi PKI, yaitu, negeri kepulauan yang luas, yang banyak penduduknya, tetapi tidak merata

dan terdiri dari banyak sukubangsa yang kemajuannya tidak sama, mengharuskan PKI untuk menjadikan dirinya *partai kader dan partai massa* sekali gus, berdisiplin baja, tersebar di seluruh negeri dan terkonsolidasi dalam ideologi, politik dan organisasi. Tanpa Partai yang demikian, tidaklah mungkin bagi PKI membawa maju gerakan revolusioner Rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemenangan. Teori kepartaian Marxis-Leninis menetapkan Partai itu adalah *detasemen pelopor dari klas*, jadi haruslah Partai kader, tidak mungkin sekali gus sebagai Partai massa. Partai massa tidak mungkin menjalankan prinsip organisasi sentralisme demokratis. Menetapkan pembangunan *Partai kader dan Partai massa sekaligus* adalah berlawanan dengan teori *Partai tipe baru* ajaran Lenin. Walaupun *Tesis* mengemukakan bahwa “Haruslah senantiasa diingat, bahwa PKI adalah *Partai tipe baru, bentuk tertinggi organisasi dan pelopor dari klas buruh*, dan ini hanya mungkin apabila PKI secara teguh mendasarkan dirinya kepada prinsip-prinsip sentralisme demokratis. Melaksanakan sentralisme demokratis dalam kehidupan Partai secara konsekwen adalah syarat utama untuk terdapatnya disiplin baja di dalam Partai”. Yang terjadi ialah melenyapkan kepeloporan Partai memimpin revolusi”.

32. Lagi-Lagi Dwitunggal Rakyat dan ABRI

MENGENAI Angkatan Bersenjata, *Tesis* mengemukakan, bahwa Angkatan Bersenjata RI lahir dari pangkuan Revolusi Agustus 1945 yang memiliki tradisi anti-fasisme, anti-imperialisme, demokratis dan bercita-cita sosialisme Indonesia. Oleh karena itu adalah alat revolusi Indonesia yang juga dipimpin oleh Manipol untuk bersama-sama kekuatan revolusi lainnya mengubah Indonesia dewasa ini menjadi masyarakat Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis menuju ke sosialisme. Mayoritas anggota Angkatan Bersenjata RI terdiri dari putra-putra kaum buruh dan tani, yang merupakan sokoguru revolusi Indonesia. Kelas buruh dan PKI, bersama dengan kekuatan revolusioner lainnya, mempunyai andil besar dalam membangun Angkatan Bersenjata ini. Oleh karena itu, adalah juga kewajiban PKI untuk mengeratkan hubungan ‘*Dwitunggal Rakyat dan Angkatan Bersenjata RI*’ supaya dalam kejadian apa pun angkatan bersenjata atau bagian terbesarnya senantiasa berdiri teguh di pihak rakyat, di pihak revolusi.

Kaum imperialis asing dan agen-agenya di dalam negeri selalu berusaha keras untuk mengadu-domba rakyat Indonesia khususnya PKI,

dengan ABRI atau sebaliknya. Mereka selalu menggambarkan seakan-akan terdapat permusuhan antara kaum komunis Indonesia dengan ABRI. Sebagai jawaban untuk menanggulangi maksud jahat kaum imperialis itu, kaum komunis selalu mengibarkan tinggi semboyan *'Dwitunggal Rakyat dan Angkatan Bersenjata'* dan sepenuhnya mendukung apa yang dikatakan oleh Presiden Soekarno di dalam amanat kepada MPRS: *'Hanya satu permintaanku, yaitu supaya rakyat manipolis, yang sedang melangsungkan ofensif manipolis, bekerja sama seerat-eratnya dengan alat-alat negara untuk meringkus reaksi dan kontra-revolusi itu. Kepada alat-alat negara, polisikah dia, AD kah dia, AL kah dia, AU kah dia, jaksa kah dia, hakim kah dia, kepala daerah kah dia, aku minta supaya mereka benar-benar memihak rakyat.'*

Sesungguhnya, penilaian tentang Angkatan Bersenjata RI ini tidak sesuai dengan kenyataan. Walaupun adalah benar, bahwa ABRI lahir dalam pangkuan revolusi, mayoritas anggotanya terdiri dari anak kaum buruh dan tani, tapi kualitas ABRI ditentukan oleh kualitas pimpinannya, kualitas para perwira yang umumnya dididik di akademi-akademi militer Amerika yang anti komunis. Walaupun secara resmi ABRI menerima Manipol, tetapi dalam praktik yang membimbing tindak-tanduknya bukanlah Manipol sebagaimana yang diharapkan Bung Karno dan PKI. Maka semboyan *'Dwitunggal Rakyat dan ABRI'* tidaklah membikin ABRI menjadi dekat kepada rakyat, lebih-lebih lagi tidak menjadi bersedia mengabdikan rakyat dan menjadi alat revolusi. Semboyan ini mencabut kewaspadaan partai dan rakyat atas bahaya yang mungkin datang dari pihak kanan Angkatan Bersenjata.

Kesalahan dalam hal ini bersumber pada subjektivisme, yaitu bertolak dari keinginan subjektif agar ABRI jadi mengabdikan rakyat dan revolusi, tidak bertolak dari kenyataan objektif bahwa kualitas ABRI sesungguhnya ditentukan oleh kualitas para komandannya, yaitu perwira-perwira hasil didikan akademi militer Amerika dan perwira-perwira yang sadar anti-komunis. Ini berarti tidak menggunakan pandangan materialisme dan metode dialektika dalam menilai hakikat ABRI.

Tesis Ulang Tahun ke-45 PKI mencerminkan keyakinan pimpinan PKI bahwa tujuan strategis membentuk pemerintahan demokrasi rakyat akan tercapai dengan mulus, lewat pembentukan Kabinet Gotong-Royong. Semboyan persatuan nasional berporoskan Nasakom, di bawah pelaksanaan Demokrasi Terpimpin diharapkan bisa menjurus ke arah tujuan ini. Karena itu, secara sadar dan gigih pimpinan PKI menjunjung tinggi semboyan *Dwitunggal ABRI dan Rakyat*. Dengan telah berlangsungnya pembubaran PSI dan Masyumi serta Partai Murba dan *retooling-retooling* hingga terjadi

penyingkiran tokoh-tokoh Murba dari pimpinan Front Nasional dan pemerintah pusat serta daerah, pelarangan penerbitan surat-surat kabar partai-partai terlarang, membikin pimpinan PKI kian yakin akan tercapainya tujuan strategis pembentukan Kabinet Gotong-Royong sebagai langkah maju menuju terwujudnya sistem demokrasi rakyat di Indonesia *lewat jalan damai*.

33. Serentetan Kesimpulan Teoretis yang Problematis

TESIS 45 Tahun PKI telah mengedepankan serentetan rumusan baru yang teoretis, yang dianggap bersifat penyimpulan pengalaman sejarah Indonesia. Antara lain adalah semboyan *"persatuan nasional berporoskan Nasakom"*, *"mendukung demokrasi dipimpin di bawah Presiden Soekarno"*, *"revolusi dari atas dan dari bawah"*, *"teori dua aspek kekuasaan negara"*, *"semboyan Dwitunggal Rakyat dan ABRI"*, *"pembangunan partai kader dan partai massa sekaligus"*, *"menjadikan Marxisme milik nasional"*. Semua ini adalah rumusan teoretis yang belum diuji kebenarannya dalam praktik, dan dirumuskan berdasarkan keinginan subjektif, tidak berdasarkan pengalaman praktik objektif. Akibatnya yang fatal adalah *ketergantungan PKI pada Soekarno dan kehilangan kewaspadaan terhadap ABRI* yang sudah lama bersiap bertindak membasmi PKI.

Tesis juga memamerkan kemajuan-kemajuan yang dicapai PKI dalam memimpin perkembangan situasi, yang menunjukkan kian terpojoknya kekuatan kanan. Dalam kenyataan, D.N. Aidit, Ketua CC, sudah menjadi Wakil Ketua MPRS dan menteri ex-officio; M.H. Lukman Wakil, Ketua I CC, menjadi Wakil Ketua DPR juga menteri ex-officio; Njoto, Wakil Ketua II CC menjadi menteri diperbantukan pada presidium kabinet; Sakirman, anggota Dewan Harian Politbiro menjadi anggota Dewan Perancang Nasional; sejumlah kader partai telah diangkat menjadi menteri, seperti Ir. Setiadi Reksoprodjo, menteri listrik dan ketenagaan, Jusuf Muda Dalam menjadi menteri kepala bank sentral, dan sejumlah jabatan wakil gubernur diduduki oleh kader PKI, seperti Sujono Atmo, Wakil Gubernur Jawa Tengah, dll. Ini semua menunjukkan kian besarnya kemungkinan PKI mencapai kedudukan dominan dalam kekuasaan negara di bawah kepemimpinan Soekarno. *Amerika Serikat sangat khawatir akan perkembangan ini. Ini dianggap mengancam dan membahayakan kedudukannya di Indonesia*. Oleh karena itu, rencana penggulingan Soekarno yang sudah ditetapkan semenjak akhir tahun lima puluhan, kian digalakkan, dengan usaha pembasmian PKI demi penggulingan Presiden Soekarno.

Puncak peringatan ulang tahun ke-45 PKI berlangsung dengan diselenggarakannya sebuah rapat raksasa di Stadion Gelora Bung Karno. Bung Karno berpidato berjudul: *Subur, Subur, Suburlah PKI!* Antara lain beliau berkata: “Dalam Kongres VI PKI saya berkata, ‘yo sanak, yo kadang, yen mati aku kelangan’ (tepuk tangan). Apalagi saudara-saudara, apalagi di dalam rangka politik yang kita jalankan, yaitu politik yang sudah dari sejak dahulu saya kemukakan, yaitu menggabungkan menjadi satu semua tenaga revolusioner progresif, dalam bahasa asingnya, *de samenbundeling van alle progressieve revolutionnaire krachten*, menggabungkan menjadi satu semua tenaga-tenaga revolusioner progresif. Di dalam kerangka politik yang demikian itu maka sebenarnya bukanlah satu barang yang aneh, bahwa pemerintah Republik Indonesia merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai mandataris daripada MPRS merangkul kepada PKI, bahwa saya sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia merangkul kepada PKI (tepuk tangan panjang), sebab siapa yang bisa membantah bahwa PKI adalah unsur yang hebat di dalam penyelesaian Revolusi Indonesia ini? (tepuk tangan panjang). Tadi telah disitir oleh Kawan Aidit apa sebabnya menurut pendapat saya PKI menjadi besar. PKI *ndodro*, *ndodro* itu, lihat tangan saya *lho*, menjalar, menjalar, menjalar. PKI menjadi kuat, PKI menjadi sekarang beranggotakan 3 juta, pemudanya 3 juta, simpatisannya 20 juta. Apa sebabnya PKI demikian? Ialah oleh karena PKI adalah konsekuensi progresif revolusioner (tepuk tangan). Nah, sudah barang tentu Saudara-saudara, saya yang berpendapat bahwa revolusi Indonesia ini tidak dapat diselesaikan jikalau tidak digabungkan menjadi satu semua, semua tenaga progresif revolusioner, saya merangkul PKI, saya berkata PKI, *yo sanakku, yo kadangku, yen mati aku melu kelangan* (tepuk tangan).

“Saudara-saudara, pernah saya ceriterakan kepada saudara-saudara, dan tadi pun sudah disitir, dikatakan oleh Kawan Aidit, beberapa senjata ampuh yang saya berikan kepada revolusi Indonesia, ialah antara lain Pancasila, antara lain penggalangan semua tenaga progresif revolusioner dalam Nasakom, antara lain Manipol-Usdek, antara lain ‘Berdikari’. Nasakom ini, Saudara-saudara, pernah saya ceriterakan kepada khalayak ramai Indonesia sendiri, bahwa utusan-utusan daripada perayaan Dasawarsa A-A tempo hari, kagum melihat Nasakom, heran bahwa Indonesia bisa menjadi besar dan kuat, heran bahwa Indonesia yang tadinya dikatakan oleh kaum imperialis akan lekas hancur, Indonesia akan lekas gugur, Indonesia rakyatnya akan mati kelaparan, Indonesia kacau-balau, bahwa Indonesia itu sebaliknya, ternyata kuat, rakyatnya ternyata teguh, rakyatnya ternyata sehat-sehat, karena Indonesia menjalankan politik Nasakom. Tadi Bung Aidit berkata sebagai bantahan terhadap kepada kaum imperialis yang mengatakan

bahwa Indonesia kekurangan pangan, bahwa Indonesia kekurangan makanan, bahwa rakyat Indonesia malahan saking banyaknya makanan, ubi singkong dipakai untuk menutup jebolnya gili-gili. Mana ada di dunia ini yang menutup jebolnya gili-gili dengan ubi-ubi singkong Saudara-saudara. Hanya Indonesia sendiri saking banyaknya makanan (tepuk tangan).”

Nasakom menjadi kekaguman semua utusan-utusan Dasawarsa A-A. Nasakom menjadi, malahan satu contoh bagi negara-negara Asia—Afrika yang akan melanjutkan perjuangannya menentang imperialisme. Sesudah itu dimengerti oleh semua utusan-utusan saudara, maka gampanglah bagi saya untuk menerangkan kepada mereka apa sebabnya Indonesia mengambil inisiatif untuk mengadakan Conefo, *Conference of the New Emerging Forces*. Utusan-utusan ini sebetulnya saudara-saudara terlebih dahulu telah kagum kepada Indonesia bahwa Indonesialah yang mengemukakan ide *New Emerging Forces* ini, bukan negara lain. Indonesia yang mengemukakan ide *New Emerging Forces*. Indonesia yang bekerja keras untuk melaksanakan penggabungan dari semua tenaga *New Emerging Forces*. Indonesia sekarang hendak mengadakan Conefo, *Conference of the New Emerging Forces*. Sebelah ini saudara-saudara, sebelah Gelora Bung Karno, di sana sekarang ini sedang dibangun perlengkapan-perengkapan, gedung-gedung untuk *Conference of the New Emerging Forces*. Saya sekarang Saudara-saudara, memanggil kepada seluruh rakyat Indonesia untuk membantu kepada pembangunan ini agar supaya tahun muka Saudara-saudara, benar-benar di Indonesia, di Jakarta, bisa diadakan *Conference of the New Emerging Forces* itu. Nah, sesudah utusan-utusan dari Dasawarsa itu melihat hebatnya, manfaatnya politik Nasakom, mudah bagi saya untuk menerangkan kepada mereka bahwa Conefo adalah sebetulnya satu Nasakom Internasional. Apa sebab Nasakom Internasional? Sebabnya ialah di dalam Conefo itu hendaknya kita gabungkan semua, asal tenaga anti imperialis baik dari negara-negara yang capnya *nasional* maupun dari negara-negara yang capnya *agama* maupun daripada negara-negara yang capnya *komunis*, bahkan daripada negara-negara kapitalis yang di situ ada perkumpulan-perkumpulan atau tenaga-tenaga progresif saudara-saudara. Dus Conefo menggabungkan, ya negara-negara *nasionalis* yang anti-imperialis, ya negara-negara *agama* yang anti-imperialis, ya, negara *komunis*, ya negara-negara lain, Saudara-saudara, yang di dalamnya adalah tenaga-tenaga progresif. Oleh karena itu, maka aku bisa menerapkan kepada utusan-utusan Dasawarsa itu bahwa Conefo adalah satu Nasakom Internasional”.

Di sini, di kalangan Indonesia sendiri, saudara-saudara, ada orang-orang yang menanya kepada saya, Bung atau Pak, kenapa politik Bung Karno

menggabungkan semua tenaga anti-imperialis, semua tenaga revolusioner dalam perkataan Nasakom? Kenapa 'Kom'? Kenapa kok tidak seperti tahun dua puluh enam waktu Bung Karno buat pertama kali mencetuskan ide persatuan daripada tenaga-tenaga revolusioner ini? *Nasionalis, Islam, Marxisme* atau *Nasionalis, Agama, Marxis*, kenapa Bung Karno tidak memakai perkataan Nasamarx? Kok pakai perkataan Nasakom? Kenapa 'Kom'? Kenapa tidak 'Sos'? Kenapa tidak 'Marx'? Nasamarx atau Nasasos? Kok Bung Karno memakai perkataan Nasakom? Jelaslah di sini Saudara-saudara, dengarkan, perkataan yang paling dicatut, dicatut oleh pencoleng-pencoleng poilitik, oleh coro-coro politik, perkataan yang paling dicatut pencoleng-pencoleng dan coro-coro ini ialah perkataan Marxisme saudara-saudara. Saudara-saudara mengetahui bahwa misalnya PSI, Partai Sosialis Indonesia yang sudah saya bubarkan itu, PSI itu selalu menepuk dada: Kami Marxis, kami Marxis, kami Marxis! Saya berkata mereka bukan Marxis! Mereka adalah pencoleng daripada Marxisme (*tepuk tangan panjang*). Karena itu aku tidak mau memakai perkataan Nasamarx. Kalau aku memakai perkataan Nasamarx, jangan-jangan nanti orang-orang PSI juga ikut-ikut di dalam Nasamarx ini Saudara-saudara. Padahal mereka adalah kontra-revolusioner. Padahal mereka adalah pencoleng Marxisme! (*tepuk tangan panjang menggemuruh*).

Kecuali itu saya dengan sengaja memakai perkataan 'Kom', Nasakom, oleh karena di Indonesia ini banyak orang yang fobi saudara-saudara, fobi kepada 'Kom'. Fobi kepada 'Kom' artinya takut kepada 'Kom' khususnya takut kepada PKI, benci kepada PKI, hendak menghancurkan-leburkan PKI. Terus terang saja, terus terang saja di kalangan Nas ada yang komunisto-fobi, di kalangan agama ada yang komunisto-fobi, di kalangan angkatan bersenjata dulu ada yang ber-komunisto-fobi. Nah, ini penyakit fobi ini hendak saya berantas Saudara-saudara, hendak saya berantas. Maka oleh karena itu dengan sengaja di dalam *penggabungan nationale revolutionnaire krachten* ini saya pakai perkataan 'Kom', 'Kom', 'Kom', sekali lagi 'Kom' (*tepuk tangan menggelegar*). [Bung Karno, *Subur, Subur, Suburlah PKI*, Pidato Presiden Soekarno pada rapat raksasa ulang tahun ke-45 PKI, Yayasan Pembaruan, Jakarta, 1965].

17 Agustus 1965, Presiden Soekarno berpidato dengan judul *Capailah Bintang-Bintang di Langit (TAKARI)*. Mengenai agresi imperialisme Amerika Serikat di Vietnam, Bung Karno berkata: "Mereka yang datang dari jarak sejauh separo bola-bumi, mereka itu namanya 'pembela perdamaian', sedang rakyat Vietnam yang tinggal di negerinya sendiri, mengurus urusannya sendiri dan mengatur tata hidupnya sendiri, rakyat Vietnam ini

dinamakan 'agresor'. Salah satu harus gila, Saudara-saudara: Vietnam atau Amerika Serikat. Kedua-duanya gila tidak mungkin, kedua-duanya waras pun tidak mungkin! Saudara-saudara bisa menyimpulkan sendiri mana yang waras dan mana yang gila!

Akhirnya 'alasan' AS mengapa melakukan 'escalation' atau peperangannya di Indocina adalah 'untuk mencegah Vietnam menjadi negeri komunis.' Saya tidak pernah mendengar Paman Ho berkeberatan AS merupakan negeri kapitalis, jika rakyat Amerika memang menghendaki demikian, kenapa AS berkeberatan Vietnam 'menjadi negeri komunis' jika rakyat Vietnam menghendaki demikian? Hak menentukan nasib sendiri berarti pula hak menentukan macam pemerintah yang dikehendaki oleh sesuatu rakyat di negerinya sendiri. Ini bahkan tercantum dalam '*Declaration of Independence*' Amerika sendiri! Ataukah dokumen besar ini telah dilemparkan sendiri oleh bangsa yang melahirkannya?

Kalau agresi AS terhadap Vietnam itu kita biarkan, maka dia akan merupakan bahaya besar bagi seluruh tata hidup internasional kita. Sekarang agresi itu terjadi di Vietnam, besok dia mungkin terjadi di bumi lain. Dia malahan sudah terjadi juga di Dominika. Maka dari itu, demi keselamatan masing-masing dan demi keselamatan kolektif kita, kita bangsa-bangsa yang cinta merdeka dan cinta damai, harus melawan agresi AS itu, dan harus aktif memberikan sokongan kita kepada Saudara-saudara di Vietnam itu.

Kepada pemerintah AS, ingin saya nasihatkan—kuharap mereka masih bisa mendengar nasihat!—supaya mengakui kesalahannya dan segera menarik diri sama sekali dari Vietnam dan dari seluruh Indocina. Percuma mereka memusuhi Republik Demokrasi Vietnam 'tak sudi berunding', karena apabila AS tidak menarik diri sama sekali dari Vietnam, semua orang melihat justru AS lah yang tidak sudi penyelesaian secara damai. Baik disadari oleh AS bahwa satu-satunya alternatif baginya adalah keluar sama sekali dari seluruh Asia Tenggara! Jika mereka emoh menarik diri, mereka bisa kehilangan segala-galanya, segala-galanya! Hai, Amerika dan Inggris! *Zaman ini bukan zamannya imperialisme lagi. Zaman ini adalah zaman anti-imperialisme. Zaman ini adalah zaman hancurnya imperialisme!"*

"... aku tahu bahwa tak pernah imperialisme itu menyerah dengan sukarela. Mereka hanya menyerah, jika mereka dipaksa, yaitu dipaksa dengan kekuatan yang mahadahsyat, dengan *machtsvorming* dan *machtsaanwending* nasional dan internasional. Di sinilah letak pentingnya Conefo, karena melalui Conefo itu kita akan menggalang '*samenbundeling van alle internationale revolutionnaire krachten*', yang kusebut juga 'nasakom

internasional—gabungannya negara-negara *nasionalis*, negara-negara *agama* dan negara-negara *komunis* dalam skala dunia, untuk melabrak babak-belur nekolim dan untuk membangun dunia kembali, membangun dunia baru—dunia tanpa imperialisme dan tanpa eksploitasi.” [Presiden Soekarno, *Tjapailah Bintang-Bintang di Langit (TAKARI)*, Pidato pada hari ulang tahun ke-20 RI, 17 Agustus 1965, Penerbit PT. Rakjat, Djakarta, hal.24]

Dalam pada itu, kekuatan anti-komunis kian terpukul dengan ditangkapnya Ketua *Partai Murba*, Sukarni, pada bulan Januari 1965. Dengan Keputusan Presiden Nomor 291 Tahun 1965, mulai tanggal 21 September 1965 Partai Murba dibubarkan. Dalam *reshuffle* kabinet, Presiden Soekarno mengganti Menteri Perdagangan Adam Malik. Memutuskan mengeluarkan semua wakil Partai Murba dari pimpinan Front Nasional, memerintahkan pencabutan izin-terbit semua surat kabar BPS dan Partai Murba.

34. Memuncaknya Reaksi Anti-PKI dan Usaha Menggulingkan Bung Karno

23 Agustus 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.16 tentang Pencabutan Undang-Undang Penanaman Kapital Asing di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa “Berdasarkan pada prinsip berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara asing, untuk melipatgandakan produksi nasional demi mempertinggi tingkat hidup rakyat Indonesia dalam menyelesaikan tahap pertama untuk memasuki tahap kedua revolusi Indonesia, yaitu tahap sosialisme Indonesia, berdasarkan Pancasila perlu adanya pembantingan setir dalam menghadapi operasi modal asing di Indonesia. Penanaman atau operasi modal asing menurut sifatnya tidak lain daripada menghisap kekayaan dari negara Republik Indonesia dan menjalankan penghisapan manusia atas manusia, dan karena itu membawa bencana bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu riwayat penanaman atau operasi modal asing yang mentransfer keuntungannya berlimpah-limpah ke luar negeri *harus diakhiri untuk selama-lamanya* dengan mencabut Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia” [Lembaran Negara, Tahun 1965, No. 78].

Dengan pencabutan *Undang-Undang Penanaman Modal Asing* ini berarti, bahwa penanaman atau operasi modal asing di Indonesia tidak akan ada lagi, sedangkan yang sudah ada harus diakhiri, atau dilikuidasi. Maka kian bergeloralah gerakan anti-imperialisme terutama anti-Amerika. Amerika

Serikat yang sedang mulai kewalahan menghadapi Perang Vietnam, jadi tambah mata gelap menghadapi perkembangan di Indonesia. Tak ayal lagi, *Soekarno harus digulingkan*. Maka semua unsur kekuatan pendukung Amerika di Indonesia digalakkan demi usaha penggulingan Bung Karno. *PKI yang jadi pendukung tangguh Bung Karno, pertama-tama harus dilenyapkan*. Untuk itu, haruslah diciptakan syarat, yaitu adanya alasan buat bertindak drastis bagi Angkatan Darat terhadap PKI.

Bergejolaklah kampanye perang syaraf dengan berbagai isu: Disebarkan berita “Bung Karno sakit berat”, “adanya dewan jenderal yang mau kudeta”, “PKI akan merebut kekuasaan”. Semua menjurus ke arah terciptanya syarat bagi Angkatan Darat untuk bertindak drastis terhadap PKI yang merupakan hantu bagi Amerika Serikat.

XI

CIPTAKAN DASAR UNTUK BERTINDAK REPRESIF DEMI PEMBASMIAN PKI DAN PENGGULINGAN BUNG KARNO

NSC—“Politbiro Perang Dingin”—memainkan peranan menentukan, adalah dalang dalam pengendalian usaha pembasmian kekuatan kiri Indonesia. NSC-lah yang merekayasa, menetapkan berbagai langkah dan tindakan yang harus diambil. Di samping memperkuat kerja sama dengan Angkatan Darat dan meningkatkan perlawanan terhadap PKI, maka kesimpulan lainnya dari NSC, yang sangat penting adalah *menciptakan dasar untuk bisa bertindak represif* terhadap PKI. Dalam bulan Maret 1965, Duta Besar AS, Jones, menyatakan pada seorang pejabat tinggi Amerika Serikat, “Menurut pandangan kami, tentu saja, *sebuah usaha coup yang gagal dari PKI* akan membikin perkembangan efektif untuk memulai penjungkir-balikan kecenderungan-kecenderungan politik di Indonesia—di mana Angkatan Darat bisa bebas untuk membasmi kaum komunis—”¹

“Setahun sebelumnya, Duta Besar Jones sudah mencoba mendorong Nasution, supaya Angkatan Darat mengambil masalah-masalah dalam tangannya untuk melawan PKI.”²

¹ George McTurnan Kahin, *Subversion as Foreign Policy*, hal.225, *The New Press New York*, 1995, *Southeast Asian Edition*, huruf tebal miring dari pengutip.

² *Idem*.

Aswi Warman Adam menulis, “Dalam situasi yang panas ini bergulir isu Dewan Djenderal, Dokumen Gilchrist, dan rumor sakitnya Presiden Soekarno. Ketiga hal ini mungkin saja dimunculkan oleh pihak yang berkepentingan dengan konstelasi politik Indonesia. Asumsinya adalah *pertama*, AS takut PKI berkuasa dan tidak suka kepada Soekarno; *kedua*, tidak mau secara langsung mengambil kekuasaan dari Bung Karno karena tidak akan didukung rakyat; *ketiga*, PKI memiliki massa untuk berdemonstrasi, tetapi tidak punya pasukan dan senjata untuk berontak. Salah satu skenario AS—ternyata efektif—adalah memprovokasikan PKI melakukan suatu gerakan yang kemudian ditumpas oleh tentara dan pada saat yang sama Soekarno digerogeti kekuatannya.” [Aswi Warman Adam, 1965: *Orang-Orang di Balik Tragedi*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta, 2009, hal.viii].

21 September 1965, Galbraith mengirim memorandum ke Kementerian Luar Negeri AS yang antara lain berisikan: “Kesimpulan kami mengenai Soekarno adalah: dia sedang mendorong negerinya menjadi dikuasai oleh kaum komunis, ... dan ... jika kian lama dia berkuasa, kian mendekatlah Indonesia mencapai tujuan ini ... oleh karena itu segala sesuatu yang membikin Soekarno kian nyaman dan memperpanjang usianya tidaklah menjadi kepentingan Amerika Serikat.”¹

Jauh sebelum itu, pada tanggal 23 April 1965, dalam surat kepada Asisten Menlu Urusan Timur Jauh, William Bundy, Dubes Howard Jones menyatakan bahwa dia “mengetahui rencana rahasia untuk suatu kudeta di sini dan menulis kepada anda untuk memberitahukan anda kemungkinan tersebut.” Jones menyatakan bahwa dia telah memberitahu hanya pada satu orang lain di Jakarta, Edward Masters, Kepala Seksi Politik Kedubes, “karena segala indikasi yang menyangkut pemerintah AS juga bisa merupakan ciuman maut tidak hanya terhadap usaha itu sendiri, namun terhadap orang-orang yang terlibat.” Jones menjamin Bundy bahwa informasinya berdasarkan “kontak pribadi dengan salah seorang pemimpin kelompok kudeta tersebut yang mewakili elemen-elemen sipil dan militer yang penting.” [Johnson Library, *National Security File, Country File, Indonesia*, Vol.IV, Memos. 3/65—9/65].

Di bidang internasional, pejabat Amerika menilai Indonesia bagaikan virus, khawatir akan pengaruh Indonesia yang giat mempropagandakan persatuan berporoskan nasakom. Dalam sebuah telegram dinyatakan bahwa “Pemerintah Indonesia sekarang ini telah menjadi sangat bermusuhan dengan apa yang paling pemerintah AS upayakan secara internasional saat

¹ *Idem*.

ini. Bila virus Indonesia diikuti dan menyebar di dalam dunia AA ini akan menjadi front pendobrak tersembunyi bagi komunisme internasional. Konsep koalisi 'nasakom internasional' dapat menjadi alat nyata bagi Cina komunis dan tidak diragukan memiliki lebih banyak daya tarik di dalam Islam-Timur Tengah yang terjepit ketimbang jenis revolusi penuh kekerasan yang menjadi arahnya komunis yang murni tanpa kompromi." [Telegram dari Kedubes di Jakarta untuk *State Department* 2641. *Embtel* 2640, Jakarta, 5 Juni 1965. 0825Z].

Usaha-usaha memprovokasi PKI agar terperosok mengambil sikap untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah, tidak berhasil. Berbagai kebijaksanaan pemerintah yang menekan atau merugikan PKI telah dihadapi oleh pimpinan PKI dengan cara menghindari konflik terbuka dengan pemerintah. Lebih-lebih lagi dengan Angkatan Darat. Dalam keadaan pimpinan Angkatan Darat mengambil langkah-langkah mendukung atau mensponsori pembentukan badan-badan atau organisasi-organisasi anti-komunis seperti *Liga Demokrasi*, *SOKSI*, *Manikebu*, *BPS*; PKI mengambil langkah menghindari konflik dengan Angkatan Darat. Bahkan PKI mengangkat semboyan "mengeratkan hubungan dwitunggal rakyat dengan angkatan bersenjata", "Angkatan Bersenjata RI bukanlah angkatan bersenjata yang reaksioner", "Angkatan Bersenjata RI adalah anak rakyat", "ABRI lahir dari revolusi". Dalam PKI sendiri ditegakkan kepercayaan, bahwa tentara adalah anak rakyat yang bersenjata. Tak ditanamkan kecurigaan sedikit pun terhadap Angkatan Darat. Bahkan dibangun semangat ingin kerja sama dengan Angkatan Darat. Pada awal tahun enam puluhan, dengan lancar organisasi-organisasi massa di bawah pimpinan PKI aktif dalam pembentukan organisasi-organisasi kerja sama dengan militer seperti *Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM)*, *Badan Kerjasama Buruh Militer (BKS Bumil)*, *Badan Kerjasama Wanita Militer*. Ini semua mengabdikan kepada strategi PKI dengan jalan damai meneruskan revolusi sampai selesai..

Jalan damai meneruskan revolusi ini mempunyai akar yang dalam pada PKI. Mengenai jalan revolusi, pada tahun 1953, Aidit menulis bahwa "Jalan Mao Tse-tung adalah satu-satunya jalan bagi revolusi Indonesia". "Tetapi jalan ini baru berguna, jika kita berhasil mempersatukannya dengan praktik yang konkret daripada revolusi Indonesia. Inilah yang kita maksudkan, bahwa revolusi Indonesia mempunyai jalannya sendiri. Ini berarti, bahwa kita harus banyak mempelajari Mao Tse-tung dan lebih banyak lagi mempelajari sifat-sifat nasional yang khusus dari negeri kita." Aidit menganjurkan supaya "kita harus belajar dari Kawan Mao Tse-tung tentang kelas-kelas dalam masyarakat, tentang tenaga pendorong dalam revolusi,

tentang hegemoni proletariat, tentang pertumbuhan revolusi borjuis-demokratis menjadi revolusi sosialis, tentang rol partai komunis dalam perjuangan besar seluruh rakyat dan tentang hubungan erat antara partai dengan massa."¹

Menurut Stalin, *Djalan Mao Tse-tung* adalah jalan kemenangan revolusi Tiongkok, "revolusi bersenjata melawan kontra-revolusi bersenjata. Ini adalah salah satu kekhususan revolusi Tiongkok dan juga salah satu keunggulan revolusi Tiongkok."²

Mao Zedong mengajarkan, jalan revolusi Tiongkok adalah jalan revolusi "dari desa mengepung kota"; "jalan *Gunung Cingkang*", yaitu "kekuasaan politik lahir dari laras senapan". Revolusi Tiongkok dimenangkan dengan pelaksanaan tiga senjata utama revolusi Tiongkok, yaitu adanya "partai yang berdisiplin, yang dipersenjatai dengan teori Marxisme-Leninisme, yang menggunakan metode otokritik dan yang berhubungan dengan massa rakyat; tentara di bawah pimpinan partai yang demikian; front persatuan dari semua kelas revolusioner dan semua golongan revolusioner di bawah pimpinan partai yang demikian."³

Kemenangan Revolusi Tiongkok tak ayal lagi sangat mengilhami kaum komunis Indonesia. Di kalangan kader PKI ada usaha untuk belajar dari pengalaman revolusi Tiongkok. Awal tahun lima puluhan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sejumlah karya Mao Tsetung, juga beredar terbitan bahasa Inggris atau Belanda: *Masalah-Masalah Strategi Peperangan Revolusioner Tiongkok*, *Tentang Praktik*, *Tentang Kontradiksi*, *Pengantar Kata 'Komunis'*, *Mengapa Kekuasaan Merah Tiongkok Dapat Hidup?*, *Pidato di Depan Sidang Perundingan Seni-Sastra di Yen-an*, *Membetulkan Pikiran Yang Keliru di Dalam Partai*, dan lain-lain. Sesuai dengan syarat-syarat sejarah konkret Indonesia pada waktu itu, dalam belajar dari revolusi Tiongkok, PKI meninggalkan "jalan revolusi bersenjata" dan menempuh jalan damai, jalan parlementer. Jalan damai ini membimbing semua kegiatan PKI demi penyelesaian revolusi Agustus.

Dalam Kongres Nasional V PKI, 1954, dirumuskan bahwa "seluruh pekerjaan PKI didasarkan atas teori-teori Marx, Engels, Lenin, Stalin, dan

¹ D.N. Aidit, *Jalan Mao Tse-Tung*, Majalah *Bintang Merah*, Tahun IX, Desember 1953, hal.543—544, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1953.

² Y.W. Stalin, *O Pyerspyektivakh Revolyutsii V Kitaye—Tentang Perspektif Perspektif Revolusi di Tiongkok*, Kumpulan Karya, Jilid VIII, edisi bahasa Rusia, hal.363, *Gosudarstvennoye Izdatyestvo Politiceskoi Literaturii*, Moskwa, 1953.

³ Mao Tsetung, *Tentang Diktatur Demokrasi Rakyat*, Pilihan Karya Mao Tsetung, Jilid IV, hal.507—508, Pustaka Bahasa Asing, Peking, 1968.

Pikiran Mao Tsetung, serta Koreksi Besar Musso.”

“Revolusi Indonesia dalam tingkat sekarang adalah revolusi demokrasi rakyat, yaitu revolusi daripada massa rakyat yang luas, yang dipimpin oleh proletariat dan ditujukan untuk melawan imperialisme, feodalisme, dan kaum borjuis komprador.”¹

Dinyatakan bahwa PKI berjuang untuk mewujudkan satu pemerintah demokrasi rakyat, yang mendasarkan dirinya atas massa, suatu pemerintah front persatuan nasional yang dibentuk atas dasar persekutuan kaum buruh dan kaum tani di bawah pimpinan kelas buruh. Pemerintah ini tidak merupakan diktator proletariat, melainkan pemerintah diktator rakyat. Ia tidak melakukan perubahan-perubahan sosialis, melainkan perubahan-perubahan demokratis, yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya melalui jalan demokrasi dan kemajuan.

Pelaksanaan putusan-putusan Kongres Nasional V telah membawa PKI mencapai kemenangan gemilang dalam pemilihan umum pertama 1955 di Indonesia. PKI tampil jadi partai nomor empat, menyusul Masyumi, PNI, dan NU. Pemilihan-pemilihan umum daerah yang berlangsung tahun 1957 menghasilkan PKI tampil sebagai partai terbesar di seluruh Indonesia. Jalan damai, jalan parlementer yang ditempuh pimpinan PKI nampaknya memberi harapan bagi masuknya PKI dalam kekuasaan negara RI. Dari pengalaman empiris menjelang tahun enam puluhan, adalah benar kesimpulan Richard Nixon, bahwa *memang sulit untuk mengalahkan PKI lewat pemilihan umum*. Lebih-lebih lagi setelah Presiden Soekarno tampil dengan *Konsepsi Presiden* mengenai pembentukan kabinet gotong-royong, di mana wakil PKI ikut dalam kabinet. Ditambah lagi dengan *Manipol* dan *Usdek* serta gagasan persatuan nasional berporoskan *nasakom*, PKI sudah diberi dasar politik yang sangat kuat untuk memiliki hak sah menduduki kursi pemerintahan. Bahkan dalam pengaturan kembali susunan kabinet Januari 1965, D.N. Aidit jadi Menteri Koordinator/Wakil Ketua MPRS, Njoto kemudian menjadi menteri negara diperbantukan pada presidium kabinet, Ir. Sakirman menjadi Wakil Ketua Depernas, dan di sejumlah provinsi wakil-wakil PKI atau simpatisan PKI sampai menduduki kedudukan wakil gubernur. Dalam kabinet sudah masuk tokoh-tokoh Partindo seperti Oey Tjoe Tat, Armunanto, juga tokoh lainnya, Ir. Setiadi Reksodipuro, A. Astrawinata, S.H., dan lain-lain. Demikian pula di tingkat kabupaten dan kota-kota besar, terdapat pimpinan PKI yang tampil menjadi bupati serta

walikota dan wakil walikota. PKI mendemonstrasikan sukses-suksesnya yang gemilang dalam menempuh jalan damai menuju ke puncak kekuasaan negara. Ini bisa terjadi dalam kondisi khusus Indonesia, terutama dengan adanya faktor Soekarno sebagai presiden yang bercita-cita membangun sosialisme di Indonesia. Gagasan-gagasan Soekarno membangun sosialisme Indonesia dan politik luar negerinya adalah sehaluan dengan isi program dan politik PKI. Karena itu mendapat dukungan sepenuhnya dari PKI. Walaupun rintangan besar dan kuat dari golongan komunisto-fobi dan perwira-perwira kanan Angkatan Darat untuk mencegah masuknya PKI dalam pemerintah pusat, Soekarno mengambil langkah-langkah yang memberi jalan bagi masuknya PKI sesuai dengan gagasannya persatuan nasional berporoskan *nasakom*. Dalam pada itu, kekuatan anti-komunis mendapat pukulan keras dengan putusan-putusan Bung Karno membubarkan PSI-Masyumi karena mendukung pemberontakan PRRI—Permesta, membubarkan dan melarang badan-badan, organisasi-organisasi atau gerakan-gerakan anti-komunis seperti Liga Demokrasi, Manikebu, Badan Pendukung/Penyebarkan Soekarnoisme, dan Partai Murba. Dan surat-surat kabar yang membawakan suara *Perang Dingin*, yaitu komunisto-fobi dilarang terbit. Maka perkembangan ini adalah cocok dengan isi memorandum Galbraith ke Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam menilai Soekarno. Tak pelak lagi, *di mata penguasa Amerika Serikat, Soekarno harus disingkirkan*.

Bung Karno dan PKI kian tinggi mengangkat semboyan anti-Amerika. Puncak-puncak anti-Amerika ini termanifestasi dalam bentakan Bung Karno: *“go to hell with your aids”* terhadap bantuan Amerika Serikat, pengusiran *Peace Corps* dari Indonesia, tindakan terhadap *Ampai* dan Bill Palmer, Indonesia menarik diri dari keanggotaan *International Olympic Committee* yang dikuasai Amerika Serikat, Bung Karno memutuskan untuk Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB karena Amerika mendukung masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Bung Karno mengajukan gagasan dan mengambil langkah-langkah untuk penyelenggaraan *Conefo*, konferensi negara-negara Nefo dan pengambil-alihan berbagai maskapai milik kapital Amerika.

Semenjak awal tahun 1965, suasana tegang kian mencengkam Indonesia. Situasi internasional juga sangat tegang. Kampanye mengganyang Malaysia merupakan satu unsur meningkatkan ketegangan-ketegangan di Indonesia. Dalam pada itu, Indonesia, terutama Bung Karno sibuk mengusahakan suksesnya *Konferensi Asia-Afrika* kedua di Aljazair.

23 Juni 1965, dengan susunan delegasi *Nasakom*, Bung Karno memimpin

¹ *Konstitusi PKI, Program Umum*, majalah *Bintang Merah*, Tahun IX—Februari/Maret 1954, hal.112—113.

delegasi Indonesia berangkat ke Kairo untuk menuju Aljazair. Pada saat akan berlangsungnya sidang menteri-menteri luar negeri yang mempersiapkan Konferensi Tingkat Tinggi dan pembukaan Konferensi A-A kedua itu, terjadilah *coup* di Aljazair. Menteri Pertahanan Huari Boumedienne menggulingkan Presiden Ben Bella. Maka terpaksa Konferensi A-A II ditunda. Dalam proses persiapan Konferensi A-A kedua inilah, Indonesia dengan gigih berkampanye mengganyang Malaysia.

Brian May menulis, “Ketika Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, dia tidak hanya didukung oleh semua partai politik, tapi juga oleh pimpinan Angkatan Darat, yang waktu itu juga takut akan imperialisme Barat. Jenderal Nasution mengingatkan (dalam wawancaranya kepada Brian May pada Januari 1973) bahwa dalam pemberontakan-pemberontakan daerah, seorang pilot Amerika Serikat, Allan Pope, tertangkap ditembak jatuh ketika melakukan pemboman di Ambon dalam bulan April 1958 yang bertolak-terbang dari lapangan Clark, pangkalan udara Amerika Serikat dekat Manila. Nasution mengatakan bahwa Angkatan Darat menganggap pangkalan-pangkalan Inggris di sekitar Selat Malaka adalah ancaman-ancaman semenjak tahun-tahun pertama RI.”¹

“Bagi Indonesia, pembentukan Malaysia berarti terkonsolidasinya kekuatan militer Inggris di depan pintu tangganya. Soekarno dan Angkatan Darat mencurigai Inggris, sebagaimana Amerika Serikat yang sudah membantu pemberontak-pemberontak daerah.”²

Kampanye mengganyang Malaysia ikut menciptakan suasana tegang. Dalam keadaan sekian lama suasana tegang di Indonesia, “komplotan-komplotan berkecamuk. Sudah enam kali usaha membunuh Soekarno dilakukan. Adalah beralasan untuk mencurigai, walaupun bukti-bukti hanyalah berupa tidak langsung, bahwa di antaranya CIA telah memainkan peranannya.”³

Hubungan antara Soekarno dan pimpinan Angkatan Darat, terutama T.B. Simatupang dan A.H. Nasution senantiasa tidak harmonis semenjak awal sejarah Republik Indonesia. Ketegangan pernah berkembang hingga menjadi “serangan yang paling mengagumkan yang nampaknya bagaikan satu percobaan *coup* pada 17 Oktober 1952, ketika perwira-perwira Angkatan Darat mengorganisasi demonstrasi massal, membariskan tank-tank di depan istana presiden dan mencoba memaksa Soekarno untuk membubarkan

parlemen. Soekarno menjawab, bahwa dia tidak bisa bertindak tanpa berkonsultasi dengan kabinet. Dalam batas-batas bahwa peristiwa ini sangat aneh dan rumit, kejadian ini adalah satu prototipe dari *putsch* 1 Oktober 1965.”¹

Pemberontakan-pemberontakan daerah, hingga memuncak sampai berdirinya republik tandingan *PRRI—Permesta* adalah hasil tindak-tanduk perwira-perwira Angkatan Darat yang mendapat dukungan CIA untuk melawan Soekarno.

Ketegangan-ketegangan kian memuncak di Indonesia. Perang syaraf berlangsung dengan berbagai kampanye yang mengacaukan masyarakat berupa: berita Bung Karno sakit berat, Bung Karno akan meletakkan jabatan, adanya Dewan Jenderal yang akan melakukan *coup*, bahaya PKI akan melakukan *coup*, dan sebagainya. Ini terjadi pada saat *Perang Dingin* kian berkecamuk di Asia. Amerika sedang meningkatkan perluasan Perang Vietnam. Amerika melakukan pemboman besar-besaran atas Vietnam Utara. Di Vietnam Selatan berlangsung berkali-kali *coup* yang direkayasa oleh CIA. *Coup-coup* ini bertujuan mendirikan pemerintah anti-komunis untuk melawan dan membasmi kaum komunis Vietnam Utara. *The New York Times* 7 November 1963 memaparkan, bahwa 1 November berlangsung *coup d’etat* di Saigon. “Setiap orang di Saigon tahu, bahwa duta besar baru Amerika, Cabot Lodge, adalah tak menyenangkan keluarga Ngo yang berkuasa, yang dianggap tak mampu memenangkan perang di Vietnam.... Ketika Ngo Dinh Diem menilpon Dubes Cabot Lodge, dubes menyatakan bahwa dia memperhatikan keselamatan presiden dan bahwa dia akan berbuat sebisa mungkin untuk menjamin pelayanan yang korek terhadap presiden dan keluarga. Paginya pasukan marinir menyerbu istana presiden, tapi Ngo Dinh Diem dan Ngo Dinh Nu sudah lenyap.” *Coup d’etat* ini dilancarkan oleh satu ‘*Dewan Jenderal*’ yang segera mengumumkan berdirinya ‘*Dewan Militer Revolusioner*’ di bawah pimpinan jenderal Duong Van Minh, Tran Van Don, dan Ton That Dinh, yang semulanya adalah pendukung Ngo Dinh Diem.”²

30 Januari 1964, jam 03:30 pagi, Jenderal Nguyen Khanh seorang perwira yang hampir-hampir tak dikenal, bersama Kolonel Cao Van Vien dan Kolonel Nguyen Chanh Thi menggulingkan ‘*Dewan Militer Revolusioner*’. Dalam tempo kurang dari 90 hari, di Saigon berlangsung dua kali *coup d’etat*. Sebelum terjadinya *coup d’etat* yang berturut-turut ini, koran *Times of Vietnam*

¹ Brian May, *The Indoneian Tragedy*, hal.92, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, Hentley and Boston, 1978]

² *Idem*, hal.93.

³ *Idem*.

¹ *Idem*, hal.78.

² Hai Thu – Binh Thanh, *Saigon A L’heure Des Coups D’etat*, hal.6—7, Editions En Langues Etrangeres, Hanoi, Mars, 1964.

menulis artikel dengan judul “CIA membiayai *coup d’etat* yang berlangsung Hari Rabu yang lalu”. Antara lain dipaparkan bahwa “grup agen-agen CIA yang mengendalikan USIS, mundur bersembunyi, menyiarkan pesan-pesan rahasia yang menyerukan supaya Angkatan Darat Republik melancarkan unjuk kekuatan yang akan melancarkan *coup d’etat*.... Jutaan warga Amerika percaya pada pikiran para pemimpinnya bahwa kebebasan dan kedaulatan nasional mereka akan lenyap, jika mereka membiarkan Vietnam jatuh ke tangan komunis”.

“*Coup d’etat* penggulingan Ngo Dinh Diem sudah lama dipersiapkan, tapi syarat-syarat untuk mewujudkannya belum ada. Diperlukan kuda tunggangan baru yang lebih setia dan lebih ‘mampu’ dari Ngo Dinh Diem, dan yang lebih tak kenal kompromis.”¹

Buletin Informasi, mingguan *Partai Demokrat Amerika*, tanggal 11 November 1967 menyatakan, bahwa *coup d’etat* itu sudah dipersiapkan selama dua tahun, dan bahwa ‘lampu hijau’ sudah diberikan kepada Duong Van Minh oleh Jenderal Taylor ketika dia mampir di Saigon dalam bulan Oktober 1961. Penggulingan Ngo Dinh Diem tak memenuhi harapan Amerika Serikat. MacNamara menyatakan di depan Kongres pada tanggal 27 Januari 1964 bahwa “perang melawan kaum komunis di Vietnam Selatan berubah menjadi lebih jelek, karena kenyataan Ngo Dinh Diem telah digulingkan.... Amerika Serikat sudah siap mengambil semua langkah untuk memastikan mencegah kemenangan bagi kaum komunis.”

“Salah satu dari langkah yang dimaksudkan telah diwujudkan tiga hari kemudian, yaitu tanggal 30 Januari 1964, jam 03:30 pagi.” Pada hari yang sama UPI mengawatkan berita bahwa sudah diketahui dengan baik, Jenderal Nguyen Khanh bekerja sama erat dengan pejabat Amerika pada teritorium militer pertama Vietnam Selatan, yang sudah menasihatinya agar melancarkan *coup d’etat* ini untuk mereorganisasi ‘*Dewan Militer Revolusioner*’. Sesuai dengan harapan Amerika Serikat untuk membasmi kaum komunis di Vietnam, dua hari sesudah merebut kekuasaan, 1 Februari 1964, Ketua *Dewan Militer Revolusioner*, Nguyen Khanh, mengumumkan Dekrit No.93 yang menyatakan *kaum komunis dan netralis berada di luar hukum*. Dengan satu dekrit dari Ketua *Dewan Militer Revolusioner*, kaum komunis dan netralis dijadikan musuh negara yang harus dibasmi. Mengenai *coup* ini, UPI menulis: “Tak cukup hanya dengan memberi nasihat, pejabat Amerika mengikuti peristiwa itu secara langsung, hingga pada malam Rabu itu “Duta Besar Cabot Lodge sudah mengetahui akan berlangsungnya perebutan

kekuasaan.”¹

Sebuah berita kawat dari AP tanggal 31 Januari 1964 menyatakan bahwa sebelum berlangsungnya pemberontakan, Presiden Johnson sudah diberitahu.

Vietnam Selatan bukanlah negeri pertama yang menjadi medan perebutan kekuasaan dengan rekayasa CIA. Tahun 1954, Amerika Serikat mendalangi penggulingan pemerintah Jacobo Arbenz hasil pemilihan umum Guatemala, digantikan oleh Castillo Armaz hasil didikan akademi militer Amerika. Di Korea Selatan berlangsung penggulingan Syng Man Rhee digantikan Park Chung Hi yang lebih bisa diperalat Amerika, di Thailand berlangsung *coup d’etat* atas Phibul Songram digantikan oleh Sarit Thanarat yang sangat pro-Amerika. Patrice Lumumba yang memimpin revolusi Kongo sampai menang, digulingkan dengan rekayasa CIA, hingga naik panggunya agen CIA, Joseph Mobutu, yang kemudian menjadi Mobutu Sese Seko, dan jadi diktator sampai tahun 90-an. Dalam beberapa bulan antara Juli dan Oktober 1963 berlangsung penggulingan pemerintah di Ekuador, Republik Dominika, dan Honduras. 17 November 1963 berlangsung *coup d’etat* oleh militer atas pemerintah Norodom Sihanouk. Silih berganti berlangsung *coup* demi *coup* di berbagai negeri. Semua tak lepas dari tindak-tanduk CIA membasmi unsur yang dinilai memihak pada komunisme atau tak menguntungkan bagi Amerika Serikat. Inilah salah satu ciri operasi melaksanakan *the policy of containment*—pembendungan komunisme—*Perang Dingin* yang dikobarkan Amerika Serikat.

Dengan perkembangan situasi di Indocina, Amerika khawatir akan terwujudnya “teori domino”, yaitu jatuhnya Vietnam Selatan ke bawah kekuasaan komunis yang akan diikuti oleh jatuhnya berbagai negara Asia Tenggara lainnya ke tangan komunis. Lebih-lebih lagi, telah dibayangkan jatuhnya Indonesia ke tangan komunis. Maka usaha *Perang Dingin*, membendung dan membasmi komunis kian dahsyat melanda Asia Tenggara. Terutama di Indonesia. *Soekarno harus disingkirkan!* Semua aparat *Perang Dingin* berjaya di Indonesia. Sesudah melalui masa panjang berlangsung kegiatan aparat-aparat RAND Corporation, Ford Foundation, datang giliran agen-agen CIA, Kubu Soeharto—CIA, sarjana-sarjana Mafia Berkeley, pejabat-pejabat Kedutaan AS, badan-badan intelijen asing termasuk MI6 Inggris, media pers internasional, dan dalam negeri yang komunisto-fobi, semua oknum komunisto-fobi, dan Soekarno-fobi, berkecamuk memainkan peranannya masing-masing. Sadar atau tidak sadar telah hanyut dalam arus

¹ *Idem*, hal.10.

¹ UPI, 30 Januari 1964.

Perang Dingin. Pada akhir 1964, “seorang pejabat intelijen Belanda dalam NATO mengatakan, bahwa badan-badan intelijen Barat akan melaksanakan ‘satu *coup* komunis yang prematur (yang pasti akan) ditakdirkan sebelumnya akan gagal, akan memberi kesempatan yang sah dan sangat diharapkan oleh Angkatan Darat untuk membasmi kaum komunis dan membikin Soekarno menjadi tawanan baik-hatinya Angkatan Darat’.”¹

Pada saat-saat yang tegang itu, “Di Jakarta dan Jawa Tengah, para konspirator sedang merencanakan *coup* 1 Oktober. Komplotan serampangan yang malang ini mendatangkan akibat malapetaka yang dahsyat; yaitu menghasilkan Angkatan Darat menggulingkan Soekarno dan berlangsungnya pembantaian manusia secara terorganisasi yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia.”²

“21 September 1965, Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad, dengan radiogram No.Rdg.T.293/9/1965, memerintahkan kepada Batalyon 454/Diponegoro, 530/Brawijaya, 328/Siliwangi, dan Kesatuan Artileri dari Cimahi, supaya datang ke Jakarta selambat-lambatnya 23 September 1965, dengan membawa perlengkapan tempur *garis satu*.”³

“Dua minggu sebelum meletusnya peristiwa G30S, Kolonel Latief menghadap Jenderal Soeharto mempersoalkan adanya kegiatan Dewan Jenderal yang merencanakan *coup d'état* terhadap Presiden Soekarno. Dua hari sebelum operasi pengambilan 6 jenderal, ia menemui Soeharto lagi. Pertemuan Latief terakhir dengan Soeharto terjadi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat “Gatot Soebroto”, 30 September 1965, pukul 23.00, selama 30 menit. Jadi, Soeharto tahu betul tentang akan terjadinya G30S.

Terjadilah *putsch* 30 September, *Gerakan Tiga Puluh September* di bawah pimpinan Letkol. Untung, yang hanya berumur beberapa jam. Disusul dengan pembantaian manusia, kaum komunis, dan Soekarno. Angkatan Darat dan semua aparat *Perang Dingin*, media pers komunis-fobi dalam dan luar negeri, mengumandangkan bahwa *PKI adalah dalang Gerakan Tiga Puluh September*. Sejumlah aparat kekuasaan Amerika Serikat sangat giat dalam hal ini.

Sejak semula, Soeharto sudah jadi pegangan Amerika Serikat. Peranan Amerika Serikat dalam kejadian penting ini terlihat dari kegiatan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 5 Oktober 1965, Kedutaan Besar AS

mengirim nota kepada Kementerian Luar Negeri AS yang isinya antara lain: “Sekarang, kunci persoalan kita adalah apakah kita bisa membentuk perkembangan ini agar menguntungkan kita. Beberapa panduan berikut mungkin bisa memberikan sebagian jawaban atas bagaimana sikap kita seharusnya:

- A. Hindari keterlibatan yang terang-terangan karena seiring berkembangnya perebutan kekuasaan.
- B. Akan tetapi, secara tersembunyi, sampaikan dengan jelas kepada tokoh-tokoh kunci di ABRI seperti Nasution dan Soeharto tentang keinginan kita membantu apa yang kita bisa, sementara di saat bersamaan sampaikan kepada mereka asumsi kita bahwa kita sebaiknya menjaga agar setiap bentuk keterlibatan atau campur tangan kita tidak terlihat.
- C. Pertahankan dan jika mungkin perluas kontak kita dengan militer.
- D. Hindari langkah-langkah yang bisa diartikan sebagai tanda ketidakpercayaan terhadap ABRI (contohnya memindahkan warga kita atau mengurangi staf).
- E. Sebarkan berita mengenai kesalahan PKI, pengkhianatan dan kebrutalannya (prioritas ini mungkin paling membutuhkan bantuan kita segera, yang dapat kita berikan kepada ABRI jika kita bisa menemukan jalan untuk melakukannya tanpa diketahui bahwa hal ini merupakan usaha AS).
- F. Dukung seluruh masukan informasi dan sarana-sarana lainnya yang ada untuk bisa menyatukan ABRI.”¹

Salah satu isu kontroversial, mengenai keterlibatan Amerika Serikat dalam pembunuhan besar-besaran anggota dan kader PKI di seluruh Indonesia, memperoleh penjelasan resmi dalam bentuk dokumen mengenai salah satu radiogram Duta Besar Amerika untuk Indonesia saat itu, Marshall Green. Dalam radiogram yang dikirimkannya ke Washington pada 10 Agustus 1966, Marshall Green melaporkan bahwa “daftar nama pemimpin teras, dan anggota PKI yang dibuat Kedutaan Besar Amerika, merupakan daftar yang dipakai sebagai acuan aparat keamanan—alias Angkatan Darat—Indonesia, untuk membersihkan Indonesia dari PKI. Tak mustahil, dari nama-nama yang disodorkan Marshall Green itu, sebagian kemudian

¹ W.F. Wertheim, *Whose Plot?—New Light On 1965 Events*, *Journal of Contemporary Asia*, Vol.9, No.2, 1979, hal.211.

² Brian May, *Indonesian Tragedy*, hal.94.

³ A. Karim D.P., *Tiga Faktor Penyebab G30S*, hal.6, uraian dalam pertemuan yang diselenggarakan Pakorba, 25 Oktober 1999 di Jakarta.

¹ *Foreign Relations of the United States, 1964—8*, Volume XXVI

terbunuh.”¹

Selain itu, dalam telegramnya pada 2 Desember 1965, Marshall Green juga mengaku “telah melakukan pembayaran (tersembunyi) dengan dana Rp50 juta kepada gerakan KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September Tiga Puluh). Dana itu diserahkan sebagai bantuan untuk membiayai aksi perlawanan terhadap orang-orang komunis.”²

Di samping itu, dokumen Memorandum dari Gabungan Kepala Staf kepada Menteri Pertahanan McNamara memaparkan bantuan Amerika Serikat terhadap usaha Angkatan Bersenjata menggulingkan Bung Karno sebagai berikut:

Washington, 30 Desember 1965
Perihal: Bantuan ke Indonesia

Berkaitan dengan pesan terakhir dari Kedutaan AS di Jakarta yang berisikan informasi bahwa Presiden Soekarno mungkin akan digulingkan setelah 1 Januari 1966, Indonesia mungkin meminta bantuan AS.

Jika ini terjadi, permintaan bantuan ekonomi mungkin akan cukup besar. Permintaan material militer mungkin tidak banyak. Barang-barang yang mungkin diminta termasuk amunisi, senjata otomatis ringan, kendaraan, radio portabel, dan mungkin suku cadang C-130 dan C-47. Bantuan training mungkin juga diminta.

Upaya penjatuhan Presiden Soekarno oleh ABRI bisa menguntungkan kepentingan keamanan AS di sana. Meski ABRI tampaknya tak ingin mencari sekutu asing dalam penerapan kebijakannya, seperti halnya Soekarno dulu. ABRI tampaknya akan menjadi kekuatan tunggal anti-komunis yang paling kuat di Indonesia, namun pada akhirnya pasti akan memerlukan kepemimpinan sipil. Kepentingan AS akan lebih terjamin jika pemerintah baru nanti cenderung pro-Barat. Atau setidaknya netral.

“Gabungan Kepala Staf merekomendasikan:

- a. Amerika Serikat, jika diminta, akan siap memberikan kepada Indonesia sejumlah bahan pangan/obat-obatan untuk menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru.
- b. Karena kampanye pimpinan ABRI melawan PKI tampaknya berjalan sesuai rencana dan bantuan militer AS tampaknya tak dibutuhkan

untuk keamanan internal, maka untuk saat ini AS hendaknya tidak secara terang-terangan memberikan bantuan militer kepada Indonesia.

- c. Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan bersama-sama menyusun kriteria untuk melanjutkan pemberian bantuan militer dan ekonomi.

- d. Memorandum ini akan diteruskan ke Menteri Luar Negeri.

Atas nama Gabungan Kepala Staf:
David L. McDonald
Ketua¹

Begitu putsch 30 September terjadi, Angkatan Darat segera menuding PKI sebagai dalangnya. Tapi tidak sedikit para pakar yang berpendapat lain. Rex Mortimer memaparkan, bahwa PKI secara sadar dan teguh menempuh jalan damai dalam mencapai strateginya. Dalam keadaan sudah berada di ambang masuk ke dalam kedudukan ikut memegang kekuasaan negara, adalah tak masuk akal, PKI melakukan *coup* terhadap pemerintah yang didukungnya sendiri.

Brian May menulis, “Sampai sejauh mana PKI terlibat, tidaklah akan mempengaruhi putusan yang diambil oleh Angkatan Darat untuk menjadikan *putsch* itu segera menjadi batu-nisan bagi Soekarnoisme dan dasar bagi Angkatan Darat untuk naik berkuasa; dan jika ada orang komunis yang menentang petunjuk-petunjuk pimpinannya, ikut dalam komplotan ini, maka ini sudah cukup jadi alasan untuk membasmi seluruh partai itu.”²

“Secara militer, *putsch* itu berlangsung tanpa persiapan yang cukup, tanpa kendaraan-kendaraan lapis baja dan tank-tank yang sangat vital; secara politik adalah *nonsense*,—omong kosong. Tidaklah mengherankan, bahwa sementara sarjana menghubungkan asal-usulnya *putsch* itu dengan kekecewaan dan puritanisme para perwira dari Jawa Tengah yang mistik; juga tak mengherankan bahwa para pemimpinnya melarikan diri dalam tempo 24 jam menghadapi Jenderal Mayor Soeharto yang akhirnya menguasai bangsa dengan 135 juta penduduk itu.”³

Jan Pluvier menulis, “Segera sesudah terjadinya *putsch* Untung, Angkatan Darat merebut kesempatan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, terutama sesudah terbunuhnya sejumlah jenderal, untuk mewujudkan hal yang sudah bertahun-tahun diharapkan, yaitu mengambil sepenuhnya kekuasaan negara

¹ *Foreign Relations of the United States, 1964—8, Volume XXVI, the volume includes an “Editorial Note” on page 387 describing Ambassador Marshall Green’s August 10, 1966 agram.*

² *On December 2, 1965, Green endorsed a 50 million rupiah covert payment to the KAP-Gestapu movement leading the repression. Foreign Relations of the United States, 1964—8, Volume XXVI, pp.379—380.*

¹ *Foreign Relations of the United States, 1964—8, Volume XXVI.*

² Brian May, *idem*, hal.91—92, huruf miring dari pengutip.

³ *Idem*, hal.97, garis bawah menurut aslinya.

dan membasmi PKI.”¹

Willem Oltmans menulis, “1 Oktober akan menjadi satu hari bersejarah dalam arus revolusi Indonesia, di mana kalangan kanan pucuk pimpinan Angkatan Darat yang pro-Amerika akan melaksanakan *rencana yang sudah bertahun-tahun dipelihara*, kali ini lewat tindakan dari orang-orang kepercayaan Soekarno, hingga dengan ‘cara sopan santun’ bisa menghadapi pendapat umum dan dunia, melaksanakan aksi massa terhadap musuh bebuyutan, *yaitu membasmi PKI*.”²

Putsch Untung disusul oleh tuduhan Angkatan Darat bahwa PKI adalah dalang peristiwa berdarah itu. Media pers Angkatan Darat dan komunis-fobi menggelorakan histeria anti-komunis dan balas dendam. “Pertengahan November 1965, pembunuhan-pembunuhan mencapai puncaknya yang mengerikan. Soeharto menandatangani perintah yang memberi kuasa untuk melakukan pembersihan mutlak yang mendasar atas PKI dan para simpatisannya dari pemerintah. Perintah ini, No.22/KOTI/1965, untuk pembentukan ‘tim-tim khusus’ buat melaksanakan instruksi tersebut dan memberi kuasa pada ‘tim-tim’ itu untuk meminta bantuan Angkatan Darat di mana perlu.”³

Sebelum berlangsungnya pengadilan dalam Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) atas para pelaku *putsch*, sebelum adanya putusan pengadilan mengenai terlibatnya PKI dalam *putsch*, Soeharto sudah mengeluarkan instruksi untuk membasmi PKI. Demikian pula Nasution, yang juga menyerukan untuk membasmi Partai Komunis. “Semua pengikut dan simpatisannya harus dibasmi, kalau tidak peristiwa ini akan terulang,” katanya di depan rapat staf RPKAD yang datang di Jawa Tengah. “Tidak hanya para pelaku yang harus dibasmi, tetapi juga dalang dan pendukung PKI,” katanya di depan satu organisasi mahasiswa. Dan dalam kunjungannya ke pangkalan Angkatan Laut di Surabaya, dia menyerukan sekali lagi untuk membasmi PKI sampai ke akar-akarnya.”⁴

Berlangsunglah penyerbuan-penyerbuan atas kantor-kantor PKI. Dan mulailah pembantaian manusia di seluruh negeri. CIA sendiri mengakui,

bahwa “dalam hal jumlah yang sudah terbunuh, pembantaian besar-besaran anti-PKI menduduki tempat pertama yang paling jelek dalam abad XX,.... Sebagaimana halnya pembunuhan massal oleh Nazi selama Perang Dunia II Dalam hal ini, *coup* di Indonesia jelaslah merupakan peristiwa yang lebih berarti, dibanding dengan banyak peristiwa yang sudah mendapat publikasi luas.”¹

“Amnesty International mencatat taksiran, bahwa lebih dari 500.000 orang mati, tapi menambahkan bahwa banyak ‘peninjau bebas’ menaksir, bahwa lebih dari satu juta orang mati dalam masa 1965—1966.”²

Laksamana Sudomo Panglima Kopkamtib mengakui, “450.000 sampai 500.000 orang terbunuh.”³

K.H. Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa “orang Islam membantai 500.000 eks-PKI. Tentu masih ada lagi yang dibunuh oleh yang tidak termasuk *orang Islam*.”⁴

Jenderal Sarwo Edhie Wibowo mengaku kepada Bapak Permadi, S.H., bahwa “yang meninggal terbunuh berjumlah tiga juta orang.”⁵

Helen Louise Hunter, seorang peneliti dari CIA menulis, bahwa “Pembantaian yang dilakukan oleh massa anti PKI di Indonesia, adalah salah satu yang terburuk dalam jajaran pembantaian massa dari abad XX.”⁶

Bertrand Russel menyatakan, bahwa dalam empat bulan saja pembantaian di Indonesia, orang yang mati sudah berjumlah lima kali lebih banyak dibandingkan dengan 12 tahun peperangan di Vietnam.”⁷

“Dari bulan Juli 1954 sampai Juli 1963, Amerika sudah melancarkan 42.500 operasi dan serangan militer, membunuh 156.000 orang dan melukai 52.000 orang.”⁸

Julie Southwood dan Patrick Flanagan menulis, “Pembantaian massal di Indonesia pada dasarnya adalah suatu proyek pembunuhan sistematis tak pandang bulu. Satu proyek yang tujuannya jelas, cara dan tanggung jawabnya sistematis, yaitu di bawah pimpinan Angkatan Darat yang secara

¹ Jan Pluvier, *Indonesie, Kolonialisme, On-afhankelijkheid, Neo-kolonialisme—Een Politieke Geschiedenis Van 1940 Tot Heden*, hal.264, Sunschrift 131, *Socialistische Uitgeverij Nijmegen*, 1978, huruf miring dari pengutip

² Willem Oltmans, *Den Vaderland Getrouwe, Uit Het Dagboek van Een Journalist*, hal.266, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1973, huruf miring dari pengutip.

³ Arnold C. Brackman, *The Communist Collapse in Indonesia*, hal.119, W.W. Norton & Company Inc., New York, 1969].

⁴ Kantor Berita Antara, 10 Desember 1965.

¹ CIA, *Directorate of Intelligence, Indonesia—1965: The Coup That Back-Fired*, 1968

² Julie Southwood dan Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, hal.73, Zed Press, 57 Caledonian Road, London, N 1 9DN, 1983.

³ Sudomo mengutip *De Telegraaf*, 1 Juni 1976.

⁴ *Mingguan Editor*, No.49, Th.VI, 4 September 1993.

⁵ A. Karim D.P., *Tiga Faktor Penyebab G30S*, hal.3, uraian dalam pertemuan yang diselenggarakan Pakorba, 25 Oktober 1999, di Jakarta.

⁶ *Idem*, hal.4.

⁷ *Idem*.

⁸ Hai Thu – Binh Thanh, *Saigon A L’heure Des Coups D’etat*, hal.71, *Editions En Langue Etrangere*, Hanoi, Mars 1964.

jelas menetapkan korban-korbannya, yaitu PKI dan para simpatisannya. Tak pandang bulu dalam kategori korban-korban, semua anggota harus dibunuh, tak pandang umur, kelamin, bersalah atau tidak....”¹

Kalau disimpulkan, bukanlah hanya sekitar 500.000 orang yang dibunuh, tetapi telah berlangsung kekejaman—pembantaian besar-besaran—yaitu satu proyek pembunuhan yang sistematis tak pandang bulu, yang diperintah dan dikontrol oleh pemimpin-pemimpin Angkatan Darat.”²

Soeharto adalah yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan di Indonesia. Paul H. Salim menulis: “Tanggal 2 Oktober 1965, setelah mendengar berita tentang ‘kup’, Kolonel Yasir Hadibroto, waktu itu Komandan Kesatuan Infanteri IV Kostrad di Sumatra Utara, datang, langsung menghadap komandannya di Markas Besar Kostrad di Jakarta, Mayjen. Soeharto.

Dia ditanyai oleh Soeharto, ‘Di mana kamu ketika pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948?’

‘Saya baru saja dipindahkan ke Jawa Barat. Pasukan saya diperintahkan untuk menghadapi 3 batalyon komunis di Wonosobo,’ Yasir menjawab.

‘Orang yang berontak hari ini adalah keturunan dari PKI Madiun. Pergi, bereskan mereka semua. D.N. Aidit di Jawa Tengah. Bawa pasukanmu ke sana!’ perintah Panglima Kostrad Mayjen Soeharto.

Di Jawa Tengah, D.N. Aidit, Ketua PKI, ditangkap, dibawa ke markas Batalyon Kostrad di Boyolali, dan dibunuh!

Pukul 3.00 sore, tanggal 24 November 1965, Kolonel Yasir diterima oleh Soeharto di Istana Yogyakarta. Dia melaporkan segala sesuatu berkenaan dengan penangkapan PKI dan cara membereskan Aidit. Setelah memberikan laporannya, Kolonel Yasir memberanikan diri untuk bertanya, ‘Waktu Bapak mengatakan ‘bereskan’ tentang D.N. Aidit, apakah itu yang Bapak maksud?’ Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto hanya tersenyum.” [Mystery Almost Solved!! by Paul H. Salim, Calgary, Canada, <http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/sal/myst.html>].

Pembendungan dan pembasmian komunisme berlangsung dahsyat, seiring dengan memuncaknya *Perang Dingin* di Asia Tenggara. Perang Vietnam kian bergejolak. Meluas sampai ke Laos dan Kamboja. Amerika Serikat sampai-sampai mengerahkan seperempat juta pasukan, menggunakan semua senjata yang paling modern waktu itu untuk

menundukkan Republik Demokrasi Vietnam dan membasmi kaum komunis Vietnam. Pembasmian kaum komunis Indonesia berlangsung tanpa pengiriman pasukan Amerika masuk Indonesia. Di Indonesia, terutama dalam Angkatan Darat terdapat kekuatan anti-komunis yang dapat diandalkan Amerika untuk membasmi PKI. Pentagon dan Gedung Putih dengan NSC-nya sebagai *Politbiro Perang Dingin* sudah sekian tahun merekayasa realisasi strategi *Perang Dingin* terhadap Indonesia. Soekarno harus disingkirkan, dan PKI harus dibasmi. Selama enam tahun, dari tahun 1959 sampai 1965 telah dilaksanakan kesimpulan NSC – Politbiro *Perang Dingin* – yaitu perkuat kerja sama dengan Angkatan Darat, tingkatkan perlawanan terhadap PKI, dan ciptakan dasar untuk bertindak represif terhadap PKI. *Putsch* 30 September adalah hasil total-jenderal rekayasa canggih, penggunaan operasi intelijen, kampanye “perang syaraf”, pengerahan semua oknum anti-komunis dan anti Soekarno serta pemanfaatan kesalahan-kesalahan PKI sendiri. *Putsch* adalah bertentangan dengan teori Marxisme-Leninisme tentang revolusi. Tidak terdapat dalam program PKI. Juga tak masuk akal, dengan *putsch* PKI menggulingkan pemerintah yang didukungnya sendiri, di mana duduk tokoh-tokoh utama pimpinan PKI. Lebih tak masuk akal lagi, dengan *putsch* PKI menggulingkan Bung Karno, yang ajaran dan politiknya mati-matian dibelanya, karena menguntungkan PKI. Dengan peristiwa *putsch* ini terwujudlah kesimpulan Politbiro *Perang Dingin*, yaitu menciptakan dasar untuk bertindak represif terhadap PKI. Peristiwa ini, oleh Angkatan Darat betul-betul dijadikan *dasar untuk bertindak represif terhadap PKI*. Dengan demikian Soekarno pun digulingkan. Penggulingan Bung Karno dan pembasmian PKI adalah realisasi *the policy of containment – politik pembendungan komunisme – strategi sejagat Perang Dingin yang dilancarkan Amerika Serikat semenjak usainya Perang Dunia II*. Inilah salah satu puncak *Perang Dingin* di Asia.

¹ Julie Southwood dan Patrick Flanagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, hal.73, Zed Press, 57 Caledonian Road, London, N 1 9DN, 1983.

² *Idem*, hal.73.

BIODATA PENULIS

Suar Suroso lahir di Padang, Sumatra Barat, 16 Mei 1930. Menyelesaikan S.M.P. dan S.M.A. di Padang dan Bukittinggi, 1950 kuliah di ITB Bandung jurusan elektro-tehnik. Semasa Revolusi Bersenjata 1945-1949 menjadi anggota batalyon Teras Lasykar Rakyat Padang Luar Kota (mendapat Tanda Penghargaan dari Gubernur Militer, Mr. Mohamad Nasroen), 1949 wkl. Ketua IPPI Padang; 1951 anggota *Consentrasi Mahasiswa Bandung (CMB)*, kemudian 1954 Sekretaris DPD *Pemuda Rakyat* Jawa Barat, Sekretaris Kongres *Rakyat* Jawa Barat, 1956 sekretaris DPP *Pemuda Rakyat*.

Sebagai aktivis organisasi pemuda, dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam berbagai pertemuan pemuda internasional, seperti a.l. di Beijing, Wina, Kairo, Santiago-Chili dan mewakili *Pemuda Rakyat* dalam *Gabungan Pemuda Demokratik Sedunia (GPDS)* dalam kapasitas sebagai wakil-presiden yang berkantor pusat di Budapest. Dalam kapasitas itu ia menghadiri berbagai kegiatan pemuda di Korea, India, Nepal, Sri Lanka, Mesir, Maroko, Guinea, Mali, Senegal, Ghana, Jerman, Rumania, Denmark, Finlandia, Polandia, Albania, dan lain-lain. Mulai Septembar 1961 melanjutkan studi di Fakultas Fisika *Universitas Lomonosov*, Moskow.

Setelah peristiwa 30 September 1965, pada bulan Agustus 1966 paspornya dicabut oleh KBRI Moskow; 1967 dinyatakan persona-non-grata oleh Pemerintah Sovyet karena memprotes kerjasama antar Pemerintah Uni Sovyet dan Pemerintah Indonesia dibawah rejim Soeharto. Sejak Februari 1967 meninggalkan Uni Sovyet dan bersama istri dan dua anaknya bermukim di Tiongkok. Sejumlah sajaknya dimuat dalam *Di Negeri Orang*, kumpulan sajak para penyair eksil di Eropa Barat. Karya-karya yang sudah dibukukan : *"Asal usul Teori Sosialisme , Marxisme Sampai Komune Paris"*, *"Bung Karno, Marxisme dan Pancasila"*, " 'Peristiwa Madiun' PKI Korban Perdana Perang Dingin" (Pustaka Pena). *"PKI Korban Perang Dingin"* (Era

Publisher), *"Bung Karno Korban Perang Dingin"* (Hasta Mitra), Kumpulan Puisi jilid I *"Jelita Senandung Hidup"* dan jilid II *"Pelita Keajaiban Dunia"* (Ultimus), *"Marxisme Sebuah Kajian, Dinyatakan Punah Ternyata Kiprah"*; dan . *"Peristiwa Madiun, Realisasi Doktrin Truman Di Asia"* (Hasta Mitra). Yang belum diterbitkan *"Klas-Klas dan Perjuangan Klas di Indonesia"* kajian historis tentang perjuangan kelas semenjak kerajaan-kerajaan tertua Nusantara sampai Perang Aceh, *"Dialektika Senjata Melawan Pembodohan"* memperkenalkan inti filsafat dialektika.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adam, Asvi Warman
2009 *1965; Orang Orang di Balik Tragedi*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta
- Aidit, D.N.
1952 *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1955 *Menggugat Peristiwa Madiun*, pidato pembelaan di depan Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955
1959, 1960, 1965 *Pilihan Tulisan Aidit*, Jilid I, II, dan III
1959 *Front Persatuan Nasional dan Sejarahnya*, PTA, Jilid I,
1960 *Konfrontasi Peristiwa Madiun (1948)—Peristiwa Sumatera (1956)*, PTA, Jilid II
1961 *Maju Terus Menggempur Imperialisme dan Feodalisme!*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1960 *Bersatulah untuk Menyelesaikan Tuntutan-Tuntutan Revolusi Agustus 1945*, PTA, Jilid II, cetakan kedua.
1962 *Untuk Demokrasi, Persatuan, dan Mobilisasi*, Laporan Umum kepada Kongres Nasional VII PKI, 25 April 1962, Depagitprop CC PKI, Djakarta
1963 *Berani, Berani, Sekali Lagi Berani!*, Laporan Politik kepada Sidang Pleno I CC VII, 10 Februari 1963, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1963 *Hayo, Ringkus dan Ganyang Kontra-Revolusi!*, Pidato Ultah ke-43 PKI di Istana Olah Raga *Gelora Bung Karno*, 26 Mei 1963, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1964 *Kobarkan Semangat Banteng! Maju Terus Pantang Mundur!*, Laporan Politik kepada Sidang Pleno II CC VII yang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, 23—26 Desember 1963 di Jakarta, Jajasan Pembaruan, Djakarta
- 1964 *Jadilah Komunis yang Baik dan Lebih Baik Lagi!*, Pidato Ultah PKI ke-44, di Surabaya, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1964 *Dengan semangat Banteng Merah mengonsolidasi organisasi komunis yang besar!*, Pidato dalam Konferensi Nasional Partai yang ke-1, dalam *Jadilah Komunis yang Baik dan Lebih Baik Lagi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1964 *Tentang Sastra dan Seni, dengan Sastra dan Seni yang Berkepribadian Nasional Mengabdikan Buruh, Tani, dan Pradjurit*, Pokok-Pokok Referat di Hadapan Konferensi Sastra dan Seni Revolusioner di Djakarta, 28 Agustus 1964, Jajasan Pembaruan, Djakarta, 1964
1964 *Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa*, Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Jawa Barat, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1964 *Angkatan Bersendjata dan Penjesuaian Kekuasaan Negara Dengan Tugas2 Revolusi*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1965 *Untuk Demokrasi dan Kabinet Gotong-Royong*, Laporan Umum ke Kongres Nasional VI PKI, 7 September 1959, PTA, Jilid III, Jajasan Pembaruan, Djakarta
1965 *Mengatasi Kelemahan Kita, Pilihan Tulisan*, Jilid I, cetakan kedua, Panitia Penerbitan Karya-Karya D.N.Aidit
1965 *Untuk Konstitusi Republik Proklamasi 1945*, PTA, Jilid II, cetakan kedua, Panitia Penerbitan Karya-Karya D.N. Aidit, 1965
- Blum, William
1986 *The CIA—A Forgotten History*, London: Zed Books Ltd.
- Boyson, Guy de
1949 *President de la F.M.J.D., Rapport Du Comite Executif De La F.M.J.D., 2me Congres De La Federation Mondiale De La Jeunesse Democratique*, Budapest, Septembre 1949
- Boylan, Richard J., Ph.D.
2011 *The Shadow Government – A Structural Analysis, (above top secret.com – ats.com)*
- Brackman, Arnold C:
1969 *The Communists Collapse In Indonesia*, W.W. Norton Inc. New York, *First edition*, kulit buku.
- Bung Karno
1959 *yo sanak, yo kadang, malah yen mati aku sing kelangan*, Jajasan Pembaruan, Djakarta

CC PKI 1962	<i>AD—ART (Konstitusi) PKI</i> , Djakarta	Engels, Friedrich 1965	<i>Surat Engels kepada Karl Kautsky</i> , 16-2-1884, <i>Marx and Engels Selected Correspondence</i> , second edition, Progress Publishers, Moscow, 1965
Cook, Fred J.: 1962	<i>The War-Fare State</i> , with a foreword by Bertrand Russel, The Macmillan Company, New York, London, <i>Third printing</i>	Fic, Victor M. 2005	<i>Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Correspondence 1957	<i>Correspondence Between the Chairman of the Council of Ministers of the U.S.S.R. and the Presidents of the USA and the Prime Ministers of Great Britain During the Great Patriotic War of 1941—1945</i> , volume two, Foreign Languages Publishing House, Moscow	Frankel, Max 1966	<i>New York Times</i> , 12 Maret 1966
Daniel Leahy, Admiral William 1950	<i>I was there</i> , New York and London: Whittlesey House, <i>Autobiography</i>	Hardjito 1952	<i>Risalah Gerakan Pemuda</i> , Pustaka Antara, Djakarta
David Ransom: 1970	<i>Ford Country: Building an Elite for Indonesia</i> , October 1970	Hario Kecik, 2009	<i>Pemikiran Militer 1 Sepanjang Masa Bangsa Indonesia</i> , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
Dean Rusk 1951	<i>"Foreign Policy Problems in the Pacific"</i> , <i>Department of State Bulletin</i> , 19 November 1951	Horowitz, David 1969	<i>Corporations and the Cold War</i> , published with the Bertrand Russel Peace Foundation, <i>Monthly Review Press</i> , First Printing, New York and London, 1969
Deliar Noer, 1978	<i>The Modernist Muslim Movement in Indoinesia 1900—1942</i> , Kuala Lumpur: Oxford University Press, Oxford, New York, Jakarta, <i>second impression</i>	Hylan, John F. 2005	New York City Mayor, 1922, <i>Brother Veritus' Website</i> , Published in this website on January 13, 2005.
Departemen Penerangan R.I. 1959	<i>Manifesto Politik Republik Indonesia</i> , 17 Agustus 1959, Pertjetakan Negara, Djakarta	Immerman, James 1982	<i>The CIA in Guatemala</i> , University of Texas Press
Departemen Agitprop CC PKI 1954	<i>Buku Putih Tentang Peristiwa Madiun</i> , disusun dan diterbitkan oleh Departemen Agitprop CC PKI, cetakan kedua	Jajasan Pembaruan 1964	<i>Aidit Membela Pantjasila</i> , Djakarta
Dewan Nasional SOBSI 2002	<i>Sejarah Gerakan Buruh Indonesia</i> , disusun kembali oleh Sadali, Pustaka Pena, Jakarta	Jenkins, David 2010	<i>Soeharto & Barisan Jenderal Orba</i> , <i>Rezim Militer Indonesia 1975—1983</i> , Komunitas Bambu, Jakarta.
		Joe Nunes 1999	<i>"Indonesia: The Final Solution"</i> , Joe Nunes—Montclair State,... http://chss.montclair.edu/english/furr/nunesindonesia.html ... <i>The final solution to the Communist problem in Indonesia</i>
		Johnson Library 1965	<i>Indonesia, National Security File, Country File</i> , Vol.IV, Memos.3/65—9/65

Jung Chang dan Jon Halliday
2007 *Mao—Kisah-Kisah yang Tak Diketahui*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Kadane, Kathy
1980 menulis untuk *South Carolina's Herald Journal on May*

Kahin, George McTurnan
1995 *Subversion as Foreign Policy*, The New Press New York, 1995, Southeast Asian Edition

Kahin, Audrey
2008 *Dari Pemberontakan ke Integrasi*, Yayasan Obor, Jakarta

Kangas, Steve
1996 *A Timeline of CIA Atrocities*, accessed in <http://www.huppi.com/kangaroo/CIAtimeline.html>, William Blum

Kementerian Penerangan RI
1948 *Mendajung Antara Dua Karang*, Pidato PM Hatta di depan BP KNIP, 20 September 1948

Kerkvliet, Benedict J
1977 *The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines*, University of California Press.

Kian Ling
t.t. *Berfikir, Bekerja, Kritik & Selfkritik*, Penerbitan Demos Surabaya, tjetakan ke-6

Kolko, Gabriel
1988 *Confrontation the Third World: United States Foreign Policy 1945—1980*, Pantheon Books.

Lansdale, Edward Geary:
1972 Major General USAF (Ret). *In the Midst of Wars, His memoir*, published in 1972, New York: Harper and Row

Lembaga Sejarah PKI
1965 *Manuskrip 45 Tahun PKI*, Bab II

Lembaran Negara.
1965 *Lembaran Negara No.78*

Lenin, V.I.
1961 *Probuzhdyeniye Azii—Kebangkitan Asia*, Kumpulan Karya, edisi Rusia, cetakan ke-5, Jilid 23, hal.145—146, Moskwa

Liu Zhidan
1979 *Liu Zhidan*, Novel Biografi, Gongren Chuban She, Balai Penerbitan Buruh

McClintock, Michael
1940—1990 *Instruments of Statecraft: U.S. Guerrilla Warfare, Counterinsurgency, and Counterterrorism*, 1940—1990

McVey, Ruth Thomas
1963 *The Rise of Indonesian Communism*, Southeast Asia studies, Yale University, by arrangement with HRAF Press,

Majalah Teori dan Politik Marxisme-Leninisme
1963 *Bintang Merah*, No.12, Tahun IX, Desember 1963

Mao Tsetung
1968 *Tentang Diktatur Demokrasi Rakyat*, Pilihan Karya Mao Tsetung, Jilid IV, hal.507—508, Pustaka Bahasa Asing, Peking.

Martin, Kevin W.
2008 *"Baghdad Pact"*, In Ruud van Dijk, et.al., *Encyclopedia of the Cold War*, New York: Routledge, pp.57.

Marx, Karl; Engels, Friedrich
1973 *Manifes Partai Komunis*, Penerbit Indonesia Progresif

May, Brian:
1978 *The Indoneian Tragedy*, hal.92, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, Hentley and Boston

Memo of Conversation
1964—1966 14 Februari 1966, RG 59, *State Department Central Files* 1964—66, POL 2 INDON, NA

Mortimer, Rex
2011 *Indonesian Communism Under Sukarno*, Cornell University Press, 1974, edisi Indonesia, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- MPRS dan Departemen Penerangan
1961 *Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara—Republik Indonesia*, Pertjetakan Negara, Djakarta
- Nash, Gary B.
2008 *“Containment Defined” The American People. Creating a Nation and a Society*, 6th ed., New York: Pearson Education
- Nasution, A.H., DR.
1983 – 1987 *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 3, 5, dan 6, Gunung Agung, MCMLXXXIII – MCMLXXXVII
- NATO
2011 *“NATO and the fight against terrorism”; North Atlantic Treaty Organization.* <http://www.nato.int/issues/terrorism/evolve02.html>. Retrieved 27 May 2011
- Njoto
1958 *PKI dan Pantjasila*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
- Nugroho Notosusanto & Ismail Saleh:
1968 *The Coup Attempt of the September 30 Movement in Indonesia*, PT Pembimbing Masa, Djakarta, August
- Pacific*,
1968 May—June 1968
- Pane, Sanoesi
1954 *Indonesia Sepanjang Masa*, Balai Pustaka, Djakarta
- Penerbit Harian Rakjat
1964 *Polemik Merdeka Harian Rakjat*, Jakarta
- Politbiro CC PKI
1965 *Tesis 45 Tahun PKI, 23 Mei 1920–23 Mei 1965, Harian Rakjat*, 7 Mei 1965
1971 *Tegakkan PKI yang Marxis-Leninis untuk Memimpin Revolusi Demokrasi Rakyat Indonesia,—Otokritik Politbiro CC PKI September 1966—*, Diterbitkan oleh Delegasi CC PKI, September 1971
- Presiden Ir. Dr. Soekarno
1965 *Tjapailah Bintang-Bintang di Langit (TAKARI)*, Pidato pada hari ulang tahun ke-20 RI, 17 Agustus 1965, Penerbit PT Rakjat Djakarta
1965 *Go Ahead!*, Jajasan Pembaruan, Djakarta
- Prouty, L.Fletcher
1976 *Indonesia 1958: Nixon, the CIA, and the Secret War, appeared in the August, 1976 issue of Gallery magazine*
- Rosihan Anwar, H.
2006 *Sukarno-Tentara-PKI, Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961—1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Rutgers, Ir. S.J.
1947 *Indonesie, Het Koloniale System in de periode tussen de eerste en tweede wereldoorlog,—Indonesia, Sistem Kolonial dalam periode antara perang dunia pertama dan kedua—* Uitgeverij Pegasus Amsterdam
- Reynolds, David
1994 *The Origins of the Cold War in Europe: International Perspectives*, New Haven and London: Yale University Press,
- Said, B.Mohammad
1979 *Wilopo dan “Tanjong Morawa”*, dalam *Wilopo 70 tahun*, Gunung Agung, Jakarta, MCMLXXIX
- Salim, Paul H.
1994 *Gestapu “Coup” Mystery Almost Solved!!*, Calgary, Canada, <http://www.antenna.nl/wvi/eng/ic/pki/sal/myst.html>
- Saunders,: Frances Stonor
1999 *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War*, Granta Books,
- Scott, Peter Dale:
1985 *The United States and the Overthrow of Sukarno, 1965—1967*, Pacific Affairs, 58, Summer 1985
- Sherwood, Robert E.
1948 *Roosevelt and Hopkins*, Harper, New York
- Simbulan, Roland G.
2000 *Covert Operations and the CIA’s Hidden History in the Philippines*, Convenor/Coordinator, Manila Studies Program University of the Philippines, Lecture at the University of the Philippines-Manila, Rizal Hall, Padre Faura, Manila, August 18, 2000.

Simatupang, T.B.
1991 *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soemarsono
2010 *Revolusi Agustus – Kesaksian Seorang Pelaku Sejarah*, Hasta Mitra, Jakarta

Southwood, Julie and Flanagan, Patrick
1983 *Indonesia, law, propaganda, and terror*, Zed Press

Sophiaan, Manai
2008 *Kehormatan Bagi yang Berhak*, cetakan kedua, Transmedia Pustaka, Jakarta

Stalin, Y. W.
1953 *O Pyerspyektivakh Revolyutsii V Kitaye—Tentang Perspektif-Perspektif Revolusi Di Tiongkok*, Kumpulan Karya, Jilid VIII, edisi bahasa Russia, hal.363, Gosudarsvyennoye Izdatyestvo Politiceskoi Lityeraturii, Moskwa

StarBrainIndonesia
2011 *Intelijen, Universitas, dan Jaringan Spionase Internasional dalam Perspektif Strategi Raya era Global*, Indonesia, posted Selasa, 15 Maret 2011

Suar Suroso
2007 *Bung Karno Korban Perang Dingin*, Hasta Mitra, Jakarta
2010 *Peristiwa Madiun, Realisasi Doktrin Truman Di Asia*, Hasta Mitra, Jakarta

Subandrio
2005 *Kesaksianku Tentang G30S*, Published by [Kolektif_Info](#) on 16/Jul/2005

Soemitro Djojohadikusumo,
1949 *untitled address* to School of Advanced International Studies, Washington, D.C., 1949, p.7.

Taher, Yoseph Tugio.
2010 *Mengorek Abu Sejarah Hitam Indonesia (MASHI)*, Cetakan 1, Bandung: Ultimus, 2010

Tan Malaka
t.t. *Tan Malaka-archief, Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief*

Telegram
1965 Dari Kedubes di Jakarta untuk State Department 2641. Embtel 2640, Jakarta, 5 Juni 1965. 0825Z

tenavision
2006 *The Real Phoenix Program, Posted By: tenavision*
Date:Friday, 6-Jan-2006, 12:38:49

Truman, Harry S
1949 *Inaugural Address*, Thursday, January 20, 1949

U.S. Department of State,
1966 *Foreign Relations of the US 1964—1968, Volume XXVI, Indonesia; Malaysia-Singapore; Philippines*, U.S. Department of State, October 27, 1966

Weiner, Tim
2008 *Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya*, Jakarta PT Gramedia, Pustaka Utama
2008 *Legacy of Ashes: The History of the CIA*, Publisher: Anchor, May 20, 2008

Wertheim, W.F.
1979 *"Whose Plot?"—new light on the 1965 events'*, *Journal of Contemporary Asia* (9)

Youth Against War and Fascism,
1966 *The Silent Slaughter, The Role of the United States in the Indonesian Massacre*, Youth Against War and Fascism, 58 West 25 Street, New York, N.Y.10010

